



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021



TONDANO, 31 Desember 2021



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR
1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan mendasar dalam Kebijakan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa yang selaras dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN
2018-2023. /

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

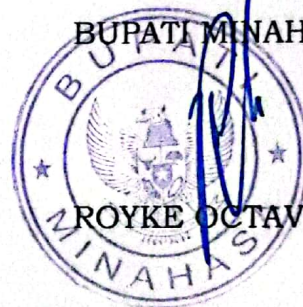
Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa. /

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 31 DECEMBER 2021

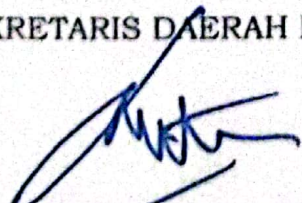
BUPATI MINAHASA,



ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 31 DECEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


FRITS ROBERT MUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 9/TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terstruktur dan direncanakan untuk sebuah tujuan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut merupakan gambaran atas kondisi objektif masyarakat yang tercermin antara lain cerminan atas kondisi struktur sosial, dinamika pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan hidup atau perubahan yang direncanakan lainnya.

Dalam kaitannya dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Periode 2018-2023, secara normatif-filosofis, pembangunan pada dasarnya harus berjalan seiring dengan tujuan Pembangunan Nasional, yakni menjalankan amanat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasangan Bapak Royke Octavian Roring sebagai Bupati dan Bapak Robby Dondokambey sebagai Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023 dalam Pemilukada Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 25 September 2018 telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dan telah ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2019. Dokumen RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam perjalanannya, RPJMD Kabupaten Minahasa, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Setelah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD untuk 2 (dua) tahun rencana yaitu Tahun 2019-2020 terdapat beberapa target yang tidak tercapai.

Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebab memenuhi poin 3 pada Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; ✓

3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional.

Substansi RPJMD Kabupaten Minahasa yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa 2 (dua) tahun kedepan. Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 adalah :

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

3. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, adalah perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; /

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh;
5. Pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota, Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan /

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 4

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR. 4 TAHUN. 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TAHUN
2018-2023**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023**

DAFTAR ISI

		Hal.
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3	Hubungan Antar Dokumen	10
1.4	Maksud dan Tujuan	11
1.5	Sistematika Penulisan	12
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	13
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	22
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	22
2.2.1.1	PDRB dan Struktur Ekonomi	22
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	28
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	38
2.3	Aspek Pelayanan Umum	40
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	40
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	81
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	133
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	146
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	148
2.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	150
2.3.7	Unsur Kewilayahan	151
2.3.8	Urusan Pemerintahan Umum	151
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	155
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	155
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	160
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	170
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	258
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	258
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	258
3.1.2	Neraca Daerah	270

3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	272
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	274
3.2.2	Analisis Pembiayaan	275
3.3	Kerangka Pendanaan	278
3.3.1	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	279
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	281
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	287
4.1	Permasalahan Pembangunan	287
4.1.1	Permasalahan berkaitan dengan Pembangunan Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing	288
4.1.2	Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	290
4.1.3	Permasalahan berkaitan dengan Aspek Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	302
4.1.4	Permasalahan berkaitan dengan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	306
4.1.5	Permasalahan berkaitan dengan Manajemen Birokrasi yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	310
4.1.6	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	316
4.1.7	Permasalahan Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	323
4.2	Isu Strategis	325
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	346
5.1	Visi	346
5.2	Misi	348
5.3	Tujuan dan Sasaran	349
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	361
6.1	Strategi	361
6.2	Arah Kebijakan	369
6.3	Program Pembangunan	375

BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	419
BAB VIII	KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	514
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	514
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	516
BAB IX	PENUTUP	581
9.1	Kaidah Pelaksanaan	581
9.2	Pedoman Transisi	581
9.3	Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	582

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel. 2.1	Gunung-Gunung di Kabupaten Minahasa	BAB – II	14
Tabel. 2.2	Daftar Sungai yang ditetapkan memiliki kawasan sempadan sungai	BAB – II	15
Tabel. 2.3	Luas penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa	BAB – II	18
Tabel. 2.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB - II	19
Tabel. 2.5	Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020	BAB – II	20
Tabel. 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Beban Ketergantungan Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	21
Tabel. 2.7	Indikator Kependudukan Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	22
Tabel. 2.8	PDRB Kabupaten Minahasa Menurut Lapangan Usaha ADHB Berlaku Tahun 2016-2020	BAB - II	24
Tabel. 2.9	PDRB Kabupaten Minahasa Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2016-2020	BAB – II	25
Tabel. 2.10	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016 S.D 2020	BAB – II	27
Tabel. 2.11	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	27
Tabel. 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa 2016-2020	BAB - II	28
Tabel. 2.13	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 S.D 2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	29

Tabel. 2.14	Angka Lama Sekolah Penduduk Tahun 2016 S.D Tahun 2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	29
Tabel. 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	30
Tabel. 2.16	Perkembangan APM Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB - II	30
Tabel. 2.17	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)% Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	31
Tabel. 2.18	Tingkat Kelulusan Siswa SD Dan SMP Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	31
Tabel. 2.19	Angka Putus Sekolah Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	31
Tabel. 2.20	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB - II	32
Tabel. 2.21	Status Gizi Buruk Di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	33
Tabel. 2.22	Cakupan Persalinan Di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	34
Tabel. 2.23	IPM Tahun 2016 S.D Tahun 2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	34
Tabel 2.24	Tabel Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa	BAB – II	35
Tabel. 2.25	Jumlah Penduduk Miskin Dan Pengangguran Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB - II	35
Tabel. 2.26	TPAK Menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2019 Kabupaten Minahasa	BAB – II	36
Tabel. 2.27	Angka Kriminalitas Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	37

Tabel. 2.28	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	38
Tabel. 2.29	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	38
Tabel. 2.30	Jumlah Lapangan Olahraga 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	39
Tabel. 2.31	Jumlah Klub Olahraga 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	39
Tabel. 2.32	Jumlah Gedung Kesenian Dan Grup Kesenian 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	40
Tabel. 2.33	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	41
Tabel. 2.34	Rasio Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016 S.D 2020	BAB – II	41
Tabel. 2.35	Rasio Guru Dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	42
Tabel. 2.36	Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020	BAB – II	42
Tabel. 2.37	Jumlah Posyandu Dan Balita Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	44
Tabel. 2.38	Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	45
Tabel. 2.39	Jumlah Puskesmas, Klinik Dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	45
Tabel. 2.40	Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	46

Tabel. 2.41	Sarana Dan Prasarana Kesehatan Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	47
Tabel. 2.42	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	47
Tabel. 2.43	Jumlah Dokter Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	48
Tabel. 2.44	Tenaga Medis Dan Paramedis Di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	49
Tabel. 2.45	Rasio Sarana Prasarana Dan Tenaga Kesehatan Tahun 2016 S.D 2020	BAB – II	50
Tabel. 2.46	Data Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020	BAB – II	50
Tabel. 2.47	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	54
Tabel. 2.48	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	55
Tabel 2.49	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Minahasa Tahun 2016–2020	BAB – II	58
Tabel 2.50	Capaian Kinerja SPM Air Minum Kabupaten Minahasa	BAB – II	58
Tabel 2.51	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 s.d Tahun 2020	BAB – II	60
Tabel 2.52	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	61
Tabel. 2.53	Rasio Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Tahun 2020	BAB – II	61

Tabel. 2.54	Persentase Luas Permukiman yang tertata Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	62
Tabel. 2.55	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa	BAB – II	62
Tabel 2.56	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	63
Tabel 2.57	Data Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	64
Tabel 2.58	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	66
Tabel 2.59	Rasio Permukiman Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	66
Tabel 2.60	Data Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	BAB – II	67
Tabel 2.61	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	68
Tabel 2.62	Jumlah Limnas Per 10.000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	68
Tabel 2.63	Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	70
Tabel 2.64	Data Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020	BAB – II	71
Tabel 2.65	Data Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021	BAB – II	71
Tabel 2.66	Data Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021	BAB – II	72
Tabel 2.67	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa	BAB – II	74

Tabel 2.68	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	76
Tabel 2.69	Jumlah Program Keluarga Harapan Kab Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	78
Tabel 2.70	Realisasi Bantuan Bencana Alam Dan Sosial Tahun 2016-2020	BAB – II	79
Tabel 2.71	Data Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016-2020	BAB – II	79
Tabel 2.72	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci menurut Angkatan Kerja Dan bukan Angkatan Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2016 – 2020	BAB – II	82
Tabel.2.73	Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	82
Tabel.2.74	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Menurut Pendidikan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	83
Tabel.2.75	Penduduk Berkerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	84
Tabel.2.76	Data Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	BAB – II	84
Tabel 2.77	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	87
Tabel 2.78	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	87
Tabel 2.79	Rasio KDRT Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	88
Tabel 2.80	Data Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 Minahasa. Tahun 2020	BAB – II	88
Tabel 2.81	Persentase Tenaga Kerja di bawah umur Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	90
Tabel 2.82	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	91

Tabel 2.83	Capaian IKLH Kabupaten Minahasa	BAB – II	93
Tabel 2.84	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	94
Tabel 2.85	Rasio Tempat Pengolahan Akhir terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	94
Tabel 2.86	Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	BAB – II	95
Tabel 2.87	Kependudukan Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	96
Tabel 2.88	Data Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	BAB – II	96
Tabel 2.89	Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2020	BAB – II	97
Tabel 2.90	Kelompok Binaan PKK Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	99
Tabel 2.91	Kelompok Binaan LPM Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	101
Tabel 2.92	Data Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	BAB – II	103
Tabel 2.93	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	103
Tabel 2.94	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	106
Tabel 2.95	Rasio Akseptor KB Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	106
Tabel 2.96	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	107
Tabel 2.97	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	107
Tabel 2.98	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa	BAB – II	108
Tabel 2.99	Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	109

Tabel 2.100	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	110
Tabel 2.101	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP. KK. Akte Lahir. Akte Nikah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Min	BAB – II	110
Tabel 2.102	Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	111
Tabel 2.103	Data Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	BAB – II	112
Tabel 2.104	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	114
Tabel 2.105	Rasio Ijin Trayek Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	114
Tabel 2.106	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	116
Tabel 2.107	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	117
Tabel 2.108	Panjang Jaringan Berdasarkan Status Tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa	BAB – II	117
Tabel 2.109	Data Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020	BAB – II	117
Tabel 2.110	Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	118
Tabel 2.111	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Minahasa	BAB – II	118
Tabel 2.112	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	120
Tabel 2.113	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	120
Tabel 2.114	Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	BAB – II	121
Tabel 2.115	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa	BAB – II	122

Tabel 2.116	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	122
Tabel 2.117	Jumlah Investasi skala Nasional Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	124
Tabel 2.118	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	124
Tabel 2.119	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2016 s.d 2020	BAB – II	125
Tabel 2.120	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	126
Tabel 2.121	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	128
Tabel 2.122	Data Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2020	BAB – II	128
Tabel 2.123	Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	131
Tabel 2.124	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	132
Tabel 2.125	Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2016-2020	BAB – II	132
Tabel 2.126	Hasil Produksi Perikanan 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	134
Tabel 2.127	Jumlah Nelayan/Petani Ikan Dan Rumah Tangga Perikanan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	134
Tabel 2.128	Jumlah Produk Unggulan Perikanan 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	135
Tabel 2.129	Data Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2023	BAB – II	136
Tabel 2.130	Perkembangan Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	138
Tabel 2.131	Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	139
Tabel 2.132	Data Jumlah Ternak Di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	140

Tabel 2.133	Potensi Dan Energi Kabupaten Minahasa	BAB – II	142
Tabel 2.134	Pasar Yang Dikelola Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	144
Tabel 2.135	Potensi UTTP Dan Wajib Tera/Tera Ulang Yang Ada Di Pasar Daerah Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	145
Tabel 2.136	Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	148
Tabel 2.137	Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	147
Tabel 2.138	Jumlah Produk Hukum Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	152
Tabel 2.139	Jumlah LSM Aktif Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	153
Tabel 2.140	Data Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	BAB – II	154
Tabel 2.141	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	154
Tabel 2.142	Angka Konsumsi Beras Per Kapita Pertahun Kabupaten Minahasa	BAB – II	156
Tabel. 2.143	Angka Konsumsi Beras Rumah Tangga Per-Kapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	157
Tabel 2.144	Pengeluaran/Belanja Makanan Dan Non Makanan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	158
Tabel 2.145	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	159
Tabel 2.146	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	160

Tabel 2.147	Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	161
Tabel 2.148	Jarak Dan Waktu Tempuh	BAB – II	161
Tabel 2.149	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 S.D 2019 Kabupaten Minahasa	BAB – II	161
Tabel 2.150	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	162
Tabel 2.151	Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	162
Tabel 2.152	Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	163
Tabel 2.153	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	163
Tabel 2.154	Rasio Luas Wilayah Kekeringan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	163
Tabel 2.155	Rasio Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	164
Tabel. 2.156	Presentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2016 S.D 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	165
Tabel. 2.157	Jumlah Pelanggan Yang Menggunakan Listrik PLN Kabupaten Minahasa	BAB – II	166
Tabel. 2.158	Jenis, Kelas Dan Jumlah Restoran Kabupaten Minahasa	BAB – II	167
Tabel. 2.159	Jumlah Restoran/Rumah Makan Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	167
Tabel. 2.160	Jenis, Kelas Dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kabupaten Minahasa	BAB – II	169
Tabel. 2.161	Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – II	169
Tabel. 2.162	Potensi Wisata Di Kabupaten Minahasa Tahun 2020	BAB – II	170

Tabel. 2.163	Jumlah Demonstrasi Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	171
Tabel. 2.164	Jumlah, Jenis Dan Lamanya Pelaksanaan Pengurusan Perijinan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	172
Tabel. 2.165	Jumlah Ijin Yang Terbit Selang 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	175
Tabel. 2.166	Jumlah Dan Macam Insentif Pajak Dan Retribusi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	176
Tabel. 2.167	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	177
Tabel. 2.168	Jumlah Produk Hukum Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	177
Tabel. 2.169	Desa/ Kelurahan Swadaya, Swakarya Dan Swasembada Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Minahasa	BAB – II	178
Tabel. 2.170	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	179
Tabel. 2.171	Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa	BAB – II	180
Tabel. 2.172	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2020	BAB – II	182
Tabel 2.173	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	BAB – II	237
Tabel 2.174	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air	BAB – II	239
Tabel 2.175	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara	BAB – II	241
Tabel 2.176	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	BAB – II	243

Tabel 2.177	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor	BAB – II	245
Tabel 2.178	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir	BAB – II	247
Tabel 2.179	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran	BAB – II	248
Tabel 2.180	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Air	BAB – II	250
Tabel 2.181	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air	BAB – II	251
Tabel 2.182	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama	BAB – II	253
Tabel 2.183	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati	BAB – II	255
Tabel 2.184	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah	BAB – II	257
Tabel. 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d 2020	BAB – II	262
Tabel. 3.2	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016-2020	BAB – II	267
Tabel. 3.3	Perkembangan Proporsi Belanja Operasional dan Belanja Modal Kabupaten Minahasa 2016-2020	BAB – II	268
Tabel. 3.4	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Minahasa Selang tahun 2016-2020	BAB – II	269
Tabel. 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2020	BAB – III	271
Tabel. 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Minahasa selang tahun 2018-2020	BAB – III	275
Tabel. 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2020	BAB – III	275

Tabel. 3.8	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Minahasa 2018-2020	BAB – III	276
Tabel. 3.9	Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Minahasa 2018-2020	BAB – III	277
Tabel. 3.10	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d tahun 2023 Kabupaten Minahasa	BAB – III	282
Tabel. 3.11	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022-2023	BAB – III	284
Tabel. 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa	BAB – III	285
Tabel. 3.13	Target Indikator Makro Tahun 2021-2023	BAB – III	286
Tabel. 4.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011-2016 Kabupaten Minahasa	BAB – IV	289
Tabel. 4.2	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun Kota Manado, Tahun 2016-2020	BAB – IV	291
Tabel. 4.3	Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Pertanian Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020	BAB – IV	294
Tabel. 4.4	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Minahasa, Tahun 2013-2020	BAB – IV	298
Tabel 4.5	Permasalahan untuk Kemandirian Ekonomi	BAB – IV	300
Tabel 4.6	Presentase Penduduk dan Kepadatan Kabupaten Minahasa tahun 2019	BAB – IV	303
Tabel 4.7	Wilayah Administratif Kabupaten Minahasa berdasarkan Kecamatan	BAB – IV	303
Tabel 4.8	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa Tahun 2016	BAB – IV	305
Tabel 4.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2015-2019	BAB – IV	307

Tabel 4.10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2015-2019	BAB – IV	308
Tabel 4.11	Permasalahan Bangunan	BAB – IV	313
Tabel 4.12	Tujuan SGDS	BAB – IV	328
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Minahasa	BAB – V	353
Tabel 6.1	Visi,Misi,Tujuan Sasaran Dan Strategi	BAB-VI	363
Tabel 6.2	Tema Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-203		370
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 Berbasis Tematik Pembangunan	BAB-VI	371
Tabel 6.4	Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Minahasa	BAB-VI	376
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Minahasa	BAB-VI	379
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa	BAB - VII	421
Tabel 7.2	Standart Pelayanan Minimal (SPM)	BAB - VII	423
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Minahasa	BAB - VII	426
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023	BAB-VIII	514
Tabel 8.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023	BAB-VIII	516

Daftar Gambar

			Hal
Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya	BAB I	1
Gambar 2.1	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	BAB-II	237
Gambar 2.2	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air	BAB-II	239
Gambar 2.3	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara	BAB-II	241
Gambar 2.4	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	BAB-II	244
Gambar 2.5	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor	BAB-II	245
Gambar 2.6	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir	BAB-II	247
Gambar 2.7	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran	BAB-II	248
Gambar 2.8	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air	BAB-II	251
Gambar 2.9	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air	BAB-II	252
Gambar 2.10	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama	BAB-II	254
Gambar 2.11	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati	BAB-II	256
Gambar 2.12	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah	BAB-II	257
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan Komposisi Pendapatan Menurut Tiga Sumber Utama	BAB-III	265
Gambar 3.2	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016-2020	BAB-III	268
Gambar 3.3	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Minahasa Selang Tahun 2016-2020	BAB-III	270
Gambar 3.4	Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Minahasa	BAB-III	278
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Minahasa	BAB-IV	304
Gambar 4.2	Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	BAB-IV	326
Gambar 5.1	Hubungan Antar Elemen Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa	BAB- V	347

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terstruktur dan direncanakan untuk sebuah tujuan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut merupakan gambaran atas kondisi objektif masyarakat yang tercermin antara lain cerminan atas kondisi struktur sosial, dinamika pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan hidup atau perubahan yang direncanakan lainnya.

Dalam kaitannya dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Periode 2018-2023, secara normatif-filosofis, pembangunan pada dasarnya harus berjalan seiring dengan tujuan Pembangunan Nasional, yakni menjalankan amanat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara memiliki berbagai potensi yang membutuhkan perencanaan yang terstruktur, terintegratif dan aspiratif sehingga potensi-potensi yang dimiliki benar-benar termanfaatkan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 diatas. Sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan demikian, aspek penting untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, terstruktur, integratif dan aspiratif tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasangan Bapak Royke Octavian Roring sebagai Bupati dan Bapak Robby Dondokambey sebagai Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023 dalam Pemilukada Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 25 September 2018 telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dan telah ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2019. Dokumen RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 memuat Visi dan Misi

serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Program Prioritas kepala daerah menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Demikian diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Dalam perjalanannya, RPJMD Kabupaten Minahasa, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Setelah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD untuk 2 (dua) tahun rencana yaitu Tahun 2019-2020 terdapat beberapa target yang tidak tercapai.

Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebab memenuhi poin 3 pada Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, adalah perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Minahasa menunjukkan perkembangan meningkat. Hal ini memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Tahun 2020 untuk penanganan

kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Tahun 2020 telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19.

Substansi RPJMD Kabupaten Minahasa yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.

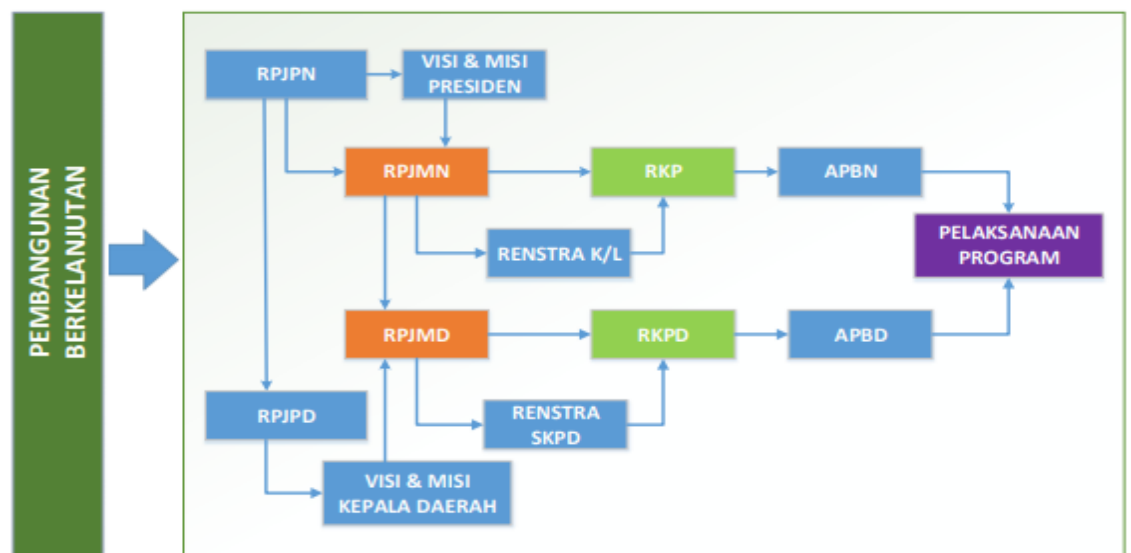
1.3. Hubungan antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian

visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD, sebagaimana pada Gambar berikut :

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa 2 (dua) tahun kedepan.

Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 adalah :

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspekgeografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH, memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
- BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, menjelaskan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan beberapa permendagri terkait Batas Wilayah Antara Kabupaten/Kota Luasan Kabupaten Minahasa sebesar 112.888 ha yang terdiri dari 25 kecamatan, Dimana Untuk Luasan Kecamatan di Kabupaten Minahasa masih berdasarkan Perda RTRW Tahun 2014 Kecamatan Kombi memiliki luas wilayah terbesar yaitu 119.74 km² sedangkan Kecamatan Langowan Timur memiliki luas wilayah terkecil yaitu 7.24 km².

Batas-batas luar Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Kota Manado dan Kota Tomohon;
- 2) Sebelah Selatan : Laut Maluku dan Kota Tomohon;
- 3) Sebelah Barat : Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
- 4) Sebelah Timur : Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Utara. Letak daerah ini menurut garis lintang dan bujur adalah: 1°22' 44" LU/ 124° 33' 52" BT ke 1° 01' 11" LU/ 124° 54' 45" BT ke 125° 04' 21"BT/ 1° 20'25" LU.

Kabupaten Minahasa pada umumnya berbukit, bergunung, dan dataran yang agak luas, hanya sekitar Danau Tondano. Dataran tersebut dijumpai dalam wilayah Tondano, Remboken, Tompaso, Langowan, dan Kakas. Lereng beragam dari datar hingga sangat curam. Lereng-lereng yang sangat curam dijumpai di dalam wilayah Kecamatan Kombi, Kecamatan Kakas, dan Kecamatan Langowan Selatan.

Kabupaten Minahasa memiliki 8 gunung dimana kawasan lindung yang terluas terdapat di Gunung Soputan yaitu 1.540,00 ha. Adapun hutan bakau yang terluas terdapat di Tanjung kelapa seluas 250 ha (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Gunung-Gunung di Kabupaten Minahasa

No	Gunung/Kelompok Hutan	Kecamatan	Lindung (Ha)
1	Gunung Mahawu	Pineleng/Tombulu	438,00
2	Gunung Masarang	Tondano	16,00
3	Gunung Tampusu	Tondano Selatan	13,00
		Remboken	8,00
4	Gunung Sopotan	Langowan Barat	1.540,00
		Tompaso	510,00
		Kawangkoan Barat	900,00
5	Gunung Lengkoan	Remboken	20,00
		Kawangkoan	25,00
		Sonder	11,00
6	Gunung Kawatak	Langowan	330,00
7	Gunung Kaweng	Kakas	417,86
8	Gunung Lembean	Tondano Timur	493,00
		Kombi	1.500,00
9	Hutan Bakau Tanjung Kelapa	Tombariri	250,00
10	Hutan Bakau Tanjung Tambala	Tombariri	50,00
T O T A L			6.521,86

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa. Tahun 2014-2034

3. Geologi

Dari batuan geologi menunjukkan dataran sekitar Danau Tondano adalah endapan lakustrin maupun sungai. Wilayah berbukit sampai bergunung bagian timur Danau Tondano terdiri atas batuan vulkanis berupa lava basalt dan tufa basalt.

Wilayah Kecamatan Langowan Barat, Tompaso, dan Kawangkoan terdiri atas Abu Vulkan dan Tufa Tondano, Wilayah Lengkoan, Tampusu (Kecamatan Remboken), Masarang, Mahawu sampai lahan wilayah Kecamatan Tombulu berupa batuan Vulkanis Muda (abu, bom, lapilli, lawa). Di daerah ini tanah- tanah yang berkembang dari batuan basalt membentuk ordo Alfisolts, Tufa Tondano ordo Andisols. Tanah di wilayah dataran sekitar Danau Tondano umumnya Aquepts. Wilayah Kecamatan Tondano yang merupakan ibukota kabupaten berbatasan dengan Gunung Mahawu yang masih aktif.

4. Hidrologi

Danau Tondano merupakan danau terbesar dengan satu sungai (Sungai Tondano) dan merupakan bagian dari kawasan strategis nasional (KSN) DAS Tondano yang berfungsi untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik (PLTA Tonsea Lama-Tanggari), dan untuk diolah sebagai air minum oleh PDAM Kota Manado. Fungsi lain dari sungai-

sungai tersebut adalah sebagai pengairan dan budidaya ikan air tawar. Adapun sungai sungai yang terdapat di Kabupaten Minahasa seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Daftar Sungai yang ditetapkan memiliki Kawasan Sempadan Sungai

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	S. Nimanga (Sebagian wilayah masuk Minsel dan Tomohon)	-	Sonder	34,00
			Kawangkoan. Tomohon	
			Tompaso	
		Masarinsin	Sonder	1,50
		Naa	Sonder	2,50
		Sapa	Sonder. Tomohon	17,00
		Titivoon	Sonder. Tomohon	4,00
		Ranoesem	Sonder. Tomohon	10,00
		Ranoinsandang	Sonder. Tomohon	10,00
		Loar	Sonder. Tomohon	2,50
		Nikoropit	Sonder. Tomohon	2,00
		Leilem	Sonder. Tomohon	4,50
		Munte	Sonder	7,00
		Keris	Sonder	5,50
		Coklat	Sonder	6,00
		Ranowangko	Kawangkoan	14,50
		Ranoesem	Kawangkoan	7,50
		Toang	Kawangkoan	7,00
		Tempak	Kawangkoan	7,50
Maasem	Kawangkoan. Tompaso	13,00		
Ranoan	Kawangkoan	5,00		
2	S. Maroondor	-		4,50
		Tuel	Kombi	5,00
3	S. Rariang	-	Kombi	4,00
4	S. Bulo	-	Kombi	9,00
		Uuan	Kombi	6,00
5	S. Rerer	-	Kombi	4,00
6	S. Sapaana	-	Kombi	3,00

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
7	S. Saluwangko		Langowan	20,00
8	S. Tombingon	-	Langowan	14,00
		Panasen	Kakas. Langowan	14,50
		Ranomperet	Langowan	10,00
		Walewangko	Langowan	5,50
		Ranolesi	Langowan	6,00
		Wuliling	Langowan	8,50
9	S. Tolour Oki	-	Tondano	5,00
		Pakawa	Tondano	2,50
10	S. Tonsaru	-	Tondano	2,50
11	S. Tougela			6,00
12	S. Toubeke			7,50
13	S. Manembo			20,50
14	S. Ranowangko			19,50
15	S. Sindoran Besar		Kakas	16,50
16	S. Sindoran Kecil		Kakas	10,50
17	S. Kaliakel		Kakas	7,50
18	S. Pinisin		Kakas	18,00
		Kakeretan	Kakas	7,50
		Kaweruan	Kakas	19,00
		Pinorutanresek	Kakas	10,00
19	S. Kayuwatu Oki		Kakas	12,50
		Silungan	Kakas	8,50
20	S. Kayuwatu Wangko		Kakas	18,50
		Katon	Kakas	10,50
21	S. Kinamang		Kakas	5,50
22	S. Tarandi		Kakas. Eris	21,50
		Karor	Kakas	16,00
23	S. Atep Oki		Eris	13,50
24	S. Raker		Eris	17,00
		Panungean	Eris	18,00
		Watuliney	Eris	7,50
25	S. Pakaretan		Eris	17,50
26	S. Kamenti		Eris. Kombi	16,50
		Tulap	Kombi	8,50

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
27	S. Kora-kora			9,50
28	S. Kanis			18,50
				5,50
29	S. Toulour			15,00
30	S. Awioki			6,00
31	S. Awiwangko			7,00
		Kaliawua		6,50
32	S. Kombi			18,00
33	S. Raker			13,50
34	S. Tulap			14,50
35	S. Buraran			6,00
				10,50
				10,50
				6,00
36	S. Mawalelong		Remboken	6,00

Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa. Tahun 2014-2034

5. Klimatologi

Kabupaten Minahasa beriklim tropis basah dan dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November-April dipengaruhi oleh angin barat yang membawa hujan. Angka curah hujan rata-rata per tahun berkisar 2.000-3.000 mm. dengan jumlah hari hujan rata-rata 90-130 hari per tahun. Suhu udara rata-rata 22°C (sekitar 21-23°C) dan memiliki kelembaban udara rata-rata 87-92%.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Minahasa dengan luas wilayah sebesar 121.043.31 ha, sebagian besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun luas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Bakau	178,37	0,15
2	Danau	4.446,90	3,67
3	Hutan	13.065,20	9,19
4	Hutan belukar	1.750,80	1,45
5	Kebun Campuran	27.888,80	23,04
6	Perkebunan /kebun	32.994,66	27,26
7	Permukiman	5.567,00	4,60
8	Rawa	102,50	0,08
9	Rumput	6.083,73	5,03
10	Sawah Irigasi	5.762,30	4,76
11	Sawah Tadah Hujan	1.227,20	1,01
12	Tanah kosong	9.224,40	7,62
13	Tegalan/Ladang	10.034,65	8,29
14	Lain-Lain	2.845,00	
Total		121.043,31	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034

Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah untuk perkebunan (27,26%) dan untuk kebun campuran (23,04%), sedangkan untuk permukiman hanya mencapai 4,6%.

7. Demografi

Jumlah penduduk kabupaten Minahasa tahun 2020 adalah 341.176 jiwa dengan 88.725 kepala keluarga, dan rata-rata anggota keluarga/ rumah tangga sebesar 3,57 jiwa.

Kepadatan penduduk mencapai angka 293,72 jiwa/km². kepadatan penduduk tinggi terdapat di Kecamatan Langowan Timur dengan kepadatan 1.870 jiwa/km², dan terendah terdapat di kecamatan Kombi dengan kepadatan 82,89 jiwa/km². Berikut ini pada Tabel 2.4 tersaji data jumlah dan kepadatan penduduk yang menggambarkan distribusi penduduk di Kabupaten Minahasa tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,94 persen.

Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan per km ²
1 Langowan Timur	7,24	13,6	1.874
2 Langowan Barat	42,69	16,6	389
3 Langowan Selatan	69,65	8,1	116
4 Langowan Utara	8,27	8,8	1059
5 Tompaso	17,32	7,4	430
6 Tompaso Barat	14,61	9,3	635
7 Kawangkoan	35,99	10,5	292
8 Kawangkoan Barat	19,27	8,7	453
9 Kawangkoan Utara	13,09	9	690
10 Sonder	52,52	19,5	372
11 Tombariri	56,43	18,2	323
12 Tombariri Timur	101,57	10,4	102
13 Pineleng	49,30	30,3	615
14 Tombulu	73,43	19,3	263
15 Mandolang	47,05	21,7	460
16 Tondano Barat	22,66	21,6	951
17 Tondano Selatan	25,34	17,9	707
18 Remboken	24,07	12,8	531
19 Kakas	88,85	12,6	142
20 Kakas Barat	45,16	11	243
21 Lembean Timur	76,94	8,5	110
22 Eris	33,25	12	360
23 Kombi	119,74	11,5	96
24 Tondano Timur	33,71	15,1	448
25 Tondano Utara	63,49	13	205
TOTAL	1.141,64	347,3	304

Sementara itu untuk rasio jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan untuk kabupaten Minahasa sebesar 104,28 persen. Rasio jenis kelamin ini beragam nilainya per kecamatan, dengan rasio tertinggi berada pada kecamatan Langowan Selatan dengan nilai 110,48, dan yang terendah pada kecamatan Tondano Utara sebesar 96,82. Gambaran Rasio Jenis kelamin per kecamatan digambarkan pada Tabel 2.5.

Pada Tabel 2.5 ini memberikan gambaran bahwa jumlah laki-laki masih lebih banyak dari perempuan dengan rasio jenis kelamin 104,46. Artinya, dalam setiap komunitas 100 perempuan, terdapat 104 sampai 105 orang laki-laki. Secara rinci, rasio tertinggi terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun (114.117). Pada kelompok berikutnya nilai ini berangsur-angsur cenderung mengecil dan untuk usia 65 tahun keatas jumlah perempuan sudah melebihi laki-laki, hal ini terlihat dari rasio jenis

kelamin yang memiliki nilai di bawah 100. Meningkatnya komposisi perempuan di usia lanjut ini merupakan fenomena yang mengindikasikan bahwa tingkat harapan hidup perempuan lebih tinggi.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	SENSUS 2020			RASIO JENIS KELAMIN
		Jumlah Penduduk			
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LANGOWAN TIMUR	6,812	6,759	13,571	100.78
2	LANGOWAN BARAT	8,569	8,044	16,613	106.53
3	LANGOWAN SELATAN	4,239	3,855	8,094	109.96
4	LANGOWAN UTARA	4,559	4,195	8,754	108.68
5	TOMPASO	3,822	3,625	7,447	105.43
6	TOMPASO BARAT	4,784	4,492	9,276	106.50
7	KAWANGKOAN	5,319	5,181	10,500	102.66
8	KAWANGKOAN BARAT	4,412	4,309	8,721	102.39
9	KAWANGKOAN UTARA	4,631	4,406	9,037	105.11
10	SONDER	9,942	9,596	19,538	103.61
11	TOMBARIRI	9,246	8,954	18,200	103.26
12	TOMBARIRI TIMUR	5,370	5,034	10,404	106.67
13	PINELENG	15,464	14,842	30,306	104.19
14	MANDOLANG	11,062	10,596	21,658	104.40
15	TOMBULU	9,897	9,413	19,310	105.14
16	TONDANO BARAT	10,958	10,600	21,558	103.38
17	TONDANO SELATAN	8,992	8,914	17,906	100.88
18	REMBOKEN	6,602	6,168	12,770	107.04
19	KAKAS	6,572	6,074	12,646	108.20
20	KAKAS BARAT	5,696	5,278	10,974	107.92
21	LEMBEAN TIMUR	4,323	4,136	8,459	104.52
22	ERIS	6,073	5,891	11,964	103.09
23	KOMBI	5,871	5,591	11,462	105.01
24	TONDANO TIMUR	7,669	7,423	15,092	103.31
25	TONDANO UTARA	6,551	6,479	13,030	101.11
	Minahasa	177,435	169,855	347,290	104.46

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. 2021

Dari data terlihat bahwa penduduk non produktif (berusia 0-14 tahun dan 65 +) mencapai angka 21,88 % dan penduduk usia produktif berada

pada angka 68,27 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa kelompok usia produktif lebih banyak jumlahnya dari ada kelompok usia non produktif, dengan rasio ketergantungan sebesar 46,53.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif.

Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (produktif).

Makin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30. angka ketergantungan sedang bila 30 – 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Angka beban ketergantungan Kabupaten Minahasa selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Ini berarti jumlah penduduk non produktif semakin kecil atau jumlah penduduk produktif semakin besar.

Jika dilihat komposisi penduduk Kabupaten Minahasa seperti Tabel 2.6, usia kelompok umur 15 – 64 tahun terus mengalami peningkatan lebih cepat dibanding kelompok umur non produktif.

Selain itu telah terjadi peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65+), dan dikenal dengan istilah proses penuaaan (aging process) atau proses transisi penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua, dan selama 2016 – 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk usia muda dan penambahan penduduk usia produktif (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk menurut Umur dan Beban Ketergantungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Umur					
0 – 14	76.122	75.887	75.626	75.673	72.337
15 - 64	227.421	229.555	231.485	233.160	237.013
65 +	28.647	29.879	31.253	32.343	37.940
Angka Ketergantungan	46,06	46,07	46,12	46,33	46,53

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. 2020

Secara umum gambaran indikator kependudukan kabupaten Minahasa tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Indikator Kependudukan Kabupaten Minahasa Tahun 2020

Uraian	Satuan	2019	2020
Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	341.176	347.290
Luas Wilayah	Km ²	1.141,64	1.141,64
Pertumbuhan	%	0,83	1,09
Sex Ratio	%	104,63	104,5
Kelompok Umur (tahun)			
0 - 14	%	22,18	21,88
15 - 64	%	68,34	68,27
65 +	%	9,48	9,85
Rasio ketergantungan		46,33	46,53

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat lebih lanjut dijelaskan mengenai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, focus kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Beberapa target indikator dari fokus Aspek dimaksud terdampak dengan adanya Pandemi Covid 19 sehingga mempengaruhi capaian target indikator yang termuat dalam perubahan dokumen ini.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. PDRB dan Struktur ekonomi

Posisi strategis Kabupaten Minahasa yang berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dan KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado-Bitung, serta kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun ketidakstabilan ekonomi global juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Minahasa.

Kapasitas ekonomi yang tergambar dari nilai keseluruhan produk

barang dan jasa yang dihasilkan di daerah ini yang tergambar pada data PDRB-nya menunjukkan bahwa perputaran roda ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun ini semakin meningkat.

Tahun 2016 PDRB sebesar lebih dari 13.314 triliun rupiah ADHB dan sebesar lebih dari 9.915 triliun rupiah ADHK. Semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah ini sehingga sampai dengan tahun 2020 PDRB sebesar lebih dari 17.427 triliun rupiah menurut HB dan lebih dari 11.681 triliun rupiah menurut HK .

Struktur perekonomian sampai dengan tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan primadona dalam perekonomian Kabupaten Minahasa. Sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 26,99 % ADHB dan 25,14% ADHK. Kemudian diikuti dengan sektor bangunan/konstruksi dengan rata-rata kontribusi 12,82% ADHB dan 15,36% dan sektor perdagangan 11,39 % ADHB dan 11,82% ADHK dan oleh sektor-sektor lainnya.

Pada Tabel 2.8 di bawah, struktur utama pembentuk PDRB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan dalam kontribusinya yaitu sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi. hotel dan restoran serta jasa perusahaan dan jasa kesehatan. Artinya ada peningkatan aktivitas ekonomi untuk konstruksi dan peran pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.8 PDRB Kabupaten Minahasa menurut lapangan usaha ADHB Berlaku Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.713.219	27,6	3.967.800	27,37	4.185.359	26,54	4.509.794	26,34	4.725.076	27,11
Pertambangan dan Penggalian	876.624	6,59	936.161	6,46	1.013.792	6,43	1.069.192	6,25	1083391.9	6,22
Industri Pengolahan	943.769	7,08	1.041.919	7,19	1.153.618	7,31	1.225.505	7,16	1251640.5	7,18
Pengadaan Listrik dan Gas	12.794	0,10	16.206	0,11	17.545	0,11	19.262	0,11	21271.5	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.293	0,14	19.553	0,13	19.877	0,13	21.203	0,12	22703	0,13
Konstruksi	1.664.407	12,49	1.839.607	12,69	2.058.122	13,05	2.273.122	13,28	2197122.1	12,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.442.644	10,83	1.612.765	11,13	1.789.378	11,34	1.989.378	11,62	2097277.7	12,03
Transportasi dan Pergudangan	842.274	6,32	911.486	6,29	993.559	6,30	1.092.359	6,38	981958.8	5,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.740	0,97	143.212	0,99	161.608	1,02	176.608	1,03	142907.6	0,82
Informasi dan Komunikasi	287.497	2,16	316.507	2,18	350.987	2,23	389.987	2,28	434986.8	2,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	339.229	2,55	368.407	2,54	379.496	2,41	387.112	2,26	425197.9	2,44
Real Estate	549.846	4,13	595.344	4,11	643.067	4,08	711.067	4,15	717067	4,11
Jasa Perusahaan	8.662	0,06	9.672	0,07	11.269	0,07	12.809	0,07	12509	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.329.116	9,97	1.446.081	9,98	1.579.087	10,01	1.632.087	9,53	1651966.5	9,48
Jasa Pendidikan	425.442	3,19	457.500	3,16	492.361	3,12	546.361	3,19	570361.2	3,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	517.832	3,89	565.859	3,90	620.407	3,93	689.407	4,03	751302.5	4,31
Jasa lainnya	223.430	1,68	248.418	1,71	303.386	1,92	374.386	2,19	340386.4	1,95

Lapangan Usaha	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.314.336	100	14.468.030	100	15.745.493	100	17.085.815	100,0	17.427.126	100

Sumber: Minahasa dalam Angka. Tahun 2021

Dari Tabel 2.9 di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 PDRB Kabupaten Minahasa didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Minahasa menurut lapangan usaha ADHK Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.580.084,00	26,02	2.664.774,00	25,34	2.749.741,70	24,64	2.886.826,30	24,46	2.949.066,70	25,25
Pertambangan dan Penggalian	663.476,10	6,69	702.093,00	6,68	746.434,60	6,69	799.734,60	6,78	785.634,60	6,73
Industri Pengolahan	779.776,00	7,86	836.128,00	7,95	902.292,60	8,09	918.898,20	7,78	933.846,50	7,99
Pengadaan Listrik dan Gas	13.530,30	0,14	14.881,90	0,14	15.857,10	0,14	17.303,10	0,15	18.526,80	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.750,90	0,15	14.850,90	0,14	14.966,70	0,13	15.299,70	0,13	15.964,60	0,14
Konstruksi	1.483.557,60	14,96	1.611.857,60	15,33	1.744.174,90	15,63	1.868.274,90	15,83	1.755.274,90	15,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.138.085,30	11,48	1.224.206,30	11,64	1.316.272,70	11,80	1.428.272,70	12,10	1.413.272,70	12,10
Transportasi dan Pergudangan	545.230,10	5,50	571.270,90	5,43	601.868,10	5,39	643.768,10	5,45	559.778,10	4,79

Lapangan Usaha	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.991,10	0,99	105.113,10	1,00	116.241,90	1,04	123.831,90	1,05	99.017,90	0,85
,Informasi dan Komunikasi	218.624,30	2,20	231.934,30	2,21	247.627,60	2,22	269.627,60	2,28	301.627,60	2,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	261.447,10	2,64	278.727,80	2,65	273.133,10	2,45	274.560,70	2,33	303.007,60	2,59
Real Estate	459.756,90	4,64	491.954,90	4,68	527.277,20	4,73	561.277,20	4,76	560.377,20	4,80
Jasa Perusahaan	6.302,10	0,06	6.813,10	0,06	7.373,10	0,07	8.008,10	0,07	7.618,10	0,07
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	828.737,50	8,36	883.802,50	8,40	942.840,50	8,45	942.340,50	7,98	922.125,50	7,89
Jasa Pendidikan	274.992,70	2,77	290.050,70	2,76	307.597,50	2,76	333.597,50	2,83	340.597,50	2,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387.556,20	3,91	415.583,20	3,95	447.500,00	4,01	482.500,00	4,09	512.500,00	4,39
Jasa lainnya	162.010,70	1,63	173.398,70	1,65	197.866,10	1,77	229.366,10	1,94	20.125,10	1,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.915.909	100	10,517.441	100	11.159.065	100	11.803.487	100	11.681.361	100

Sumber: Minahasa dalam Angka. Tahun 2021

Dari Tabel 2.10 di bawah menunjukkan bahwa Pada tahun 2016-2020 laju pertumbuhan PDRB kabupaten Minahasa didominasi oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas.

**Tabel 2.10 Perkembangan Laju
Pertumbuhan PDRB Tahun 2016 s.d 2020**

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	3,06	3,28	3,19	4,99	2,16
Pertambangan dan Penggalian	7,03	5,82	6,32	7,14	-1,76
Industri Pengolahan	1,27	7,23	7,91	1,84	1,63
Pengadaan Listrik dan Gas	19,76	9,99	6,55	9,12	7,07
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2,29	0,68	0,78	2,22	4,35
Konstruksi	8,46	8,65	8,21	7,12	-6,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,63	7,57	7,52	8,51	-1,05
Transportasi dan Pergudangan	8,16	4,78	5,36	6,96	-13,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,98	7,27	10,59	6,53	-20,04
Informasi dan Komunikasi	10,24	6,09	6,77	8,88	11,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	21,32	6,61	-2,01	0,52	10,36
Real Estate	6,73	7,00	7,18	6,45	-0,16
Jasa Perusahaan	7,95	8,11	8,22	8,61	-4,87
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,14	6,64	6,68	-0,05	-2,15
Jasa Pendidikan	6,2	5,48	6,05	8,45	2,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	7,23	7,68	7,82	6,22
Jasa lainnya	7,16	7,03	14,11	15,92	-11,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,06	6,07	6,10	5,77	-1,03

Sumber: Minahasa dalam Angka. Tahun 2021

Pada Tabel 2.11 menjelaskan bagaimana indikator sosial terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2019 tapi mengalami kenaikan di tahun 2020 seperti tingkat kemiskinan, sedangkan pengangguran di tahun 2020 mengalami kenaikan. Kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran ini sebagai dampak dari Pandemi Covid 19.

**Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Minahasa
Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (ADHK)	(Trilyun Rp)	9,91	10,52	11,16	11,80	11,68
PDRB (ADHB)	(Trilyun Rp)	13,33	14,49	15,77	17,12	17,43
PDRB/kap (ADHB)	(Juta Rp)	40,12	43,23	46,62	50,18	50,67
Kemiskinan	(Jiwa)	27,640	26,340	24,490	24,320	24,950
Pengangguran	(Jiwa)	14,203	10,927	12,799	9,937	10,671

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
TPT	(%)	9,20	6,91	7,35	5,88	6,30

Sumber : BPS Sulawesi Utara. Tahun 2021

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukkan Tahun 2016 ekonomi daerah ini mampu tumbuh 6,06 persen terus naik hingga di Tahun 2018, tapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5.77 persen dan tahun 2020 -1.03 persen. Hal ini sebagai dampak dari Pandemi Covid 19. Secara keseluruhan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa adalah sebesar 4,59 persen (Tabel 2.12).

Tabel 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,06	6,07	6,10	5,77	-1,03

Sumber : BPS Sulut. Tahun 2021

2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk sehingga hasilnya menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau per satu orang penduduk dengan pendekatan menggunakan data PDRB atas dasar harga berlaku. Data ini bermanfaat sebagai pendekatan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu. PDRB per kapita dari penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perekonomian daerah ini. Tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Minahasa sebesar 40,12 juta rupiah terus mengalami peningkatan di tahun 2020 50,67 juta rupiah.

2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

Secara umum kondisi bidang sosial masyarakat berlangsung secara dinamis. didukung dengan budaya masyarakat Minahasa yang toleran, egaliter, dan demokratis dengan semangat mapalus yang masih melekat dalam masyarakat. Kondisi ini merupakan perwujudan upaya dalam rangka pengembangan seni budaya daerah. pembinaan olahraga, dan pemantapan kerukunan antar umat beragama. Adapun dalam mendukung fokus kesejahteraan sosial diperlukan data sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, angka melek huruf dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya turun sebesar 0,05 persen. Angka melek huruf didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tercermin dari data angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Data menunjukkan pada tahun 2016 sebesar 99,87 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 99,83 persen (Tabel 2.13).

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s.d 2020 di Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas yang bisa membaca dan menulis	253.347	253.348	276.452	288.040	298.068
2	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas	278.556	253.729	279.357	289.023	298.568
3	Angka Melek Huruf	99,87	99,84	98,96	99,66	99,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

**penduduk 15 tahun ke atas

2. Angka Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dan tahun 2016 angka lama sekolah sebesar 9,54 tahun terus meningkat menjadi 9,59 tahun di tahun 2020 (Tabel 2.14).

Tabel 2.14 Angka Lama Sekolah Penduduk Tahun 2016 s.d Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Sekolah	9,54	9,55	9,56	9,58	9,59

Ini berarti rata-rata lama sekolah di Kabupaten Minahasa sudah mencapai level Pendidikan SMU/SMK atau sederajat. Program wajib belajar 12 tahun sudah berhasil dan terus harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas SDM di masa yang akan datang.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk di masing- masing sekolah di jenjang pendidikan (Tabel 2.15).

Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
I	SD / MI					
1	Jumlah Siswa	30.428	28.020	28.020	27.442	26.117
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun	30.112	25.660	27.177	29.757	28.320
3	Rasio	101,05	109,2	103,10	92,22	92,22
II	SMP / MTs					
1	Jumlah Siswa	14.512	14.302	13.769	13.805	12.724
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun	14.781	13.364	12.749	14.153	14.064
3	Rasio	98,18	107,02	108,00	97,54	90,47

Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Perhitungan APK adalah dengan membandingkan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 Tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 untuk tingkat SD 101,05 kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 99,22. Sedangkan untuk SMP dari 98,18 pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 turun menjadi 90,47.

Angka partisipasi murni Kabupaten Minahasa untuk SD dan SMP mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2020 APM SD/MI 92,22. APM SMP/ MTs sebesar 54,50 (Tabel 2.16).

Tabel 2.16 Perkembangan APM Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
I	SD / MI					
1	Jumlah Siswa kelompok usia 7-12 thn yg bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	28.859	23.352	24.324	23.506	26.117
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun	30.112	25.660	27.177	29.757	28.320
3	Rasio	95,84	91,01	89,50	78,99	92,22
II	SMP / MTs					
1	Jumlah Siswa kelompok usia 13-15 thn yg bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	11.031	8.848	8.430	8.002	7.665
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun	14.781	13.364	12.749	14.153	14.064
3	Rasio	74,63	66,21	66,12	56,54	54,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

4. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah (Tabel 2.17).

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Pendidikan yang di Tamatkan (APT) % Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Minahasa

No	APT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak Berijazah	14,40	5,84	16,35	16,36	15,03
2	SD	18,30	25,73	15,70	15,71	21,03
3	SMP	26,76	31,05	19,78	19,79	18,42
4	SMA	43,27	36,33	30,60	30,61	35,67
5	Perguruan Tinggi	14,05	3,42	9,87	9,88	9,86

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Minahasa berusia 10 tahun ke atas berdasarkan kepemilikan ijazah sampai pada tahun 2020 menunjukkan sebagian besar memiliki ijazah SMA yaitu sebesar 35,67 persen (Tabel 2.18).

Tabel 2.18 Tingkat Kelulusan Siswa SD dan SMP Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Tingkat Sekolah	Peserta Ujian (Siswa)	Lulus Ujian (Siswa)	%	Nilai Rata-rata
1	SD/MI	4.518	4.518	100	100
2	SMP/MTs	4.455	4.455	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

5. Angka Putus Sekolah

Berdasarkan data yang ada, Angka Putus Sekolah Kabupaten Minahasa sampai tahun 2020 paling besar adalah di level tingkat SMP dibandingkan SD (Tabel 2.19).

Tabel 2.19 Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Tingkat Sekolah	Tahun				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	SD/MI	0,04	0,05	0,12	0,13	0,05
2	SMP/MTs	0,05	0,04	0,24	0,15	0,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Namun dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan angka putus sekolah sebesar 0,05 persen untuk SD/MI dan SMP/MTs sebesar 0,07 persen pada tahun 2020.

6. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) tahun 2016 adalah 6,64 terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2018 hanya 5,35 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,97 tapi di tahun 2020 kemali mengalami penurunan menjadi 6,80. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 mencapai 993,36 per 1000 kelahiran hidup menjadi 993,20 per 1.000 kelahiran di tahun 2020. Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun juga mengalami penurunan dari 33 bayi pada tahun 2016 menjadi 26 bayi pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 34 bayi tapi kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 16 (Tabel 2.20).

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2016	33	4.970	6,64	993,36
2017	32	5.418	5,91	994,09
2018	26	4.862	5,35	994,65
2019	34	4.875	6,97	993,03
2020	16	2.352	6,80	993,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka/ Usia Harapan Hidup merupakan indikator utama dalam menilai kinerja Kesehatan oleh Pemerintah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat Kesehatan pada Khususnya. Pada tahun 2016 usia harapan hidup

penduduk Kabupaten Minahasa sebesar 70,40 dan pada tahun 2020 sebesar 71,08.

c. Persentase Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu: rendah = di bawah 10%, sedang = 10-19%. tinggi = 20-29%. sangat tinggi = 30%. Status gizi buruk balita di Kabupaten Minahasa selang tahun 2015-2019 (Tabel 2.21).

**Tabel 2.21 Status Gizi Buruk di Kabupaten Minahasa
Tahun 2016-2020**

Tahun	Sasaran Balita	Gizi Buruk	Per-10.000
2016	24.811	0	0
2017	24.158	0	0
2018	24.284	1	0,41
2019	22.880	3	1,31
2020	20.976	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2021

Terdapat penurunan pada kondisi gizi buruk balita di Kabupaten Minahasa. ini berarti kepedulian terhadap konsumsi makanan pada balita semakin meningkat. Dilihat dari penggolongannya menunjukkan bahwa gizi buruk di Kabupaten Minahasa masuk pada kelompok rendah.

d. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (*Mother Mortality Rate*) adalah 192,15/100.000 KH (12 kasus) tahun 2013 turun menjadi 11,77/100.000 KH ,(6 kasus) tahun 2014, dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 211,73/100.000 KH (10 kasus), dan tahun 2016 sampai tahun 2017 menurun berturut-turut 140,85/100.000 KH (7 kasus) dan 73,83/100.000 KH (4 kasus). Kondisi ini menyatakan bahwa MMR masih menjadi prioritas.

e. Persalinan Ibu Hamil

Pada tahun 2015 tercatat sebesar 90,2 persen (4.751 per salinan) dari 5.269 per salinan dan terus meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar 102,44 persen (5.286 per salinan) dari 5.160 per salinan. Hasil cakupan persalinan sudah baik karena telah mencapai lebih dari 100 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.22.

**Tabel 2.22 Cakupan Persalinan di Kabupaten Minahasa
Tahun 2016-2020**

Tahun	Sasaran	Target (%)	Capaian	%
2016	5.213	91	4.996	95,9
2017	5.160	93	5.286	102,44
2018	5.105	93	4.839	94,79
2019	5.049	97	4.865	96,36
2020	4.996	98	4.641	92,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2021

f. Kondisi IPM dan UCI

Selanjutnya salah satu peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat di lihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Minahasa secara bertahap meningkat sejak tahun 2016 sebesar 74,37; menjadi 75,29 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,92 persen (Tabel 2.23).

**Tabel 2.23 IPM Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 Di Kabupaten
Minahasa**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	74,37	74,59	74,97	75,47	75,29

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Universal Child Immunization (UCI) mencapai 73,59% Tahun 2015. dari semua desa dan kelurahan yang ada. terus meningkat sampai pada tahun 2019 pada 75,47%. sehingga belum mencapai target nasional dimana setiap desa 100% UCI.

g. Prevalensi Stunting

Masalah Stunting di Kabupaten Minahasa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa, dimana menjadi fokus untuk menurunkan angka jumlah kasus.

Di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2016 Prevalensi Stunting di Kabupaten Minahasa sebesar 24 %, tahun 2017 naik sebesar 37,6 % dan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan masing-masing sebesar 20,12% dan 15,8 %. Untuk tahun 2020 dari jumlah sasaran 23.875 balita yang dilakukan pengukuran hanya 5.691 balita atau 23 %. Hasil pengukuran dari 5.691 balita terdapat 177 balita Stunting atau 3,1 %. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 2.24 angka prevalensi stunting dibawah ini

Tabel 2.24 Tabel Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa

NO.	TAHUN	PREVALENSI STUNTING (%)	SUMBER
1.	2016	24	SURVEI PSG
2.	2017	37,6	SURVEI PSG
3.	2018	20,12	REISKESDAS
4.	2019	15,8	SSGBI
5.	2020	3,1	EPPGBM

7. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah penduduk miskin terus berkurang dari 27.640 jiwa atau 8,36 persen pada tahun 2016 terus turun menjadi 24.320 jiwa atau 7,18 persen pada Tahun 2019. Turunnya jumlah penduduk miskin secara otomatis mengurangi angka pengangguran, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang mana jumlah pengangguran pada tahun 2016 berjumlah 14.203 orang (9,20 persen) menurun pada tahun 2019 menjadi 9.937 orang secara persentase turun menjadi 5,88 persen (Tabel 2.25).

Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Kabupaten Minahasa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Jumlah Pddk Miskin	Jumlah Pengangguran	% TPT
2016	27.640	8,36	14.203	9,20
2017	26.340	7,90	10.927	6,91
2018	24.490	7,30	12.799	7,35
2019	24.320	7,18	9.937	5,88
2020	24.950	7,30	10.671	6,30

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

8. Kesempatan Kerja

Kabupaten Minahasa mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang Pertanian. Kehutanan. Peternakan dan Perikanan. Hal ini di ditunjukkan pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26 TPAK Menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2019
Kabupaten Minahasa**

Lapangan Pekerjaan Utama *)	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42.275	8.122	50.397
Pertambangan dan Penggalian	800	-	800
Industri Pengolahan	8.272	4.037	12.309
Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.441	-	1.441
Konstruksi	9.791	-	9.791
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	12.474	15.351	27.825
Transportasi Dan Pergudangan	10.598	495	11.093
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.048	5.021	7.069
Informasi dan Komunikasi	560	176	736
Jasa Keuangan dan Asuransi	547	922	1.469
Real Estat, Jasa Perusahaan	2.161	508	2.669
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.165	4.572	11.737
Jasa Pendidikan	2.511	7.127	9.638
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	917	4.340	5.257
Jasa Lainnya	2.462	4.224	6.686
JUMLAH	104.022	54.895	158.917

Sumber : Kabupaten Minahasa dalam Angka. Tahun 2020

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa lapangan kerja yang terbesar adalah sektor pertanian sejumlah 50.397 orang atau sebesar 31.72 persen dari jumlah total penduduk yang bekerja, sedangkan bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejumlah 7.069 orang atau sebesar 4.45 persen. Paling sedikit adalah yang bekerja di sektor Informasi

dan Komunikasi hanya 736 orang. Jumlah laki- laki yang bekerja lebih dominan dibandingkan dengan perempuan di Kabupaten Minahasa mencapai 65,46 persen.

9. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Salah satu penyakit masyarakat yaitu minuman keras dan aksi premanisme dapat memberikan potensi terjadi tindak kriminal penganiayaan dan kecelakaan lalu-lintas. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. dan tahun 2012 sebesar 0,09 pada tahun 2015 menjadi 0,13 (Tabel 2.27).

**Tabel 2.27 Angka Kriminalitas Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Minahasa**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba					
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	7	7	N/a	3	10
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	19	11	N/a	30	52
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	253	293	N/a	165	290
5.	Jumlah kasus Pencurian	75	89	N/a	74	92
6.	Jumlah kasus Penipuan	31	39	N/a	30	52
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang			N/a	0	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	285	439	N/a	302	496
9.	Jumlah Penduduk		335.321	338.364	341.176	347.290
	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,09	0,13	0	0,09	0,14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja. Tahun 2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi budaya yang memiliki budaya bermusyawarah. seperti yang dilakukan sejak tahun 1428 di Watu Pinabetengan. Para leluhur "TOU" Minahasa telah bermusyawarah dan sepakat untuk menyebar di seluruh Tanah Minahasa dengan semboyan "Esa Kita Sumerah. Sumerah Kita To Esa". Di tanah Minahasa terdapat 5 (lima) Suku Besar yang dikenal dengan Pakasan yaitu Toulour, Tountemboan, Tonsea, Tombulu dan Tonsawang dengan karakteristik seni dan budaya yang beraneka ragam. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dapat dilaksanakan terhadap indikator-indikator diantaranya jumlah grup kesenian (Tabel 2.28). Jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga masih sangat minim, dengan koefisien 0,0122 untuk klub olahraga dan 0,0028 untu gedung olahraga, maka pada tahun mendatang perlu dibangun fasilitas gedung olahraga (Tabel 2.29).

Tabel 2.28 Jumlah Grup dan Gedung Kesenian 2016-2020

No	Cakupan Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian/10.000 pddk	4,01	3,90	3,90	3,90	3,90
2	Jumlah gedung Kesenian/10.000 pddk	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Tahun

Tabel 2.29 Jumlah Klub dan Gedung Olahraga 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Cakupan Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga / 10.000 pddk.	15,23	15,81	0,0097	0,0115	0,0122
2	Jumlah gedung olahraga/10.000 pddk.	13,42	14,03	0,0073	0,0079	0,0028

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Kabupaten Minahasa yang dikenal dengan sebutan daerah atlet. memiliki banyak klub di tahun 2020 yang diantaranya klub bola volly (15), bulutangkis (8), olahraga catur (7), dan sepak bola (35) yang merupakan olahraga yang paling banyak diminati masyarakat. Namun fasilitas gedung dan lapangan olahraga sangat minim yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.27 dan wadah olahraga KONI belum berjalan sebagaimana mestinya.

Jumlah lapangan olahraga untuk berbagai cabang olahraga ditunjukkan pada Tabel 2.30. Dari tahun 2016-2020 terjadi peningkatan yang cukup tinggi jumlah lapangan olahraga tersebut.

Tabel 2.30 Jumlah Lapangan Olahraga 2016- 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepak bola	21	18	19	20	22
2	Bulu tangkis	16	56	56	60	62
3	Tenis lapangan	11	8	8	8	8
4	Tenis meja	15	15	15	15	15
5	Renang	2	2	2	2	2
6	Atletik	3	3	3	3	4
7	Tinju	2	2	3	3	5
8	menembak	1	1	1	1	1
9	Bola Volly	6	6	8	10	12
	Jumlah	77	111	115	122	131

Jumlah klub olahraga untuk berbagai cabang olahraga ditunjukkan pada Tabel 2.31. Dari tahun 2016-2020 terjadi peningkatan yang cukup tinggi jumlah klub olahraga tersebut.

Tabel 2.31 Jumlah Klub Olahraga 2016- 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepak bola	30	30	32	32	35
2	Bulu tangkis	6	6	7	8	8
3	Tenis lapangan	4	4	4	4	4
4	Tenis meja	2	2	5	5	8
5	Catur	3	3	3	3	7
6	Renang	1	1	1	1	3
7	Drum Band	17	17	20	27	29
8	Atletik	4	4	4	4	6
9	Tinju	4	4	4	4	4
10	Menembak	1	1	1	1	3
11	Bola Volly	6	6	8	10	15
	Jumlah	78	78	89	99	122

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Jumlah Gedung kesenian dan grup kesenian tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.32. Grup kesenian paling banyak yaitu grup musik kulintang dari 13 cabang kesenian di Kabupaten Minahasa.

**Tabel 2.32 Jumlah Gedung Kesenian dan Grup Kesenian 2020
Kabupaten Minahasa**

No	Nama Cabang Kesenian	Jumlah Grup	Jlh. Gedung Kesenian
1	Musik Bambu/Klarinet	29	
2	Musik Kolintang	30	
3	Keroncong Tradisional	0	
4	Orkes/Orkestra	8	
5	Group Seruling	0	
6	Cakalele/Kabasaran	23	
7	Maengket	27	
8	Katrili dan Tari Jajar	15	
9	Masamper	4	
10	Koor/Vocal Group	8	
11	Gerak dan Lagu	4	
12	Seni Rupa	3	
13	Opera/Teater	2	
	Jumlah	153	4

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut Aspek Pelayanan Umum ini menjelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek Pelayanan umum difokuskan pada layanan urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan

Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Dimana pengetahuan dan pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi

keputusan seseorang untuk berperilaku sehat.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. yaitu dengan mencanangkan berbagai program seperti program wajib belajar. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Berikut tabel APS di Kabupaten Minahasa (Tabel 2.33).

Tabel 2.33 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

TAHUN	APS-SD	APS-SMP
2016	909,56	875,2
2017	919	671,9
2018	98,92	99,49
2019	78,98	93,06
2020	92,2	54,5

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

APS tertinggi pada tahun 2016 adalah APS SD/MI mencapai 909,56 sedangkan APS SMP/MTs sebesar 875,2. Tingkat SMA saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. namun data menunjukkan bahwa untuk APS SMA/SMK/MA adalah 686,9.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah sejak tahun 2016 sampai 2020 untuk level SD dan SMP terus meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016 s.d 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1	Jumlah Gedung Sekolah	342	343	344	344	347
1	Jumlah Siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	28859	23352	27442	27069	27206
1	Rasio	118,51	146,88	125,36	127,08	127,55
2	SMP/MTs					
2	Jumlah Gedung Sekolah	102	102	102	102	108

2	Jumlah Siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jejang pendidikan SMP/MTs	11031	8848	13769	13805	13238
2	Rasio	92,47	115,28	74,08	73,89	81,59

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2021

3) Rasio Ketersediaan Guru Tahun 2020

Jumlah guru sebanyak 2.433 guru SD/MI dan jumlah murid sebanyak 28.02 orang (rasio guru/murid 12). Jumlah guru SMP/MTs sebanyak 1.103 orang dan murid sebanyak 14.302 orang (rasio guru/murid 13). Jumlah guru SMA/SMK sebanyak 586 orang dengan jumlah murid sebesar 8.456 orang (rasio guru/murid 15) (Tabel 2.35).

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
2	Jumlah Guru	1795	2514	2162	2492	2549
3	Jumlah Siswa kelompok yang bersekolah di jejang pendidikan SD/MI	33479	30133	30428	28112	27206
4	Rasio	536.16	834.30	710.53	886.45	936.93
5	SMP/MTs	1061	1139	1038	1151	1177
6	Jumlah Guru	14711	14678	14582	13925	13238
7	Jumlah Siswa kelompok yang bersekolah di jejang pendidikan SMP/MI	1061	1139	1038	1151	1177
8	Rasio	721.23	775.99	711.84	826.57	889.11

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.36 Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/a	N/a	60,16%	66,10%	66,20%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/a	N/a	79,50%	80,99%	92,18%
3	Angka rata-rata lama sekolah	9,54	9,55	9,56	9,58	9,59
4	Angka Partisipasi Kasar	26%	34%	60,16%	66,1%	66,2%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Angka pendidikan yang ditamatkan	100%	100%	87%	91,35%	91,45%
6	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	95,2%	91%	89,50%	78,99%	92,18%
7	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74,5%	66,2%	66,12%	56,54%	54,20%
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106.54	101.64	103,10%	92,20%	92,25%
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103%	107,2%	108%	97,54%	90,47%
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	98,64	99,75	98,92%	78,98%	92,20%
11	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	93,47	96,53	66,12%	56,54%	54,20%
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.04	0.05	0,12%	0,10%	0,05%
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.05	0.04	0,04%	0,15%	0,07%
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,8	100	100	100	100
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,8	100	100	100	100
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
18	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C	1054	1211	1616	1284	1218
19	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	25%	35%	0,31	0,32	0,33
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:13	1:11	1:25	1:27	1:31
21	Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	140,41	139,42	140,43	143,24	147,45
22	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	90.95	97.89	98,75	98,95	99,02
23	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,55%	99,05%	99,45	99,66	99,83
24	Nilai IKM Dinas Pendidikan					
25	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	67,3	71,9%	80,81%	84,1%	85,6%
26	Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan satuan pendidikan dasar	0	0	0	0	0
27	Persentase Guru bersertifikasi pendidik	45,2%	56,9%	84,54%	86,24%	86,24%
28	Persentase Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memiliki ijin	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan

Sarana dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Minahasa tersedia dalam mendukung jaringan pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, didukung oleh pelayanan dokter praktek dan pada tingkat terbawah terdapat posyandu yang dikelola berdasarkan peran serta masyarakat. Kabupaten Minahasa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas pelayanan yang semakin baik, maka diupayakan pula peningkatan peran aktif masyarakat, diantaranya melalui pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskedes), serta berupaya menciptakan Desa Siaga Aktif. Desa siaga aktif 38 desa.

1) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Minahasa terus berkembang dan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 rasio posyandu per-satuan balita adalah 1.41 (memenuhi). Hanya terdapat peningkatan jumlah posyandu sebanyak 4 unit dari 306 pada tahun 2016 menjadi 310 tahun 2017 dan pada tahun 2020 turun menjadi 296 posyandu. Sedangkan jumlah balita menurun sebanyak 6 balita (Tabel 2.37).

Tabel 2.37 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	306	310	296	296	296
2.	Jumlah Balita	24.811	24.427	24.284	22.880	20.976
3.	Rasio	1,23	1,27	1,22	1,29	1,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah puskesmas Telah mengalami perubahan yang dimana sebelumnya pada tahun 2016 berjumlah 22 hingga tahun 2020 menjadi 23, sedangkan jumlah klinik mengalami peningkatan dan pustu mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tabel 2.38).

Tabel 2.38 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	22	22	22	22	23
2.	Jumlah Klinik	9	9	9	11	11
3.	Jumlah Pustu	42	42	42	38	38
4.	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	338.368	341.176	343.966
5.	Rasio Puskesmas / 100.000 pdk	6,62	6,56	6,50	6,45	6,69
6.	Rasio Klinik / 100.000 pdk	2,71	4,18	2,66	3,22	3,20
7.	Rasio Pustu / 100.000 pdk	12,64	12,53	12,41	11,14	11,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 6.62 persen rasio puskesmas dan pustu per 100.000 penduduk mengalami penurunan selang tahun 2016-2020. Secara rinci rasio puskesmas/100.000 penduduk naik 0,07 dan rasio pustu/100.000 penduduk turun 1.59. sedangkan rasio klinik/100.000 penduduk meningkat 0.49 (Tabel 2.39).

Tabel 2.39 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Klinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 x 1000)	(6)	(7=6/3 x 1000)	(8)	(9=8/3 x 1000)
1.	Eris	16.967	1	0,06	0	0,00	2	0,12
2.	Kakas	12.913	1	0,08	0	0,00	1	0,08
3.	Kakas Barat	73.12	1	0,14	0	0,00	0	0,00
4.	Kawangkoan							
5.	Kawangkoan Barat	8.660	1	0,12	0	0,00	3	0,35
6.	Kawangkoan Utara	20.119	1	0,05	1	0,05	2	0,10
7.	Kombi	11.747	1	0,09	0	0,00	2	0,17
8.	Langowan Barat	16.080	1	0,06	0	0,00	1	0,06
9.	Langowan Selatan	7.422	1	0,13	0	0,00	2	0,27
10.	Langowan Timur	13.389	1	0,07	2	0,15	0	0,00
11.	Langowan Utara	5.685	1	0,18	0	0,00	1	0,18

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Klinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 x 1000)	(6)	(7=6/3 x 1000)	(8)	(9=8/3 x 1000)
12.	Lembean Timur	10.254	1	0,10	0	0,00	0	0,00
13.	Pineleng	30.134	1	0,03	0	0,00	1	0,03
14.	Mandolang	19.518	1	0,05	0	0,00	1	0,05
15.	Remboken	11.283	1	0,09	1	0,09	2	0,18
16.	Sonder	18.604	1	0,05	0	0,00	2	0,11
17.	Tombariri	18.013	1	0,06	0	0,00	0	0,00
18.	Tombariri Timur	10.439	1	0,10	0	0,00	3	0,29
19.	Tombulu	17.417	1	0,06	0	0,00	4	0,23
20.	Tompaso	15.188	1	0,07	1	0,07	3	0,20
21.	Tompaso Barat							
22.	Tondano Barat				3			
23.	Tondano Selatan	42.703	1	0,02	1	0,02	5	0,12
24.	Tondano Timur	15.471	1	0,06	1	0,06	0	0,00
25.	Tondano Utara	11.858	1	0,08	1	0,08	0	0,00
	Jumlah		22		11		38	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2021

3).Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Berikut ini disajikan jumlah sarana kesehatan. ratio puskesmas. poliklinik dan pustu per-satuan penduduk tahun 2019 dengan ratio 21,77 (memenuhi), dan rasio rumah sakit per-satuan penduduk sebesar 1,26 (memenuhi). Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit/100.000 penduduk. Berikut ini ditampilkan data sarana prasarana kesehatan di kabupaten Minahasa (Tabel 2.40).

Tabel 2.40 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah RSU (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah RS Jiwa / Paru dan Penyakit Lainnya	0	0	0	0	0
3.	Jumlah RS AD / AD / AU / AL / POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1

5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	4
6.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	4	4	4	4	3
7.	Jumlah Penduduk	32.190	335.321	338.368	341.176	343.966
	Rasio / 10.000 Penduduk	1,00	1,19	1,18	1,17	1,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

Dalam 5 (lima) tahun memang tidak terdapat peningkatan jumlah RSU (pemerintah). RS Daerah. dan RS Swasta. akibatnya rasio RS per 10.000 penduduk mengalami kenaikan dari 1,00 pada tahun 2016 menjadi 1,45 tahun 2020.

Total jumlah rumah sakit di Kabupaten Minahasa masih stagnan dan sudah memenuhi standard minimal, hanya memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Tabel 2.41).

Tabel 2.41 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Minahasa

No	Sarpras	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Sakit	4	4	4	4	5
2.	Puskesmas	22	22	22	22	23
3.	Pustu	42	42	42	35	42
4.	Posyandu	304	310	296	310	296
5.	Poskesdes	41	41	41	41	41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2021

4). Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada selebihnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No.	Kecamatan	Jmlh Penduduk (Ribu Jiwa)	Jmlh Dokter*	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Eris	13,6	5	3,68
2.	Kakas	16,6	3	1,81
3.	Kakas Barat	8,1	2	2,47
4.	Kawangkoan	8,8	1	1,14
5.	Kawangkoan Barat	7,4	1	1,35
6.	Kawangkoan Utara	9,3	0	0,00
7.	Kombi	10,5	2	1,90
8.	Langowan Barat	8,7	3	3,45

No.	Kecamatan	Jmlh Penduduk (Ribu Jiwa)	Jmlh Dokter*	Rasio
9.	Langowan Selatan	9	1	1,11
10.	Langowan Timur	19,5	4	2,05
11.	Langowan Utara	18,2	4	2,20
12.	Lembean Timur	10,4	2	1,92
13.	Pineleng	30,3	4	1,32
14.	Mandolang	19,3	2	1,04
15.	Remboken	21,7	2	0,92
16.	Sonder	21,6	2	0,93
17.	Tombariri	17,9	4	2,23
18.	Tombariri Timur	12,8	2	1,56
19.	Tombulu	12,6	2	1,59
20.	Tompaso	11	2	1,82
21.	Tompaso Barat	8,5	0	0,00
22.	Tondano Barat	12	7	5,83
23.	Tondano Selatan	11,5	3	2,61
24.	Tondano Timur	15,1	3	1,99
25.	Tondano Utara	13	4	3,08
	Jumlah	347,3	65	47,99

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2021

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan (Tabel 2.43).

Tabel 2.43 Jumlah Dokter Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Dokter	86	65	140	79	144
2.	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	338.368	341.176	343.966
3.	Rasio	25,89	19.38	41.38	23.16	41,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.2021

Data menunjukkan bahwa jumlah dokter mengalami Kenaikan dari 86 dokter pada tahun 2016 menjadi 144 dokter pada tahun 2020

meskipun di tahun 2017 dan 2019 kembali menurun, disatu sisi terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.

Hal ini berarti terjadi kenaikan rasio dokter per saruan penduduk dari 25,89 tahun 2016 menjadi 41,86 tahun 2020. Jumlah dokter per kecamatan menunjukkan bahwa penyebarannya tidak merata, karena dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa terdapat 2 (dua) kecamatan yang tidak memiliki dokter yaitu di Kecamatan Kawangkoan Utara dan Kecamatan Tompaso Barat.

5). Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa terus bertambah dari tahun ke tahun walaupun dari terdapat beberapa unsur yang belum mencapai standar (Tabel 2.44).

Tabel 2.44 Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Sarpras	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Spesialis	16	21	21	-	-
2.	Dokter Umum	68	40	102	67	129
3.	Dokter Gigi	2	4	7	12	15
4.	Perawat	258	286	306	177	537
5.	Bidan	149	139	122	134	202
6.	Tenaga Farmasi	27	5	42	17	20
7.	Apoteker	2	4	-	-	39
8.	Asisten Apoteker	-	-	-	-	-
9.	Sarjana Kesmas	10	7	24	35	74
10.	Sanitarian	54	40	44	27	30
11.	Tenaga Gizi	8	10	23	24	20
	Tenaga Medis	594	556	691	493	1.066

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

Secara keseluruhan terdapat kenaikan jumlah tenaga medis di Kabupaten Minahasa dari 594 orang pada tahun 2016 menjadi 691 orang tahun 2018 dan berkurang menjadi 493 tenaga medis dan pada tahun 2019 kemudian kembali meningkat menjadi 1.066 tenaga medis pada tahun 2020. Kenaikan ini jika dilihat berdasarkan data yang ada terutama karena bertambahnya dokter umum, perawat, dan apoteker.

Berikut ini ditampilkan tabel rasio sarana prasarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa (Tabel 2.45).

Tabel 2.45. Rasio Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu/Sat Balita	1,23	1,27	1,22	1,49	1,41
2	Rasio RS/Satuan Pddk	1	1,12	1,18	1,27	1,45
3	Rasio Dokter/Satuan pddk	0,65	1,19	1,27	1,26	4,18
4	Rasio Tenaga Keperwtan/Sat pddk	2,6	3,5	3,1	3,1	15,6
5	Angka Harapan Hidup	70,40	70,46	70,67	70,98	71,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Data menunjukkan bahwa untuk bidang kesehatan terjadi penurunan pada rasio RS per satuan penduduk. sebaliknya terjadi peningkatan pada rasio dokter per satuan penduduk dan angka harapan hidup.

Tabel 2.46. Data Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			43%	131,86%	40,35%
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	104.7%	104.7%	98,19%	108,22%	98,28%
3	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92.4%	93.1 %	94,79%	97,06%	92,89%
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	419 (56.2%)	557(77.8%)	97,02%	104,3%	91,34%
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	88,8%	113,14%	70,55%	96,73%	21,4%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,83%	75,99%	35,04%	94,79%	44,91%
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	N/a	N/a	100,35%	40,89%
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	N/a	N/a	95,77%	58,96%
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	N/a	32,33%	105,17%	118,58%
10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	N/a	N/a	103,94%	96,61%
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/a	N/a	N/a	111,26%	47,89%
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	N/a	N/a	N/a	7,8%	15,30%
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	31	29	5.35/1.000 KH	6.97/1.000 KH	1.5/1.000 KH

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	7	4	61.7/100.000 KH	102.56/100.000 KH	150.15/100.000 KH
15	Prevalensi Stunting	N/A	24%	0,68%	1,63%	3,11%%
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	151.3%	108.2%	87%	90%	92%
17	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0	0	100%	100%	100%
18	Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	104,6%	114%	92%	93%	94%
19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	2	2	≥2	<2
20	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)			49,77	110,8	103
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
22	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	91,08%	92%	93%
23	Angka kejadian Malaria	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰
24	Tingkat kematian akibat Malaria	0	0	0	0	0
25	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	199,2%	100%	100%	73%
27	Cakupan pelayanan nifas	95.4 %	103%	83%	85%	88%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
28	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
29	Nilai IKM Dinas Kesehatan			B	B	B
30	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	83,7%	89,6%	91,1%	96,6%	86,36%
31	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	N/A	N/A	46,30%	50%	100%
32	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	N/A	4	8	8	0
33	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
34	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1	1.19	1.18	1.17	1.45
35	<i>Persentase Tenaga Kesehatan Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	114,93%
36	<i>Persentase Petugas Pelayanan Publik Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	73,7%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
37	Persentase Masyarakat Umum Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	N/A	N/A	N/A	N/A	30,64%
38	Persentase Lansia Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	N/A	N/A	N/A	N/A	26,13%
39	Persentase Anak 12-17 Tahun Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	N/A	N/A	N/A	N/A	31%

c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

1) Jalan

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan pada beberapa indikator makro yaitu:

a) Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, yang definisi secara kualitatif.

b) Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan sampai tahun 2020 adalah baik 360.1 km, sedang 112.76 km, rusak 124.5 rusak berat 83.79 km (Tabel 2.47).

Tabel 2.47 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Km				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	295,65	305,16	313,6	326,1	360,1
2	Kondisi Sedang	119,91	129,42	103,95	117,75	112,76
3	Kondisi Rusak	92,84	103,35	94,7	154,5	124,5

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Km				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Kondisi Rusak Berat	58,45	143,22	168,90	82,80	83,79
	Total Panjang Jalan	567	681,15	681,15	681,15	681,15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

Data jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 687 Tahun 2012 tentang Penetapan ruas-ruas jalan Kabupaten Minahasa. Adapun data Jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 249 tahun 2017 tentang Penetapan ruas-ruas jalan Kabupaten Minahasa.

Indikator perubahan kondisi jalan per tahun disebabkan oleh kelebihan kapasitas muatan, cuaca, dan peningkatan arus lalu lintas yang diperkirakan sebesar 5% per tahun.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan yaitu 360,1/681,15 sebesar 0,53 pada Tahun 2020.

2) Sumber Daya Air dan Irigasi

Kabupaten Minahasa memiliki sumberdaya pengairan, sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya. Beberapa sumberdaya air terdiri dari: sungai, Rawa, Danau, Pantai dan Irigasi. Terdapat beberapa sungai yakni: Sungai Tondano, Tikala, Kuma dan Sukuyon, juga terdapat Danau Tondano. Terdapat juga beberapa Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten Minahasa. Rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan
1	Jaringan Primer	57.274 m
2	Jaringan Sekunder	176.771 m
3	Jaringan Tersier	6.929 m
4	Luas Lahan Budidaya	7.411 Ha
	Rasio	0,0033

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Data menunjukkan bahwa rasio jaringan irigasi pada tahun 2020 adalah 0.0033 dimana paling panjang adalah jaringan sekunder diikuti oleh panjang jaringan primer.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi (PJI) terhadap luas lahan budidaya. PJI meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Didalam pengelolaan jaringan irigasi. tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas, Efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR), Efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA), Tingkat efisiensi akan diukur dari nilai Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR maka pengelolaan irigasi semakin efisien. Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR, PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi. dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar.

3). Air Minum dan Air Limbah Domestik

Layanan air minum dan sanitasi/air limbah merupakan salah satu layanan urusan wajib di Dinas PUPR dan merupakan salah satu layanan yang wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Penerapan SPM di bidang Air minum dan Sanitasi di Kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

- *Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.* Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Pelayanan Dasar adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.
- *Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.* Mutu

Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Penerima layanan adalah dan Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

a. Air minum

Kondisi penyediaan air minum saat ini : tingkat pelayanan, cakupan pelayanan air minum pada daerah perkotaan baru mencapai 40 % yang meliputi sistem perpipaan sebanyak 60% dan sistem non perpipaan yang terlindungi sebanyak 40%, diperkirakan masih terdapat masyarakat miskin di perkotaan yang belum terlayani air minum. Masih terdapat 4 ibu kota kecamatan yang rawan air minum dan 62 desa rawan air minum. Dalam meningkatkan derajat kesehatan, penyediaan air bersih merupakan hal utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keberadaan PDAM ikut menjaga kualitas air bersih, dari keluarga diperiksa 59.888 dari 73.155 kk (81.86%) dengan akses air bersih seperti ledeng 55.90%. SGL 29.18%. Dari cakupan yang ada untuk akses air bersih secara keseluruhan sebesar 67% belum mencapai 85%. Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Permen PUPR tentang SPM. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa menunjukkan kinerja baik dalam penyediaan air minum dimana terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum. Dimana Pada tahun 2016 Rumah tangga yang berakses air minum sebesar 67, 25% dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 70,22%, tahun 2018 mencapai 72,62% dan pada tahun 2019 menjadi 90,96%. Untuk Rumah Tangga yang memiliki akses berkelanjutan air minum, Kabupaten Minahasa juga mengalami peningkatan dari Tahun ke tahun yaitu pada tahun 2016 sebesar 67,25% dan pada tahun 2020

sudah pada angka 90,33%. Akses berkelanjutan yang dimaksud adalah akses untuk mendapatkan air minum layak.

Secara rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dalam setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2.49).

Tabel 2.49. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Minahasa Tahun 2016–2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	67,25	70,22	72,62	90,96	90,33

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2021, BPS

Dari tabel tersebut nampak bahwa komposisi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak/berkelanjutan lebih besar dari yang tidak layak. BPS mendefinisikan air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Untuk mengukur pencapaian SPM air minum Kabupaten Minahasa, indikator yang digunakan adalah Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Capaian Kinerja Air Minum sesuai SPM dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.50 Capaian Kinerja SPM Air Minum Kabupaten Minahasa

Indikator	2018	2019	2020
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	78,6%	81,05%	82,48%

Dari data yang ada menunjukkan bahwa capaian SPM ini meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah rumah tangga yang terlayani terus meningkat. Hal ini berarti pelayanan penyediaan air minum sudah terlaksana dengan baik dan perlu untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik. Kuantitas yang dimaksud adalah setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. Sedangkan dari segi kualitas meliputi pelayanan akses dasar dan akses aman. Capaian kinerja layanan pengolahan air limbah ini juga dapat dilihat pada indikator persentase rumah tinggal berakses sanitasi. Namun untuk mengukur layanan SPM air limbah diukur dengan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten.

Kinerja layanan SPALD akses dasar di kabupaten Minahasa terlihat dari jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) individual dimana air limbah domestiknya terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat. Sesuai data BPS Provinsi Sulawesi Utara, persentase Rumah Tangga yang memiliki fasilitas BAB Kabupaten Minahasa mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 85,70% padahal pada tahun 2018 sudah mencapai 94,16% dan naik menjadi 96,95% pada tahun 2019. Hal ini berarti hingga tahun 2020 masih terdapat 15,30% RT yang belum memiliki akses dasar layanan sanitasi.

Selain layanan akses dasar terdapat juga layanan sanitasi layak melalui SPALDS dan SPALDT. Persentase Rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga

yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut di gunakan oleh rumah tangga sendiri atau Bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sedangkan yang dimaksud dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sehingga dapat dikatakan bahwa layanan air limbah domestik akses aman termasuk pada akses sanitasi layak. Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Utara (2021) Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak di Kabupaten Minahasa dari tahun 2016 adalah 67,21% sampai dengan tahun 2018 terus meningkat yaitu 69,55% dan 83,34%, namun ditahun 2019 menurun menjadi 79,21% dan meningkat Kembali pada tahun 2020 menjadi 88,03%.

Di Kabupaten Minahasa sebenarnya sudah terbangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLT). IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sayangnya IPLT ini belum beroperasi dan status keberadaannya sedang dalam proses untuk serah terima pengelolaan.

Kinerja SPM layanan air limbah domestik kabupaten Minahasa diukur dengan indicator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Adapun capaian kinerja air limbah domestik tersebut dapat dilihat pada tabel 2.51 Berikut ini.

Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 s.d Tahun 2020.

Indikator	2018	2019	2020
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,3%	69,1%	69,78%

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu fasilitas air bersih, pembuangan

tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah (Tabel 2.52).

Tabel 2.52 Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	67.026	54.591	74,231	82.291	74,193
2	Jumlah rumah tinggal	76.977	73.395	84,850	84.859	85,408
3	Persentase	87,07	74.38	87	96.97	87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

4). Pengembangan Kawasan

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria: lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Tabel 2.53).

Tabel 2.53 Rasio Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	106.517,30
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	293
3	Luas Wilayah Perkotaan	7.319,30
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,94

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

a) Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata dapat disusun Tabel 2.54.

Tabel 2.54 Persentase Luas Permukiman yang tertata Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Area Permukiman Tertata (ha)	4.731	5.074	5000.66	5000.66	5000.66
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (ha)	5.567	5.901	n/a	n/a	13282.44
3	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata	85%	86%	n/a	n/a	37.65%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

5). Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Tabel 2.55).

Tabel 2.55 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jmlah Bangunan Ber- IMB	Rasio Bangunan ber-IMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Eris	2.651	16	0,006
2	Kakas	3.452	23	0,007
3	Kakas Barat	2.663	7	0,003
4	Kawangkoan	2.857	192	0,067
5	Kawangkoan Barat	2.433	42	0,017
6	Kawangkoan Utara	2.331	16	0,007
7	Kombi	3.013	12	0,004
8	Langowan Barat	4.711	64	0,014
9	Langowan Selatan	2.295	3	0,001
10	Langowan Timur	3.318	38	0,011
11	Langowan Utara	2.293	12	0,005
12	Lembean Timur	2.734	7	0,003

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jmlah Bangunan Ber- IMB	Rasio Bangunan ber-IMB
13	Pineleng	12.105	809	0,067
14	Mandolang	4.697	340	0,072
15	Remboken	2.476	21	0,008
16	Sonder	4.585	50	0,011
17	Tombariri	7.513	104	0,014
18	Tombariri Timur	5	5	1,000
19	Tombulu	4.679	1491	0,319
20	Tompasor	4.606	23	0,005
21	Tompaso Barat	2.344	3	0,001
22	Tondano Barat	5.079	186	0,037
23	Tondano Selatan	4.228	317	0,075
24	Tondano Timur	3.722	51	0,014
25	Tondano Utara	3.253	178	0,055
	Jumlah	94.043,00	4.010.00	0,043

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Tabel 2.56).

Tabel 2.56 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.958	2.222	2.628,19	3.232,19	4.010,19
2	Jumlah Bangunan	72.997	84.390	92.645,00	93.249	94,043
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,027	0,026	0,028	0.035	0.043

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.57 Data Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	N/A	N/A	68.80%	68,8%	75%
2	Persentase luas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	N/A	N/A	N/A	68.80%	75%
3	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	N/A	N/A	N/A	87.20%	90.50%
4	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Ratio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	N/A	N/A	N/A	27.84%	28.96%
7	Tingkat ketaatan terhadap Tata Ruang	N/A	N/A	N/A	71.05%	73%
8	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi darat	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	N/A	N/A	61.30%	65.16%	69.42%
10	Persentase layanan Pengelolaan Dumber daya air (Irigasi), drainase dan persampahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	N/A	N/A	3.63	3,94%	4,77%
12	Persentase Panjang Drainase Primer Dan	N/A	N/A	N/A	52.15%	52.15%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Sekunder Dalam Kondisi Baik					
13	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	N/A	N/A	N/A	7.43%	11%
14	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	N/A	N/A	61,47%	62,19%	62,80%
15	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	N/A	N/A	78,6%	81,05%	82,48%
16	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	68,3%	69,1%	69,78%
17	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	N/A	N/A	C	CC	B
18	Nilai IKM Dinas PUPR	N/A	N/A	B	B	B

d. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

1). Rasio rumah layak huni

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan, baik lingkungan fisik, biologi maupun sosial budaya. Kondisi kesehatan lingkungan berhubungan erat dengan kondisi perumahan. Jumlah rumah layak huni tahun 2021 sebesar 68.793 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 60.494. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Tabel 2.58).

Tabel 2.58 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah	79.966	86.060	86.545	87.082	82.862
2.	Jumlah Rumah Layak Huni	60.494	67.201	67.686	68.223	68.793
3.	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	338.364	342.110	343.564
4.	Rasio Rumah Layak Huni thd Jumlah penduduk	0,18	0,20	0,20	0,20	0,21

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2). Rasio Permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman (Tabel 2.59).

Tabel 2.59 Rasio Permukiman Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Permukiman Perkotaan	14.520
2.	Luas Permukiman Layak Huni	7.260
3.	Rasio Permukiman Layak Huni thd Luas Permukiman	0.5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Urusan Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga memiliki Standar Pelayanan Minimal yang merupakan layanan wajib yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi SPM Perumahan Rakyat adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten;
2. Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua jenis layanan SPM tersebut di Kabupaten Minahasa pada dasarnya belum terlaksana. Hingga pada tahun 2021 hal yang dilakukan adalah pendataan jumlah rumah yang terdampak korban bencana. Sedangkan untuk jenis layanan SPM untuk relokasi program pemerintah

belum terlaksana karena hingga tahun 2021 belum ada kegiatan pemerintah Kabupaten Minahasa yang menyebabkan perlunya relokasi rumah warga.

Tabel 2.60 Data Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	NA	NA	30%	30%	27%
2	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA
3	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	NA	NA	89%	90%	91%
5	Prosentase pemukiman kabupaten yang tertangani untuk mencegah tumbuh kembangnya kawasan kumuh	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	NA	NA	90%	91%	92%

e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk Tabel 2.61.

**Tabel 2.61 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Polisi pamong praja	144	157	172	197	236
2	Jumlah penduduk	332.190	335.321	338.370	341.180	347.290
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,0433	0,0468	0,051	0,058	0,068

Sumber : Kantor Satpol PP. Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1). Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Jumlah Limnas Per 10.000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Limnas	2.374	2.498	2498	2498	2498
2	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	338.364	341.176	347.290
3	Rasio Jumlah Limnas per 10.000 Penduduk	0,715	0,745	0,738	0,738	0,72

Sumber : Kantor Satpol PP. Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif .

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2). Rasio Pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Adapun Tabel 2.63 rasio jumlah pos Siskamling per kecamatan tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.63 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

NO	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio
(1)	(2)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(15)	(16)	(17=15/16)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)	(18)	(19)	(20=18/19)
1	Eris	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
2	Kakas	23	13	2	23	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2
3	Kakas Barat	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
4	Kawangkoan	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
5	Kawangkoan Barat	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
6	Kawangkoan Utara	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
7	Kombi	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2
8	Langowan Barat	32	16	2	32	16	2	32	16	2	32	16	2	32	16	2
9	Langowan Selatan	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
10	Langowan Timur	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
11	Langowan Utara	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
12	Lembean Timur	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
13	Pineleng	28	14	2	28	14	2	28	14	2	28	14	2	28	14	2
14	Mandolang	24	12	2	24	12	2	24	12	2	24	12	2	24	12	2
15	Remboken	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
16	Sonder	38	19	2	38	19	2	38	19	2	38	19	2	38	19	2
17	Tombariri	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
18	Tombariri Timur	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
19	Tombulu	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
20	Tompaso	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
21	Tompaso Barat	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
22	Tondano Barat	18	9	2	18	9	2	18	9	2	18	9	2	18	9	2
23	Tondano Selatan	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
24	Tondano Timur	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
25	Tondano Utara	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
	Jumlah	540	270	2	540	270	2	540	270	2	540	270	2	540	270	2

Sumber: Badan Kesbangpol. Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

**Tabel 2.64 Data Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	84.03	91.06	92.31	84.43	85.22
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	5.3	8.9	7.5	7.5	9.6
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100
4	Presentase kerjasama pemeliharaan KANTRAN TIBMAS	100	100	100	100	100
5	Presentase pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat/PAT KO (Patroli Kota)	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Satpol PP. Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.65 Data Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	N/a	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran)	N/a	68.18%	58.82%	22.81%	69.57%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Kabupaten Minahasa dan Kabupaten/kota yang berbatasan	Kabupaten Minahasa dan Kabupaten/kota yang berbatasan	Kabupaten Minahasa dan Kabupaten/kota yang berbatasan	Kabupaten Minahasa dan Kabupaten/kota yang berbatasan	Kabupaten Minahasa dan Kabupaten/kota yang berbatasan
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	14 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
5	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	0.00%	2.06%	7.22%	9.28%	14.43%
6	Persentase Ketersediaan sarana pemadam kebakaran	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
7	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih dan sigap dalam upaya mitigasi bencana kebakaran	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.66 Data Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh	0	0	100%	92%	95%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana					
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	342.110 jiwa	50 Jiwa	10.000 jiwa
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	342,110 jiwa	4245 jiwa	4600 jiwa
4	Persentase menurunnya resiko bencana pada pusatpusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	0	0	95%	85%	75%
5	Persentase meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	0	0	50%	60%	70%
6	Cakupan penanganan musibah/bencana akibat kondisi iklim ekstrim (KARHUTLA)	0	0	100%	100%	100%
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan masyarakat tangguh bencana	0	0	100 masyarakat	200 masyarakat	300 masyarakat
8	Cakupan penanganan pemulihan daerah bencana	0	0	3 paket	5 Paket	11 paket

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	0	100%	100%	100%

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021

f. Urusan pemerintahan bidang sosial

Panti sosial masyarakat terbentuk atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial yang dilakukan secara sukarela. Panti asuhan anak merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar. Berdasarkan jumlah yang ada, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKS-A sebanyak 14 Panti. Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut Usia LKS-LU ada 11 Panti, sehingga keseluruhan berjumlah 25 Panti.

Jumlah klien LKS Anak berjumlah 651 klien, dengan rincian jumlah di dalam panti berjumlah 417 klien dan di luar panti berjumlah 234 klien. Sedangkan untuk Jumlah klien LKS-LU berjumlah 628 klien, dengan rincian di dalam panti berjumlah 108 klien dan di luar panti berjumlah 520 klien (Tabel 2.67).

Tabel 2.67 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa

2020						
No	Nama Panti	Jumlah Penghuni			Lokasi	Ket
		Dalam Panti	Luar Panti	Total		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak					
1	Lksa Dorkas	30	0	30	Kelurahan Liningaan Tondano Timur	
2	Lksa Mamre	31	0	31	Kelurahan Kiliar Tondano Timur	

3	Lksa ETTY	30	0	30	Kelurahan Wawalintouan Tondano Barat	
4	Lksa Febe	45	0	45	Kelurahan Tatataran Patar Tondano Selatan	
5	Lksa Kasih	15	0	15	Kelurahan Tonsaru Tondano Selatan	
6	Lksa Kabar Baik	20	0	20	Kelurahan Tounkuramber Tondano Barat	
7	Lksa Yakobus Peduli	25	0	25	Kelurahan Rinegetan Tondano Barat	
8	Lksa Rumah Iman Anak- Anak	48	0	48	Kelurahan Rerewokan Tondano Barat	
9	Lksa Kasih Sayang	30	0	30	Desa Talikuran Remboken	
10	Lksa Cinta Kasih	42	0	42	Desa Talikuran Remboken	
11	Lksa Maupusan	10	0	10	Desa Sendangan Remboken	
12	Lksa Yapi	45	0	45	Desa Tompasso 2 Tompasso Barat	
13	Lksa Melania	44	0	44	Desa Koyawas Langowan Barat	
14	Lksa Harapan Bangsa				Touliang Oki Eris	Tidak Aktif
15	Lksa Nurul Hidayah	40	0	40	Desa Sea 1 Pineleng	
16	Lksa Asuh Bina Didik Mercyville	9	0	9	Desa Sinuian Remboken	
17	Lksa Eliana	26	0	26	Desa Tountimomor Kakas Barat	
18	Lksa ash iksan	0	0	0	Kelurahan Kampung Jawa Tondano Utara	
19	Panti Sosial Abika	0	34	34	Desa Kolongan Atas 1 Sonder	
20	Panti Sosial Disabilitas Victoria	12	3	15	Desa Kalasey 2 Mandolang	
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia					
1	Lks-Lu Debora	20	150	170	Ling 2 Kelurahan Taler Tondano Timur	
2	Lks-Lu Ina I	22	150	172	Kelurahan Tounkuramber	
3	Lks-Lu Agape	21	0	21	Jln Bakti ABRI Ling 5	
4	Lks-Lu Yakobus Peduli	8	34	42	Ling 5 Kelurahan Rinegetan Tondano Barat	
5	Lks-Lu Pelita Hati				Desa Touliang Oki Eris	

6	Lks-Lu Pengasih	20	100	120	Jaga 1 Desa Leleko Remboken
7	Lks-Lu Elshaday	15	150	165	Jaga 3 Desa Talikuran
8	Lks-Lu Masawangan	10	100	110	Jln Raya Sendangan
9	Lks-Lu Hana	10	55	65	Jaga 3 Kayuwi Kawangkoan Barat
10	Lks-Lu Tabita	0	22	22	Jaga 2 Desa Tombasian
11	Lks-Lu Maitrili	3	0	3	Jln Kuala Salusem
12	Orsos Torang Samua Basudara	0	55	55	Ling 5 Rinegetan Tondano Barat
13	Orsos "BUKIT KASIH"	0	55	55	Desa Kanonang Satu Kec. Kawangkoan Barat
14	LKS-LU ASH IKHLAS	1	55	56	Lingk. II Kel. Kampung Jawa Kec. Tondano Utara
15	LKS-LU PELITA HATI				Desa Touliang Oki Kec. Eris

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

PMKS adalah seseorang, keluarga atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, Rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan keterlantaran kecacatan (disabilitas), ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana (Tabel 2.68).

Tabel 2.68 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2020

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	1
2	Anak Terlantar	245
3	Anak Yang berhadapan dengan Hukum	5
4	Anak Jalanan	
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	115

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	22
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3515
8	Lanjut Usia Terlantar	85
9	Penyandang Disabilitas	2255
10	Tuna Susila	11
11	Gelandangan	12
12	Pengemis	10
13	Pemulung	4
14	Kelompok Minoritas	7
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	20
16	Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)	
17	Korban Penyalahgunaan Napza	
18	Korban Trafiking	0
19	Korban Tindak kekerasan	
20	Pekerja Migran bermasalah Sosial (PMBS)	
21	Korban Bencana Alam	75 KK
22	Korban Bencana Sosial	25
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	
24	Fakir Miskin	
25	Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	
26	Komunitas Adat terpencil	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Pelaksanaan Program PKH sebagai upaya memberi perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin. Pada Jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perilaku peserta dalam perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Kemudian dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat menuntaskan rantai kemiskinan antar Generasi. Adapun Jumlah penerima PKH Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2019 (Tabel 2.69).

**Tabel 2.69 Jumlah Program Keluarga Harapan Kab Minahasa
Tahun 2016-2020**

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eris	395	375	595	558	511
2	Kakas	598	323	762	716	732
3	Kakas Barat	316	569	927	863	826
4	Kawangkoan	210	166	253	222	210
5	Kawangkoan Barat	184	200	279	259	263
6	Kawangkoan Utara	161	166	219	193	186
7	Kombi	361	333	428	413	379
8	Langowan Barat	418	405	841	803	780
9	Langowan Selatan	363	351	468	420	385
10	Langowan Timur	182	179	275	261	252
11	Langowan Utara	306	303	399	376	354
12	Lembean Timur	212	212	452	444	461
13	Mandolang	455	571	875	798	813
14	Pineleng	283	137	415	365	426
15	Remboken	329	311	776	649	754
16	Sonder	230	226	579	555	573
17	Tombariri	707	449	849	704	696
18	Tombariri Timur	267	494	725	684	657
19	Tombulu	221	208	433	362	371
20	Tompaso	214	187	283	248	217
21	Tompaso Barat	183	198	407	377	356
22	Tondano Barat	426	405	472	427	402
23	Tondano Selatan	212	210	416	402	375
24	Tondano Timur	424	410	633	559	533
25	Tondano Utara	218	208	335	321	285
TOTAL		7875	7596	13096	11979	11797

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

Korban bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/Kota (Tabel 2.70).

Tabel 2.70 Realisasi Bantuan Bencana Alam Dan Sosial Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	BENCANA SOSIAL	BENCANA ALAM
1	2	3	4
1	2016	40	81 KK
2	2017	35	613 KK
3	2018	45	150 KK
4	2019	75	150 KK
5	2020	25	75 KK

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.71 Data Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.01%	0.20%	0.75%	0.45%	0.52%
2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	7.26%	25.28%	30.28%	44%	58%
3	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3.41%	22.01%	17.53%	9%	11%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	0
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	-	-	-	-
7	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	120 orang	416 orang	582 orang	6 orang	85 orang
8	Persentase meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
10	Presentase meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin	1.01%	0.20%	0.75%	0.45%	0.52%
11	Keluarga pra sejahterah dan keluarga sejahtera	-	-	-	-	-
12	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	7.01%	20.95%	24%	4.47%	14.29%
13	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					
14	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Taman makam pahlawan yang dikelola	1 Makam	1 Makam	1 Makam	2 Makam	2 Makam

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2.3.2. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15- 64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

1) Angkatan Kerja (*labor force*)

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization). penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Pada periode tahun 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja (Tabel 2.72).

Tabel 2.72 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci menurut Angkatan Kerja Dan bukan Angkatan Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	ANGKATAN KERJA					
	Bekerja	136.369	147.253	161.225	158.917	158.771
	Pangangguran	14.513	10.927	12.799	9.937	10.671
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (i)	150.882	158.180	174.024	168.854	169.442
2	BUKAN ANGGKATAN KERJA					
	Sekolah	25.148	21.265	17.107	23.119	22.359
	Mengurus RT	65.413	64.303	55.544	60.687	66.893
	Lainnya	11.827	16.280	16.565	13.792	13.119
	Jumlah Penduduk bukan angkatan kerja (ii)	102.388	101.848	89.216	97.598	102.371
	Jumlah Penduduk usia kerja (i) +(ii)	253.270	260.028	263.240	266.452	271.813
3	TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja)	59,57	60,83	66,11	63,33	62,34
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	9,62	6,91	7,35	5,88	6,3

Sumber : BPS. Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2021

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran menurut jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk yang bekerja	102.472	56.299	158.771
2	TPAK			62,34%
3	Tingkat Pengangguran terbuka			6,3%

Sumber: BPS. Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2021

Dari data jumlah pekerja, dapat diperoleh data bahwa jumlah pekerja laki-laki 2 kali lebih banyak dari pekerja perempuan dengan kontribusi pekerja laki-laki 59.46% dan pekerja perempuan 32.83%. Data jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana yang terbesar adalah SLTA sebanyak 88 orang dan diikuti oleh tenaga sarjana sebanyak 376 orang (Tabel 2.74).

Tabel 2.74 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Menurut Pendidikan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	≤ SD	2	-	2
2	SLTP	3	5	8
3	SLTA	38	12	50
4	SMK	23	4	27
5	DIPLOMA	5	19	24
6	S1	29	79	108
7	S2	1	-	1
	JUMLAH	101	119	202

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2021

2) Produktivitas Kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Jadi pada tahun 2016 produktivitas kerja yaitu $PDRB/Jumlah\ pekerja$ sebesar: Produktivitas kerja Tahun 2011 = $4.862.228.720/172.238 = 28.230$.

3) Kesempatan kerja

Perkembangan pembangunan telah memberikan banyak kesempatan kerja pada masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Data ini bisa didapat dari BPS sebagaimana dalam Tabel 2.75.

**Tabel 2.75 Penduduk Berkerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 Kabupaten Minahasa**

No	Kel. Lapangan Usaha	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pertanian	40.394	8.300	48.694	30,67
2	Manufaktur	23.169	5.945	29.114	18,34
3	Jasa-Jasa	38.909	42.054	80.963	50,99
	Jumlah	102.472	56.299	158.771	100

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Untuk penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2020 terdiri dari sektor pertanian 30.67%, sektor industry/Manufaktur 18.34%, dan sektor jasa-jasa lainnya sebesar 50.99%. Pada umumnya kontribusi perempuan dalam bursa tenaga kerja hanya mencapai 35.46% yang sangat jauh dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 64.54%.

4) Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan. Untuk mengukur pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi yaitu sebesar 14.203 Tahun 2016 dan menjadi 10.671 Tahun 2020.

Tabel 2.76 Data Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2%	2%	5.50%	7.50%	15%
2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS	56.30%	59.10%	0,66	0,89	0,90

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	2.30%	2.30%	4 perusahaan	5 perusahaan	6 perusahaan
4	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	5%	2%	45	43	40
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	65%	28%	45	43	40
6	Keselamatan dan perlindungan	2.30%	2.30%	6%	7%	9.50%
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	56.30%	59.10%	55 %	70 %	90.4 %
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.45%	0.96%	0.60%	0.82%	-3.97 %
9	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	16 %	19 %	21%	24%	29.10%
10	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	0.10 %	0.11 %	0.12 %	0.13 %	0.047 %
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	0	0

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	73.10%	77.70%	80%	100%	36.70%
15	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	65%	68%	68,6	72,6	74,8
16	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	77%	82%	85%	88%	88%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tahun 2021

b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta. besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Dengan jumlah pengisian jabatan oleh perempuan yang mencapai 39% berarti sudah memenuhi kuota 30% (Tabel 2.77).

**Tabel 2.77 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati Eselon II	7	7	9	9	9
2	Jumlah perempuan yang menempati Eselon III	80	79	76	80	82
3	Jumlah perempuan yang menempati Eselon IV	388	367	414	432	334
4	Jumlah	475	453	499	521	425
5	Jumlah pekerja perempuan	3565	3290	3565	3193	3177
6	Jumlah PNS di pemerintahan	5173	4958	5173	4636	4548
7	Persentase pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon di lembaga Pemerintah	13.32	13.77	14.00	16.32	13.38
8	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	68.92	66.36	68.92	68.87	69.85

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2). Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan berada pada 17 sampai dengan 18 persen dari total pekerja (Tabel 2.78).

**Tabel 2.78 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2016
s.d 2020 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	697	899	1.033	1.187	1.362
2	Jumlah pekerja perempuan	4.921	4.984	5.134	4.578	4.492
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	14,16	18,03	20.12	25,00	30.32

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Tahun 2021

3). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, Dengan jumlah keluarga tahun 2017 sebesar 86.012 dan kasus KDRT sebanyak 24 maka rasio KDRT adalah sebesar 0,03 (Tabel 2.79).

Tabel 2.79 Rasio KDRT Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Kasus 2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah KDRT	1	14	15
2	Jumlah Rumah Tangga	162.761		
3	Rasio KDRT	0.0006	0.008	0.01

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2021

Tabel 2.80 Data Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 Minahasa. Tahun 2020

No	Uraian	Data per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase ARG pada Belanja Langsung APBD	N/a	N/a	15.21%	45.29%	35.15%
2	Presentase Peran Perempuan dalam Pembangunan di Berbagai Bidang	N/a	30%	50%	60%	70%
3	Jumlah Kebijakan (Perda/Perbup) dalam Rangka meningkatkan Kualitas Anak dan Perempuan diterbitkan	N/a	N/a	4 Kebijakan	4 Perbup	544,9 KLA
4	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPR	N/a	N/a	31	35	35

No	Uraian	Data per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	N/a	0.028	0.03%	0.03%	0.04%
6	Presentasi Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	N/a	0.05%	100%	100%	100%
7	Cakupan Layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan petugas Rehabilitasi terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam unit Pelayanan Terpadu	N/a	N/a	71.1	65	60
8	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten \ Kota yang Mendapat Pelatihan	N/a	1	2	3	3
9	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Telah Memiliki Standart Pelayanan Minimal	N/a	2	3	5	6
10	Presentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	N/a	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2021

4). Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak (Tabel 2.81).

Tabel 2.81 Persentase Tenaga Kerja di bawah umur Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja anak usia 5-14 Tahun	120	120	120	120	120
2	Jumlah pekerja usai 5 tahun keatas	2.567	2.667	3.149	3.326	3.326
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,046	0,052	0,038	0,036	0,036

Sumber : Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

C. Urusan pemerintahan bidang pangan

Ketersediaan pangan beberapa tahun sudah mencapai surplus, namun untuk dapat dijadikan sebagai lumbung pangan masih sangat jauh, sehingga diperlukan intensifikasi produk pangan termasuk beras. sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.82.

Tabel 2.82 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Ketersediaan (Ton)	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/Def (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/Def (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/Def (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/Def (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/Def (Ton)
1	Eris	1.618	1.380	2.38	1.372	1.357	15	1.256	1.079	177	1.469	1.149	320	1.115	1.149	-34
2	Kakas	2.686	1.401	1.285	2.393	1.378	1.015	3.403	1.160	2.243	3.244	1.212	2.032	3.959	1.212	2.747
3	Kakas Barat	4.332	1.158	3.174	4.149	1.137	3.012	3.837	992	2.845	4.068	1.046	3.022	4.441	1.046	3.395
4	Kawangkoan	119	1.197	(1.078)	189	1.176	(987)	370	1.017	-647	746	1.004	-258	228	1.004	-775
5	Kawangkoan Barat	1.872	1.000	872	1.991	981	1.010	1.109	853	256	1.060	858	202	1.002	858	145
6	Kawangkoan Utara	376	1.017	(841)	576	998	(422)	282	868	-586	377	854	-477	236	854	-618
7	Kombi	168	1.377	(1.209)	369	1.354	(985)	42	1.049	-1.007	489	1.102	-613	45	1.102	-1.057
8	Langowan Barat	1.786	1.877	(91)	1.869	1.849	20	2.138	1.579	559	1.844	1.621	223	1.875	1.621	253
9	Langowan Selatan	628	885	(257)	877	1.145	(268)	477	785	-308	739	793	-54	680	793	-114
10	Langowan Timur	2.940	1.557	1.383	3.549	1.533	2.016	4.294	1.289	3.005	2.868	1.299	1.569	3.269	1.299	1.970
11	Langowan Utara	1.137	985	152	977	1.357	(380)	1.603	842	761	1.376	844	532	1.549	844	704
12	Lembean Timur	-	998	(998)	475	979	(504)	0	818	-818	278	816	-538	-	816	-816
13	Pineleng	-	3.218	(3.218)	624	3.176	(2.552)	0	2.704	-2.704	354	2.668	-2.314	-	2.668	-2.668
14	Mandolang	-	2.223	(2.223)	357	2.192	(1.835)	0	1.981	-1.981	473	1.986	-1.513	14	1.986	-1.972

15	Remboken	2.752	1.404	1.348	1.396	1.381	15	2.001	1.185	816	1.876	1.209	667	1.405	1.209	196
16	Sonder	2.515	2.231	284	2.223	2.199	24	2.145	1.900	245	2.235	1.902	333	1.861	1.902	-40
17	Tombariri	-	2.101	(2.101)	1.245	2.071	(826)	1.321	1.811	-490	777	1.762	-985	76	1.762	-1.685
18	Tombariri Timur	564	1.143	(579)	689	1.121	(432)	518	1.013	-495	1.069	1.006	63	372	1.006	-634
19	Tombulu	-	1.964	(1.984)	1.556	1.935	(379)	0	1.731	-1.731	462	1.704	-1.242	27	1.704	-1.677
20	Tompaso	2.995	840	2.155	2.832	823	2.009	3.610	721	2.889	3.709	721	2.988	2.692	721	1.972
21	Tompaso Barat	524	974	(450)	566	956	(390)	342	843	-501	577	870	-293	592	870	-278
22	Tondano Barat	5.342	2.447	2.895	5.439	2.413	3.026	4.283	1.885	2.398	3.733	1.999	1.734	3.649	1.999	1.649
23	Tondano Selatan	2.046	1.946	100	1.937	1.919	20	4.073	1.675	2.398	2.041	1.664	377	2.657	1.664	994
24	Tondano Timur	4.810	1.741	3.069	5.733	1.715	4.018	6.168	1.415	4.753	6.174	1.499	4.675	5.520	1.499	4.022
25	Tondano Utara	718	1.417	(699)	1.409	1.394	15	838	1.232	-394	1.277	1.235	42	944	1.235	-291
	JUMLAH	39.928	38.481	1.447	44.792	38.537	6.255	44.110	32.427	11.683	43.315	32.823	10.492	38.208	32.823	5.385

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

d. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Gambaran kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa juga dapat dilihat dari capaian IKLH, yang terdiri dari indeks Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan lahan. Capaian IKLH Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.83 Capaian IKLH Kabupaten Minahasa

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Indeks Kualitas Air			45,48	45,48	55,58
Indeks Kualitas Udara			90,20	90,20	90,08
Indeks Tutupan Lahan			30,21	30,21	30,21
IKLH			55,29	55,29	58,70

Di Kabupaten Minahasa terdapat Danau yang merupakan salah satu dari lima belas Danau Prioritas yang perlu dijaga keberlanjutannya yaitu Danau Tondano. Dari berbagai laporan yang ada kondisi Danau Tondano terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik dari permasalahan ledakan pertumbuhan eceng gondok, pendangkalan dan eutrofikasi serta masalah kualitas air. Itulah sebabnya penanganan Danau Tondano merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan

lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa.

2). Penanganan Sampah

Upaya pengembangan perekonomian suatu daerah masalah sampah merupakan salah satu dampak langsung maupun tidak langsung pembangunan. Untuk menghitung persentase penanganan sampah dapat disusun Tabel 2.84.

Tabel 2.84 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sampah yang ditangani	110	125	106	126	126
2	Jumlah volume produksi sampah (M3)	143	165	36.000	43.200	43.200
3	Persentase	76,9	75,7	34	34,3	34,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Rasio Tempat Pengolahan Akhir (TPA) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pengolahan akhir per 1.000 jumlah penduduk. Rasio pada tahun 2016 berada pada 23,78% terus meningkat sampai tahun 2020 pada 36,8% (Tabel 2.85).

Tabel 2.85 Rasio Tempat Pengolahan Akhir terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPA	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Daya Tampung TPA	7.900	7.900	12.600	12.600	12.600
3.	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	338.4	342.1	343.564
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	23,78	23,55	37,20%	36,80%	36,80%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Produksi sampah di Kabupaten di kedua lokasi TPA per hari sebesar 114 m3 dimana pengelolaannya dengan sistem semi sanitary landfill.

**Tabel 2.86 Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N.A	N.A	55,29	65,18	72,82
2	Indeks kualitas air	N.A	N.A	45,48	45,58	78,34
3	Indeks Kualitas Udara	N.A	N.A	90,20	92,41	90,56
4	Indeks kualitas tutupan lahan	N.A	N.A	30,21	59,45	30,82
5	Berkurangnya luasan Populasi eceng gondok di Danau Tondano	N.A	N.A	N.A	75ha	150ha
6	Meningkatnya Kualitas Air Danau Tondano	N.A	N.A	cemar berat	cemar ringan	cemar ringan
7	Berkurangnya Laju Pendangkalan Danau	N.A	N.A	N.A	0,01m	0,01m
8	Presentase keanekaragaman hayati terpelihara	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9	Persentasi pengendalian penerbitan ijin B3 dn LB3	N.A	N.A	N.A	N.A	51%
10	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	N.A	N.A	N.A	65%	66%
11	Persentase keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
12	Persentase Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
13	Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
14	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
15	Persentase pengelolaan sampah di kab. (penanganan dan pengurangan sampah)	N.A	N.A	73%	73%	80%

2) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Dalam rangka peningkatan pelayanan secara tepat dan lancar, khususnya dalam hal penerbitan akte catatan sipil terlihat seperti pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87 Kependudukan Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

NO	Jenis & Jumlah Produk Kependudukan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Akte Kelahiran	7.202	5.127	5.331	7.260	4.154
2	Akte Kematian	1.264	1.512	2.501	4.165	4.208
3	Akte Perkawinan	2.417	2.341	2.410	2.394	2.214
4	Akte Perceraian	190	231	219	236	242
5	Wajib Ktp	259.142	260.997	263.662	266.380	253.707

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.88 Data Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perekaman KTP elektronik	94%	95%	96%	98%	98%
2	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	N/a	N/a	0%	4%	5%
3	Persentase penerbitan akte perkawinan, perceraian, kematian dan penyajian data kependudukan	2417),(190),(1264)(2)	2341),(231),(1512),2	2410),(219),(2501),2	2394),(236),(4165),2	2214),(242),(4208),2
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	80%	85%	88 %	90%	93,22%
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0%	0%	0%	0%	0%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase PD, Kantor, Badan yang terkoneksi update dengan Database Kependudukan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

3) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM.

Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Demikian juga semakin besar peran LPM semakin besar kemajuan desa untuk menjadi desa swasembada (Tabel 2.89).

Tabel 2.89 Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2020

No	Tingkat Perkembangan Desa	2018	2019	2020
1	Sangat Tertinggal	1	0	0

No	Tingkat Perkembangan Desa	2018	2019	2020
2	Tertinggal	76	31	0
3	Berkembang	138	161	119
4	Maju	12	35	77
5	Mandiri	0	0	31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Desa/kelurahan swasembada dan persentase desa/kelurahan berstatus swasembada di Kabupaten Minahasa mengalami penurunan selama Tahun 2016-2020.

1) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Kelompok Binaan PKK Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Minahasa

NO	KECAMATAN	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata
1	Eris	8	9	1,13	8	9	1,13	8	9	1,13	8	9	1,13	8	9	1,13
2	Kakas	13	27	2,08	13	27	2,08	13	27	2,08	13	27	2,08	13	27	2,08
3	Kakas Barat	10	3	0,30	10	3	0,30	10	3	0,30	10	3	0,30	10	3	0,30
4	Kawangkoan	10	69	6,90	10	69	6,90	10	69	6,90	10	69	6,90	10	69	6,90
5	Kawangkoan Barat	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00
6	Kawangkoan Utara	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10
7	Kombi	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38
8	Langowan Barat	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00
9	Langowan Selatan	10	12	1,20	10	12	1,20	10	12	1,20	10	12	1,20	10	12	1,20
10	Langowan Timur	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
11	Langowan Utara	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
12	Lembean Timur	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00
13	Pineleng	14	18	1,29	14	18	1,29	14	18	1,29	14	18	1,29	14	18	1,29

14	Mandolang	12	36	3,00	12	36	3,00	12	36	3,00	12	36	3,00	12	36	3,00
15	Remboken	11	5	0,45	11	5	0,45	11	5	0,45	11	5	0,45	11	5	0,45
16	Sonder	19	3	0,16	19	3	0,16	19	3	0,16	19	3	0,16	19	3	0,16
17	Tombariri	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10
18	Tombariri Timur	10	56	5,60	10	56	5,60	10	56	5,60	10	56	5,60	10	56	5,60
19	Tombulu	11	7	0,64	11	7	0,64	11	7	0,64	11	7	0,64	11	7	0,64
20	Tompaso	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00
21	Tompaso Barat	10	19	1,90	10	19	1,90	10	19	1,90	10	19	1,90	10	19	1,90
22	Tondano Barat	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00
23	Tondano Selatan	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
24	Tondano Timur	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00
25	Tondano Utara	8	0	0,00	8	20	2,50	8	20	2,50	8	20	2,50	8	20	2,50
	JUMLAH	270	80	0,30	270	291	1,08	270	291	1,08	270	291	1,08	270	291	1,08

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun kelompok binaan LPM tahun 2016 s.d. 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91 Kelompok Binaan LPM Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Minahasa

NO	KECAMATAN	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jmlh LPM	Jml Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jml Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jml Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata
1	Eris	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
2	Kakas	13	0	0,00	13	8	0,62	13	8	0,62	13	8	0,62	13	8	0,62
3	Kakas Barat	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00
4	Kawangkoan	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00
5	Kawangkoan Barat	10	13	1,30	10	13	1,30	10	13	1,30	10	13	1,30	10	13	1,30
6	Kawangkoan Utara	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00
7	Kombi	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38
8	Langowan Barat	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00
9	Langowan Selatan	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00
10	Langowan Timur	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
11	Langowan Utara	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
12	Lembean Timur	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00
13	Pineleng	14	0	0,00	14	0	0,00	14	0	0,00	14	0	0,00	14	0	0,00

NO	KECAMATAN	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jmlh LPM	Jml Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jml Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jml Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata
14	Mandolang	12	0	0,00	12	10	0,83	12	10	0,83	12	10	0,83	12	10	0,83
15	Remboken	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00
16	Sonder	19	0	0,00	19	0	0,00	19	0	0,00	19	0	0,00	19	0	0,00
17	Tombariri	10	7	0,70	10	7	0,70	10	7	0,70	10	7	0,70	10	7	0,70
18	Tombariri Timur	10	0	0,00	10	15	1,50	10	15	1,50	10	15	1,50	10	15	1,50
19	Tombulu	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00
20	Tompaso	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10
21	Tompaso Barat	10	0	0,00	10	15	1,50	10	15	1,50	10	15	1,50	10	15	1,50
22	Tondano Barat	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00
23	Tondano Selatan	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
24	Tondano Timur	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00
25	Tondano Utara	8	1	0,13	8	3	0,38	8	3	0,38	8	3	0,38	8	3	0,38
	JUMLAH	270	27	0,10	270	77	0,29	270	77	0,29	270	77	0,29	270	77	0,29

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Tahun 2021.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Tabel 2.92 Data Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BUMDesa yang maju dan mandiri	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2) Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penggunaan teknologi tepat guna (TTG) di Kabupaten Minahasa telah dilakukan di 11 kecamatan dan pada 33 desa. Adapun jenis kegiatannya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
1	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan	Paslaten	Kakas
2	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Karor	Lembean Timur
3	Meja Putar	Membentuk Gerabah/Keramik	Pulutan	Remboken
4	Mesin Aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik	Pulutan	Remboken
5	Irigasi Pipa Pvc	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi	Tember	Tompaso
6	Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik	Paslaten	Kakas
7	Mesin Cacah	Mencacah Sampah	Tonsea Lama	Tondano Utara

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
8	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Noongan	Langowan Barat
9	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Kamangta	Tombulu
10	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
11	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Timbukar	Sonder
12	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
13	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Timur	Tombariri Timur
14	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Ranotongkor Timur	Tombariri Timur
15	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh	Tombariri Timur
16	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh Uner	Tombariri Timur
17	Mesin Pengolahan Vco	Pengolahan Vco	Lemoh	Tombariri Timur
18	Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik	Lemoh	Tombariri Timur
19	Mesin Pemipil	Memipil Jagung	Kiawa Satu	Kawangkoan Utara
20	Mesin Pemipil	Memipil Jagung	Kiawa Satu Barat	Kawangkoan Utara
21	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Kauneran Satu	Sonder
22	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa	Talikuran Satu	Sonder
23	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah	Talikuran Satu	Sonder
24	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas	Talikuran Satu	Sonder
25	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Talikuran	Sonder
26	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Sendangan	Sonder

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
27	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Tincep	Sonder
28	Alat Pipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tincep	Sonder
29	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah	Tincep	Sonder
30	Alat Pipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tounelet	Sonder
31	Alat Penanam Padi	Mempermudah Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat	Tounelet	Sonder
32	Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan	Tounelet	Sonder
33	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas	Tounelet	Sonder
34	Mesin Penanam Jagung	Mempermudah Dlm Menanam Jagung/Lebih Cepat	Tounelet	Sonder
35	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Tountimomor	Kakas Barat
36	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Kalawiran	Kakas Barat
37	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Touliang	Kakas Barat
38	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Passo	Kakas Barat
39	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Panasen.	Kakas Barat
40	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Tountimomor	Kakas Barat
41	Alat Peras	Mempermudah Dan Efektif Memeras Santan	Panasen	Kakas Barat
42	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lolah Satu	Tombariri Timur
43	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lolah Tiga	Tombariri Timur
44	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung	Lolah Dua	Tombariri Timur

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
45	Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik(Kompom Gas & Listrik	Lemoh Timur	Tombariri Timur

4) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1). Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2016 rata-rata adalah 2.50 dan menurun di tahun 2020 rata-rata 1.4 (Tabel 2.94).

Tabel 2.94 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak	222.027	2.225	141.312	126.290	83.457
2	Jumlah Keluarga	88.8725	9.405	109.851	113.339	118.543
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,50	2,37	1,29	1,11	1,4

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2). Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama (Tabel 2.95).

Tabel 2.95 Rasio Akseptor KB Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB	22.683	48.873	54.484	59.955	49.169
2	Jumlah pasangan usia subur	41.078	61.211	68.496	75.457	62.269
3	Rasio akseptor KB	55,21	79,84	79,54	7,946	7,896

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Pada tahun 2016 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 41.078 orang dan meningkat menjadi 62.269 Orang pada tahun 2020.

a). Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk dituangkan dalam Tabel 2.96.

**Tabel 2.96 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa**

No	Fertilitas/Mortalitas	2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	15,21	16,17	9,49	9,08	5,59
2	Angka Kematian Kasar (CDR)	4,2	4,07	5,97	10,40	11,47
3	Angka Kematian bayi (IMR)	6,64	5,91	9,31	36,16	61,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

b). Pengelompokan Penduduk

i. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2019 Kabupaten Minahasa dituangkan dalam Tabel 2.97. Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Pineleng sedangkan paling sedikit di Kecamatan Tompaso.

**Tabel 2.97 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020
Kabupaten Minahasa**

NO	NAMA KECAMATAN	SENSUS 2020			RASIO JENIS KELAMIN
		Jumlah Penduduk			
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LANGOWAN TIMUR	6,812	6,759	13,571	100.78
2	LANGOWAN BARAT	8,569	8,044	16,613	106.53
3	LANGOWAN SELATAN	4,239	3,855	8,094	109.96
4	LANGOWAN UTARA	4,559	4,195	8,754	108.68
5	TOMPASO	3,822	3,625	7,447	105.43
6	TOMPASO BARAT	4,784	4,492	9,276	106.50
7	KAWANGKOAN	5,319	5,181	10,500	102.66
8	KAWANGKOAN BARAT	4,412	4,309	8,721	102.39
9	KAWANGKOAN UTARA	4,631	4,406	9,037	105.11

NO	NAMA KECAMATAN	SENSUS 2020			RASIO JENIS KELAMIN
		Jumlah Penduduk			
		L	P	L+P	
10	SONDER	9,942	9,596	19,538	103.61
11	TOMBARIRI	9,246	8,954	18,200	103.26
12	TOMBARIRI TIMUR	5,370	5,034	10,404	106.67
13	PINELENG	15,464	14,842	30,306	104.19
14	MANDOLANG	11,062	10,596	21,658	104.40
15	TOMBULU	9,897	9,413	19,310	105.14
16	TONDANO BARAT	10,958	10,600	21,558	103.38
17	TONDANO SELATAN	8,992	8,914	17,906	100.88
18	REMBOKEN	6,602	6,168	12,770	107.04
19	KAKAS	6,572	6,074	12,646	108.20
20	KAKAS BARAT	5,696	5,278	10,974	107.92
21	LEMBEAN TIMUR	4,323	4,136	8,459	104.52
22	ERIS	6,073	5,891	11,964	103.09
23	KOMBI	5,871	5,591	11,462	105.01
24	TONDANO TIMUR	7,669	7,423	15,092	103.31
25	TONDANO UTARA	6,551	6,479	13,030	101.11
	Minahasa	177,435	169,855	347,290	104.46

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Rasio jumlah laki-laki lebih banyak di dibandingkan dengan perempuan di Kabupaten Minahasa (104,46) Rasio tertinggi terdapat di Langowan Selatan (109,96) dan Langowan Utara mencapai (108,68). Rasio terendah antara laki-laki dan perempuan terdapat di Kecamatan Langowan Timur Sebesar (100,78). Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.98.

Tabel 2.98 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-19 tahun	13.328	12.548	25.876
20-24 tahun	14.009	12.961	26.970
25-29 tahun	13.130	12.331	25.461
30-34 tahun	12.471	11.509	23.980
35-39 tahun	12.396	11.656	24.052
40-44 tahun	12.898	11.925	24.823
45-49 tahun	12.680	11.812	24.492
50-54 tahun	11.843	11.301	23.144
55-59 tahun	10.507	10.101	20.608
TOTAL	113.262	106.144	219.406

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

ii). Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk /geografis.

Tabel 2.99 menunjukkan luas dan kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Kecamatan. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Langowan Timur 1.874 Jiwa/Km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kombi dengan kepadatan 96 jiwa/Km², dengan rata-rata kepadatan di Kabupaten Minahasa sebesar 304 jiwa/km².

Tabel 2.99 Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Langowan Timur	7,24	13,6	1.874
2	Langowan Barat	42,69	16,6	389
3	Langowan Selatan	69,65	8,1	116
4	Langowan Utara	8,27	8,8	1.059
5	Tompaso	17,32	7,4	430
6	Tompaso Barat	14,61	9,3	635
7	Kawangkoan	35,99	10,5	292
8	Kawangkoan Barat	19,27	8,7	453
9	Kawangkoan Utara	13,09	9	690
10	Sonder	52,52	19,5	372
11	Tombariri	56,43	18,2	323
12	Tombariri Timur	101,57	10,4	102
13	Pineleng	49,30	30,3	615
14	Tombulu	73,43	19,3	263
15	Mandolang	47,05	21,7	460
16	Tondano Barat	22,66	21,6	951
17	Tondano Selatan	25,34	17,9	707
18	Remboken	24,07	12,8	531
19	Kakas	88,85	12,6	142
20	Kakas Barat	45,16	11	243
21	Lembean Timur	76,94	8,5	110
22	Eris	33,25	12	360
23	Kombi	119,74	11,5	96
24	Tondano Timur	33,71	15,1	448
25	Tondano Utara	63,49	13	205
	TOTAL	1.141,64	347,3	304

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.99 menunjukkan luas dan kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Kecamatan. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Langowan Timur 1.756 Jiwa/Km² dan kepadatan

penduduk terendah berada di Kecamatan Kombi dengan kepadatan 83 jiwa/Km², dengan rata-rata kepadatan di Kabupaten Minahasa sebesar 294 jiwa/km².

iii). Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat pendidikan

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Angka pendidikan yang ditamatkan tahun 2017 sebesar $270.774 / 316.884 \times 100\% = 85,44\%$. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

NO	TAHUN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		SD/MI	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI	TIDAK SEKOLAH	
1	2016	99.765	57.736	111.182	21.907	44.419	332.190
2	2017	97.349	58.290	113.842	23.109	45.372	335.321
3	2018	92.975	58.429	116.886	24.822	43.923	337.035
4	2019	93.709	59.345	119.72	25.401	43.939	342.11
5	2020	93.057	59.142	120.568	25.814	44.550	343.131

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Selanjutnya dari data yang ada, untuk mengetahui prosentasenya, dispesifikasikan lagi berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tampak pada tabel berikut. Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Hasil perhitungan rasio di atas. Kemudian dituangkan dalam Tabel 2.101.

Tabel. 2.101 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP. KK. Akte Lahir. Akte Nikah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Minahasa

No	Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte Lahir		Akte Nikah	
		Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	Blm
1	2016	225.832	26.031	100.877	4.624	312.541	21.411	100.018	5.483
2	2017	240.166	16.04	104.974	2.872	319.697	15.966	102.66	5.186
2	2018	258.434	52.28	105.677	4.174	324.116	15.273	164.23	7.739

No	Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte Lahir		Akte Nikah	
		Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	Blm
3	2019	263.424	2.956	107.785	5.554	327.741	14.369	165.541	7.258
5	2020	243.653	10.054	114.275	4.268	329.743	13.382	165.575	6.270

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Minahasa. Tahun 2021

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB, Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk (Tabel 2.102).

Tabel 2.102 Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Peserta KB Aktif	Metode Kotrasepsi						
		PUS		IUD	MOP	MOW	Kondom	Implan	Suntik	Pil
1	Eris	1.136	827	233	5	70	62	126	164	167
2	Kakas	2.752	2.063	482	0	15	31	437	482	616
3	Kakas Barat	2.661	2.008	459	0	15	31	437	482	590
4	Kawangkoan	1.977	1.828	95	1	31	7	197	997	500
5	Kawangkoan Barat	2.492	2.070	126	3	55	12	469	762	643
6	Kawangkoan Utara	1.490	1.140	253	1	27	4	70	328	357
7	Kombi	1.362	.923	180	0	33	20	197	217	276
8	Langowan Barat	3.218	2.694	132	13	18	23	292	1.740	476
9	Langowan Selatan	845	579	63	0	26	14	106	266	104
10	Langowan Timur	2.573	2.034	395	0	14	52	300	728	545
11	Langowan Utara	1.378	1.013	78	4	15	8	109	593	213
12	Lembean Timur	2.235	1.679	127	0	11	16	407	651	467
13	Pineleng	4.585	3.548	390	0	87	58	224	1.470	1.319
14	Mandolang	5.501	4.399	297	0	104	25	751	2.085	1.137
15	Remboken	1.341	966	202	0	44	8	82	415	215
16	Sonder	1.859	1.637	95	1	112	59	102	923	345
17	Tombariri	6.171	5.124	251	30	68	119	820	2.237	1.599
18	Tombariri Timur	2.365	1.762	423	3	30	26	296	548	436
19	Tombulu	1.259	964	2	0	0	54	17	424	467

No.	Kecamatan	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Metode Kotrasepsi						
				IUD	MOP	MOW	Kondom	Implan	Suntik	Pil
20	Tompaso	1.298	898	172	2	28	174	212	186	124
21	Tompaso Barat	2.612	2.145	341	7	17	6	582	602	590
22	Tondano Barat	1.136	827	233	5	70	62	126	164	167
23	Tondano Selatan	5.694	4.321	297	3	20	25	751	2.085	1.137
24	Tondano Timur	2.094	1.853	124	8	42	42	437	809	391
25	Tondano Utara	1.811	1.409	72	0	16	13	86	912	310
	Jumlah	61.845	48.711	5.522	86	968	951	7.633	20.270	13.191

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Tabel 2.103 Data Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,53	2,2	2,06	2,06	2,08
2	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	-	79,54%	79,94%	80,34%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,88	5	4,66	8,96	15,96
4	Median Usia kawin pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	20	20	20	20	21
5	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,97	0,94	0,91	0,83	1,51
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	-	-	-

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	47	47	47	13,36	12
8	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	95	96	96	32	84
9	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	97	98	98	37	84
10	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	98	97	97	32	84
11	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	8	8	9	9	20
12	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	0,29	0,20	-
13	Rasio Petugas pendamping bina keluarga	1	1	1	0	1:08
14	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	-	-	79,54	80,34	80
15	Cakupan peserta KB Aktif	93,1	96	96	78,74	78,96
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	-		11,44	-
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	29,4	30	30	86,36	83

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

5) Urusan pemerintahan bidang perhubungan

Sistem jaringan transportasi menempatkan Kabupaten Minahasa sebagai daerah asal dan tujuan yang menghubungkan Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten

Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai hubungan langsung dan hubungan tidak langsung dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga telah ditunjang dengan beberapa terminal antar kota maupun, antar kota dan desa-desa di sekitarnya. Jumlah terminal di Kabupaten Minahasa 3 buah yakni terminal Tondano dengan luas 4.510 m², terminal Langowan 7.700 m² dan terminal Kawangkoan 2.400 m² .

1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

**Tabel 2.104 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang	9.615.898	11.150.268	12.187.952	12.553.590	12.919.229
2	Total Jumlah Penumpang	9.615.898	11.150.268	12.187.952	12.553.590	12.919.229

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2) Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas:jaringan trayek lintas batas negara; jaringan trayek antarkota antarprovinsi; jaringan trayek antarkota dalam provinsi; jaringan trayek perkotaan; dan jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus. yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang .

**Tabel 2.105 Rasio Ijin Trayek Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Trayek Perkotaan	52	526	526	524	519
2	Izin Trayek Perdesaan	16	338	338	316	313
3	Jumlah Ijin Trayek	567	914	914	840	832
4	Jumlah Penduduk	319.945	335.321	338.370	342.110	342.110
5	Rasio Trayek	0,017	0,272	0,270	0,247	0,220

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tahun 2021

3) Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan.

Pada Tabel 2.106 pengujian Kendaraan bermotor atau yang disebut dengan Uji KIR menunjukkan bahwa Angkutan Umum khusus mobil bus umum sampai Tahun 2020 berjumlah 180, dan untuk Mobil barang sampai tahun 2018 berjumlah 653.

Tabel 2.106 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%
		2016			2017			2018			2019			2020		
1	Mobil bus Umum	1.138	571	0,50	1.138	444	0,39	1345	180	0,13	1.138	180	0,13	1.138	180	
2	Mobil barang	3.054	791	0,25	4.487	845	0,18	3095	653	0,21	3095	653	0,21	3095	653	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal & memindahkan Barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, Perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum (Tabel 2.107).

Tabel 2.107 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0
2.	Jumlah pelabuhan Udara	0	0	0	0	0
3.	Jumlah terminal bis	3	3	0	0	0
	Jumlah	3	3	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

5) Jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan

Aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio dengan menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus lalu lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan ditunjukkan dengan adanya kemacetan. Batasan nilai V/C ratio yang menunjukkan ke arah kemacetan diambil $>0,65$ (Tabel 2.108).

Tabel 2.108 Panjang Jaringan Berdasarkan Status Tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Negara	129	178	178	178	178
2	Jalan Provinsi	184,5	208,4	208,4	208,4	208,4
3	Jalan Kabupaten	566,85	681,15	681,15	681,15	681,15
	Jumlah	880	1.068	1.068	1.068	1.068

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Panjang jalan secara keseluruhan tahun 2020 adalah 1.068 Km yang terdiri dari jalan negara 178 Km, jalan provinsi 208.4 Km. Jalan kabupaten 681,15 Km, dan Jalan Usaha Tani/Jalan Desa 144.50 Km.

Tabel 2.109 Data Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota (VC Ratio Jalan Kabupaten)	70.0%	70.0%	70.0%	75.0%	75.0%
2	Ratio (Indeks) konektifitas angkutan jalan	80.0%	80.0%	85.0%	85.0%	85.7%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Ratio (Indeks) konektifitas angkutan sungai, danau dan laut	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%
4	Ratio (Indeks) konektifitas transportasi udara	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Minahasa. Tahun 2021

6) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

1). Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa menunjukkan jumlah yang signifikan (Tabel 2.110).

Tabel 2.110 Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan Telepon genggam	110	138	168	202	231

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Tahun 2021

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111 Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang menggunakan HP	93.047	93.047	102.086	114.112	115.063
2	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	33.219	33.534	33.769	33.980	34.200

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Total jumlah Penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	116.266	117.362	135.855	148.092	149.236
4	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	355.322	385.350	408.710
5	Prosentase Penduduk yang memiliki telepon PSTN (2) / (4)	0,1	0,009	0,095	0,0881	0,0836
6	Prosentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)	0,34	34	38	38	0,365

Sumber: Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Minahasa Tahun 2021

2). Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Semakin besar rasio wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

3). Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Untuk menghitung surat

kabar terbitan nasional atau lokal dapat disusun Tabel 2.112.

**Tabel 2.112 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis surat kabar terbitan nasional	3	3	3	3	3
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan local	14	15	16	18	20
3	Total jenis surat kabar (1+2)	17	18	19	21	23

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Tahun 2021

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

3). Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Untuk menghitung jumlah penyiaran radio/TV lokal dapat disusun Tabel 2.113.

**Tabel 2.113 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyiaran radio lokal	7	7	7	7	7
2	Jumlah penyiaran radio nasional	-	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV local	1	1	1	1	1
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	-	1	1	1	1
5	Total Penyiaran radio/TV local (1+2+3+4)	8	10	10	10	10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Tahun 2021

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun

nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.114 Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase layanan publik yang di selenggarakan secara online dan integrasi	10%	15%	20%	30%	50%
2	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	8%	13%	20%	30%	40%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	25%	30%	40%	50%	60%
4	Informasi Tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	10%	15%	22%	27%	40%
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30%	40%	50%	60%	65%
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20%	30%	40%	50%	60%
7	Persentase pelaksanaan EGovernment Pemerintah Daerah	20%	30%	40%	50%	60%
8	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	5%	10%	20%	30	40%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Tahun 2021

7) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

Koperasi merupakan salah satu institusi perekonomian Kabupaten Minahasa. Sampai tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Minahasa

sebanyak 1.143 koperasi, yang terdiri dari 861 koperasi aktif dan 282 koperasi yang tidak aktif.

Keberhasilan pembinaan koperasi dan UKM antara lain dengan adanya beberapa aktivitas produksi seperti Kerajinan batok kelapa di Desa Maumbi, Kelurahan Sasaran, keramik di Desa Pulutan Kecamatan Remboken, akar bambu di Desa Kembes Kecamatan Tombulu, industri rumah panggung di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan, dan pengolahan VCO di Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat dan Kecamatan Lembean Timur serta Kacang Tore di Kecamatan Kawangkoan. Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap:

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Berikut ini jumlah koperasi ditunjukkan pada Tabel 2.115.

**Tabel. 2.115 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020
di Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	1.097	928	928	928	410
2	Jumlah Koperasi	1.310	1.143	1.143	1.143	1.143
3	Persentase Koperasi Aktif	83.74%	81.19%	81.19%	81.19%	35.87%

Sumber: BPS. Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Jumlah koperasi aktif dari tahun ke tahun tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Tabel 2.116 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No	Kecamatan	KUD	KPRI	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
1	Langowan Timur	1	-	2	36	39
2	Langowan Barat	3	2	-	33	38
3	Langowan Selatan	1	-	-	22	23
4	Langowan Utara	-	-	-	16	16

5	Kakas	5	3		51	60
6	Kakas Barat	3	-	-	34	37
7	Tompaso	1	-	-	19	20
8	Tompaso Barat	1	-	-	12	13
9	Remboken	4	1	-	52	57
10	Kawangkoan	1	2	-	27	30
11	Kawangkoan Utara	2	2	-	39	43
12	Kawangkoan Barat	1	1	-	29	31
13	Tombariri	3	1	2	18	41
14	Tombariri Timur	3		-	16	19
15	Sonder	7	2	-	58	67
16	Tondano Barat	6	9	1	88	104
17	Tondano Timur	3	2	-	75	80
18	Tondano Utara	3	8	1	29	41
19	Tondano Selatan	4	1	-	54	59
20	Eris	7	2	-	84	93
21	Lembean Timur	7	1	-	92	100
22	Kombi	8	1	-	76	85
23	Pineleng	3	2	-	18	23
24	Mandolang	-	1	-	11	12
25	Tombulu	2	-	-	10	12
	JUMLAH					1.143

Sumber: BPS. Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Di Tahun 2020 dari total Koperasi sebanyak 1.143 buah, hanya 410 buah atau 35.87% yang aktif dan 733 buah atau 64.13% tidak aktif.

8) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal

Berdasarkan data yang ada jumlah investasi swasta yang masuk masih sangat rendah, sehingga masih memerlukan kerja keras dalam Kabupaten Minahasa. Adapun jumlah investor yang masuk adalah sebagai berikut:

1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode 2016-2020 mengalami penurunan yang signifikan. Adapun penanaman modal Asing tidak ada untuk periode tersebut.

**Tabel 2.117 Jumlah Investasi skala Nasional Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa**

Tahun	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	17	-	17
2017	31	-	31
2018	19	-	19
2019	13	-	13
2020	11	-	11

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Minahasa 2021

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Realisasi jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan, selanjutnya menurun sampai tahun 2020 (Tabel 2.118).

**Tabel. 2.118 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Minahasa
Tahun 2016-2020**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah proyek	Nilai investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.000)
2016	17	974.809.000	17	974.809.000
2017	31	1.931.800.000	31	1.931.800.000
2018	19	3.850.500.000	19	3.850.500.000.000
2019	13	1.710.545.982.000	13	1.710.545.982.000
2020	11	862.100.000	11	862.100.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Minahasa 2021

Berdasarkan data yang ada, tingkat investasi di Kabupaten Minahasa perlu ditingkatkan dengan berbagai terobosan sehingga dapat membantu menggairahkan perekonomian di daerah. Persaingan yang sangat ketat antar daerah dalam mempromosikan potensi daerah khususnya di sektor industri pariwisata menjadi perhatian khusus dalam perencanaan daerah.

3) Rasio daya Serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten tahun 2016 s.d 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.119.

**Tabel 2.119 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten
Tahun 2016 s.d 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	340	465	285	260	n/a
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	17	31	19	13	11
3	Rasio daya serap tenaga kerja	77.14	67.89	70.24	61.50	61.78

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Minahasa 2021

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Peluang investasi lain yang sangat menarik untuk dikembangkan adalah jasa transportasi, pengembangan industri pariwisata dan kerajinan, serta investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun peluang investasi yang dominan adalah :

- a. Bidang Pertanian yang meliputi peningkatan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian, dimana terbentang lahan yang subur dan luas sehingga dapat meningkatkan produk yang kompetitif serta memiliki daya saing baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, dimana cengkih, kelapa dan vanili merupakan produk serta potensi andalan daerah.
- b. Sasaran pembangunan sektor industri diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan industri dengan peningkatan keterkaitan antara industri menengah, industri kecil dan industri rakyat. serta keterkaitan antara sektor industri dan sektor ekonomi.
- c. Energi dengan meningkatnya pemanasan global, maka kebutuhan akan energi alternatif terbarukan sangat mendesak dibangun. Adapun potensi yang ada di kabupaten Minahasa antara lain: energi panas bumi di Sonder. Kawangkoan dan Tompaso, energi tenaga air di sungai Tondano, hydro power di Sonder, bio diesel dengan tanaman saketa di Kombi, dan bio-fuel dengan bahan pokok eceng gondok dan kotoran ternak.

9) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.120 menunjukkan jumlah organisasi pemuda tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa dimana mengalami penambahan secara signifikan.

Tabel 2.120 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eris	7	7	10	12	15
2	Kakas	10	10	12	14	16
3	Kakas Barat	10	10	11	13	15
4	Kawangkoan	12	12	14	15	17
5	Kawangkoan Barat	8	8	9	11	14
6	Kawangkoan Utara	8	8	9	12	13
7	Kombi	11	11	13	14	16
8	Langowan Barat	12	12	14	15	17
9	Langowan Selatan	7	7	9	10	13
10	Langowan Timur	12	12	14	15	19
11	Langowan Utara	10	10	12	14	17
12	Lembean Timur	8	8	10	12	15
13	Pineleng	14	14	16	18	20

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
14	Mandolang	12	12	13	15	17
15	Remboken	11	11	13	14	16
16	Sonder	13	13	15	17	19
17	Tombariri	10	10	12	15	17
18	Tombariri Timur	7	7	9	11	14
19	Tombulu	7	7	10	13	16
20	Tompaso	6	6	8	11	14
21	Tompaso Barat	6	6	7	9	12
22	Tondano Barat	14	14	16	19	22
23	Tondano Selatan	15	15	17	20	21
24	Tondano Timur	12	12	15	17	19
25	Tondano Utara	12	12	14	17	20
	Jumlah	254	254	302	353	414

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa 2021

2) Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Tahun 2017 jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 141 kegiatan yang merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan

olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.

Pada tahun 2019 jumlah event olahraga sebanyak 274 kali dan menurun ditahun 2020 96 Kali, sehingga diperlukan peningkatan frekwensi kegiatan olahraga dimasa akan datang .

Tabel 2.121 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eris	4	6	8	12	5
2	Kakas	4	6	9	14	4
3	Kakas Barat	3	5	6	10	3
4	Kawangkoan	5	7	9	11	4
5	Kawangkoan Barat	4	6	7	9	3
6	Kawangkoan Utara	4	6	7	8	3
7	Kombi	4	5	7	9	3
8	Langowan Barat	4	5	8	10	4
9	Langowan Selatan	3	4	9	11	4
10	Langowan Timur	4	6	8	12	3
11	Langowan Utara	3	4	7	9	5
12	Lembean Timur	3	4	6	7	2
13	Pineleng	6	8	10	12	5
14	Mandolang	4	6	8	9	5
15	Remboken	5	7	9	14	4
16	Sonder	5	7	8	11	4
17	Tombariri	4	5	8	12	5
18	Tombariri Timur	3	4	6	8	3
19	Tombulu	3	4	8	12	4
20	Tompaso	3	4	8	11	4
21	Tompaso Barat	3	4	9	14	3
22	Tondano Barat	6	8	11	14	4
23	Tondano Selatan	5	6	8	12	3
24	Tondano Timur	6	8	9	12	5
25	Tondano Utara	5	6	9	11	4
	Jumlah	103	141	202	274	96

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa 2021

Tabel 2.122 Data Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5%	5%	10%	15%	20%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	5%	30%	41%	43%	59%
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5%	5%	10%	20%	20%
4	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5%	5%	5%	10%	15%
5	jumlah atlet berprestasi	50 atlet	98 atlet	108 atlet	118 atlet	118 atlet
6	jumlah prestasi olahraga	10 CABOR	14 CABOR	15 CABOR	23 CABOR	10 CABOR
7	Presentase pemuda berprestasi	2%	3%	10%	15%	20%
8	Presentase Sport Development Index	20%	60%	40%	42%	21%

10) Urusan pemerintahan bidang statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Minahasa Dalam Angka tersedia setiap tahun. Kendala Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi serta belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial. Diupayakan kedepan ada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya Peningkatan pengelolaan Data Pembangunan terutama pengelolaan data di perangkat daerah.

11) Urusan pemerintahan bidang persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur adanya kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah untuk mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu koridor yang memagari agar pemerintah daerah tidak menyalahgunakan urusan persandian sebagai upaya untuk menutup-nutupi tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada skala nasional, keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu di dukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Untuk itu sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai. Hal ini menjadi sangat penting bila dikatikan dengan dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan.

Diupayakan kedepan ada peningkatan pengelolaan sistem pengamanan informasi melalui sistem Persandian daerah.

12) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan

Kondisi budaya yang memiliki budaya bermusyawah, seperti yang dilakukan sejak tahun 1428 di Watu Pinabetengan. Para leluhur "TOU Minahasa telah bermusyawah dan sepakat untuk menyebar di seluruh Tanah Minahasa dengan semboyan "Esa Kita Sumerah. Sumerah Kita To Esa". Dalam perkembangannya di Tanah Minahasa terdapat 5 (lima) Suku Besar yang dikenal dengan Pakasan yaitu Toulour, Tountemboan, Tonsea, Tombulu dan Tonsawang dengan karateristik seni dan budaya yang

beraneka ragam. Demikian juga gedung kesenian yang representatif hanya terdapat di Kota Tondano yaitu Gedung “Wale Ne Tou Minahasa”. Kabupaten Minahasa yang memiliki fasilitas alam Danau Tondano dan laut, merupakan potensi yang kuat untuk membangun olahraga air. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dapat dilaksanakan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

13) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan

1). Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Untuk menghitung jumlah perpustakaan dapat disusun Tabel 2.123.

**Tabel 2.123 Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	197	197	197	197	197
3.	Jumlah Perpustakaan milik Sekolah	324	324	324	324	324
4.	Total Perpustakaan (1+2+3)	522	522	522	522	522

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan

masyarakat serta sebagai penunjang pelayanan pendidikan.

Tabel 2.124 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2020		
		Pengunjung	Pespustakaan	Rasio/hari
1	Perpustakaan Daerah	236	1	0,70
2	Perpustakaan milik non Pemda		197	
3	Perpustakaan milik Sekolah		324	
	Tota Pengunjung Perpustakaan (1+2+3)	236	522	0,70

Sumber : Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan Pendidikan.

Tabel 2.125 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.97%	2.97%	2.98%	3.44%	3.72%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2.97%	2.97%	2.50%	3.20%	3.38%
3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1%	1%	1%	2%	3%
4	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	0.20%	0.20%	0.21%	0.21%	0.21%
5	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0%	0%	0	0	0
6	Persentase perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku	15%	20%	22%	24%	25%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi dialihmediakan	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

14) Urusan pemerintahan bidang kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan Pemerintahan pilihan dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah. yaitu:

a. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan

Usaha perikanan yang potensial di kabupaten Minahasa adalah perikanan laut dan darat, namun potensi perikanan ini belum dilakukan secara intensif dan maksimal yang sebagian besar berada di pesisir pantai Kalasey, Tately, Tanawangko serta pantai Kombi, Kakas Barat dan Langowan Selatan.

Khusus olahan perikanan darat yang terdapat di danau Tondano telah dikembangkan budidaya ikan Nila, Koi dan Betutu, disamping ikan Payangka yang merupakan satwa endemik di Danau Tondano. Ekspor dilakukan oleh pabrik pengolahan ikan, PT. Mikaindo sudah cukup lama beroperasi yang berlokasi di Tanawangko. Adapun perkembangan hasil produksi perikanan ditunjukkan pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126 Hasil Produksi Perikanan 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenis Usaha Perikanan	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
1	Perikanan tangkap					
	a. Perairan Laut	13.089	21.751	45.564	38.441	45.379
	b. Perairan umum					
	- Waduk	3,5	3,3	2,3	2,4	2,1
	- Sungai	46	42	42	44,3	47,9
	- Danau	990	1.135	6.720	5.434,3	5.070
2	Perikanan Budidaya					
	a. Kolam	8,07	5.114	6.721	4.234	22.409
	b. Minapadi	9.064	6.207	4324	3,760	6,675
	c. KJA Air Tawar					
	d. Karamba Jaring Tancap (KJT)	61.876	43.676	44.655	43.652	27.769
	e. Rumput Laut					
	f. KJA Air Laut	5	1	1,4		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Jumlah kelompok nelayan binaan sebanyak 138 kelompok untuk perikanan budidaya dan khususnya untuk perikanan tangkap sebanyak 62 kelompok dengan produksi rata-rata 40,26 ton/tahun, dengan jumlah nelayan dan keluarga nelayan yang ditunjukkan pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127 Jumlah Nelayan/Petani Ikan dan Rumah Tangga Perikanan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan					Jumlah Rumah Tangga Perikanan					Jumlah Kelompok Nelayan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nelayan Perairan Umum	1.548	1.576	1.581	2.567	2.753	516	525	527	855	2.705	103	105	83	78	62
2	Nelayan di laut	4.186	4.814	4.712	5.091	4.957	1.395	1.605	1.570	1.697	5.091	129	221	229	224	214
3	Pembudidaya Ikan Kolam	1.636	1.712	1.802	1.782	1.764	545	571	601	594	588	84	89	91	87	93
4	Pembudidaya ikan Ikan Sawah (Minapadi)	940	985	963	976	1.112	313	329	321	325	370	63	66	51	53	49

5	Pembudidaya ikan di danau	3.260	3.324	3.421	3.436	3.524	1.087	1.108	1.140	1.145	1.174	217	221	223	231	242
	Jumlah	11.570	12.411	12.479	13.852	14.110	3.856	4.138	4.159	4.616	9.928	771	827	677	673	660

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Jumlah produk unggulan perikanan 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128 Jumlah Produk Unggulan Perikanan 2020 Kabupaten Minahasa

No	Jenis Nelayan	Produksi (Ton)
1	Rumput Laut	
2	Ikan Mas	23.998
3	Ikan Nila	32.848
4	Ikan Lainnya	7,00
	Jumlah	56.853

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

b. Urusan pemerintahan bidang pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata yang dimiliki berdasarkan pada sumberdaya alam yang indah merupakan potensi objek wisata yang terus dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara maupun domestik juga dapat menjadi pendorong bagi pengembangan kawasan-kawasan sekitarnya. Potensi objek wisata di Kabupaten Minahasa terdiri dari :

1) Wisata Alam: Wisata air terjun di Kecamatan Pineleng, Danau Tondano, Wisata Pantai di Kecamatan Tombariri, Pineleng, Lembean Timur, Pemandian air panas di Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Kawangkoan, Wisata Religius Bukit Kasih di Kecamatan Kawangkoan, Pacuan Kuda di Kecamatan Tompasso, dan Wisata Hutan Lindung Kawangkoan Utara, Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Eris.

Wisata Budaya/Sejarah: Watu Pinabetengan di Kecamatan Tompasso, Makam DR SAM Ratulangi dan Benteng Moraya di Kecamatan Tondano Barat, Goa Jepang Di Kecamatan Kawangkoan, Makam Imam Bonjol di Kecamatan Pineleng, Makam Kiay Modjo di Kecamatan Tondano Utara, Kuburan Reidel dan Swarz di Kecamatan Tondano Timur dan

Langowan, serta bekas pangkalan lapangan terbang amphibi di Kakas.

2) Wisata Industri/Minat khusus: Kerajinan tangan dari tanah liat di Kecamatan Remboken, produksi olahan kayu di Kecamatan Sonder dan Eris, Souvenir kayu kelapa, sulaman kain. dan wisata agro industri (PAKAKAAN).

3) Wisata Seni dan Budaya: antara lain tari lenso, maengket, katrili, cakalele, musik kolintang, musik bambu dan musik bambu klarinet.

Potensi Wisata danau Tondano di Kabupaten Minahasa menjadi prioritas dalam pengembangan berkaitan dengan agriwisata.

Tabel 2.129 Data Capaian Kinerja Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>persentase pelestarian warisan budaya</i>	42.86	42.86	41.86%	26%	14,88%
2	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	75%	75%	66.70%	66.70%	66.70%
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	35.29%	35.29%	35.29%	19.67%	10.71%
4	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	76.69%	1322.71%	13.83%	80.96%	-97,41%
8	Persentase peningkatan perjalanan	23,52%	23,89%	15%	53%	-86,49%

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota					
9	Tingkat Hunian Akomodasi	56.69%	59.81%	61.96%	65.39%	38.66%
10	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	N/A	N/A	N/A		
11	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	N/A	N/A			

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

c. Urusan pemerintahan bidang pertanian

1) Pertanian

Kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai petani, memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung produksi pertanian.

Namun kondisi yang terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan, banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian/perkebunan untuk dipakai menjadi kawasan permukiman dan perdagangan. Walaupun kondisi luasan di daerah yang sangat besar, ternyata masih banyak lahan yang produktif belum dikelola secara maksimal.

Perkembangan yang terjadi saat ini. dimana telah muncul anomali iklim yang sangat mempengaruhi pola tanam serta produktivitas pertanian, sehingga diperlukan analisis yang lebih akurat untuk meningkatkan produktivitas.

Daya dukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten Minahasa selama ini telah memberikan kontribusi yang

cukup signifikan, antara lain dalam pembentukan PDRB, penyerapan dan penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha serta penyediaan produksi pangan regional/daerah.

Terdapat sekitar 5 jenis komoditas tanaman pangan yang diusahakan masyarakat kabupaten Minahasa yaitu Komoditi padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, talas, dan sayur-sayuran.

Komoditas padi sebesar dengan total produksi sebesar 68.090 ton menempati urutan tertinggi capaian produksi. Potensi dan komoditas pertanian di Kabupaten Minahasa digambarkan melalui Tabel 2.130.

Tabel 2.130 Perkembangan Komoditi Tanaman pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No.	Komoditi	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	13.797	16.490	8.000	10.598	10.172
		Produktivitas(Ku/Ha)	58,75	55,67	40,00	45,00	52,50
		Produksi (Ton)	81.071	91.813	32.000	47.691	53.403
2	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	55	146	5.082	6.132	129
		Produktivitas(Ku/Ha)	27,63	27,67	21,76	22,88	20,00
		Produksi (Ton)	152	404	11.058	14.030	259
3	Jagung	Luas Panen (Ha)	28.795	58.904	30.000	30.677	31.485
		Produktivitas(Ku/Ha)	43,24	42,04	40,00	44,00	57,50
		Produksi (Ton)	124.538	247.675	120.000	134.981	181.037
4	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	700	590	292.00	300	384
		Produktivitas(Ku/Ha)	14,22	14,25	14,36	14,37	20,00
		Produksi (Ton)	996	841	419	431	768
5	Kedele	Luas Panen (Ha)	2.806	461	10.632.00	1.332	639
		Produktivitas(Ku/Ha)	14,18	14,25	14,40	14,22	12,00
		Produksi (Ton)	3.981	657	15.310	1.894	767

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Minahasa. Tahun 2021

Komoditas tanaman perkebunan yang diusahakan penduduk setempat mencakup: kelapa, cengkih, pala, vanili, kopi, kakao, tanaman cassiavera, tanaman aren, tanaman lada dan tanaman kemiri. Pola penanamannya masih secara sederhana pada lahan perkebunan rakyat

yang dikelola langsung oleh rakyat secara turun temurun (Tabel 2.131).

**Tabel 2.131 Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa**

No.	Komoditi	2016		2017		2018		2019		2020	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	18.471	19241	18.471	21.367	13.617	21.347	15.117	22.530	14.007	16.808
2	Cengkih	24939	8012	24939	8812,5	14.571	14.571	17.296	2.314	17.296	2.314
3	Pala	356	57,65	356	57,65	617,50	35,77	617,50	35,77	717,50	38,00
4	Kopi	256,25	115,93	256,25	115,95	305,25	31,71	305,25	31,71	365,25	32,00
5	Vanili	237,25	46,45	237,25	46,45	237,25	46,45	196,00	0,00	206,00	60,00
6	Kakao	46,5	30,31	46,5	30,31	46,50	11,20	46,50	11,00	46,50	3,00
7	Jambu Mete	8,5	4,04	14,5	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Casiavera	93,5	94	93,5	96,3	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	1,00
9	Lada	3,9	3,33	3,9	3,33	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kemiri	20,25	2,8	20,25	2,75	21,50	5,80	21,00	5,85	21,00	6,15
11	Aren	654,5	10,2	653,5	11,36	439,00	16,78	439,00	16,78	439,00	17,00
12	Jarak Pagar	0	0	0	0	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Minahasa. Tahun 2021

2) Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan yang diusahakan penduduk setempat mencakup: kelapa, cengkih, pala, vanili, kopi, kakao, tanaman cassiavera, tanaman aren, tanaman lada dan tanaman kemiri. Pola penanamannya masih secara sederhana pada lahan perkebunan rakyat yang dikelola langsung oleh rakyat secara turun temurun. Tanaman cengkih dan kelapa merupakan dua komoditas yang banyak dikelola oleh masyarakat dan sampai saat ini merupakan andalan produksi perkebunan di Kabupaten Minahasa. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada jenis komoditas ini.

Sebagian tanaman cengkih dan kelapa sudah perlu diremajakan disamping perlunya pembinaan dan sentuhan teknologi dalam meningkatkan hasil turunan komoditas ini, disamping produksi *Virgin*

Coconut Oil (VCO) yang sudah banyak di produksi oleh kelompok usaha masyarakat setempat. Pada tahun 2010 tanaman kelapa yang merupakan salah satu tanaman andalan yang mayoritas terdapat di Kecamatan Tombariri, Tombulu, Pineleng dan Mandolang seluas 7.200 ha dengan produksi 10.250 ton dan diikuti dengan Kecamatan Kombi, Kakas, Kakas Barat, Lembean Timur dan Langowan Selatan seluas 4.700 ha dengan produksi 6.700 ton. Demikian juga dengan cengkeh yang mayoritas terdapat di Kecamatan Kakas. Kakas Barat, Kombi, Langowan Selatan, dan Tombariri dengan total produksi 12,77 ton, yang diikuti dengan Kecamatan Sonder, Lembean Timur, Tombulu dan Pineleng dengan produksi sebesar 3.80 ton.

3) **Peternakan**

Usaha di bidang peternakan cukup memadai terutama jenis ternak ayam, itik, kambing serta babi. Produksi daging relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. bahkan sebagiannya dipasok ke daerah lain.

Pada tahun 2016-2020 usaha peternakan ayam buras, ayam ras (pedaging dan petelur) mengalami peningkatan demikian pula babi, serta itik sangat menonjol, dimana kondisi tersebut juga ikut mendorong upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Areal peternakan rakyat banyak terdapat di Kecamatan Pineleng, Tombulu, Sonder, Kawangkoan, Tompaso. Langowan (Kawasan Agropolitan Pakakaan) dan Kota Tondano.

Tabel 2.132 Data Jumlah Ternak di Kabupaten Minahasa Tahun 2016 – 2020

No.	Populasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	24.193	25.155	25.400	25.906	25.972
2	Babi	124.087	126.156	127.400	129.944	129.721
3	Kuda	3.985	3.129	3.150	3.150	3.056
4	Anjing	68.973	68.973	-	-	
5	Kambing	2.601	2.007	2.007	2.007	2.007
6	Itik	66.378	66.391	67.100	68.443	68.443

No.	Populasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Ayam Buras	721.298	728.171	735.500	750.209	750.208
8	Ayam Ras Petelur	277.750	278.200	278.200	292.110	306.750
9	Ayam Ras Pedaging	1.811.700	1.937.578	1.937.700	1.976.454	1.983.954
10	Puyuh	80.975	80.975	1.937.700	80.975	80.975
11	Kelinci	1.450	1.450	-	-	

Sumber: BPS. Kabupaten Minahasa 2021

d. Urusan pemerintahan bidang kehutanan

Kawasan hutan lindung sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Minahasa meliputi hutan lindung Gunung Mahawu, Gunung Tampusu, Gunung Lembean, Gunung Kawatak, Gunung Soputan, Gunung Masarang, Gunung Lengkoan, Gunung Kaweng, dan hutan lindung/Hutan Bakau Tanjung Kelapa.

Rencana pengembangan hutan lindung meliputi hutan lindung Sungai Laundano-Paso di kecamatan Kawangkoan Utara, hutan lindung Gunung Tatawiran di Kecamatan Pineleng, dan hutan lindung Gunung Kamintong di Kecamatan Eris.

e. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral

Hasil produksi pertambangan di Kabupaten Minahasa di dominasi oleh 5 (lima) jenis bahan tambang dalam bentuk galian yaitu pasir, kerikil, tanah urug, koalin dan batuan.

Disamping pengelolaannya dilakukan oleh pengusaha, namun masih ada pengelolaan galian c pada khususnya dikelola oleh kelompok masyarakat.

Saat ini proses perijinan untuk usaha galian C sudah sangat selektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Berikut ini tabel produksi galian C (Tabel 2.133).

Tabel 2.133 Potensi dan Energi Kabupaten Minahasa

No	Komoditas	Lokasi	Desa/Kelurahan	Potensi	Ket.	
A	MINERAL LOGAM					
1	Pasir Besi	Kec.Langowan	Rumbia	6.000.000	Indikasi	
		Selatan		Ton		
		Kec.Kakas Barat	Bukit Tinggi			
		Kec.Tombariri	Poopo	4.000.000		
			Tanawangko	Ton		
			Teling	1.000.000		
				Ton		
				4.131.374		
			Ton			
2	Emas	Kec. Pineleng Kec. Tondano Timur Kec. Kombi	Agotey Makalonsow Kombi		Terduga Terduga	
B	MINERAL NON LOGAM DAN BANTUAN					
1	Belerang	Kec. Sonder Kec. Langowan Barat Kec. Kawangkoan	Leilem Toraget	60.000 Ton	Indikasi Servey ESDM	
			Kanonang	81.000 Ton		
2	Kaolin	Kec.Langowan Utara Kec.Kawangkoan Barat	Toraget Tempang	1.000.000	Terukur Indikasi	
			Kanonang	Ton		
				500.000 Ton		
3	Tras	Kec. Kawangkoan Barat	Kayuuwi	1.575.000	Indikasi	
			Talikuran	M3		
			Tomasian Atas	600.000 m3	Indikasi	
		Kec.Tombulu	Sawangan	10.000 M3		
		Kec. Tondano	Tonsea Lama	10.00 M3	Indikasi	
		Utara	Makalonsow	7.500 M3		
			Papakelan	7.500 M3	Indikasi	
		Kec.Tondano	Pineleng	10.000 M3		
			Timur'	106.500.000	Terukur	
		Kec. Pineleng	M3			
4	Obsidian	Kec.Tondano Selatan	Tataaran Kasuang	2.575.00 M3	Indikasi	
			Watulambot	600.000 M3		
			Wewelen	5.000 M3		
			Kec. Tondano	7.500 M3		
		Barat				
5	Batu	Kec.Pineleng	Warembungan	7.421.000	Indikasi	
			Tateli	M3		
			Sea	79.743.700		
			Kec. Tombulu	Sawangan		M3
			Kec.Tondano	Wewelen		10.000.000
			Barat	Watulambot		M3
				Noongan I.II		5.000.000
				Kec. Langowan		M3
						3.000.000
						M3
						2.500.000
			M3			
			133.750.000			
			M3			

No	Komoditas	Lokasi	Desa/Kelurahan	Potensi	Ket.
6	Pasir Vulkanis	Kec.Langowan Selatan	Noiongan	30.000 M3	Indikasi
7	Lempung	Kec.Remboken	Pulutan	10.000 M3	Indikasi
			Parepey		
		Kec. Tombariri	Lemoh	9.000 M3	Indikasi
			Lolah		
		Kec. Eris	Touliang Oki	3.000 M3	Indikasi
		Kec. Langowan selatan	Noongan	4.000 M3	Indikas
8	Batu lapis	Kec.Sonder	Timbukar	3.915.000 M3	Indikasi
9	Pasir	Kec.Tombariri		3.000 M3	Indikasi
		Kec.Langowan Barat		2.000 M3	Indikasi
		Kec. Tompaso		3.000 M3	Indikasi
10	Basah	Kec.Langowan	Noongan	7.421.000 M3	Terukur
11	Batu Apung	Kec. Tombariri	Lemoh	15.000 M3	Indikasi
			Ranotongkor		
			Lolah		
		Kec.Eris	Touliang Oki	100.-000 M3	Terukur
		Kec.Tompaso	Tompaso	4.000 M3	Indikasi
12	Energi Listrik	Kec.Tompaso	Talikuran	20 x 2 M	Indikasi
	Tenaga Panas	Kec.Remboken	Kasuratan	40 M	Terpasang
		Kec. Kawangkoan	Kanonang	20 x 2 M	Indikasi
		Kec. Sonder	Leilem	40 M	Indikasi
	Bumi				
13	Energi Listrik Tenaga Mikro	Kec.Kawangkoan Barat	Sungai Royongan	4 M	Indikasi
			Ranowangko		
			Sungai Tincep	4.5 M w	Indikasi' Indikasi
		Kec.kawangkoan Utara	Sungai maasim	2 mw 2x2	Indikasi Indikasi
			Sungai	mw 12 Kw	Indikasi Indikasi
		Kec. Sonder Kec. Tompaso	Ranowangko	14 Kw	Indikasi Indikasi
		Kec. Tombariri	Sungai Kolongan	2 Mw	Indikasi Indikasi
		Kec.Kombi (PNPM)	Sungai Lalumpe	2 Mw	
			Sungai Bulu	2 Mw	
			Sungai Kombi'	2 Mw	
			Sungai	2 Mw	
		Kec. Tombulu Kec. Langowan	Ranowangko		
			Sungai Tombulu		
			Sungai Tombingon		

Sumber : Dinas Perdagangan Kab.Minahasa. Tahun 2018

Seluruh desa dan kecamatan di kabupaten Minahasa telah mendapat sambungan listrik. Ketersediaan dan kebutuhan energi listrik di kabupaten Minahasa cenderung meningkat. Hal ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kemampuan rumah tangga dan industri mengkonsumsi listrik.

Ketersediaan di Kabupaten Minahasa energi listrik sangat besar baik yang sudah berproduksi maupun dalam tahapan eksplorasi yang terdapat di:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tonsea Lama Tondano Utara;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong V dan VI di Sonder (2x20 MW) dan Tompaso (2x20 MW);
3. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Tincep I. II. III. IV dengan kapasitas kurang lebih 3.6 MW. PLTM Kiawa. Kayuwi. Sungai Sawangan. dan Sungai Tuloun; dan
4. Pengembangan potensi PLTP di Remboken, Kawangkoan Barat dan Tompaso.

f. Urusan pemerintahan bidang perdagangan

Perdagangan memegang peran penting dalam perekonomian Kabupaten Minahasa. Terdapat tiga lokasi yang menjadi pusat perdagangan, yaitu: Tondano Barat untuk Kec. Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Utara, Tondano Selatan, Eris, Kombi, Lembean Timur dan Remboken; Kawangkoan untuk Kec. Kawangkoan, Tompaso, Sonder, dan Leilem; Langowan Timur untuk Kec. Langowan Barat, Langowan Timur, Langowan Selatan, Langowan Utara. Kakas, serta Kecamatan Ratahan dan Kec. Belang yang merupakan bagian dari Kab. Minahasa Tenggara. Adapun pasar yang dikelola Pemerintah di Kabupaten Minahasa tahun 2020 sebanyak 9 pasar (Tabel 2.134).

Tabel 2.134 Pasar yang dikelola Pemerintah di Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pasar
1	Tondano Utara	
2	Tondano Timur	
3	Kombi	
4	Eris	
5	Lembean Timur	
6	Kakas Barat	
7	Kakas	1
8	Remboken	1
9	Tondano Selatan	

10	Tondano Barat	2
11	Mandolang	
12	Tombulu	
13	Pineleng	
14	Tombariri Timur	
15	Tombariri	1
16	Sonder	1
17	Kawangkoan Utara	
18	Kawangkoan Barat	
19	Kawangkoan	1
20	Tompaso Barat	1
21	Tompaso	
22	Langowan Utara	
23	Langowan Selatan	
24	Langowan Barat	
25	Langowan Timur	1
	Jumlah Pasar	9

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Tabel 2.135 menunjukkan potensi perizinan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan wajib tera/tera ulang yang ada di pasar daerah di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.135 Potensi UTTP dan Wajib Tera/Tera Ulang yang ada di Pasar Daerah Di Kabupaten Minahasa

N o	Jenis UTTP	Tondano	Tompaso	Kawangkoan	Langowan Timur	Remboke n	Sonde r	Kaka s	Tombariri
1	Meteran								
	Meteran Kayu	4	1	2	2	1	2		1
2	Takaran								
	Takaran Basah	71	8	9	50	5	4	4	5
	Takaran Kering	191	42	126	70	97	74	74	75
	Timbangan								
	Timbangan Elektronik	9	5	7		3			2

3	Timbangan Pegas	201	45	130	48	82	56	56	38
	Timbangan Cepat	-							
	Neraca	4		21	1		2	2	2
	Dacin	9	1						
	Timbangan Milisimal	-		8	1	1	1	1	3
	Timbangan Santisimal	11							
	Timbangan Desimal								
	Timbangan Bobot								
	Timbangan Meja Beraner								

g. Urusan pemerintahan bidang perindustrian

Kondisi perindustrian di Kabupaten Minahasa tercermin dari data industri yang terdiri dari industri pengolahan ikan beku oleh PT Mikaindo di Tombariri dan industri kecil menengah (IKM) yang terdiri dari IKM pangan (73 unit), sandang (22 unit), kimia dan bahan bangunan (92 unit), logam dan elektronika (214 unit) dan kerajinan (19 unit). Tenaga kerja yang diserap oleh IKM logam dan elektronika adalah yang terbesar sebanyak 1.235 orang atau 50,83% dari tenaga kerja keseluruhan yang berjumlah 2.424 orang.

Namun dari nilai investasi (NI), yang paling tinggi adalah IKM pangan. Tumbuh dan berkembangnya IKM baru terpusat pada satu tempat sesuai dengan ketersediaan bahan baku maupun oleh faktor lainnya.

Usaha industri yang tersebut kemudian membentuk sentra-sentra produksi, seperti: pengolahan VCO di Desa Lemoh Kecamatan Tombariri, pengolahan kacang goreng di Kecamatan Kawangkoan, usaha meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder, usaha keramik di Desa Pulutan Kecamatan Remboken dan usaha pandai besi di Tondano Utara.

2.3.4. Unsur Pendukung urusan pemerintahan

Unsur-unsur pendukung pemerintahan terbagi dua yaitu unsur Sekretariat Daerah dan Unsur Sekretariat DPRD

a. Unsur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan unsur pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Minahasa yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Minahasa. Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan Administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa terdiri atas 3 (tiga) Asisten; 12 (dua belas) Bagian dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian.

Tabel 2.136 Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0
4	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	53.24%	28.48%	24.32%	22.20%	17.07%
5	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,24	28,48	24,32	22,20	17,07
6	Presentase kebijakan strategis bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Sumber Sekretariat Kabupaten Kabupaten Minahasa Tahun 2021

b. Unsur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pemerintahan yang memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD membawahi 3 (tiga) Bagian dan 8 (delapan) Sub Bagian.

Hubungan bupati dengan DPRD diupayakan membina hubungan yang serasi, seimbang dan dinamis antara pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif, melalui rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, dan peninjauan lapangan

**Tabel 2.137 Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	5	5	4	5	5
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Jumlah Ranperda (Ranperda eksekutif dan Ranperda Inisiatif) yang difasilitasi	5	5	4	5	5
5	Persentase Propemperda yang ditindaklanjuti	65%	52%	67%	55%	57%

Sumber Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2021

2.3.5. Unsur penunjang urusan pemerintahan

a. Unsur Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan utama dalam menyusun dokumen perencanaan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukan perencanaan partisipatif “Participatory Planning” yang menjadi tuntutan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan Kabupaten Minahasa harus mengantisipasi pertumbuhan daerah yang dinamis dan pesat, dengan memperhatikan kabupaten/kota tetangga yang saling mempengaruhi dan saling bersinergis. Perencanaan yang dilakukan memadukan kebijakan secara nasional “top down” dan usulan aspirasi masyarakat yang dimulai dari bawah “bottom up planning” disamping mendapat masukan teknokrat dan politis yaitu melalui musrenbang

desa/kelurahan kemudian musrenbang kecamatan, dan kabupaten secara berjenjang. Dokumen perencanaan yang dijadikan acuan adalah RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RAPBD, dan dokumen pendukung lainnya antara RTRW dan RDTR. Kabupaten Minahasa telah memiliki dokumen RPJPD Tahun 2008-2028 dan penyelesaian Perda dokumen RTRW Tahun 2013-2033. Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang Sistem pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga capaian kinerja sulit diukur. Mutu sumberdaya manusia, khususnya kemampuan di bidang perencanaan dan organisasi masih rendah.

b. Unsur Keuangan

Menurut PP Nomor 12 tahun 2019 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah haruslah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan daerah di Indonesia yang ditetapkan dengan Perda. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk Kabupaten Minahasa SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Minahasa memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sehingga harus dipertahankan pengelolaan administrasi keuangan/pembangunan dan asset daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah, diarahkan pada penginventarisasian dan penggunaan aset-aset milik daerah yang efektif dan efisien serta ekonomis, dan telah dilakukan penelitian barang melalui sensus barang

dan penertiban penggunaan barang aset daerah, terutama di tingkat dinas daerah dan kecamatan

c. Unsur Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Diklat dan Pengembangan SDM.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Pendidikan dan Pelatihan juga merupakan tanggung jawab dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang diberikan kepada pegawai atau jika ada hal-hal baru dalam pekerjaan.

Pada dasarnya pendidikan bertujuan mendidik seluruh anggota organisasi tentang mengapa sesuatu aktifitas dilakukan, sedangkan pelatihan bertujuan melatih seluruh anggota organisasi tentang bagaimana melakukan aktivitas kegiatan pada suatu organisasi.

e. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.

Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Minahasa masih belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.

Kendala terkait dengan hal tersebut antara lain :

- 1) Lemahnya peran kelembagaan riset dan hasil IPTEK yang diterapkan belum optimal ;
- 2) Lemahnya pengembangan daya inovasi;
- 3) Kurangnya kemitraan dengan lembaga-lembaga yang terkait serta kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 4) Belum adanya kelembagaan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dan jasa;
- 5) Belum optimalnya pengembangan sumberdaya manusia berkeahlian tinggi.

2.3.6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan

Penyelenggaraan fungsi pengawasan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan pola tindak dan mental aparatur yang berdasarkan etika serta moral menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta terciptanya penegakan supremasi hukum.

2.3.7. Unsur kewilayahan

Unsur kewilayahan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai sebuah perangkat daerah organisasi ini memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya. selain itu Camat sebagai pemimpin kecamatan mendapatkan kewenangan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

Selain kedua organisasi sebagaimana PP Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, unsur kewilayahan lain yang setipe tapi memiliki status yang berbeda adalah Desa atau Pemerintah Desa. Keberadaan desa dibedakan dengan kelurahan mengingat statusnya sebagai daerah otonom asli.

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota. Pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'. Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, ujung tombak Pelayanan, ujung tombak Pemberdayaan dan ujung tombak pembangunan.

Meskipun pemberdayaan unsur kewilayahan belum dilaksanakan secara optimal, akan tetapi hal tersebut tidak berarti belum ada upaya dari pemerintah untuk melaksanakannya.

Di Kabupaten Minahasa terdapat 25 wilayah Kecamatan

2.3.8. Urusan pemerintahan umum

Keadaan Pemerintahan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi seluas- luasnya nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui inventarisasi/pengkajian urusan pemerintahan daerah, mendayagunakan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan. Kelembagaan, aparatur pelaksana, keuangan dan pembiayaan. dan penetapan peraturan daerah sebagai salah satu landasan yuridis pelaksanaan otonomi daerah, termasuk hubungan yang serasi antar daerah.

Aspek kelembagaan, yakni penyesuaian beberapa peraturan daerah yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan daerah. Adapun organisasi perangkat daerah di Kabupaten Minahasa terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, 16 dinas daerah, inspektorat, Bappelitbangda, Lembaga Teknis Daerah (yang terdiri dari 8 Badan. 1

Kantor. 1 RSUD Daerah), 1 satuan polisi pamong praja, 1 kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT), 1 badan penyuluh pertanian perkebunan perikanan dan kehutanan (BP4K), 1 perusahaan daerah, 25 kecamatan, 227 desa, dan 43 kelurahan.

Aspek Ketatalaksanaan. yaitu melakukan inventarisasi dan penajaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yakni hukum dan keamanan tahun 2017 terdapat produk hukum daerah yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 buah peraturan daerah (Perda), 490 surat keputusan bupati, dan 2 buah instruksi bupati.

Adapun produk hukum Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Produk	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Bupati	69	42	52	54	44
2	Surat Keputusan Bupati	549	718	620	645	361
3	Peraturan Daerah	8	4	4	6	3
4	Instruksi Bupati	4	3	4	3	0

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Birokrasi sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran, program, dan kegiatan di daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dalam rangka tugas pokok birokrat tersebut, dibutuhkan perwujudan nyata tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Untuk pemberdayaan aparatur daerah, maka citra dan peran pemerintah daerah harus dibenahi berdasarkan tata pemerintahan yang lebih efisien dan efektif agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

Pemekaran wilayah Minahasa yang merupakan aspirasi masyarakat yang saat diwacanakan untuk daerah Kabupaten Minahasa Barat dan Kota Langowan.

Bidang politik merupakan bagian dari pemerintahan umum karena terkait dengan stabilisasi. Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2018 merupakan contoh sukses pelaksanaan politik daerah. Data pemilihan tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berhak memilih 265.835 orang dan yang menggunakan hak pilih 231.714 orang, ini berarti kesadaran masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesar 80,40%.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139 Jumlah LSM aktif Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM Terdaftar	33	42	46	48	52
2	Jumlah LSM tidak Aktif	13	9	9	9	9
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	20	33	37	39	43

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah dan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.140 Data Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan fasilitasi kegiatan TKD/FKDM	Peningkatan Kapasitas FKDM (2 Kegiatan)	Peningkatan Kapasitas FKDM (1 Kegiatan)	Peningkatan Kapasitas FKDM (1 Kegiatan)	Peningkatan Kapasitas FKDM (1 Kegiatan)	Anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terfasilitasi (5 Orang)
						Anggota TKD (Tim Kewaspadaan Daerah) Kab. Minahasa yang terfasilitasi (8 Orang)
2	Data Hasil Perbaikan Indikator Kinerja Program					

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Kabupaten Minahasa terkenal dengan besarnya toleransi kehidupan antar umat beragama, hal ini terjadi berkat dukungan organisasi yang sangat aktif berperan didalamnya yaitu BKSAU, FKUB, dan BAMAG yang didukung dengan pola kehidupan masyarakat yang religius (Tabel 2.141).

**Tabel 2.141 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa**

No	Bangunan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio
1	Mesjid	37	23720	1,56	37	25094	1,47	32	16.604	518,9	32	16.750	523,4	33	16.943	513,4
2	Gereja	903	288252	3,13	964	278441	3,46	940	30.8721	328,4	944	308.792	327,1	962	309.225	321,4
3	Pura	1	137	7,30	10	499	20,04	4	128	32	4	128	32	4	128	32
4	Vihara		142	0,00	3	530	5,66	1	29	29	1	29	29	1	29	29
5	Kelenteng								7			7			7	
	Jumlah	941	292251	3,22	1.014	304.564	3,42	977	325.489	333,1	981	325.706	332,1	1000	326.332	326,3

Sumber : Bagian Setda Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

2.4.Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.

Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita. yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan Tabel 2.142 dapat disimpulkan bahwa angka konsumsi beras per kapita menurun dari tahun 2016 s.d Tahun 2019.

Tabel 2.142 Angka Konsumsi Beras Per Kapita Pertahun Kabupaten Minahasa

NO	KECAMATAN	KONSUMSI KB/KAPITA/TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tondano Utara	132,4	132,4	94,1	94,1	94,1
2	Tondano Barat	133,6	132,0	93,9	93,9	93,9
3	Tondano Timur	133,5	133,7	95,1	95,1	95,1
4	Tondano Selatan	133,8	134,6	95,7	95,7	95,7
5	Remboken	133,0	133,3	94,8	94,8	94,8
6	Eris	132,8	132,7	94,3	94,3	94,3
7	Kombi	129,9	129,9	92,4	92,4	92,4
8	Lembean Timur	129,1	129,2	91,8	91,8	91,8
9	Kakas Barat	135,5	135,4	96,3	96,3	96,3
10	Kakas	134,4	134,5	95,6	95,6	95,6
11	Langowan Barat	134,6	134,5	95,6	95,6	95,6
12	Langowan Timur	135,2	135,3	96,2	96,2	96,2
13	Langowan Selatan	134,6	134,6	95,7	95,7	95,7
14	Langowan Utara	134,3	134,4	95,6	95,6	95,6
15	Tompaso	134,5	134,4	95,6	95,6	95,6
16	Kawangkoan	139,5	133,4	94,8	94,8	94,8
17	Kawangkoan Barat	133,7	133,8	95,1	95,1	95,1
18	Kawangkoan Utara	133,6	133,5	95,1	95,1	95,1
19	Sonder	134,1	134,4	95,6	95,6	95,6
20	Tombariri	132,1	132,2	94,0	94,0	94,0
21	Pineleng	132,0	132,1	93,9	93,9	93,9
22	Tombulu	133,5	133,3	94,8	94,8	94,8
23	Tombariri Timur	132,4	132,3	94,8	94,8	94,8
24	Mandolang	133,5	133,4	94,8	94,8	94,8
25	Tompaso Barat	134,7	134,6	95,7	95,7	95,7
	Rata-rata	133,4	133,4	94,9	94,9	94,9

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.143 dapat disimpulkan bahwa angka konsumsi beras rumah tangga per kapita menurun dari tahun 2016 s.d Tahun 2020.

Tabel 2.143 Angka Konsumsi Beras Rumah Tangga Per-Kapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eris	132,8	132,7	94,3	94,3	94,3
2	Kakas	134,4	134,5	95,6	95,6	95,6
3	Kakas Barat	135,5	135,4	96,3	96,3	96,3
4	Kawangkoan	133,5	133,4	94,8	94,8	94,8
5	Kawangkoan Barat	133,7	133,8	95,1	95,1	95,1
6	Kawangkoan Utara	133,7	133,8	95,1	95,1	95,1
7	Kombi	129,9	129,9	92,4	92,4	92,4
8	Langowan Barat	135,6	134,5	95,6	95,6	95,6
9	Langowan Selatan	134,6	134,6	95,7	95,7	95,7
10	Langowan Timur	135,2	135,3	96,2	96,2	96,2
11	Langowan Utara	134,3	134,4	95,6	95,6	95,6
12	Lembean Timur	129,1	129,1	91,8	91,8	91,8
13	Pineleng	132,0	132,1	93,9	93,9	93,9
14	Mandolang	133,5	133,4	94,8	94,8	94,8
15	Remboken	133,0	133,3	94,8	94,8	94,8
16	Sonder	134,1	134,4	95,6	95,6	95,6
17	Tombariri	132,1	132,2	94,0	94,0	94,0
18	Tombariri Timur	133,5	133,4	94,8	94,8	94,8
19	Tombulu	133,5	133,3	94,8	94,8	94,8
20	Tompaso	134,5	134,4	95,6	95,6	95,6
21	Tompaso Barat	137,7	134,6	95,7	95,7	95,7
22	Tondano Barat	133,6	132,0	93,9	93,9	93,9
23	Tondano Selatan	134,8	134,6	95,7	95,7	95,7
24	Tondano Timur	133,5	133,7	95,1	95,1	95,1
25	Tondano Utara	132,4	132,4	94,1	94,1	94,1
	Rata-Rata / Kapita	133,4	133,4	94,9	94,9	94,9

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Pengeluaran konsumsi

non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan). Kemajuan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator yang diantaranya adalah dari sisi belanja atau pengeluaran. Adapun pengeluaran/belanja makanan dan non makanan tahun 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.144.

Tabel 2.144 Pengeluaran/Belanja Makanan dan Non Makanan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

Kelompok Komoditas	Persentase
Makanan/Food	
Padi-padian/Cereals	6,39
Umbi-umbian/Tubers	0,40
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	5,01
Daging/Meat	2,16
Telur dan susu/Eggs and milk	2,50
Sayur-sayuran/Vegetables	3,46
Kacang-kacangan/Legumes	0,62
Buah-buahan/Fruits	3,18
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	1,14
Bahan minuman/Beverage stuffs	1,46
Bumbu-bumbuan/Spices	0,66
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	0,50
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	17,16
Rokok/Cigarettes	5,62
Jumlah makanan/Total food	50,26
Bukan makanan/Non-food	
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	23,59
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	11,25
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	3,61
Komoditas tahan lama/Durable goods	6,10

Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	3,63
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	1,56
Jumlah bukan makanan/Total non-food	49,74
Jumlah/Total	100

Sumber : Kabupaten Minahasa dalam Angka Tahun 2021

Kemampuan pemenuhan kalori masyarakat pada umumnya mengalami peningkatan diatas 2 juta kalori / hari. Pada golongan pengeluaran kedua nilai konsumsi rata-rata hanya 1.285 kilo kalori dan yang terbesar adalah 3.748 kilo kalori.

Sedangkan untuk Pengeluaran Perkapita Kabupaten Minahasa naik dari Tahun 2016 sebesar Rp.11.827.000,00 naik hingga Tahun 2019 Sebesar Rp. 12.720.000,00 dan Turun kembali di Tahun 2020 menjadi Rp.12.395.000,00. Dapat dilihat seperti pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Minahasa	11.827.000	12.026.000	12.319.000	12.720.000	12.395.000

b. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa menunjukkan peningkatan (Tabel 2.146).

Tabel 2.146 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	NTP	93.94	95.16	95.38	94.33	98.79

Sumber : BPS Sulawesi Utara. Tahun 2021

c. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

a). Aksesibilitas daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan:

- 1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (km)	566	566	681.15	681.15	681.15
2	Jumlah Kendaraan	46.518	55.305	57.240	59.244	62250
3	Rasio (km/unit kendaraan)	82,2	97,7	84,0	87,0	91,39

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa 2021

Selanjutnya dapat dilihat informasi tentang jarak tempuh akan kota besar dan jumlah kendaraan (Tabel 2.148).

Tabel 2.148 Jarak dan Waktu Tempuh

No	Aksesibilitas	Jarak	Waktu
1	Tondano-Bandara Sam	45 Km	1 Jam 30 Menit
2	Ratulangi Tondano – Manado	30 Km	1 Jam
3	Tondano – Pelabuhan Bitung	62 Km	1 Jam 30 Menit

Sumber : Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

2) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.149 Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun terus meningkat

Tabel 2.149 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang	Orang	21.020.000	19.824.000	12.817.952	12.553.590	12.919.229
2.	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

b). Penataan wilayah

1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.150.

Tabel 2.150 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi RTRW (Ha)	99.230	100.234	100.600	101.520	102.000.13
2.	Rencana Peruntukan RTRW	118.869	118.869	118.869	112.929.13	112.929.13
3.	Rasio (1/2)	0,83	0,84	0,85	0,89	0,9

Sumber : Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

2) Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah Kabupaten Minahasa sebesar 121.041.30 ha, namun terdapat beberapa kawasan yang tidak termasuk produktif sebesar 29.103 ha yang terdiri dari kawasan kehutanan seluas 14.816.00 ha, kawasan permukiman seluas 6.344.11 ha. kawasan sempadan pantai seluas 759.00 ha, kawasan sempadan sungai seluas 3.562.00 ha. kawasan sekitar danau/embung seluas 418.00 ha, kawasan sekitar mata air 6.40 ha, kawasan ruang terbuka hijau seluas 353.00 ha, dan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas 2.845.00 ha.

Sehingga luas kawasan produktif sebesar 87.4911 ha. Adapun kawasan budidaya seluas 89.815 Ha. Berikut Tabel 2.151 menunjukkan rasio luas wilayah produktif Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.151 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah produktif	81.430	82.568	83682	94537	102037.4
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	98.181	98.181	98.181	112929.13	112929.13
	Rasio (1./2.)	0,83	0,84	0,85	0,84	0,9

Sumber: : Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

3) Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio

luas wilayah industri tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152 Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Industri	10.2	11.5	42.5 Ha	42.5 Ha	562 Ha
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	98.181	98.181	98.181	112.929.13	112.929.13
	Rasio (1./2.)	0,00010	0,00012	0,000433	0,000376	0,00498

Sumber: Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

4) Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah kebanjiran tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	134	156	1250	3250	4785
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	98.181	98.181	98.181	112929.13	112929.13
	Rasio (1./2.)	0.0013	0.0016	0.013	0.029	0.043

Sumber:: Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

5) Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah kekeringan tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Kekeringan	0	0	0	0	0
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	98181	98181	98181	112929.13	112929.13
	Rasio (1./2.)	0	0	0	0	0

Sumber : Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

6) Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah perkotaan tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.155.

Tabel 2.155 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Perkotaan	9.250	10.600	7852	6523	5066.66
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	98.181	98.181	98181	112929.13	112929.13
	Rasio (1./2.)	0,094	0,108	0,079	0,058	0,045

Sumber : Bappelitbangda Minahasa. Tahun 2021

c). Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang- cabangnya.

1) Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d). Ketersediaan air bersih

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih. Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah

dimasak. Air Minum (drinking water) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air bersih dapat dibedakan atas: Air Hujan, Air Sungai dan Danau, Mata Air, Air Sumur Dangkal, dan Air Sumur Dalam. Sajian persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.156.

Tabel 2.156 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Minahasa

No	Sumber Air Bersih	2016	2017	2018	2019	2020
1	Leding(Perpipaan)	22.254	83.9	211,494	53	40,485
2	Sumur Lindung	25.353	84.77	54,987	10,750	28,405
3	Sumur Tidak Terlindung			-	2,687	5,417
4	Mata Air Terlindung	8.641	92.98	5,212	-	520
5	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	39
6	Sungai	-	-	-	-	
7	Danau/Waduk			-	-	641
8	Air Hujan	234	51.72	360		-
9	Air Kemasan			-		350
10	Lainnya			17,632		808
11	Total Jumlah Rumah Tangga yg menggunakan air bersih	249.457	77.425	324,000	299,700	76,665
12	Jumlah Rumah Tangga	94.027	106.425	338,364	335,104	85,408
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	77.97	72.55	95.75	89.43	89.76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

e). Fasilitas listrik dan telepon

1) Jumlah Pelanggan yang menggunakan listrik PLN

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan listrik pada masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Kabupaten Minahasa

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan	66.943	68.733	70.317	72.054	74.183

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2021

f). Ketersediaan restoran Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Adapun jenis, kelas dan jumlah restoran Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.158.

Tabel 2.158 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Usaha Restoran Golongan Tertinggi	7	208	3	250
2	Usaha Restoran Golongan Menengah	6	80	2	132
3	Usaha Restoran Golongan Terendah	0	0	0	0
4	Usaha Rumah Makan Kelas A	5	50	14	484
5	Usaha Rumah Makan Kelas B	8	30-60	14	368
6	Usaha Rumah Makan Kelas C	79	377	59	236
7	Usaha Rumah Makan Kelas D	0	0	2	8

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut, dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Adapun jumlah restoran/rumah makan aktif menurut kecamatan tahun 2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.159.

Tabel 2.159 Jumlah Restoran/Rumah Makan Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	2020		
		Restoran/ RM	Tempat Duduk	Klasifikasi
1	Langowan Timur	17	50	C3
2	Langowan Selatan	3	10	C3
3	Langowan Utara	2	10	C3
4	Langowan Barat	2	15	C2
5	Kakas	2	15	C2
6	Remboken	2	20	C1
7	Kawangkoan	20	250	C1,C2,C3
8	Sonder	3	115	B1,C2
9	Tombariri	3	25	C2,C3
10	Mandolang	15	580	A1. A2. B1. B2. C1. C3
11	Tondano Utara	3	15	C2

12	Tondano Barat	39	850	C1,C2,C3
13	Tondano Selatan	8	320	A1,B1,C1,C3
TOTAL		119		

g). Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

1) Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan.

Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional.

Persyaratan Dasar: Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha).
 Persyaratan Teknis: Unsur Fisik. Unsur Pengelolaan. Unsur Pelayanan.
 Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis.
 Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah

kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Adapun Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.160.

Tabel 2.160 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kabupaten Minahasa

No	Jenis Penginapan / Hotel	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	Hotel Bintang 5															
1	Hotel Bintang 4	1	249	498	1	249	498	1	249	498	2	339	658	2	339	658
2	Hotel Bintang 3	1	25	35	1	25	35	1	32	40	1	32	40	1	32	40
3	Hotel Bintang 2	2	51	60	2	41	60	2	54	64	2	70	86	2	70	86
4	Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan Penginapan Lainnya)	27	224	356	27	224	356	36	316	424	36	406	500	36	406	500
	TOTAL	31	549	949	31	539	949	40	651	1026	41	847	1284	41	847	1284

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Pada Tabel 2.161 menunjukkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Minahasa baik mancanegara maupun wisatawan nusantara tiap tahun mengami peningkatan.

Tabel 2.161 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah
1	2016	32.125	808	840.125
2	2017	74.758	1.001.000	1.075.758
3	2018	85.100	1.151.150	1.236.250
4	2019	154.400	1.760.000	1.914.400
5	2020	3.992	237.726	241.718

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Minahasa. 2021

Pada Tabel 2.162 menunjukkan potensi wisata di Kabupaten Minahasa tahun 2020 berdasarkan objek wisata dan penunjang pariwisata.

**Tabel 2.162 Potensi Wisata di Kabupaten Minahasa
Tahun 2020**

No	Jenis	2020
A	Objek Wisata	
1	Objek Wisata Alam	72
2	Objek Wisata Buatan	36
3	Objek Wisata Budaya	41
B	Penunjang Pariwisata	
1	Hotel	41
2	Restauran	32
3	Rumah Makan	103
4	Jasa Travel	11
5	Panti Pijat	1
6	Art Shop	5
7	Pengrajin	18
8	Billyard	1
9	Café	3
10	Salon	12
11	Diskotik	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Minahasa.Tahun 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a). Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 0,09 dan naik pada tahun 2017 sebesar 0,13. Kondisi dengan angka yang cukup tinggi ini menjadikan keamanan sebagai hal yang harus diperhatikan.

b). Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam

periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Adapun jumlah demonstrasi Tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.163.

Tabel 2.163 Jumlah Demonstrasi Tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	1	2	n/a	n/a	n/a
2	Ekonomi	6	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	7	2	10	7	n/a

Sumber: Polres Minahasa. Tahun 2021

c). Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Proses perijinan sudah dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (KPTSA), dimana sudah ada prosedur tetap (protap) yang pada prinsipnya transaksi pembayaran harus dilakukan di bank terdekat (Bank Sulut). Pada Tabel 2.164 dapat dilihat jumlah, jenis, dan lamanya pelaksanaan pengurusan perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Minahasa, serta jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan produksinya. Dari data tersebut diatas lama rata-rata pengurusan perijinan adalah 3 hari per surat ijin.

Tabel 2.164 Jumlah, Jenis, dan Lamanya Pelaksanaan Pengurusan Perijinan Tahun 2020 Kabupaten Minahasa

NO	JENIS PERIZINAN	LAMA MENGURUS (Hari)	JUMLAH PERSYARATAN
1	Izin Lokasi	5 (Lima) Hari	15 Persyaratan
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 (Tiga) Hari	12 Persyaratan
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 (Tiga) Hari	18 Persyaratan
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 (Tiga) Hari	17 Persyaratan
5	Izin Usaha	3 (Tiga) Hari	16 Persyaratan
6	Izin Usaha Perluasan	3 (Tiga) Hari	17 Persyaratan
7	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)	3 (Tiga) Hari	17 Persyaratan
8	Izin Usaha Perubahan	3 (Tiga) Hari	16 Persyaratan
9	Izin Operasional Sekolah SD dan SMP	3 (Tiga) Hari	18 Persyaratan
10	Izin Operasional PAUD (Taman Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak)	3 (Tiga) Hari	9 Persyaratan
11	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	3 (Tiga) Hari	9 Persyaratan
12	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	3 (Tiga) Hari	9 Persyaratan
13	Izin Usaha Peternakan	3 (Tiga) Hari	15 Persyaratan
14	Izin Lingkungan	3 (Tiga) Hari	3 Persyaratan
15	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 (Tiga) Hari	11 Persyaratan
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14 (Empat Belas) Hari	20 Peryaratan
17	Izin Usaha Industri (IUI)	3 (Tiga) Hari	11 Peryaratan
18	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 (Tiga) Hari	14 Peryaratan
20	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
21	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3 (Tiga) Hari	12 Peryaratan
22	Tanda Daftar Industri (TDI)	3 (Tiga) Hari	11 Peryaratan
23	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan

NO	JENIS PERIZINAN	LAMA MENGURUS (Hari)	JUMLAH PERSYARATAN
24	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB)	3 (Tiga) Hari	8 Peryaratan
25	Surat Izin Menampung dan Mengirim Cap Tikus (SIM-MCT)	3 (Tiga) Hari	7 Peryaratan
26	Izin Trayek	3 (Tiga) Hari	5 Peryaratan
27	Izin Usaha Angkutan	3 (Tiga) Hari	7 Peryaratan
28	Izin Pengembangan Terminal Khusus Sungai dan Danau	3 (Tiga) Hari	7 Peryaratan
29	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
30	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
31	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
32	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
33	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
34	Tanda Daftar Usaha penyedia akomodasi	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
35	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Rekreasi	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
36	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
37	Tanda Daftar Jasa Konsultasi Pariwisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
38	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
39	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
40	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
41	Tanda Daftar Usaha SPA	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
42	Izin Lembaga Latihan Kerja (LPK)	3 (Tiga) Hari	6 Peryaratan
43	Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	3 (Tiga) Hari	20 Peryaratan
44	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	3 (Tiga) Hari	20 Peryaratan

NO	JENIS PERIZINAN	LAMA MENGURUS (Hari)	JUMLAH PERSYARATAN
45	Perpanjangan IMTA	3 (Tiga) Hari	8 Peryaratan
46	Pencatatan Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	3 (Tiga) Hari	7 Peryaratan
47	Pengesahan Peraturan Perusahaan	3 (Tiga) Hari	7 Peryaratan
48	Izin Operasional Rumah Sakit	7 (Tujuh) Hari	9 Peryaratan
49	Izin Mendirikan Rumah Sakit	3 (Tiga) Hari	7 Peryaratan
50	Izin Operasional Puskesmas	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
51	Izin Praktek Penata Anastesi	3 (Tiga) Hari	8 Peryaratan
52	Izin Praktek Bidan (SIPB)	3 (Tiga) Hari	12 Peryaratan
53	Izin Praktek Perawat (SIPP)	3 (Tiga) Hari	12 Peryaratan
54	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	3 (Tiga) Hari	11 Peryaratan
55	Izin Praktek Kedokteran	3 (Tiga) Hari	8 Peryaratan
56	Izin Praktek Perawat Gigi dan Mulut	3 (Tiga) Hari	18 Peryaratan
57	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	3 (Tiga) Hari	17 Peryaratan
58	Izin Toko Obat	3 (Tiga) Hari	14 Peryaratan
59	Izin Apotik	3 (Tiga) Hari	16 Peryaratan
60	Izin Balai Pengobatan	3 (Tiga) Hari	14 Peryaratan
61	Izin Klinik Bersalin /BKIA	3 (Tiga) Hari	13 Peryaratan
62	Izin Laboratorium Swasta	3 (Tiga) Hari	12 Peryaratan
63	Izin Optikal	3 (Tiga) Hari	11 Peryaratan
64	Izin Klinik Kecantikan	3 (Tiga) Hari	19 Peryaratan
65	Izin Kerja Tenaga Sanitari	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
66	Izin Kerja Tenaga Gizi	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
67	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
68	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
69	Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Fisioterapi	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
70	Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
71	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
72	Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optomtris	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan

NO	JENIS PERIZINAN	LAMA MENGURUS (Hari)	JUMLAH PERSYARATAN
73	Izin Pangkalan LPG	3 (Tiga) Hari	12 Peryaratan
74	Izin Lokasi Pemasangan Reklame	3 (Tiga) Hari	6 Peryaratan
75	Rekomendasi/Persetujuan Prinsip	3 (Tiga) Hari	15 Peryaratan
76	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup (SPPL)	3 (Tiga) Hari	3 Peryaratan
77	Rekomendasi Radio Siaran	3 (Tiga) Hari	9 Peryaratan
78	Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar	3 (Tiga) Hari	3 Peryaratan
79	Rekomendasi Distributor Pupuk	3 (Tiga) Hari	2 Peryaratan
80	Rekokmendasi Pemberian Usaha Pertambangan	3 (Tiga) Hari	10 Peryaratan
81	Fiskal Daerah	3 (Tiga) Hari	3 Peryaratan
82	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3 (Tiga) Hari	2 Peryaratan

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Jumlah ijin yang terbit selang 2016-2020 Kabupaten Minahasa terlihat adanya peningkatan (Tabel 2.165).

Tabel 2.165 Jumlah Ijin Yang Terbit Selang 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Tahun	Jumlah Ijin
1	2016	2.114
2	2017	2.584
3	2018	2.131
4	2019	1.844
5	2020	2.742
	Jumlah	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

d). Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. Adapun jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.166.

Tabel 2.166 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10
2	Jumlah Insentif pajak yang mendukung iklim investasi	10	10	10	1	1
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	5	3	3	3	3
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	5	3	3	0	0

Sumber : Dinas Kabupaten Minahasa. Tahun 2020

e). Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Adapun jumlah Perda yang mendukung iklim usaha tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.167.

**Tabel 2.167 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda terkait perijinan	1	1	0	0	0
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	0	0	0	0	0
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan. perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Selang 5 tahun terakhir telah terbit 5 (lima) buah Perda tentang perijinan. Adapun jumlah produk hukum tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.168.

**Tabel 2.168 Jumlah Produk Hukum Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa**

No	Produk	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Bupati	69	42	52	54	44
2	Surat Keputusan Bupati	549	718	620	645	361
3	Peraturan Daerah	8	4	4	6	3
4	Instruksi Bupati	4	3	4	3	0

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

f). Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju, dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan, dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Desa atau Kelurahan yang Berswasembada}}{\text{Jumlah Desa atau Kelurahan}} \times 100$$

Adapun desa/kelurahan swadaya, swakarya dan swasembada tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.169.

Tabel 2.169 Desa/ Kelurahan Swadaya, Swakarya Dan Swasembada Tahun 2016-2020 di Kabupaten Minahasa

NO	PRODUK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa/Kelurahan Swadaya	85	85	38	50	53
2	Desa/Kelurahan Swakarya	153	153	2	2	1
3	Desa/Kelurahan Swasembada	32	32	0	3	1
4	jumlah Desa/Kelurahan	270	270	270	270	270
5	Persentase Desa/Kelurahan Berstatus Swasembada	11,85	11,85	0%	1,1%	0,37%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Adapun rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa (ganti table Minahasa Dalam Angka) ditunjukkan pada Tabel 2.170.

**Tabel 2.170 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan S1	2669	3644	3837	3242	1979
2	Jumlah Lulusan S2	191	297	145	144	108
3	Jumlah Lulusan S3	-	176	5	10	15
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	2860	3941	3987	3396	2102
5	Jumlah Penduduk	332.190	335.321	338364	341176	347290
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5 x 10.000)	86,09	117,52	117,83	99,54	60,53

Sumber: Universitas Negeri Manado. Tahun 2021

2) Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.

Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap

sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependencyratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Adapun rasio ketergantungan tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.171.

Tabel 2.171 Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	76.122	75.887	75626	75673	72337
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	28.647	29.879	31253	32343	37940
3	Jumlah Penduduk Usia tidak produktif (1) & (2)	104.769	105.766	106879	108016	110277
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	227.421	229.555	231485	233160	237013
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,068	46,074	46,17	46,33	46,53

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2021

Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penduduk usia} < 15 \text{ th} + \text{usia} > 64}{\text{Penduduk usia } 15-64} \times 100$$

Adapun hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.172.

Tabel 2.172 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2020

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6.15-6.2	5,77	belum tercapai	6.2-6.3	-1,03	belum tercapai
2	Laju Inflasi (%)	2,5	3,52	melampaui	2,5	-0,18	belum tercapai
3	PDRB per kapita /ADHB (Juta Rp)	45.14	50,18	melampaui	47.37	50,67	melampaui
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,7	94.12	melampaui	92.85	93.7	melampaui
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	75,09	75,47	melampaui	75,59	75,29	belum tercapai
6	Angka melek huruf	99,49	99,65	melampaui	99,68	99,75	Sesuai
7	Angka rata-rata lama sekolah	10,2	9,58	belum tercapai	10,25	9,59	belum tercapai
8	Angka usia harapan hidup	70.49	70,98	melampaui	70.52	71,08	melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
9	Angka usia harapan hidup	70.49	70,98	melampaui	70.52	71,08	melampaui
10	Persentase balita gizi buruk	0	0,013	belum tercapai	0	0	Sesuai
11	Prevalensi balita gizi kurang	17	1,84%	melampaui	16.5	0,74%	melampaui
12	Cakupan desa siaga aktif	75 %	66,94%	belum tercapai	80,00%	66,94%	belum tercapai
13	Angka partisipasi angkatan kerja	61.28	174,024	melampaui	61.72	168,854	melampaui
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61.28	66,11 %	melampaui	61.72	63,37 %	melampaui
15	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6.90	5,88	melampaui	6.47	6,3	melampaui
16	Rasio penduduk yang bekerja	94,98	161,225	melampaui	95,08	158,917	melampaui
17	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	5,98	5,98	Sesuai	6,38	6,38	Sesuai
18	Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	60,52	60,52	Sesuai	60,4	60,40	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	77,51	77,51	Sesuai	78,66	78,66	Sesuai
20	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	1,629	N/a	N/a	1,629	N/a	N/a
21	Persentase PAD terhadap pendapatan	8%	7,65%	belum tercapai	8%	9,48%	Melampaui
22	Opini BPK	WTP	WTP	Sesuai	WTP	WTP	Sesuai
23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,5	92,7	Melampaui	92,7	92,3	belum tercapai
24	Penguatan Cadangan Pangan	0	N/a	N/a	5 Ton	0	belum tercapai
25	Penanganan daerah rawan pangan	0	15 Desa	Melampaui	5 Desa	7 Desa	Melampaui
26	Produksi sektor pertanian :						
	<u>Tanaman Pangan</u>						
	1. Padi Sawah (Ton)	17,000	47,691	Melampaui	18,000	53,403	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	2. Padi Ladang (Ton)	1,750	14,03	Belum Tercapai	2,000	259	Belum Tercapai
	3. Jagung (Ton)	90,000	134,981	Melampaui	100,000	181,037	Melampaui
	4. Kacang Tanah (Ton)	600	431	Belum Tercapai	700	768	Melampaui
	5. Kedele (Ton)	2,750	1,894	Belum Tercapai	2,875	767	Belum Tercapai
27	Hortikultura:						
	1. Bawang Merah	3,000	519	Belum Tercapai	3,255	960	Belum Tercapai
	2. Bawang Putih	105	18	Belum Tercapai	140	0	Belum Tercapai
	3. Cabe Besar	786	1.641	Melampaui	828	2.327	Melampaui
	4. Cabe Rawit	2,029	1.507	Belum Tercapai	2.061	2.915	Melampaui
	5. Tomat	4,347	7.214	Melampaui	4.407	24.537	Melampaui
	6. Durian	487,5	N/a	N/a	520	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	7. Rambutan	125	N/a	N/a	165	N/a	N/a
28	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB:						
	<u>Produksi sektor perkebunan</u>						
	1. Kelapa (Ton)	13,200	22,53	Belum Tercapai	13,800	16,808	Melampaui
	2. Cengkih (Ton)	10,200	2,314	Belum Tercapai	10,200	2,314	Belum Tercapai
	3. Pala (Ton)	250	35,77	Belum Tercapai	260	38,00	Belum Tercapai
	4. Kopi (Ton)	36	31,71	Belum Tercapai	39	32,00	Belum Tercapai
	5. Vanili (Ton)	40	0	Belum Tercapai	43	60,00	Melampaui
	Produksi Sektor Peternakan:						
	Sapi	375 ton	318 ton	Belum Tercapai	375 ton	94 ton	Belum Tercapai
	Babi	4073 ton	4250 ton	Melampaui	4153 ton	1800 ton	Belum Tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Ayam Buras	214	220 ton	Melampaui	218	195 ton	Belum Tercapai
	Itik	22,5	23 ton	Melampaui	23	8 ton	Belum Tercapai
29	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Juta)	950,000	799.735	Belum Tercapai	1.000.000	785 634,6	Belum Tercapai
30	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Pariwisata	7.009M	10.165 M	Melampaui	7.863M	2.418 M	Belum Tercapai
31	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7,90%	13,24%	Melampaui	8,42%	6,31%	Belum Tercapai
32	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta)	1.693.403	1.428.273	Belum Tercapai	1.778.073	1413272,7	Belum Tercapai
33	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1,88%	7,16%	Melampaui	2,51%	7,18%	Melampaui
34	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	1,31%	N/a	N/a	1,51%	N/a	N/a
35	Pertumbuhan Industri	15	7	Belum Tercapai	20	0	Belum Tercapai
36	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	12.164.300	12.720.000	Melampaui	12.364.760	12.395.000	Melampaui
2	Nilai tukar petani	99	94,33	Belum Tercapai	101	98,79	Belum Tercapai
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	62,24	49,33	Belum Tercapai	63,44	48,64	Belum Tercapai
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	12,59%	1,1%	Belum Tercapai	13,3%	0,37	Belum Tercapai
ASPEK PELAYANAN UMUM							
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
1	PENDIDIKAN						
	Angka rata-rata lama sekolah	10,2	9,58	Belum Tercapai	10,25	9,59	Belum Tercapai
	Angka Partisipasi Kasar	84%	66,1 %	Belum Tercapai	85%	66,2 %	Belum Tercapai
	Angka pendidikan yang ditamatkan	88,74	91,35%	Melampaui	91,35	91,45%	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Angka Partisipasi Murni						
	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	89,50%	78,99%	Belum Tercapai	84%	92,18%	Melampaui
	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,01%	56,54%	Belum Tercapai	86%	54,20%	Belum Tercapai
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103,10%	92,20%	Belum Tercapai	104%	92,25%	Belum Tercapai
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	108%	97,54%	Belum Tercapai	109%	90,47%	Belum Tercapai
	Angka partisipasi sekolah						
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	93,74%	78,98%	Belum Tercapai	96,49%	92,20%	Belum Tercapai
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	68,44%	56,54%	Belum Tercapai	70,46 %	54,20%	Belum Tercapai
	Angka Putus Sekolah						
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,10%	0,10%	Sesuai	0,80%	0,05%	Melampaui
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,22%	0,15%	Melampaui	0,20%	0,07%	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Angka Kelulusan:						
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Angka Melanjutkan (AM):						
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,9%	99,9%	Sesuai	99,9	99,9%	Sesuai
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,9%	99,9%	Sesuai	99,9%	99,9%	Sesuai
	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C	74%	70%	belum tercapai	75%	61%	belum tercapai
	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0,32	0,32	Sesuai	0,33	0,33	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	136,63	1:27	belum tercapai	15:36	1:31	belum tercapai
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	18,16	1:12	belum tercapai	16:33	1:13	belum tercapai
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,28	1:16	belum tercapai	6:43	1:18	belum tercapai
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1,41	1:16	Melampaui	10:48	1:18	belum tercapai
	Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	143,24	143,24	Sesuai	147,45	147,45	Sesuai
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	98,95	98,95	Sesuai	99,02	99,02	Sesuai
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,45	99,66	Melampaui	99,65	99,83	Melampaui
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82,43	84,1%	Melampaui	84,85	85,6%	Melampaui
	Prosentase Guru bersertifikasi pendidik	84%	86,24%	Melampaui	86%	86,24%	Melampaui
2	KESEHATAN						
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	N/a	N/A	N/a	N/a	0,001	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	N/a	N/A	N/a	N/a	N/a	N/a
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4.9/1.000KH	6.7/1.000KH	belum tercapai	4.7/1.000KH	1.5/1.000KH	Melampaui
	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	41/100.000KH	102.56/100.000KH	belum tercapai	20.23/100.000KH	150.15/100.000KH	belum tercapai
	Prevalensi Stunting	14,5	15,8%	belum tercapai	14,00%	3,1%	Melampaui
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	125%	96,60%	belum tercapai	124%	86,36%	belum tercapai
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	50%	50%	Sesuai	52%	100%	Melampaui
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	8	8	Sesuai	6 Akreditasi 4 re-akre	0	Belum tercapai
	Cakupan Universal Health Coverage	100%	81%	Belum tercapai	100%	73%	Belum tercapai
	Rasio posyandu per satuan balita	13,3	12,94	Belum tercapai	14,1	14,11	Sesuai
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,26	20,81	Melampaui	0,3	20,93	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90%	100%	Melampaui	92%	100%	Melampaui
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	93%	108,59%	Melampaui	94%	45,40%	Belum tercapai
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	≥2	≥2	Sesuai	≥2	<2	Belum tercapai
	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	143	110,8	Belum tercapai	142	103	Belum tercapai
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	N/a	131,86%	N/a	N/a	40,35%	N/a
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Penderita diare yang ditangani	92%	100%	Melampaui	93%	100%	Melampaui
	Angka kejadian Malaria	<1%	0,3	Melampaui	<1%	0,2	Melampaui
	Tingkat kematian akibat Malaria	0	0	Sesuai	0	0	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	13%	Belum tercapai	100%	10%	Belum tercapai
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	108,22%	Melampaui	100%	98,28%	Belum tercapai
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	97,06%	Belum tercapai	100%	92,89%	Belum tercapai
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	N/a	104,3%	N/a	N/a	91,34%	N/a
	Cakupan pelayanan nifas	85%	97,30%	Melampaui	90%	N/a	N/a
	Cakupan pelayanan anak balita	70%	96,73%	Melampaui	73%	21,4%	belum tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	Sesuai	100%	73%	belum tercapai
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1,18	1,17	belum tercapai	1,18	1,45	Melampaui
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	94,79%	N/a	N/a	44,91%	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	100,35%	N/a	N/a	40,89%	N/a
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	95,77%	N/a	N/a	58,96%	N/a
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	105,17%	N/a	N/a	118,58%	N/a
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	103,94%	N/a	N/a	96,61%	N/a
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/a	111,26%	N/a	N/a	47,89%	N/a
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	N/a	7,8%	N/a	N/a	15,30%	N/a
3	PEKERJAAN UMUM						

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	47,84%	47,84%	Sesuai	48,06%	58,87	Melampaui
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,002	0,002	Sesuai	0,002	0,002	Sesuai
	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	4,55	4,40%	Melampaui	4,4	4,30%	Sesuai
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	35,88%	36,10%	Melampaui	36,40%	36,40%	Sesuai
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	69,1	69,10%	Sesuai	70,40%	69,78%	Belum tercapai
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	17,8	17,80%	Sesuai	16,20%	16,20%	Sesuai
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	28,1	54%	Melampaui	27%	54%	Melampaui
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	88	89%	Melampaui	89%	90%	Melampaui
	Rasio Jaringan Irigasi	8,7	8,7	Sesuai	8,7	8,7	Sesuai
	Persentase penduduk berakses air minum	79,9	79,90%	Sesuai	81,70%	82,48%	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	50,1	65,03%	Melampaui	51,90%	71,09%	Melampaui
	Ketaatan terhadap RTRW	100%	71,05%	Belum tercapai	100%	73%	Belum tercapai
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Rasio rumah layak huni	0,21	0,70	Melampaui	0,21	0,78	Melampaui
	Rasio permukiman layak huni	0,02	0,5	Melampaui	0,02	0,52	Melampaui
	Ketersediaan rumah layak huni	0,88	68,223	Melampaui	0,9	68,793	Melampaui
	Persentase pemukiman yang tertata	0,01%	50%	Melampaui	0,02%	52%	Melampaui
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,2%	0,28%	Sesuai	0,20%	0,27%	Sesuai
	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	0,30%	0,02%	Melampaui	0,31%	0,017%	Melampaui
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0,10%	0,10%	Sesuai	0,09%	0,00%	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,39%	0,50%	Melampaui	0,39%	0,52%	Melampaui
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	99,92	99.92 org per kecamatan	Sesuai	99,92	99.92 org per kecamatan	Sesuai
	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	72%	N/a	N/a	74%	N/a	N/a
	Presentase kerjasama pemeliharaan KANTRAN TIBMAS	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Presentase pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat/PATKO (Patroli Kota)	100%	58,08%	Belum tercapai	100%	N/a	N/a
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	44%	44%	Sesuai	60%	60%	Sesuai
	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60%	27%	Belum tercapai	70%	45%	Belum tercapai
	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	N/a	12,1%	N/a	N/a	21,1%	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase Ketersediaan sarana pemadam kebakaran	55%	55%	Sesuai	70%	70%	Sesuai
	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih dan sigap dalam upaya mitigasi bencana kebakaran	N/a	66Orang	N/a	N/a	75 Orang	N/a
	Persentase Penegakan PERDA	60%	N/a	N/a	65%	N/a	N/a
	Cakupan fasilitasi kegiatan FKD/FKDM	92%	95%	Melampaui	94%	50%	Belum tercapai
6	SOSIAL						
	Persentase terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial	100%	100%	Sesuai	100%	N/a	N/a
	Persentase meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	9,5%	98,08%	Melampaui	11,1%	N/a	N/a
	Presentase meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin	10,7%	90,69%	Melampaui	14,3%	N/a	N/a
	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	17,64%	90,69%	Melampaui	41,17%	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Keluarga pra sejahterah dan keluarga sejahtera	1,63%	N/a	N/a	1,63%	N/a	N/a
	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	44%	100%	Melampaui	58%	N/a	N/a
	Persentase PMKS yang tertangani	44%	100%	Melampaui	58%	N/a	N/a
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	75%	100%	Melampaui	80%	N/a	N/a
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	100%	Melampaui	85%	N/a	N/a
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100%	100%	Sesuai	100%	N/a	N/a
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase menurunnya resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Cakupan penanganan musibah/bencana akibat kondisi iklim ekstrim (KARHUTLA)	100%	100%	Sesuai	100%	N/a	N/a
	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan masyarakat tangguh bencana	90 Relawan	100 Masyarakat	Melampaui	100 Relawan	30 Masyarakat	belum tercapai
	Cakupan penanganan pemulihan daerah bencana	19 Paket	5 Paket	belum tercapai	20 Paket	11 Paket	belum tercapai
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	Sesuai	100%	N/a	N/a
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	36,20%	N/a	N/a	52,60%	N/a	N/a
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
1	TENAGA KERJA						
	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	87,12	0,13 %	belum tercapai	71,97	0,047 %	belum tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Tingkat pengangguran terbuka	6,9	5,88	Melampaui	6,47	6,3	Melampaui
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	72,6	72,6	Sesuai	74,8	71,4	Belum tercapai
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS	0,89	0,89	Sesuai	0,9	0,90	Sesuai
	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	5 perusahaan	5 perusahaan	Sesuai	5 perusahaan	6 perusahaan	Melampaui
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,28	43	belum tercapai	0,22	40	belum tercapai
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0,75	43	belum tercapai	0,66	40	belum tercapai
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	72,6	72,6	Sesuai	74,8	74,8	Sesuai
	Keselamatan dan perlindungan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	70	54,5	belum tercapai	78	78,1	Melampaui
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	N/a	72	N/a	19,2	80	belum tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60,15	152	Melampaui	63,1	160	Melampaui
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	N/a	115	N/a	17,2	120	Melampaui
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	Persentase peran perempuan dalam pembangunan diberbagai bidang	60%	30%	belum tercapai	70%	30%	belum tercapai
	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Jumlah kebijakan (Perda/ Perbup) dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan yang diterbitkan	5 Kebijakan	1 Kebijakan	belum tercapai	6 Kebijakan	Tidak ada	belum tercapai
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69,6	68,87%	belum tercapai	69,70%	69,85%	Melampaui
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	35	48,57%	Melampaui	35,00%	48,57%	Melampaui
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	20	23%	Melampaui	23%	25%	Melampaui
	Rasio KDRT	0,027	0,027	Sesuai	0,026	0,026	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	4,35	0,042	Melampaui	3,25	0,043	Melampaui
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	65	43	Belum tercapai	60	91	Belum tercapai
3	PANGAN						
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92,5	92,7	Melampaui	92,7	92,3	Belum tercapai
	Ketersediaan pangan utama	90,25%	N/a	N/a	90,50%	N/a	N/a
	Ketersediaan energi perkapita	4,608,2	3450,55	Belum tercapai	4,631,2	2323,83	Belum tercapai
	Ketersediaan protein perkapita	125,8	115,06	Belum tercapai	126,4	67,17	Belum tercapai
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3 Kali	3 Kali	Sesuai	3 Kali	3 Kali	Sesuai
	Persentase pencapaian pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi	65%	65%	Sesuai	N/a	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
4	PERTANAHAN						
	Persentase luas lahan bersertifikat	9,6%	N/a	N/a	12,30%	N/a	N/a
	Penyelesaian kasus tanah Negara	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Penyelesaian izin lokasi	20 (100%)	N/a	N/a	25 (100%)	N/a	N/a
5	LINGKUNGAN HIDUP						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,76	55,29	Belum Tercapai	68,78	58,70	Belum Tercapai
	Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	N/a	0	N/a
	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	N/a	0	N/a
	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum Tercapai
	Tersusunnya Dokumen AMDAL Kawasan Danau Tondano	N/a	1 Dokumen	N/a	1 Dokumen	0	Belum Tercapai
	Tersusunnya Dokumen Peta Zonasi Danau Tondano	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	N/a	0	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Tondano	N/a	1 Dokumen	N/a	1 Dokumen	0	Belum Tercapai
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	1 Dokumen	0	Belum Tercapai
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	1 Dokumen	0	Belum Tercapai
	Disahkannya PERBUP/PERDA Pengelolaan Sampah	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen	N/a	N/a
	Disahkannya PERDA JAKSTRADA (Kebijakan dan STRategi DAerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	N/a	N/a	N/a	1 Perda	1 Perda	Sesuai
	Peningkatan Indeks kualitas air	49,52	45,48	Belum Tercapai	30,4	N/a	N/a
	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	86,7	90,20	Melampaui	86,7	N/a	N/a
	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	50,08	30,21	Belum Tercapai	50,08	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi kegiatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	7	100%	Melampaui	9%	100%	Melampaui
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/Kota yang ditangani	5	100%	Melampaui	N/a	100%	N/a
	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten	1 dok	1 dok	Sesuai	1 dok	1 dok	Sesuai
	Timbulan sampah yang ditangani	236,573	100%	Sesuai	225,113	100%	Sesuai
	Presentasi timbulan sampah yang berkurang	5%	100%	Melampaui	10%	100%	Melampaui
	Presentasi cakupan area pelayanan	12 Kecamatan	100%	N/a	15 Kecamatan	100%	N/a
	Presentasi jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	2%	3,00%	Melampaui	3%	2,1%	Belum Tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Perekaman KTP-el	N/a	98%	N/a	N/a	98%	N/a
	Persentase Anak Usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	N/a	4%	N/a	N/a	5%	N/a
	Mengukur Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	N/a	90%	N/a	N/a	93,22%	N/a
	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	N/a	0	N/a	N/a	0	N/a
	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	98%	Belum Tercapai	100%	55%	Belum Tercapai
	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pelatihan/diklat	100%	100%	Sesuai	100%	55%	Belum Tercapai
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu melalui penyiapan sarana dan prasarana	2Apl	2Apl	Sesuai	4Apl	4Apl	Sesuai
	Persentase Tersedianya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat	100%	99%	Belum Tercapai	100%	56%	Belum Tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	100%	99%	Belum Tercapai	100%	56%	Belum Tercapai
	Persentase administrasi perkantoran	100%	100%	Sesuai	100%	57%	Belum Tercapai
	Persentase pengembangan database kependudukan	1 Db	1 Db	Sesuai	1 Db	1 Db	Sesuai
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,99	0,98	Sesuai	1,00	0,98	Sesuai
	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	1	Sesuai	1,00	1,12	Melampaui
	Rasio pasangan berakte menikah	0,95	0,93	Belum Tercapai	0,97	0,95	Belum Tercapai
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	Sesuai	ada	ada	Sesuai
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	Sesuai	ada	ada	Sesuai
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,0%	99,00%	Sesuai	99,5%	56,00%	Belum Tercapai
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	99%	99,00%	Sesuai	100,00%	56,00%	Belum Tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	74%	72,20%	Belum Tercapai	76%	90,42%	Melampaui
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,32	0,29	Belum Tercapai	0,37	0,29	Belum Tercapai
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1,19	1,08	Belum Tercapai	1,3	1,08	Belum Tercapai
	Persentase LPM Berprestasi	2,59%	1,48%	Belum Tercapai	5,19%	1,48%	Belum Tercapai
	Persentase PKK aktif	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase pementasan desa tertinggal	N/a	59,21%	N/a	N/a	100%	N/a
	Persentase peningkatan status desa mandiri	N/a	16,66%	N/a	N/a	45,34%	N/a
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,02	1,5	Melampaui	1,01	1,51	Belum Tercapai
	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	N/a	2,06	N/a	N/a	2,08	N/a
	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	N/a	80,34%	N/a	N/a	80%	N/a
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	N/a	8,96	N/a	N/a	16,96	N/a
	Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	N/a	20	N/a	N/a	21	N/a
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	N/a	-	N/a	N/a	-	N/a
	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	N/a	33,72%	N/a	N/a	30,5%	N/a
	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK						
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19)	34	13	Belum Tercapai	32	12	Belum Tercapai
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Cakupan Kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	26%	81	Melampaui	29%	84%	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	10%	9%	Belum Tercapai	20%	20%	Sesuai
9	PERHUBUNGAN						
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	85%	5%	Belum Tercapai	58%	0%	Belum Tercapai
	Persentase layanan angkutan darat	80%	80%	Sesuai	83%	80%	Belum Tercapai
	Persentase angkutan darat yang laik uji	80%	0%	Belum Tercapai	83%	0%	Belum Tercapai
	Persentase penurunan tingkat kecelakaan angkutan orang dan barang	80%	61%	Belum Tercapai	83%	95%	Melampaui
	Pemasangan rambu-rambu	0,492	0,013	Belum Tercapai	0,6	0	Belum Tercapai
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00902	0,000676 5	Belum Tercapai	0,00806	0,0006765	Belum Tercapai
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	12,553,590	8.531.566	Belum Tercapai	12,919,229	4.521.730	Belum Tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	12,553,590	8.531.566	Belum Tercapai	12,919,229	4.521.730	Belum Tercapai
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik	7 Layanan	7 Layanan	Sesuai	10 Layanan	10 Layanan	Sesuai
	Persentase sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	30%	30%	Sesuai	40%	40%	Sesuai
	Persentase perangkat daerah yang mengelolah informasi public	20%	20%	Sesuai	30%	30%	Sesuai
	Persentase tata kelola persandian & statistik	20%	20%	Sesuai	30%	30%	Sesuai
	Jumlah sdm bidang komunikasi dan informasi yang memiliki kompetensi	N/a	2 orang	N/a	8 orang	2 orang	Belum Tercapai
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	20%	20%	Sesuai	40%	40%	Sesuai
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,846	0,65	Belum Tercapai	0,963	0,7	Belum Tercapai
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	75,00%	75%	Sesuai	80,00%	80%	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,217	0,21	Sesuai	0,219	0.50	Melampaui
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,109	0,1	Sesuai	0,11	0,20	Melampaui
11	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25 Koperas	25 Koperasi	Sesuai	25 Koperas	35 koperasi	Melampaui
	Meningkatnya koperasi yang Mendapatkan Izin	10 Koperasi	2 Koperasi	Belum Tercapai	10 Koperas	2 Koperasi	Belum Tercapai
	Jumlah Koperasi yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal	10	10	Sesuai	12	8	Belum tercapai
	Jumlah UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal	25	20	Melampaui	25	25	Sesuai
	Persentase koperasi aktif	7,33%	2.18%	Belum tercapai	72,33%	3.06%	Belum tercapai
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	76,82%	76,82%	Melampaui	77,82%	77,82%	Melampaui
	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	0,254%	0,18%	Belum tercapai	0,254%	0,22%	Belum tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Nilai IKM Dinas Koperasi dan UMKM	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
12	PENANAMAN MODAL						
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	20%	(55,57)	Belum tercapai	20%	(49,60)	Belum tercapai
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10 investor	13 Investor	Melampaui	12 investor	11 Investor	Melampaui
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	350 M	1.710.545 .982.000	Melampaui	500M	862.100.000 .000	Melampaui
	Rasio daya serap tenaga kerja	61,28	61,50%	Melampaui	61,72	61,78%	Sesuai
	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	133 % (200 M)	434%	Melampaui	43% (150 M)	168%	Melampaui
	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25%	25%	Sesuai	25%	-	-
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0%	5%	Melampaui	15%	15%	Sesuai
	persentase wirausaha muda	5%	5%	Sesuai	5%	5%	Sesuai
	cakupan pembinaan olahraga	90%	90%	Sesuai	90%	75%	Belum tercapai
	cakupan pelatih yang bersertifikasi	5%	5%	Sesuai	5%	5%	Sesuai
	cakupan pembinaan atlet muda	5%	5%	Sesuai	5%	5%	Sesuai
	jumlah atlet berprestasi	0	118 Atlet	Melampaui	115 Atlet	118 Atlet	Melampaui
	jumlah prestasi olahraga	0	23 Cabor	Melampaui	16 Cobar	10 Cabor	Belum tercapai
	Presentase pemuda berprestasi	15%	15%		20%	20%	
	Presentase prestasi olahraga diberbagai event/kompetisi	Peringkat II Proprov	50%	N/a	Peringkat II Proprov	55%	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Presentase Sport Development Index	42%	10%	Belum tercapai	44%	5%	Belum tercapai
14	STATISTIK						
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Sesuai	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Sesuai
	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai
	Buku "PDRB"	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai
15	PERSANDIAN						
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	6 SKPD	N/A	N/A	9 SKPD	N/A	N/A
16	KEBUDAYAAN						
	Cagar Budaya	39 Buah	61 Buah	Melampaui	43 Buah	112 Buah	Melampaui
	Terkelolanya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya secara terpadu	N/A	18 Cagar Budaya	N/A	N/A	21 Cagar Budaya	N/A

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	pemanfaatan dan pengembangan karya budaya	6 Karya Budaya	N/A	N/A	6 Karya Budaya	N/A	N/A
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	18	6 Karya Budaya	Belum tercapai	19	6 Karya Budaya	Belum tercapai
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7	3	Belum tercapai	7	1	Belum tercapai
17	PERPUSTAKAAN						
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	190 orang	781 orang	Melampaui	210 orang	798 orang	Melampaui
	koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	11,047 buku	11,047 buku	Sesuai	12,047 buku	12,047 buku	Sesuai
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,87	1,87	Sesuai	1,88	1,88	Sesuai
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	65 orang	65 Org	Sesuai	67 orang	67 Org	Sesuai
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3,591	2,605	Belum Tercapai	3,605	3,605	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	Sesuai	2	2	Sesuai
18	KEARSIPAN						
	Persentase perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku	14	15%	Melampaui	20	20%	Sesuai
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25	15%	Belum tercapai	35	20%	Belum tercapai
	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1	PARIWISATA						
	Kunjungan Wisata Mancanegara	89,355 org	154.400 Org	Melampaui	93,823 org	3992 Org	Belum tercapai
	Kunjungan Wisata Nasional	1,208,708 org	1.760.000 Org	Melampaui	1,269,143 org	12.056 Org	Belum tercapai
	Total Kunjungan Wisata	1,298,063 org	1.914.000 Org	Melampaui	1,362,966 org	18.974 Org	Belum tercapai
	Tersedianya Destinasi Wisata	5 unit	7 Fasilitas	Melampaui	5 unit	5 Fasilitas	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Lama kunjungan wisata (Wisman)	3 s.d 4 Hari	3 s.d 4 Hari	Sesuai	3 s.d 4 Hari	1-2 Hari	Belum tercapai
	Lama kunjungan wisata (Wisnu)	3 s.d 5 hari	3 s.d 5 hari	Sesuai	3 s.d 5 hari	1-2 Hari	Belum tercapai
2	PERTANIAN						
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4.45	4.45	Sesuai	5.50	5.50	Sesuai
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	8.96	8.96	Sesuai	7.58	7.58	Sesuai
	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	18,8	N/a	N/a	18,85	N/a	N/a
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	2%	4.45%	Melampaui	2%	5.50	Melampaui
	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	2%	9.39%	Melampaui	2%	10.55%	Melampaui
	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	10%	0.59%	Belum tercapai	10%	0.93%	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Populasi Peternakan	2%	2%	Sesuai	2%	1%	Belum tercapai
	Persentase fasilitasi penanggulangan kasus penyakit hewan menular	N/a	72,23%	N/a	N/a	72,70%	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase Peningkatan teknologi yang diterapkan oleh petani	N/a	65%	N/a	N/a	70%	N/a i
	Jumlah kenaikan kelas kelompok tani	N/a	2	N/a	75	1	N/a
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	6,05	N/a	N/a	6,1	N/a	N/a
3	KEHUTANAN						
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Kerusakan kawasan Hutan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dalam Kabupaten yang dikelola	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha pertambangan yang di bina	500	N/a	N/a	500	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase perolehan Bonus Produksi Panas Bumi	95%	N/a	N/a	95%	N/a	N/a
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	1,12%	N/a	N/a	1,13%	N/a	N/a
5	PERDAGANGAN						
	Persentase kinerja realisasi pupuk	N/a	N/a	N/a	N/a	35%	N/a
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUST/SIUP,Tokoh Swalayan)	15%	20%	Melampaui	15%	15%	Sesuai
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	3.2%	3.2%	Sesuai	3.2%	3.2%	Sesuai
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang di_tata	90,00%	N/a	N/a	90,00%	N/a	N/a
	Jumlah pasar yang di bangun dan direhabilitasi	5	5	Sesuai	6	0	Belum tercapai
	Jumlah Temuan peredaran barang kadaluarsa dan Bahan pangan yang	12	10	Melampaui	10	0	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	mengandung zat berbahaya serta UTP						
	Pengawasan Barang Beredar	12 keg	10	Belum tercapai	12 keg	2	Belum tercapai
	Rekonsiliasi Bonus Panas Bumi	59,89% (3,543,139,034)	60,14%	Melampaui	61,89% (3,614,001,81)	56,74%	Belum tercapai
	Nilai IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Terciptanya Pemasaran Produk Dalam Negeri	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
6	PERINDUSTRIAN						
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	N/a	0,9	N/a	N/a	2,4	N/a
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya dikeluarkan instansi terkait di daerah kabupaten/kota	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	Persentase penanganan IKM	5%	4	Belum tercapai	4,90%	2	Belum tercapai
	Persentase industri kecil dan menengah yang bertambah	13,90%	8	Belum tercapai	16,30%	N/a	N/a
	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,0051	N/a	N/a	0,0051	N/a	N/a
7	TRANSMIGRASI						
	Persentase transmigran swakarsa	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Produksi perikanan budidaya (ton)	55,000	55,000	Belum tercapai	56,000	26.538	Belum tercapai
	Produksi perikanan tangkap (ton)	50,000	50.000	sesuai	52,500	24.922	Belum tercapai
	Produksi pengolahan dan pemasaran (ton)	400	423	Melampaui	410	98	Belum tercapai
	Rata-rata pendapatan/tahun (Rp)	53,333,333	86.203.650	Melampaui	53,333,333	93.499.449	Melampaui
	Produksi perikanan	79,37	106,56%	Melampaui	78,79	63,33%	Belum tercapai
	konsumsi ikan	93,75	101,50%	Melampaui	94,54	106,54%	Melampaui
	cakupan bina kelompok nelayan	16,26	17%	Melampaui	16,26	17,29	Melampaui
	produksi perikanan kelompok nelayan	34,71	81,34%	Melampaui	37,28	48,23 %	Melampaui
	proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	19,37	20,25	Melampaui	19,75	20,25	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial	0,17	0,17	Sesuai	0,17	0,17	Sesuai
	Nilai tukar nelayan	105	105	Sesuai	105	105	Sesuai
	Persentase pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	N/a	60%	N/a	N/a	60%	N/a
PENUNJANG URUSAN							
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
	Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahannya yang telah ditetapkan dengan PERDA dan PERBUP	4 Dokumen	4 Dokumen	Sesuai	2	2 Dokumen	Sesuai
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, dan Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Ranking 3	Ranking 3	Sesuai	Ranking 2	N/a	N/a
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	N/a	N/a	N/a

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	N/a	N/a	N/a
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	N/a	N/a	N/a
	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam APBD	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	98%	98%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
2	KEUANGAN						
	Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Penyusunan APBD Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai
	Prosentase penyerapan belanja	94,82%	90,34%	belum tercapai	94,84%	84,93%	belum tercapai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai
	Prosentase data aset yang akurat	95%	95%	Sesuai	96%	96%	Sesuai
	Persentase SILPA	2,78	4,73%	Melampaui	1,74%	4,86%	Melampaui
	Persentase SILPA terhadap APBD	2,78	4,73%	Melampaui	1,74%	4,86%	Melampaui
	Prosentase penyerapan belanja	94,82%	91,20%	belum tercapai	94,84%	84,93%	belum tercapai
	Persentase belanja pendidikan	26,43	26,03%	belum tercapai	25,12%	23,73%	belum tercapai
	Persentase belanja kesehatan	19,92	48,56%	Melampaui	15,74%	55,94%	Melampaui
	Capaian Penerimaan Pajak Daerah	100%	102%	Melampaui	100%	96%	belum tercapai
	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	11%	11,96%	Melampaui	2,00%	0%	belum tercapai
	Perbandingan antara belanja langsung / belanja tidak langsung	41,01 / 62,08	42,89 / 66,76	Melampaui	37,92 / 58,99	44,07 / 73,67	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,54%	10%	Melampaui	1%	11%	Melampaui
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	Rata Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	96 hari	96 hari	Sesuai	96 hari	N/a	N/a
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100	100%	Sesuai	100	100%	Sesuai
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	27,73	19,75%	Belum tercapai	34,49	16,10%	Belum tercapai
	Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	38	38	Sesuai	38	38	Sesuai
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	212	212	Sesuai	212	212	Sesuai
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3,12	2873	Melampaui	3,12	2810	Melampaui
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Persentase perangkat daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	96,36%	96,36%	Sesuai	96,36%	100%	Melampaui
	Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN Minahasa	81%	83,33%	Melampaui	84%	83,33%	Belum tercapai
	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase pegawai yang datanya akurat	100%	95,50%	Belum tercapai	100%	95,50%	Belum tercapai
	Persentase pegawai Minahasa yang Memiliki sertifikat diklat Peningkatan kompetensi (Diklat PIM II, III dan IV)	27,73%	19,75%	Belum tercapai	34,49%	16,10%	Belum tercapai
	Persentase pegawai Minahasa yang Memiliki sertifikat diklat Peningkatan kompetensi (Tugas Teknis dan Fungsional)	57%	60%	Melampaui	60%	60%	Sesuai
	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi (diklat dasar)	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	9 PNS	10 PNS	Melampaui	25 PNS	17 PNS	Belum tercapai
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	80%	82,80%	Melampaui	85,00%	88,30%	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Persentase rekomendasi kebijakan Hasil Litbang yang diterapkan di daerah	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	>75%	>75%	Sesuai	>75%	>75%	Sesuai
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	>80%	>80%	Sesuai	>80%	>80%	Sesuai
	Penerapan SIDA :						
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	2,86%	2,86%	Sesuai	5,71%	5,71%	Sesuai
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
5	PENGAWASAN						
	Persentase pelanggaran pegawai	0,11	0,09	Sesuai	0,1	0,24	Melampaui
	Jumlah temuan BPK	20	24	Belum tercapai	18	13	Melampaui

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 1	Belum tercapai	Level 2	Level 1	Belum tercapai
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 2	Level 2	Sesuai	Level 2	Level 2	Sesuai
	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	73,33	73,71	Sesuai	73,93	75,95	Sesuai
	Persentase perangkat daerah yang memiliki predikat sikip	N/a	6	N/a	N/a	20	N/a
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Penunjang Unsur Pengawasan	N/a	N/a	N/a	N/a	4	N/a
6	SEKRETARIAT DAERAH						
	Presentase kebijakan strategis bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100%	100%	Sesuai	100%	28,65%	Belum tercapai
7	SEKRETARIAT DEWAN						
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Sesuai	12 Dokumen	12 Dokumen	Sesuai
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk	5 Dokumen	5 Dokumen	Sesuai	5 Dokumen	5 Dokumen	Sesuai

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampaui (*)
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
	melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)						
	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya	100%	100%	Sesuai	100%	100%	Sesuai
	Presentase fasilitas penyelenggaraan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya	95%	100%	Melampaui	95%	100%	Melampaui
	Jumlah Ranperda (Ranperda eksekutif dan Ranperda Inisiatif) yang difasilitasi	8 Ranperda	9 Ranperda	Melampaui	9 Ranperda	9 Ranperda	Sesuai
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran setwan DPRD	5 dokumen	5 Dokumen	Sesuai	5 dokumen	5 Dokumen	Sesuai

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDG's) DI KABUPATEN MINAHASA

Pencapaian TPB/SDGS dikabupaten Minahasa Meliputi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat, Penanggulangan Kelaparan bagi semua orang, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Penurunan Angka Kematian Balita, Pencegahan Penyakit Menular, Penguatan Pelayanan KB, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan untuk Semua: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, Penguatan Kelembagaan PPPA dan P2TP2A, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Penyediaan Layanan Air Minum Layak, Pengelolaan Limbah Cair Ramah Lingkungan dan Aman, Ketersediaan Listrik bagi Masyarakat, Peningkatan Lapangan Kerja bagi kelompok usia kerja, KIE Layanan Perbankan dan Lembaga Keuangan, Peningkatan Kualitas Anggota Legislatif Perempuan, Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, dan Peningkatan Kualitas Anggota Legislatif Perempuan

Tujuh belas tujuan yang terdapat di dalam TPB/SDGs diklasifikasikan menjadi empat Pilar Pembangunan yang meliputi Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15) dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16). Narasi penting terkait pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs pada masing-masing pilar tersebut sebagai berikut: Tantangan utama untuk pencapaian target-target pada setiap tujuan di dalam Pilar Pembangunan Sosial yakni mendorong ketersediaan data pencapaian yang valid untuk setiap indikator. Pada sisi yang lain, upaya menumbuhkan inovasi dalam penyusunan program dan kegiatan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri. Khususnya, untuk sektor-sektor yang masih didominasi dengan status “perlu perhatian khusus” seperti pada Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Meningkatkan kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu tantangan besar untuk mempercepat pencapaian target di Pilar Pembangunan Sosial. Di tengah tekanan eksternal yang melanda perekonomian global maupun nasional, Kabupaten Minahasa juga menghadapi tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa terus menunjukkan angka yang membaik, namun terjadi kecenderungan penurunan pertumbuhan PDRB. Situasi ini perlu mendapat perhatian khusus karena implikasi pertumbuhan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan, dan pendapatan daerah. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas diperlukan ikhtiar menyeimbangkan antara mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dengan memperkecil jurang ketimpangan. Tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain menumbuhkan ekosistem investasi yang ramah dan kondusif. Tantangan dalam Pilar Pembangunan Lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tantangan utama. Pertama, terkait terbatasnya ketersediaan data indikator untuk pemantauan, evaluasi

dan pelaporan tujuan-tujuan pada Pilar tersebut. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian terutama untuk memastikan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, kesesuaian antara Indikator RPJMD, Renstra, RAD TPB/SDGs dan RKPD/APBD perlu diperhatikan. Saat ini, indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs masih didominasi indikator yang tidak tercantum di dalam dokumen RPJMD dan Renstra. Hal ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi kegiatan pemerintah yang secara langsung dapat berdampak mendukung pencapaian tujuan TPB/SDGs. Perlu usaha-usaha pengarusutamaan yang lebih intensif lagi agar percepatan pencapaian target TPB/SDGs dapat diraih. Ketiga, tekanan terhadap kualitas lingkungan Kabupaten Minahasa (air, udara dan tanah) yang semakin meningkat. Percepatan pembangunan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan di dalamnya. Keselarasan Ekosistem Lautan (Tujuan 14) dan Ekosistem Daratan (Tujuan 15) dengan manusia dan segala hasil pembangunannya juga perlu diperhatikan. Perlu disadari oleh semua pihak, Kabupaten Minahasa juga memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dijaga. Saat ini, masalah Ekosistem Lautan dan Ekosistem Daratan belum mendapatkan porsi perhatian yang memadai. Adapun capaian pelaksanaan TPB di Kabupaten Minahasa sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam **Lampiran I** buku RPJMD ini.

2.6). Kajian Muatan KLHS: Daya Dukung dan Daya Tampung

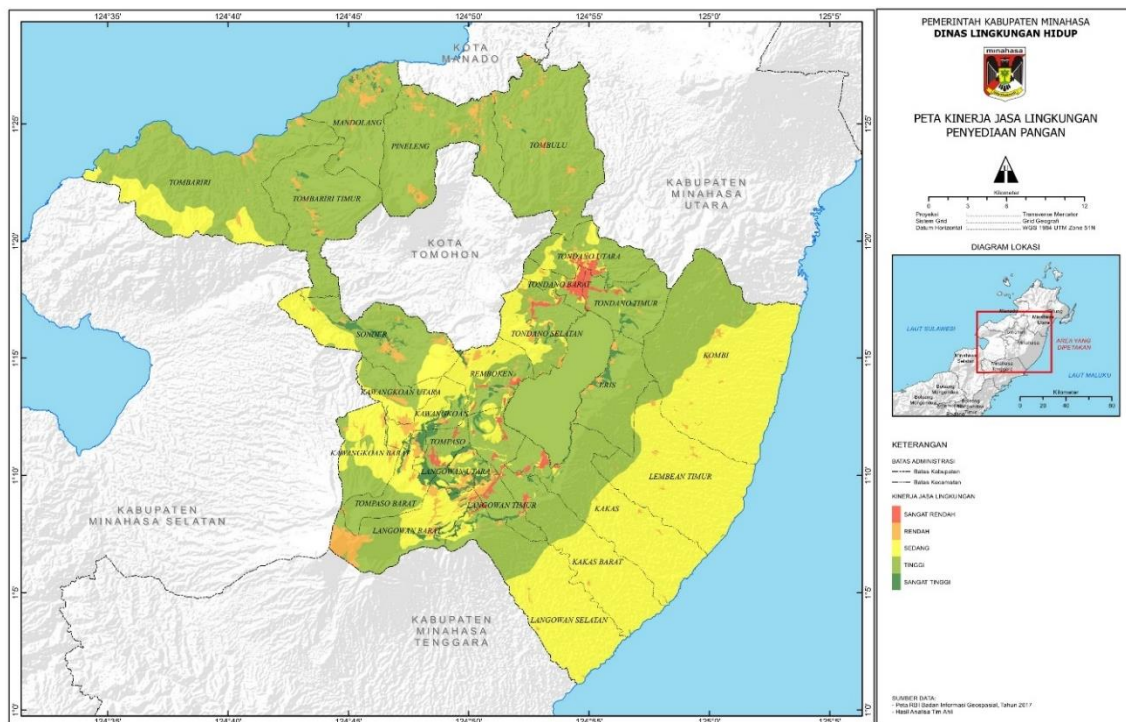
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa

Ekosistem sebagai berikut:

1. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Dari hasil analisa, Jasa lingkungan penyedia pangan secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa masih sangat baik. Hanya sebesar 1.173,4 Ha wilayah berada dalam kelas sangat rendah dalam menyediakan kebutuhan pangan. Sedangkan yang mendominasi adalah kelas Tinggi seluas 66,866.95 Ha. Luas dan persentase jasa Lingkungan penyedia pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.173 dan sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan



Tabel 2.173 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	92.86	0.78	146.38	34.05	4,041.53	4,315.60
KAKAS	31.21	103.29	56.75	3,920.47	3,612.07	7,723.80
KAKAS BARAT	22.94	135.41	70.37	3,707.61	3,173.98	7,110.31
KAWANGKOAN	125.69	7.93	149.58	924.79	319.11	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	100.13		5.97	1,536.05	999.26	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	118.50	2.57	7.40	657.46	834.29	1,620.23
KOMBI	101.18			7,868.13	4,634.32	12,603.64
LANGOWAN BARAT	764.42	29.05	188.17	1,243.26	1,644.69	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	62.00	19.40	88.18	5,050.30	1,800.00	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	126.10	75.41	102.43	39.34	932.14	1,275.42
LANGOWAN UTARA	150.33	4.63	223.04	236.08	319.82	933.89

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
LEMBEAN TIMUR	62.75			6,691.66	786.01	7,540.43
MANDOLANG	382.90		79.20	2.24	3,380.01	3,844.34
PINELENG	437.66		17.68		5,522.68	5,978.03
REMBOKEN	143.61	72.36	105.57	1,159.34	1,460.97	2,941.85
SONDER	233.86	7.85	247.47	1,679.72	2,817.83	4,986.73
TOMBARIRI	198.43		3.78	2,082.24	7,959.99	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	120.21		50.24	49.32	5,293.32	5,513.10
TOMBULU	267.60		20.90	12.92	8,173.19	8,474.61
TOMPASO	9.37	99.83	222.15	162.98	638.03	1,132.36
TOMPASO BARAT	167.98	2.68	157.45	631.53	1,128.06	2,087.70
TONDANO BARAT	19.47	196.44	0.10	201.44	517.67	935.13
TONDANO SELATAN	131.68	102.62	56.16	1,127.25	2,623.08	4,040.80
TONDANO TIMUR	22.37	156.74	100.13	15.72	2,347.94	2,642.91
TONDANO UTARA	49.15	156.93	22.14	511.95	1,906.95	2,647.13
Grand Total	3,942.42	1,173.94	2,121.25	39,545.86	66,866.95	113,650.41

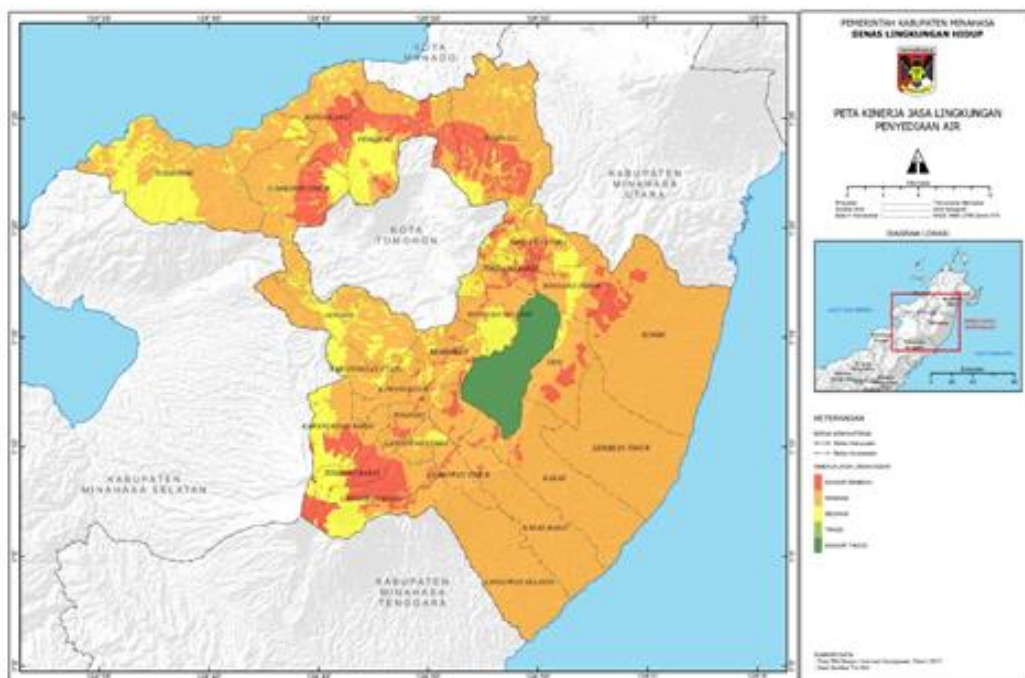
2. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Bentang Lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa ada yang dapat memberikan manfaat berupa penyediaan air bersih dengan baik maupun tidak. Secara umum di Kabupaten Minahasa lahan yang mampu menyediakan air bersih dapat dibagi menjadi lahan berpotensi Sangat tinggi,

tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan air bersih di Kabupaten Minahasa memiliki luasan sebesar 4,625.04 Ha atau dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa sedangkan lahan yang masuk dalam kategori sangat rendah dalam penyediaan air bersih memiliki luasan yang paling tinggi sebesar 79,602.09 Ha.

Gambar 2.2. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air



Tabel 2.174. Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air

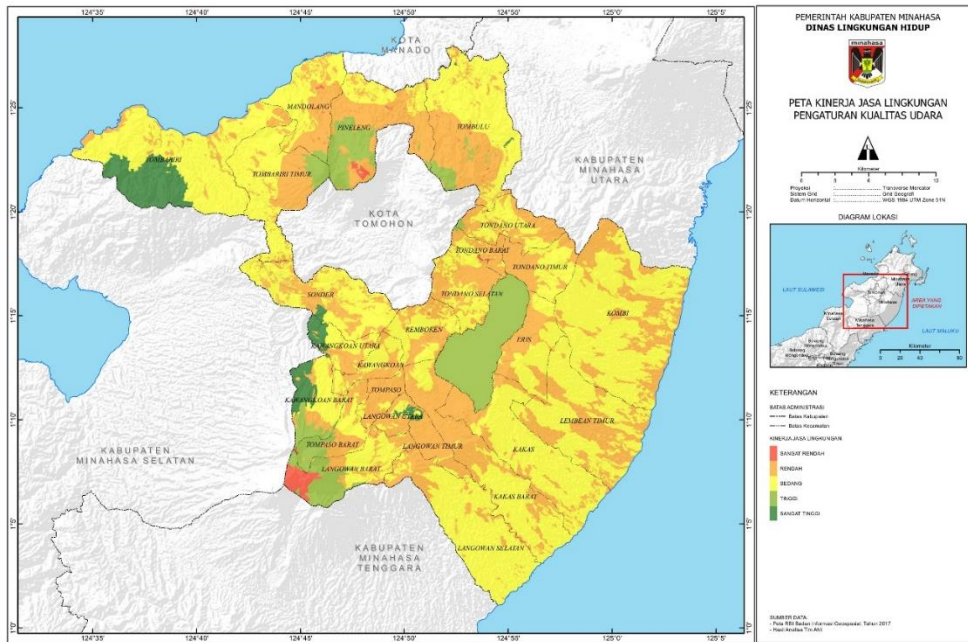
KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	2,408.14	493.49	1,252.53	159.54	1.90	4,315.60
KAKAS	6,488.68	183.25	1,013.26	30.14	8.46	7,723.80
KAKAS BARAT	6,182.78	275.57	569.61	72.96	9.40	7,110.31
KAWANGKOAN	1,316.87	48.88		160.98	0.39	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	961.27	503.32		1,176.82		2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,029.21			591.02		1,620.23
KOMBI	11,846.32	756.82			0.50	12,603.64
LANGOWAN BARAT	942.99	1,713.34	1.57	1,211.69		3,869.59

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
LANGOWAN SELATAN	6,963.04	54.36			2.47	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,166.21	75.41		33.81		1,275.42
LANGOWAN UTARA	704.40	4.73	3.91	220.86		933.89
LEMBEAN TIMUR	7,535.94				4.49	7,540.43
MANDOLANG	2,299.48	1,057.85	0.49	486.52		3,844.34
PINELENG	2,446.95	1,747.65	3.74	1,775.01	4.68	5,978.03
REMBOKEN	1,811.27	192.54	459.18	477.62	1.25	2,941.85
SONDER	3,596.95		19.22	1,370.56		4,986.73
TOMBARIRI	5,991.07		24.43	4,228.94		10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,544.99	1,172.38	8.86	786.86		5,513.10
TOMBULU	5,579.39	1,880.92	23.60	988.00	2.70	8,474.61
TOMPASO	980.37	151.99				1,132.36
TOMPASO BARAT	597.94	907.86		581.91		2,087.70
TONDANO BARAT	488.22	252.84	22.13	169.36	2.58	935.13
TONDANO SELATAN	1,580.28	171.12	1,107.79	1,180.40	1.21	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,589.20	483.33	114.72	447.57	8.08	2,642.91
TONDANO UTARA	1,550.15	331.01		763.60	2.37	2,647.13
Grand Total	79,602.09	12,458.65	4,625.04	16,914.16	50.48	113,650.41

3. Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara

Areal berhutan pada daerah pegunungan merupakan sumber pengatur kualitas udara yang sangat baik, berdasarkan hasil analisa kinerja jasa Lingkungan pada kelas sangat tinggi memiliki luasan sebesar 3,774.86 Ha sedangkan peringkat kinerja pengaturan kualitas udara sangat rendah yaitu seluas 767.73 Ha. Sedangkan wilayah yang menyediakan jasa ekosistem pengatur kualitas udara paling besar terdapat pada kategori sedang dengan luasan sebesar 59,641.48 Ha atau 31,78%. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengaturan kualitas udara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.175 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Peta Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara



Tabel 2.175 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	1,512.47	0.48		1,548.23	1,254.43	4,315.60
KAKAS	1,746.77	0.61		4,961.50	1,014.91	7,723.80
KAKAS BARAT	3,131.11			3,409.59	569.61	7,110.31
KAWANGKOAN	724.08			803.03		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	485.45		668.44	1,004.54	482.97	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	552.49		376.23	691.51		1,620.23
KOMBI	3,877.00			8,726.63		12,603.64
LANGOWAN BARAT	868.32	532.15		1,255.86	1,213.26	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	1,305.05	0.21		5,714.61		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,168.21		29.99	75.16	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	599.48		111.31	212.57	10.53	933.89
LEMBEAN TIMUR	2,975.85			4,564.58		7,540.43
MANDOLANG	1,785.35	27.36		1,932.99	98.64	3,844.34
PINELENG	3,136.58	123.21		1,056.94	1,661.29	5,978.03
REMBOKEN	1,126.11	10.70		1,345.68	459.36	2,941.85
SONDER	1,710.35		97.44	3,159.72	19.22	4,986.73
TOMBARIRI	1,155.84		2,466.54	6,597.63	24.43	10,244.44

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
TOMBARIRI TIMUR	1,787.25	3.13		3,268.22	454.49	5,513.10
TOMBULU	3,355.10	21.24	24.92	4,622.42	450.94	8,474.61
TOMPASO	972.15	0.13		160.08		1,132.36
TOMPASO BARAT	895.29	14.28		596.22	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	666.11	8.34		219.30	41.38	935.13
TONDANO SELATAN	1,626.79	18.32		1,289.96	1,105.72	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,282.52	1.95		1,235.63	122.81	2,642.91
TONDANO UTARA	1,404.53	5.62		1,188.87	48.12	2,647.13
Grand Total	39,850.28	767.73	3,774.86	59,641.48	9,616.06	13,650.4

4. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

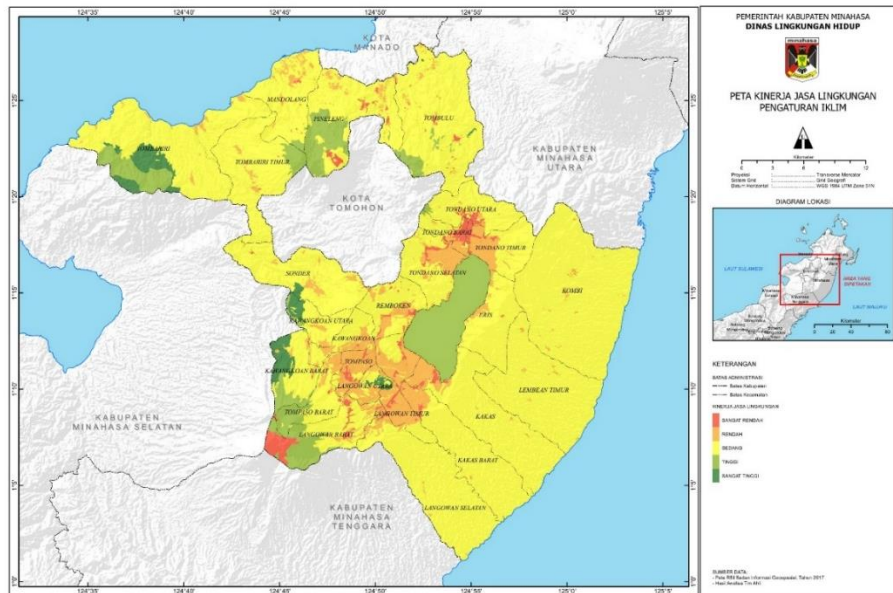
Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Minahasa ada yang dapat memberikan manfaat berupa pengaturan iklim maupun tidak. Lahan yang paling besar berpotensi dalam pengaturan iklim di Kabupaten Minahasa berada dalam kategori sedang dengan luasan sebesar 88,256.53 Ha dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.176 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	193.34	4.50		2,865.24	1,252.53	4,315.60
KAKAS	604.25	96.41		6,003.07	1,020.08	7,723.80
KAKAS BARAT	1,310.93	135.41		5,087.24	576.73	7,110.31
KAWANGKOAN	470.39	7.93		1,048.79		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	102.13	4.14	657.37	1,383.73	494.04	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	126.11	2.57	279.07	1,115.32	97.16	1,620.23
KOMBI	101.18			12,501.96	0.50	12,603.64
LANGOWAN BARAT	350.53	691.18		1,614.62	1,213.26	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	235.68	19.61		6,762.12	2.47	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	809.15	75.41	29.99	358.82	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	480.13	4.63	111.31	327.29	10.53	933.89
LEMBEAN TIMUR	62.75			7,473.19	4.49	7,540.43
MANDOLANG	361.26	28.24		3,356.21	98.64	3,844.34
PINLENG	246.78	205.93		3,864.02	1,661.29	5,978.03
REMBOKEN	519.04	84.83		1,877.74	460.25	2,941.85
SONDER	258.47	9.48	97.44	4,614.29	7.05	4,986.73
TOMBARIRI	199.17		1,101.14	7,554.30	1,389.83	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	123.23	7.87		4,928.90	453.10	5,513.10
TOMBULU	214.26	62.71	24.92	7,721.51	451.23	8,474.61
TOMPASO	869.42	99.96		162.98		1,132.36
TOMPASO BARAT	316.81	32.92		1,156.06	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	217.55	204.78		472.08	40.71	935.13
TONDANO SELATAN	781.09	130.84		2,020.90	1,107.96	4,040.80
TONDANO TIMUR	739.74	156.74		1,631.70	114.72	2,642.91

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
TONDANO UTARA	88.98	157.94		2,354.46	45.74	2,647.13
Grand Total	9,782.35	2,224.05	2,301.24	88,256.53	11,086.26	113,650.41

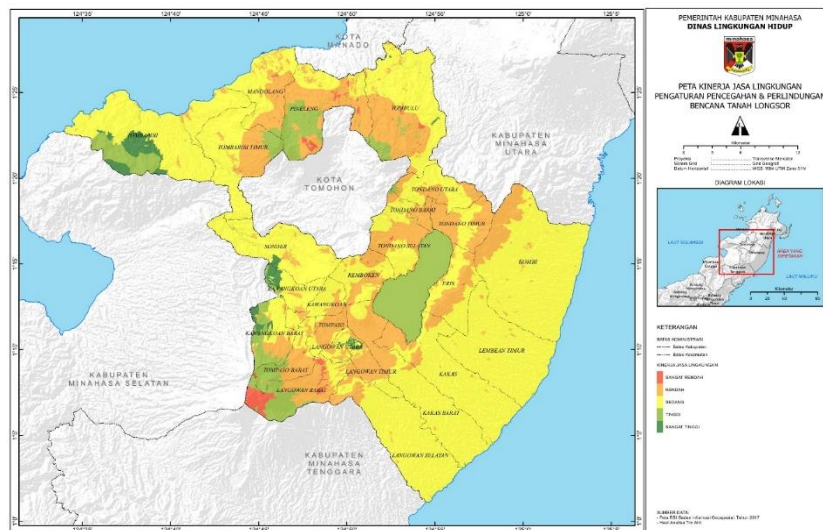
Gambar 2.4. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim



5. Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor

Kondisi tanah dari bentang lahan dan keadaan penutupan lahan merupakan faktor utama pengatur tanah longsor. Kinerja jasa Lingkungan pengatur tanah longsor di Kabupaten Minahasa secara umum didominasi dengan kriteria sedang yaitu seluas 71,655.09 Ha dari luas total luas wilayah dan hanya 1,040.33 Ha pada kriteria sangat rendah.

Gambar 2.5. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor



Tabel 2.177 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor

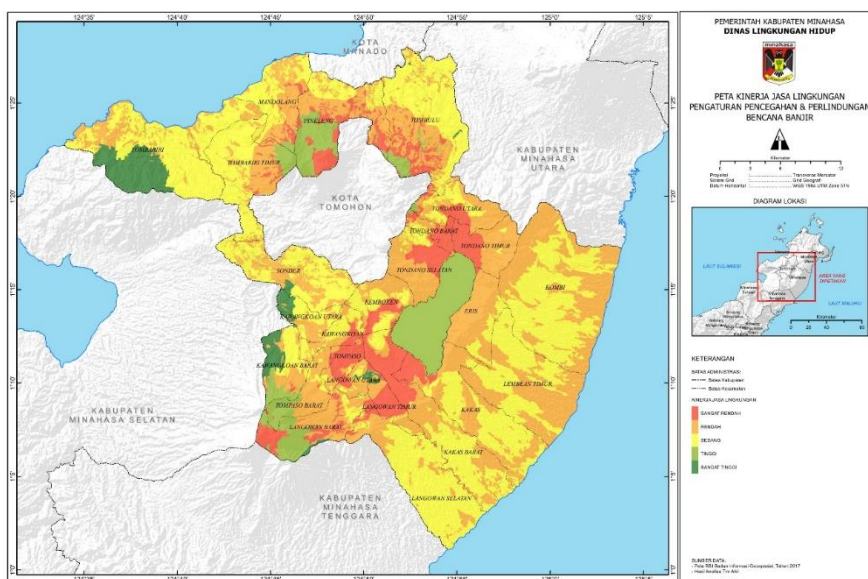
KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	1,274.84	5.28	32.81	1,781.06	1,221.62	4,315.60
KAKAS	1,082.36	6.88	25.49	5,612.83	996.23	7,723.80
KAKAS BARAT	1,695.87			4,835.44	579.00	7,110.31
KAWANGKOAN	398.75			1,127.97	0.39	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	639.23	4.14	199.47	846.63	951.94	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	121.07		279.07	1,122.93	97.16	1,620.23
KOMBI	1,841.00			10,762.14	0.50	12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,576.60	662.13	1.57	417.60	1,211.69	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	625.98			6,391.42	2.47	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	783.13		11.48	460.25	20.56	1,275.42
LANGOWAN UTARA	297.81		82.31	514.25	39.53	933.89
LEMBEAN TIMUR	62.75			7,473.19	4.49	7,540.43
MANDOLANG	1,607.30	28.24	0.49	2,103.56	104.75	3,844.34
PINELENG	2,976.89	201.80	3.74	1,127.90	1,667.70	5,978.03
REMBOKEN	1,038.80	17.72	0.83	1,424.90	459.60	2,941.85

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
SONDER	241.71		116.66	4,617.48	10.89	4,986.73
TOMBARIRI	198.43		1,125.57	7,555.04	1,365.40	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	1,482.11	7.55	8.86	3,558.94	455.64	5,513.10
TOMBULU	2,921.92	60.86	48.80	5,011.74	431.29	8,474.61
TOMPASO	803.18			329.18		1,132.36
TOMPASO BARAT	1,042.24	30.24		433.31	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	598.21	0.51	2.56	293.12	40.73	935.13
TONDANO SELATAN	1,455.00	14.96	1.55	1,461.83	1,107.45	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,808.86		8.08	711.25	114.72	2,642.91
TONDANO UTARA	917.86		2.37	1,681.16	45.74	2,647.13
Grand Total	27,491.88	1,040.33	1,951.71	71,655.09	11,511.40	113,650.41

6. Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir

Untuk jasa Lingkungan pengaturan banjir, areal yang paling kecil merupakan areal dengan kriteria sangat tinggi untuk pengaturan banjir yaitu sebesar 3,991.67 Ha dari total luas wilayah, tersebar dari punggung gunung hingga puncak gunung. Daerah berhutan merupakan faktor pendukung tingginya tingkat kriteria pengatur banjir, untuk wilayah dengan kriteria sangat rendah sebesar 11,133.00 Ha.

Gambar 2.6. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir



Tabel 2.178 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir

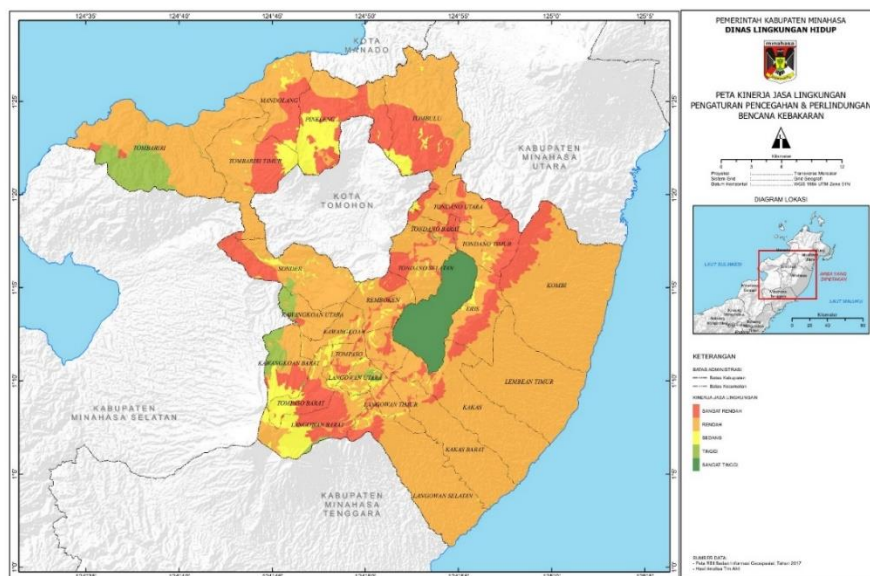
KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	2,500.01	20.43	30.91	540.74	1,223.51	4,315.60
KAKAS	2,811.23	639.10	23.85	3,258.56	991.06	7,723.80
KAKAS BARAT	2,243.68	1,444.58		2,852.44	569.61	7,110.31
KAWANGKOAN	573.44	229.77		723.90		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	708.57	48.19	668.44	733.23	482.97	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	561.98		376.23	682.02		1,620.23
KOMBI	6,013.09			6,590.55		12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,388.28	1,014.45	89.99	253.60	1,123.27	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	1,454.33	141.06		5,424.48		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	511.19	657.03	29.99	75.16	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	531.58	147.38	115.22	133.09	6.62	933.89
LEMBEAN TIMUR	3,937.99			3,602.44		7,540.43
MANDOLANG	1,779.24	251.28		1,715.19	98.64	3,844.34
PINELENG	1,900.49	1,405.24	3.74	1,006.32	1,662.24	5,978.03
REMBOKEN	1,062.19	459.44	0.65	960.86	458.71	2,941.85
SONDER	1,819.58		104.48	3,050.50	12.17	4,986.73
TOMBARIRI	2,015.54		2,490.94	5,737.93	0.03	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	1,637.72	212.81	7.47	3,208.08	447.02	5,513.10
TOMBULU	2,562.83	959.67	48.52	4,473.84	429.75	8,474.61
TOMPASO	322.23	741.91		68.22		1,132.36
TOMPASO BARAT	1,264.21	59.81		181.78	581.91	2,087.70

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
TONDANO BARAT	213.48	540.58		139.69	41.38	935.13
TONDANO SELATAN	1,807.76	823.59	1.25	303.73	1,104.47	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,602.91	872.79		44.41	122.81	2,642.91
TONDANO UTARA	1,418.13	463.91		716.97	48.12	2,647.13
Grand Total	42,641.68	11,133.00	3,991.67	46,477.71	9,406.34	113,650.41

7. Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran

Kinerja jasa Lingkungan pengaturan kebakaran untuk kelas kriteria sangat tinggi hanya sebesar 4,607.38 Ha dari total luas wilayah, kriteria pengaturan kebakaran didominasi oleh kelas rendah yaitu sebesar 77,278.83 Ha. Hanya sebesar 4,019.85 Ha areal dengan kinerja jasa Lingkungan pengaturan kebakaran pada kelas kriteria tinggi.

Gambar 2.7. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran



Tabel 2.179 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	1,775.87	1,157.14	1,252.53	128.17	1.90	4,315.60
KAKAS	6,153.43	515.17	1,013.26	33.48	8.46	7,723.80
KAKAS BARAT	6,057.19	403.59	569.61	72.80	7.12	7,110.31
KAWANGKOAN	1,324.26	52.87		149.97		1,527.11

KAWANGKOAN BARAT	928.84	555.18		479.20	678.18	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,165.03	71.57		7.40	376.23	1,620.23
KOMBI	10,860.29	1,739.82		3.03	0.50	12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,099.13	1,456.38	1.57	1,207.80	104.71	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	6,443.88	478.08		95.23	2.68	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,063.27	75.41		104.70	32.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	575.20	13.81	3.91	223.04	117.93	933.89
LEMBEAN TIMUR	7,535.88			0.06	4.49	7,540.43
MANDOLANG	2,317.97	1,253.52	0.49	265.76	6.60	3,844.34
PINELENG	1,465.62	2,818.29	3.74	1,680.23	10.14	5,978.03
REMBOKEN	1,801.12	541.70	459.18	139.50	0.35	2,941.85
SONDER	3,508.18	1,080.23	7.05	269.15	122.12	4,986.73
TOMBARIRI	7,605.06	137.04	24.43	11.37	2,466.54	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,578.75	1,422.95	7.47	492.53	11.40	5,513.10
TOMBULU	5,189.73	2,751.25	23.60	480.87	29.16	8,474.61
TOMPASO	754.04	155.91		222.27	0.13	1,132.36
TOMPASO BARAT	422.13	898.75		765.39	1.42	2,087.70
TONDANO BARAT	502.42	380.65	20.24	21.43	10.38	935.13
TONDANO SELATAN	2,179.54	679.36	1,105.59	60.41	15.89	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,345.31	1,077.63	114.72	97.16	8.08	2,642.91
TONDANO UTARA	1,626.67	943.82		73.26	3.38	2,647.13
Grand Total	77,278.83	20,660.11	4,607.38	7,084.24	4,019.85	113,650.41

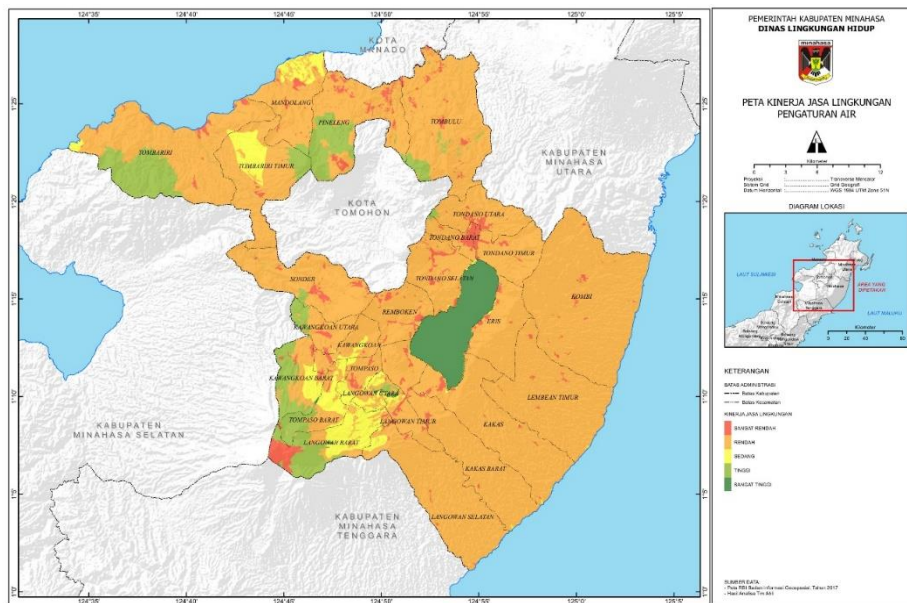
8. Jasa Lingkungan Pengaturan Air

Kinerja jasa Lingkungan pengaturan air di wilayah Kabupaten Minahasa didominasi oleh kelas kriteria rendah dengan sebaran luas sebesar 90,635.04 Ha. Sebesar 3,996.64 Ha pada kriteria sangat rendah dan 4,548.12 Ha pada kriteria sangat tinggi. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengatur air selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.180 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.8.

Tabel 2.180 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Air

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	2,954.23	92.86	1,221.62	14.09	32.81	4,315.60
KAKAS	6,544.32	127.62	989.42	36.95	25.49	7,723.80
KAKAS BARAT	6,349.93	158.35	569.61	32.42		7,110.31
KAWANGKOAN	1,303.58	63.29		160.25		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	964.61	88.59	9.74	436.80	1,141.67	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,148.03	89.49		6.49	376.23	1,620.23
KOMBI	12,501.96	101.18		0.50		12,603.64
LANGOWAN BARAT	702.19	553.56	17.85	1,400.57	1,195.40	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	6,763.20	70.35		186.32		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,070.23	88.33	16.16	84.81	15.89	1,275.42
LANGOWAN UTARA	418.79	10.96	23.96	382.31	97.88	933.89
LEMBEAN TIMUR	7,473.19	62.75		4.49		7,540.43
MANDOLANG	2,956.13	146.10	0.49	643.48	98.15	3,844.34
PINELENG	3,874.39	437.66			1,665.98	5,978.03
REMBOKEN	2,255.40	213.35	458.53	13.74	0.83	2,941.85
SONDER	4,628.36	241.71			116.66	4,986.73
TOMBARIRI	7,430.57	196.08	0.03	126.81	2,490.94	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,959.90	42.80		1,055.91	454.49	5,513.10
TOMBULU	7,728.45	267.60		0.28	478.27	8,474.61
TOMPASO	703.48	99.83		329.05		1,132.36
TOMPASO BARAT	814.69	39.89	1.42	651.21	580.48	2,087.70
TONDANO BARAT	672.58	211.51	20.24	7.77	23.03	935.13
TONDANO SELATAN	2,660.95	233.13	1,104.34	38.79	3.58	4,040.80
TONDANO TIMUR	2,337.40	179.12	114.72	3.58	8.08	2,642.91
TONDANO UTARA	2,418.50	180.52			48.12	2,647.13
Grand Total	90,635.04	3,996.64	4,548.12	5,616.62	8,853.99	113,650.41

Gambar 2.8. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air



9. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

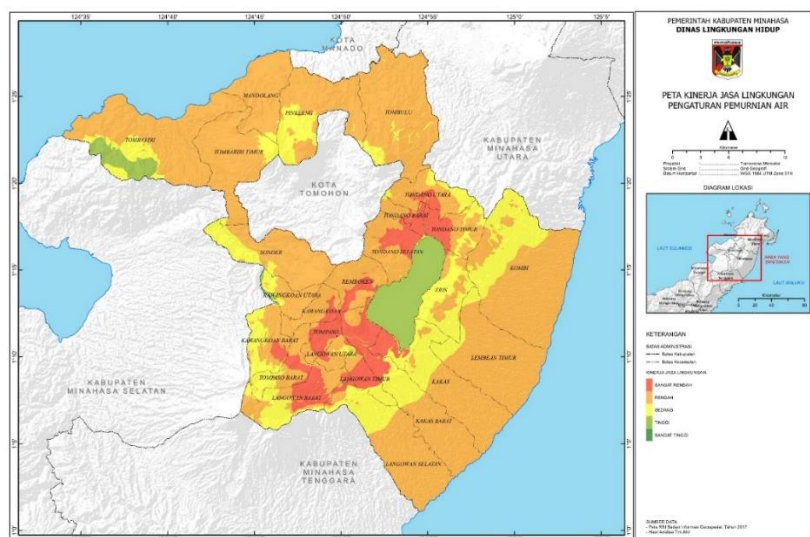
Luas wilayah untuk kinerja jasa Lingkungan pengaturan pemurnian air pada kelas kategori sangat rendah hanya seluas 9,168.70 Ha dari total luas wilayah yang tersebar di 7 Kecamatan dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Hanya 6,088.57 Ha wilayah yang menempati kelas kategori tinggi dan 76,635.72 Ha wilayah merupakan areal pada kategori rendah yang merupakan areal paling dominan.

Tabel 2.181 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	978.54	20.43	2,064.11	1,252.53	4,315.60
KAKAS	4,138.63	604.42	1,967.48	1,013.26	7,723.80
KAKAS BARAT	3,774.01	1,527.40	1,239.29	569.61	7,110.31
KAWANGKOAN	1,258.18	268.93			1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,229.57	262.18	1,138.58	11.07	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,172.23		350.84	97.16	1,620.23
KOMBI	8,904.11		3,699.53		12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,423.29	1,196.63	1,249.66		3,869.59
LANGOWAN SELATAN	5,127.73	159.54	1,732.60		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	201.81	657.02	416.59		1,275.42
LANGOWAN UTARA	678.83	139.84	115.22		933.89

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	Grand Total
LEMBEAN TIMUR	6,751.64		788.79		7,540.43
MANDOLANG	3,745.71		98.64		3,844.34
PINELENG	4,312.05		1,662.24	3.74	5,978.03
REMBOKEN	1,927.45	539.74	15.48	459.18	2,941.85
SONDER	3,787.70		1,179.81	19.22	4,986.73
TOMBARIRI	7,616.43		1,238.21	1,389.80	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	5,009.29		494.95	8.86	5,513.10
TOMBULU	7,995.76		455.25	23.60	8,474.61
TOMPASO	338.93	793.43			1,132.36
TOMPASO BARAT	1,113.17	394.05	580.48		2,087.70
TONDANO BARAT	447.36	436.74	30.78	20.24	935.13
TONDANO SELATAN	1,976.18	917.81	41.21	1,105.59	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,084.83	872.79	570.56	114.72	2,642.91
TONDANO UTARA	1,642.29	377.75	627.09		2,647.13
Grand Total	76,635.72	9,168.70	21,757.41	6,088.57	113,650.41

Gambar 2.9. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air



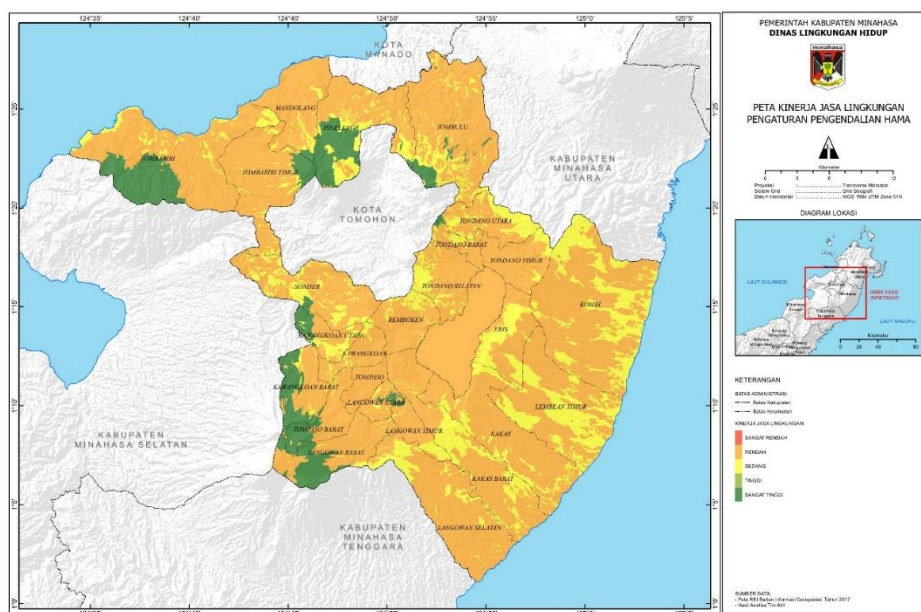
10. Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama

Dari hasil analisa, kinerja jasa Lingkungan pengaturan pengendalian hama, sebesar 83,907.38 Ha dari total luas wilayah merupakan kelas kriteria rendah dan merupakan yang paling luas dibandingkan dengan kriteria lainya dalam pengaturan pengendalian hama. Untuk kelas kriteria Sedang dan sangat tinggi yaitu seluas 8,753.10 Ha dan 8,753.10 Ha.

**Tabel 2.182. Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan
Pengendalian Hama**

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	Grand Total
ERIS	3,054.80		1,260.81	4,315.60
KAKAS	6,670.25		1,053.55	7,723.80
KAKAS BARAT	5,467.87		1,642.44	7,110.31
KAWANGKOAN	1,306.03		221.08	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,367.28	1,151.41	122.71	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	820.18	376.23	423.82	1,620.23
KOMBI	8,827.32		3,776.32	12,603.64
LANGOWAN BARAT	2,542.64	1,211.69	115.25	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	5,967.43		1,052.44	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	960.72	32.05	282.65	1,275.42
LANGOWAN UTARA	728.14	117.93	87.82	933.89
LEMBEAN TIMUR	4,622.84		2,917.59	7,540.43
MANDOLANG	3,427.54	98.15	318.66	3,844.34
PINELENG	3,082.08	1,657.56	1,238.39	5,978.03
REMBOKEN	2,488.71		453.14	2,941.85
SONDER	3,670.27	97.44	1,219.02	4,986.73
TOMBARIRI	6,824.27	2,466.54	953.64	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	4,652.23	445.63	415.23	5,513.10
TOMBULU	6,854.59	452.26	1,167.76	8,474.61
TOMPASO	1,129.45		2.90	1,132.36
TOMPASO BARAT	1,466.74	581.91	39.05	2,087.70
TONDANO BARAT	729.44	18.58	187.10	935.13
TONDANO SELATAN	3,343.96		696.84	4,040.80
TONDANO TIMUR	2,341.62		301.29	2,642.91
TONDANO UTARA	1,560.95	45.74	1,040.44	2,647.13
Grand Total	83,907.38	8,753.10	20,989.93	113,650.41

Gambar 2.10. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama



11. Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati

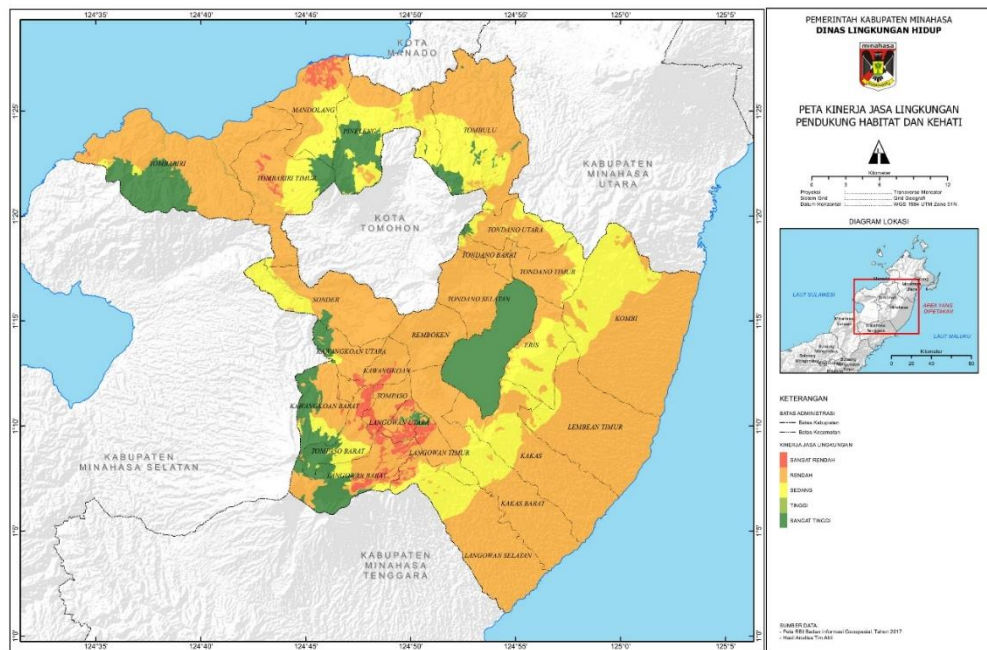
Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumberdaya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumberdaya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat, kebutuhan akan sumberdaya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan

flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Di Kabupaten Minahasa luasan jasa pendukung keanekaragaman hayati yang paling besar berada pada kelas dengan kriteria Rendah dengan luasan sebesar 74,140.83 Ha dari total luas wilayah.

Tabel 2.183. Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	843.36		1,254.43	2,217.82		4,315.60
KAKAS	5,184.99		1,014.91	1,523.90		7,723.80
KAKAS BARAT	5,373.50	0.85	569.61	1,166.36		7,110.31
KAWANGKOAN	1,379.74	147.37				1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,200.53	16.17	1,141.67	273.29	9.74	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,145.28	31.59	376.23	67.14		1,620.23
KOMBI	8,427.24			4,176.40		12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,777.02	569.20	1,195.40	310.11	17.85	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	5,268.58	93.47		1,657.82		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	25.11	179.22	15.89	339.04	16.16	1,275.42
LANGOWAN UTARA	452.07	359.98	97.88		23.96	933.89
LEMBEAN TIMUR	6,908.08			632.35		7,540.43
MANDOLANG	2,026.64	468.77	98.15	1,250.29	0.49	3,844.34
PINELENG	1,600.82		1,665.98	2,711.23		5,978.03
REMBOKEN	2,477.51		459.36	4.99		2,941.85
SONDER	3,797.70		116.66	1,072.37		4,986.73
TOMBARIRI	7,632.37	8.95	2,490.94	112.15	0.03	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,525.31	155.28	454.49	1,378.02		5,513.10
TOMBULU	5,388.70		478.27	2,607.64		8,474.61
TOMPASO	864.55	267.81				1,132.36
TOMPASO BARAT	693.48	286.36	580.48	525.95	1.42	2,087.70
TONDANO BARAT	828.14		41.38	65.61		935.13
TONDANO SELATAN	2,919.99		1,105.72	15.08		4,040.80
TONDANO TIMUR	1,847.89		122.81	672.22		2,642.91
TONDANO UTARA	1,852.24		48.12	746.77		2,647.13
Grand Total	74,140.83	2,585.02	13,328.36	23,526.55	69.65	113,650.41

Gambar 2.11. Peta Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati



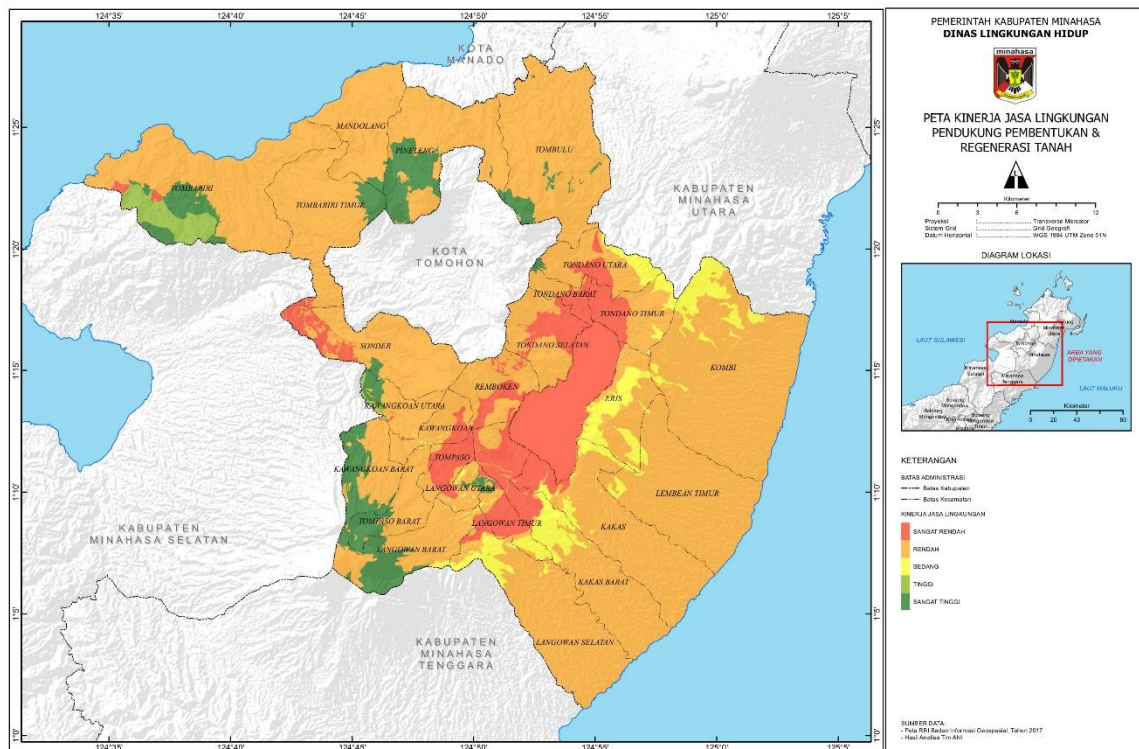
12. Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah

Bentang lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa ada yang dapat memberikan manfaat berupa regenerasi tanah. Secara umum di Kabupaten Minahasa lahan yang dapat mendukung regenerasi tanah dapat dibagi menjadi lahan berpotensi Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mendukung regenerasi tanah di Kabupaten Minahasa memiliki luasan sebesar 7.272,66 Ha dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa., sedangkan yang mendominasi adalah kriteria kelas rendah sebesar 85.516,61 Ha dari luas keseluruhan.

Tabel 2.184 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	1,841.97	1,258.81		1,214.83		4,315.60
KAKAS	5,630.48	1,632.50		460.81		7,723.80
KAKAS BARAT	4,072.51	2,120.52		917.28		7,110.31
KAWANGKOAN	1,240.17	269.44		17.50		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,481.57	7.56	1,140.34	0.86	11.07	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,223.88	14.70	279.07	5.42	97.16	1,620.23
KOMBI	11,241.75			1,361.89		12,603.64
LANGOWAN BARAT	2,477.94	95.58	1,211.69	84.38		3,869.59
LANGOWAN SELATAN	6,192.77	136.63		690.47		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	303.70	657.02	29.99	282.65	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	613.97	139.74	116.17	62.25	1.76	933.89
LEMBEAN TIMUR	7,327.83			212.60		7,540.43
MANDOLANG	3,746.20		98.15			3,844.34
PINELENG	4,320.47		1,657.56			5,978.03
REMBOKEN	1,828.72	1,113.13				2,941.85
SONDER	4,086.45	802.84	97.44			4,986.73
TOMBARIRI	7,640.87	137.04	1,101.14		1,365.40	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	5,026.06	41.40	445.63			5,513.10
TOMBULU	8,022.36		452.26			8,474.61
TOMPASO	336.53	793.43		2.39		1,132.36
TOMPASO BARAT	1,472.57	25.78	581.91	7.44		2,087.70
TONDANO BARAT	442.94	473.61	18.58			935.13
TONDANO SELATAN	1,921.33	2,119.47				4,040.80
TONDANO TIMUR	1,342.44	999.18		301.29		2,642.91
TONDANO UTARA	1,681.15	476.33	45.74	443.91		2,647.13
Grand Total	85,516.61	13,314.71	7,275.66	6,065.99	1,477.44	113,650.41

Gambar 2.12. Peta Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyusunan RPJMD merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilaksanakan dan diimplementasikan hak dan kewajiban daerah untuk dinilai dengan uang dan perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016-2021 menjadi penting diuraikan sebagai dasar bagian analisis kinerja meliputi pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah. Dalam penyusunan Revisi RPJMD 2018-2023 akan menjadi sangat penting mereview realisasi APBD 2018-2020 untuk melakukan prediksi sepanjang periode RPJMD 2022 - 2023.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak operasional maupun belanja modal. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016 – 2020 telah menunjukkan perkembangan yang kurang baik apalagi terjadinya pandemi virus covid di tahun 2020. Pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik sehingga bisa dikelola secara efisien

sehingga walaupun pendapatan daerah tidak tumbuh namun mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dalam realisasinya sepanjang 2016-2020 dapat diikuti pada Tabel 3.1. Pendapatan daerah meningkat dari 1.314.066.320.326 Rupiah pada 2016 menjadi 1.222.002.343.773 Rupiah pada 2020 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -1,75%. Pendapatan daerah pada tahun 2017 turun dibanding pada tahun 2016 namun tahun 2018 naik dibanding tahun 2017 dan naik lagi pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018 kemudian turun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid 19. Walaupun pendapatan daerah pertumbuhannya negatif namun sumber utama pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan terus meningkat dari 77.933.004.819 Rupiah pada 2016 menjadi 115.849.507.478 Rupiah pada 2020 dan pada tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 100.663.291.000 rupiah dan tumbuh rata-rata pertahun sebesar 7,4 %, dan dana pendapatan transfer dari 977.671.406.136 Rupiah pada 2016 menjadi sebesar 1.103.293.279.189 Rupiah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 telah ditetapkan dalam APBD sebesar 1.124.405.251.000 Rupiah atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 3,21 %, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada 2016 sebesar 258.461.909.371 Rupiah dan pada 2020 sebesar 2.859.557.106 rupiah dan tahun 2021 telah ditetapkan dalam APBD sebesar 27.084.650.000 rupiah tumbuh rata-rata pertahun sebesar -28,39%.

Perkembangan ketiga sumber utama penerimaan telah memberikan perubahan yang cukup berarti pada komposisi pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut: PAD pada 2017 naik signifikan sebesar 45% dan turun sebesar 16% pada 2018, dan naik lagi sebesar 5,69% tahun 2019 dan naik 16,54% tahun 2020. Dana Transfer pada 2017 turun 8,96%, tahun 2018 naik menjadi 28,23%, tahun 2019 naik 1,69% dan turun 4,94% tahun 2020, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah turun sebesar rata-rata 28,39 pertahun sejak tahun 2017-2020.

Menarik diperhatikan bahwa khusus pendapatan daerah secara rata-rata turun sebesar 1,4% pertahun sejak tahun 2017-2020 namun Pendapatan Asli Daerah meningkat rata-rata pertahun sebesar 7,4% atau nominal sebesar 77.933.004.819 Rupiah tahun 2016 menjadi 99.406.903.272 Rupiah Tahun 2019 dan di Tahun 2020 naik menjadi 115.849.507.478 Rupiah. Penurunan terjadi pada komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah turun secara rata-rata pertahun 28,39 dari tahun 2016-2020 atau secara

nominal 258.461.909.371 Rupiah tahun 2016 menjadi 2.859.557.106 Rupiah Tahun 2020 sementara dana Transfer yang sangat fluktuatif setiap tahun. Jika diperhatikan pada masing-masing sumber penerimaan utama, maka dapat dikemukakan bahwa untuk penerimaan Transfer tetap masih menjadi sumber andalan Penerimaan Daerah khusus pada 2016 Pendapatan Transfer 74% dari penerimaan daerah, PAD sebesar 6% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20% dan tahun 2020 prosentasi penerimaan transfer sebesar 89% dari total penerimaan daerah, PAD sebesar 8%, sementara Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3%.

Penerimaan PAD terus bertumbuh secara signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dimana pada Tahun 2019 Total PAD 99.406.903.272 Rupiah dan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 40.130.327.750 Rupiah, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 27.228.137.670 Rupiah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 5.417.363.563 Rupiah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 26.631.074.289 Rupiah. Rata rata pertumbuhan pertahun sejak tahun 2016-2020 Pendapatan Pajak Daerah rata-rata naik sebesar 6,72%, Pendapatan Retribusi Daerah turun sebesar 10,03%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik secara rata-rata sebesar 15,16% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara rata-rata tumbuh sebesar 44,31.

Jika memperhatikan khusus dana Transfer, maka sumber terbesar tahun adalah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 626.199.943.000 Rupiah, kemudian dana alokasi khusus (DAK) sebesar 209.591.990.446 Rupiah, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar 212.066.704.926 Rupiah dan terakhir dana Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 33.972.535.987 Rupiah. Dari penerimaan transfer maka penerimaan DAU dan DAK serta Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang paling dominan. Pertumbuhan penerimaan transfer secara rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 3,21% pertahun.

Pada komponen penerimaan daerah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2016 sebesar 258.461.909.371 Rupiah, Tahun 2017 sebesar 273.399.103.564 Rupiah, Tahun 2018 sebesar 32.028.515.508 Rupiah, Tahun 2019 sebesar 40.021.468.152 Rupiah dan Tahun 2010 sebesar 2.859.557.106 Ruipah atau turun secara rata-rata sebesar 28,39%. Komponen dari penerimaan daerah Lain-lain Pendapatan yang sah yang ini terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan

APBD yang merupakan instrument dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara professional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Minahasa**

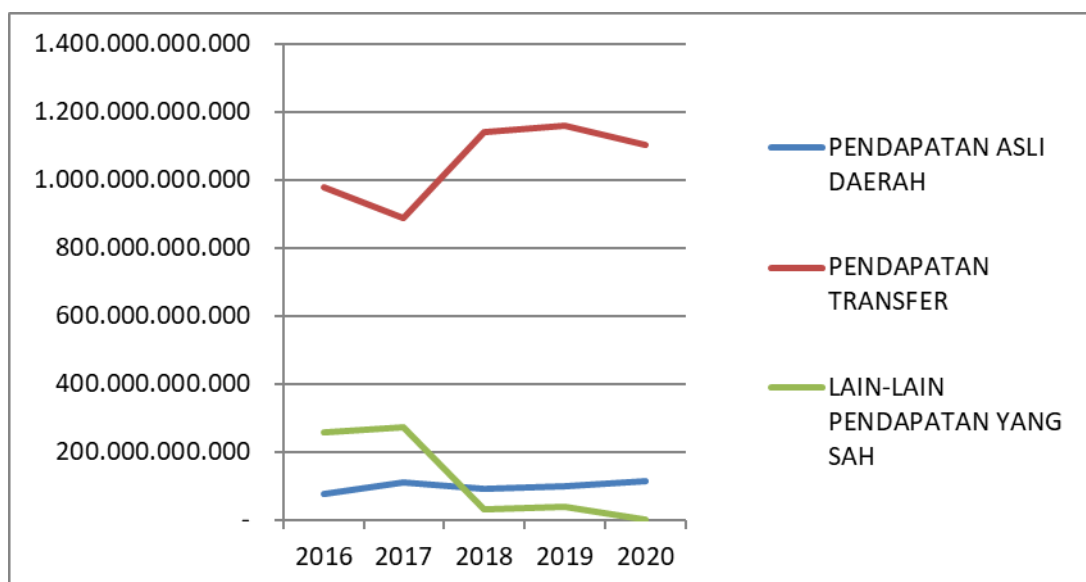
URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Δ16-20
PENDAPATAN	1.314.066.320.326	1.276.079.815.204	1.267.974.996.960	1.300.024.724.183	1.222.002.343.773	(1,75)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.933.004.819	112.621.999.187	94.590.405.094	99.406.903.272	115.849.507.478	12,53
Pendapatan Pajak Daerah	28.662.130.479	37.664.806.022	40.954.428.429	40.130.327.750	32.148.962.501	4,56
Pendapatan Retribusi Daerah	24.378.942.411	27.916.525.146	26.059.012.944	27.228.137.670	3.645.790.244	(18,57)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.008.394.417	2.649.484.945	4.154.979.062	5.417.363.563	3.271.046.997	19,88
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.883.537.512	44.391.183.074	23.421.984.659	26.631.074.289	76.783.707.736	62,19
PENDAPATAN TRANSFER	977.671.406.136	890.058.712.453	1.141.356.076.358	1.160.596.352.759	1.103.293.279.189	4,01
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	911.587.605.152	906.083.472.525	857.254.038.276	(3,00)
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	19.216.098.573	17.308.176.635	14.236.276.860	(13,84)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	9.617.113.012	10.082.641.287	7.225.827.970	(5,87)
Dana Alokasi Umum	-	-	656.641.151.000	680.344.043.000	626.199.943.000	(2,18)
Dana Alokasi Khusus	-	-	226.113.242.567	198.348.611.603	209.591.990.446	(3,31)
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-	-	170.656.617.000	202.021.873.000	212.066.704.926	11,68
Dana Penyesuaian	-	-	170.656.617.000	202.021.873.000	212.066.704.926	
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	59.111.854.206	52.491.007.234	33.972.535.987	(23,24)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	59.111.854.206	52.491.007.234	33.972.535.987	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	258.461.909.371	273.399.103.564	32.028.515.508	40.021.468.152	2.859.557.106	F
Pendapatan Hibah	-	-	22.109.400.000	35.976.558.000	-	
Pendapatan Lainnya	-	-	9.919.115.508	4.044.910.152	2.859.557.106	(16,27)
BELANJA	1.322.939.471.392	1.272.422.425.685	1.273.130.917.962	1.290.203.142.720	1.151.287.575.59	(3,35)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Δ16-20
					1	
BELANJA OPERASI	1.021.783.549.616	1.072.980.737.597	1.104.096.340.104	1.137.880.494.646	1.030.808.059.201	0,39
Belanja Pegawai	583.111.954.325	539.035.967.853	538.646.852.361	535.818.614.528	496.424.344.169	(1,93)
Belanja Barang	209.493.608.057	240.906.427.259	247.717.206.059	320.497.978.834	259.124.738.382	7,01
Belanja Bunga	-	-	92.668.477.334	-	-	0,00
Belanja Hibah	19.329.287.000	44.602.271.245	2.835.000.000	24.766.600.000	23.500.395.000	
Belanja Bantuan Sosial	417.500.000	580.000.000	222.228.804.350	13.280.090.000	10.099.750.000	
Belanja Bagi Hasil	4.850.937.000	5.306.125.000				
Belanja Bantuan Keuangan	204.580.263.234	242.549.946.240	157.018.810.271	243.517.211.284	241.658.831.650	
BELANJA MODAL	301.155.921.776	199.231.482.746	565.345.000	146.150.994.074	116.529.524.952	-32,14
Belanja Tanah	-	-	27.147.329.244	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	33.259.623.931	46.463.305.405	23.891.206.039	
Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	94.036.901.075	32.006.812.647	20.456.497.716	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	2.009.611.021	59.109.155.878	71.179.158.188	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-		8.571.720.144	1.002.663.009	
BELANJA TAK TERDUGA	-	210.205.342	5.725.274.487	-	349.600.000	
TRANSFER			6.290.493.100	6.171.654.000	3.600.391.438	F
SURPLUS / (DEFISIT)			5.155.921.002	9.821.581.463	70.714.768.182	
PEMBIAYAAN						

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Δ16-20
PENERIMAAN DAERAH			70.231.700.480	61.075.779.478	65.897.360.941	
					-	
PENGELUARAN DAERAH			4.000.000.000	5.000.000.000		
					-	
PEMBIAYAAN NETTO	176.393.919.701	74.548.310.625	66.231.700.480	56.075.779.478	65.897.360.941	

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh hasil bahwa Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d 2020 di Kabupaten Minahasa sebesar minus 1,75%. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa sangat fluktuatif.



Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Komposisi Pendapatan Menurut Tiga Sumber Utama

Berdasarkan gambar 3.1 di atas nampak PAD di Kabupaten Minahasa sejak Tahun 2016 sampai tahun 2020 relatif meningkat. Sementara pendapatan Transfer ada kecenderungan menurun pada Tahun 2020 demikian juga dengan Lain-lain Pendapatan yang sah. .

B. Belanja

Sepanjang perkembangan 2017-2020 untuk total belanja daerah kecuali tahun 2018 dan tahun 2019 maka tahun lainnya mengalami pertumbuhan negatif, bahkan jika diamati pertumbuhan rata-rata selang 4 tahun tersebut turun sebesar sebesar 3,3% pertahun, di mana pada 2016 sebesar 1.322.939.471.392 Rupiah menjadi 1.151.287.575.591 Rupiah pada 2020. Komposisi belanja dilihat dari belanja operasional kebelanja modal tampak bahwa belanja operasional meningkat pertumbuhannya pada tahun 2017 sebesar 5,01% dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 3,06% namun pada tahun 2020 turun menjadi 9,41% dan secara rata-rata pertahun dari tahun 2017-2020 tumbuh sebesar

0,29%. Secara nominal Tahun 2016 belanja operasional sebesar 1.021.783.549.616 Rupiah menjadi 1.030.808.059.201 Rupiah di tahun 2020. Selanjutnya terjadi penurunan secara nominal belanja modal dari 301.155.921.776 Rupiah di tahun 2016 menjadi 116.529.524.952 Rupiah pada tahun 2020 dan secara rata-rata pertumbuhan belanja modal dari tahun 2017-2020 turun sebesar 31% pertahun.

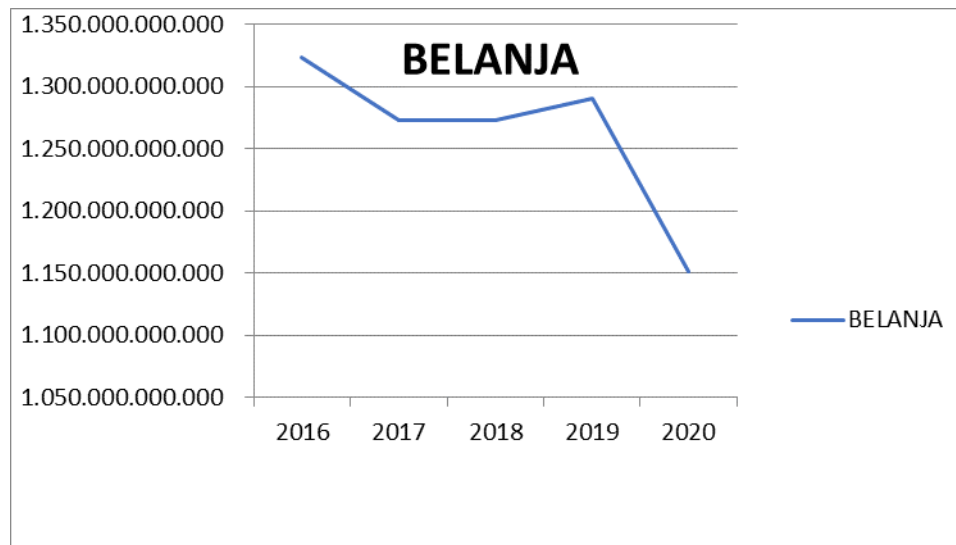
Perkembangan belanja operasional yang terus mengalami peningkatan tipis sepanjang lima tahun terakhir dari tahun 2017 tumbuh 5,01%, tahun 2018 tumbuh sebesar 2,90%, tahun 2019 tumbuh sebesar 3,06 dan tahun 2020 turun 9,41%. memperlihatkan nominasi belanja pegawai secara nominal terus mengalami penurunan. Tabel memperlihatkan bahwa belanja pegawai turun rata-rata pertahun sebesar 3,08% dari nominal 583.111.954.325 Rupiah pada 2016 menjadi sebesar 496.424.344.169 Rupiah tahun 2020. Berikut dapat juga dikemukakan bahwa secara nominal belanja pegawai terus mengalami penurunan, proporsinya dari 57,1% pada 2016 menjadi sekitar 47% pada 2020. Selanjutnya secara rata-rata dari tahun 2017-2020 Belanja Barang meningkat sebesar 0,29% pertahun, Belanja Bunga secara rata-rata turun 3,08%, belanja hibah dan Belanja Bantuan Keuangan sangat fluktuatif setiap tahunnya. Untuk jelasnya komponen belanja sepanjang 2016-2020 dapat dilihat pada table dibawah berikut.

Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2 Δ
BELANJA	1.322.939.471.392	1.272.422.425.685	1.273.130.917.962	1.290.203.142.720	1.151.287.575.591	(3,53)
BELANJA OPERASI	1.021.783.549.616	1.072.980.737.597	1.104.096.340.104	1.137.880.494.646	1.030.808.059.201	0,39
Belanja Pegawai	583.111.954.325	539.035.967.853	538.646.852.361	535.818.614.528	496.424.344.169	(1,93)
Belanja Barang	209.493.608.057	240.906.427.259	247.717.206.059	320.497.978.834	259.124.738.382	7,01
Belanja Bunga	-	-	92.668.477.334	-	-	0,00
Belanja Hibah	19.329.287.000	44.602.271.245	2.835.000.000	24.766.600.000	23.500.395.000	
Belanja Bantuan Sosial	417.500.000	580.000.000	222.228.804.350	13.280.090.000	10.099.750.000	
Belanja Bagi Hasil	4.850.937.000	5.306.125.000				
Belanja Bantuan Keuangan	204.580.263.234	242.549.946.240	157.018.810.271	243.517.211.284	241.658.831.650	
BELANJA MODAL	301.155.921.776	199.231.482.746	565.345.000	146.150.994.074	116.529.524.952	(32,14)
Belanja Tanah	-	-	27.147.329.244	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	33.259.623.931	46.463.305.405	23.891.206.039	
Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	94.036.901.075	32.006.812.647	20.456.497.716	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	2.009.611.021	59.109.155.878	71.179.158.188	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-		8.571.720.144	1.002.663.009	
BELANJA TAK TERDUGA	-	210.205.342	5.725.274.487	-	349.600.000	
TRANSFER			6.290.493.100	6.171.654.000	3.600.391.438	

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa Tahun 2018 (Data diolah)

Pada Tabel 3.2 nampak bahwa Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016-2020 secara relatif menurun dan sangat fluktuatif. Secara umum rata-rata penurunan realisasi belanja sebesar 3,53%



Gambar 3.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016 – 2020

Berdasar Tabel 3.2. tentang Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016-2020 dan Gambar 3.2 tentang Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 2016 – 2020 nampak bahwa realisasi belanja kecenderungan menurun apalagi untuk Belanja pada Tahun 2020 saat Pandemi Covid-19 yang sangat menurun.

Tabel 3.3. Perkembangan Proporsi Belanja Operasional dan Belanja Modal Kabupaten Minahasa 2016-2020

URAIAN TAHUN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL
2016	1.021.783.549.616	301.155.921.776
2017	1.072.980.737.597	199.231.482.746
2018	1.104.096.340.104	565.345.000
2019	1.137.880.494.646	146.150.994.074
2020	1.030.808.059.201	116.529.524.952

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2020

Belanja operasional mengalami kenaikan kecil peningkatannya secara rata-rata dari tahun 2017-2020 sebesar 0,29% dan secara nominal dari 1.021.783.549.616 Rupiah tahun 2016 menjadi 1.030.808.059.201 Rupiah di tahun 2020. Sementara belanja modal turun dari nominal 301.155.921.776 Rupiah di tahun 2016 menjadi 116.529.524.952 Rupiah di 2020, prosentase

belanja operasional terhadap total belanja dari tahun 2016-2020 adalah 77,2% tahun 2016, tahun 2017 sebesar 84,3%, tahun 2028 sebesar 86,7%, tahun 2019 sebesar 88,2% dan tahun 2020 sebesar 89,5% sementara proporsi belanja modal terus menurun dimana tahun 2016 sebesar 22,8%, tahun 2017 sebesar 15,7%, tahun 2019 sebesar 11,3% dan tahun 2010 sebesar 10,1% sehingga terjadi penurunan drastis proporsi belanja modal terhadap total belanja.

C. Pembiayaan

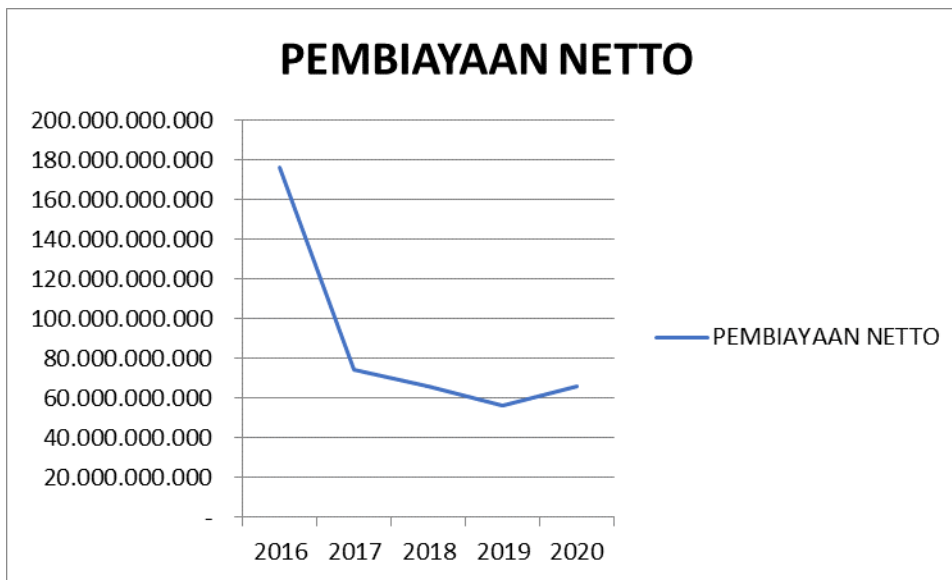
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menurun dari waktu ke waktu selang 2016-2020. Realisasi pembiayaan neto terus menurun selang 2010-2020 yakni tahun 2016 sebesar 176.393.919.701 Rupiah menjadi 65.897.360.941 Rupiah di tahun 2020. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.4 di bawahini.

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Minahasa Selang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pemb Net	176.393.919.701	74.548.310.625	66.231.700.480	56.075.779.478	65.897.360.941
Penerimaan Pembiayaan	176.393.919.701	74.548.310.625	70.231.700.480	61.075.779.478	65.897.360.941
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	4.000.000.000	5.000.000.000	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2020

Berdasar Tabel 3.4 menyatakan bahwa Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Minahasa Selang Tahun 2016-2020 menurun dan juga sangat fluktuatif. Pembiayaan (financing) merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.



Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Minahasa Selang Tahun 2016-2020

3.1.2. Neraca Daerah

Keberadaan laporan neraca daerah menjadi kewajiban untuk disusun pemerintah daerah. Neraca daerah memberikan informasi strategis dalam manajemen pembangunan pemerintah daerah karena kapasitas kekayaan dan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dalam neraca daerah.

Tabel 3.5. memperlihatkan keberadaan asset lancar yang terdiri dari kas dan piutang serta persediaan. Kemudian asset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi serta jaringan, asset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Jumlah asset daerah terus berkembang yang ditentukan oleh bertambahnya asset tetap milik pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Informasi mengenai kewajiban dan ekuitas dana menunjukkan juga perkembangan yang bervariasi.

Umumnya kewajiban sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab dan tugas dimasa yang lalu. Kewajiban dapat diklasifikasikan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Ekuitas dana yang adalah selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar diperoleh dari selisih asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi diperoleh dari selisih jumlah nilai investasi dan asset tetap serta asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Adapun ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Oleh sebab itu gambaran suatu neraca daerah memberikan informasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan investasi dan belanja

dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di masa datang. Melalui neraca daerah dapat diamati jelas nilai aset yang dapat menjadi jaminan untuk meningkatkan sumber pendapatan atau pembiayaan daerah serta yang dapat luwes untuk dipertukarkan atau dilepas dalam rangka peningkatan kemampuan melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2020

URAIAN	2018	2019	2020	Pert 2019	Pert 2020
ASET					
ASET LANCAR	97.818.971.860,21	112.476.496.321,21	233.845.114.176,61	14,98	107,91
Kas	64.124.242.278,00	67.188.003.947,22	163.788.681.585,62	4,78	143,78
Piutang	35.222.014.186,00	26.281.773.611,00	26.281.773.611,00	-25,38	0,00
Piutang Lain-lain	755.883.292,23	1.267.613.005,23	26.035.553.222,23	67,70	1953,90
Persediaan	4.769.107.321,00	22.782.942.384,00	22.773.042.384,00	377,72	-0,04
Penyisihan Piutang	(7.052.275.217,02)	(5.043.836.626,24)	(5.033.936.626,24)	-28,48	-0,20
INVESTASI JANGKA PANJANG	43.003.740.998,24	36.983.122.865,78	36.983.122.865,78	-14,00	0,00
Investasi Permanen	43.003.740.998,24	36.983.122.865,78	36.983.122.865,78	-14,00	0,00
ASET TETAP	1.506.837.339.654,75	1.643.491.255.065,75	1.759.645.465.873,75	9,07	7,07
Tanah	283.108.419.320,00	283.251.913.218,00	283.251.913.218,00	0,05	0,00
Peralatan dan Mesin	270.094.545.081,70	308.539.672.330,70	332.547.305.225,70	14,23	7,78
Gedung dan Bangunan	431.678.888.217,00	461.129.597.135,00	481.094.353.851,00	6,82	4,33
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.168.201.070.782,00	1.226.091.054.922,95	1.297.270.213.110,95	4,96	5,81
Aset Tetap Lainnya	19.922.587.216,00	20.673.841.590,00	21.676.504.599,00	3,77	4,85
Konstruksi dalam Pengerjaan	10.084.228.565,00	10.657.301.236,60	10.657.301.236,60	5,68	0,00
Akumulasi Penyusutan	(676.252.399.526,95)	(666.852.125.367,50)	(666.852.125.367,50)	-1,39	0,00
ASET LAINNYA	217.866.792.828,00	220.328.098.679,83	220.328.098.679,83	1,13	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	42.980.632,00	42.980.632,00		0,00
Aset Tidak Berwujud	1.028.689.000,00	4.066.557.314,78	4.087.917.314,78	295,31	0,53
Aset Lain-lain	216.838.103.828,00	216.218.560.733,05	216.197.200.733,05	-0,29	-0,01
JUMLAH ASET	1.865.526.845.341,20	2.013.278.972.932,57	2.250.801.801.595,97	7,92	11,80
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.463.993.926,25	17.583.255.819,92	68.149.704.135,92	107,74	287,58
Utang Perhitungan Fihak	2.928.691.882,00	1.260.423.710,00	2.034.578.609,00	-56,96	61,42

Ketiga (PFK)					
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.535.302.044,25	16.322.832.109,92	66.115.125.526,92	194,89	305,05
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA	8.463.993.926,25	17.583.255.819,92	68.149.704.135,92	107,74	287,58
EKUITAS DANA LANCAR	89.242.846.607,96	88.861.343.450,27	136.997.558.908,69	-0,43	54,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	61.075.779.478,00	65.897.360.941,22	114.569.521.988,62	7,89	73,86
Cadangan untuk Piutang	28.925.822.261,21	38.568.121.466,99	32.440.971.327,99	33,33	-15,89
Cadangan untuk Persediaan	4.769.107.321,00	152.445.451,00	6.279.678.406,00	-96,80	4019,30
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(5.527.862.452,25)	(15.756.584.408,94)	(16.292.612.813,92)	185,04	3,40
EKUITAS DANA INVESTASI	1.761.047.748.466,99	1.900.174.248.648,38	2.023.524.530.059,36	7,90	6,49
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	43.003.740.998,24	36.983.122.865,78	36.983.122.865,78	-14,00	0,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.554.652.716.330,75	1.699.368.572.192,65	1.767.713.854.354,08	9,31	4,02
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	163.391.291.138,00	218.827.552.839,50	218.827.552.839,50	33,93	0,00
KOREKSI EKUITAS	6.772.256.340,00				
JUMLAH EKUITAS DANA	1.857.062.851.414,95	1.995.695.717.112,65	2.160.522.088.968,05	7,47	8,26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.865.526.845.341,20	2.013.278.972.932,57	2.228.671.793.103,97	7,92	10,70

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2018

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas ternyata Total Aset Tahun 2019 sebesar 7,92% dan Tahun 2020 tumbuh sebesar 11,80%.Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2020, sementara jumlah kewajiban Tahun 2019 meningkat sebesar 107,74% dan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 287,58%.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah substansinya adalah operasionalisasi dalam mewujudkan visi dan misi kepemimpinan daerah yang terjabar dalam program dan kegiatan. Ada dua sisi yang penting diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni: sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Keduanya memerlukan strategi yang harus memanfaatkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan dari segi upaya meningkatkan pendapatan di masa lalu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah yang terpadu dengan peningkatan pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah
- Meningkatkan sistem administrasi yang efisien dan efektif bagi penggunaan anggaran dalam rangka upaya pengembangan pendapatan daerah
- Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, di mana ekstensifikasi utamanya dilakukan pendayagunaan asset daerah termasuk pendapatan dari pihak ketiga
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan dana perimbangan yang memungkinkan seperti DAK dan lainnya
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengembangkan dana bagi hasil dan sumber lainnya.
- Meningkatkan optimalisasi PAD melalui pengembangan potensi sumber daya alam.

Berkaitan dengan belanja daerah maka kebijakan yang dilakukan adalah:

- Mengupayakan untuk mengalokasikan proporsi belanja kebidang atau sektor tertentu sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yakni: belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja modal.
- Mengupayakan pergeseran belanja yang seimbang antara belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- Mengupayakan pengembangan belanja untuk optimalisasi pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah.
- Mengalokasikan anggaran dana transfer kedaerah dan dana desa sebagaimana besaran jumlah masing-masing.
- Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pemerataan pendapatan
- Mengupayakan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UKM

- Mengupayakan efisiensi dan efektifitas belanja melalui alisis standar belanja (ASB) dalam rangka kewajaran dan terjaminnya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk kegiatan-kegiatan yang sejenis.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ditujukan untuk mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan pusat, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan social untuk urusan non-pemerintahan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dialokasikan bagi rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat kesimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengartikan bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan, mengartikan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan, mengartikan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi, mengartikan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi, mengartikan bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi Stabilisasi, mengartikan bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Melalui fungsi-fungsi anggaran sebagaimana dikemukakan tersebut,

maka anggaran dipergunakan dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintah daerah yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk birokrat pejabat. Disamping itu pelaksanaan anggaran harus bermuara pada tugas pokok pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan terdistribusi baik kemakmurannya.

Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Minahasa selang Tahun 2018 - 2020

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (BELANJA PEGAWAI) (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA, PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (Rp)	PRESENTASE (a) / (b) x 100 %
1	TAHUN 2018	538.646.852.361	1.104.096.340.104	48,79%
2	TAHUN 2019	535.818.614.528	1.137.880.494.646	47,09%
3	TAHUN 2020	496.424.344.169	1.030.808.059.201	48,16%

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2020

Pada Tabel 3.6. memperlihatkan bahwa selang waktu 2018-2020 terlihat nominal belanja aparatur terjadi penurunan, yakni tahun 2018 sebesar 538.646.852.361 Rupiah dan menurun menjadi 535.818.614.528 Rupiah pada tahun 2019 serta menurun lagi menjadi 496.424.344.169 Rupiah pada Tahun 2020. Secara proporsi terjadi penurunan yakni sekitar 48,79% pada tahun 2018 dan menurun menjadi sekitar 47,09% pada Tahun 2019 serta sekitar 48,16% pada tahun 2020. Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian pemerintah daerah dalam anggaran pembangunan terus mengalami peningkatan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam anggaran pemerintah daerah pasti berhadapan dengan surplus atau defisit sehingga pengelolaan dalam pembiayaan menjadi penting demi kelangsungan dan kelancaran anggaran. Pengertian pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2020

URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
REALISASI PENDAPATAN DAERAH	1.267.974.996.960	1.300.024.724.183	1.222.002.343.773
DIKURANGI REALISASI			

BELANJA DAERAH	1.273.130.917.962	1.290.203.142.720	1.151.287.575.591
PEMBIAYAAN DAERAH NETO	66.231.700.480	56.075.779.478	65.897.360.941
DEFISIT RIIL	61.075.779.478	65.897.360.941	136.612.129.123

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2018

Dalam pembiayaan pembangunan daerah ada yang bersifat penerimaan dan ada yang bersifat pengeluaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran-anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada tiga tahun terakhir tampak bahwa pada tahun 2018 – 2010 terdapat surplus riil positif sebesar 61.075.779.478 Rupiah yang sebenarnya realisasi belanja lebih kecil dibandingkan realisasi pendapatan namun adanya penggunaan dana SILPA sehingga terjadi surplus. Kemudian sebaliknya yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya yakni tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari realisasi belanja.

Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Minahasa 2018 -2020

URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL		
	2018	2019	2020
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	70.231.700.480	61.075.779.478	65.897.360.941
PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2020

Kondisi keuangan Kabupaten Minahasa memiliki kemampuan memadai dalam rangka membiayai belanja baik belanja operasional maupun modal. Hal ini dapat diikuti pada eksistensi perkembangan SILPA yang terjadi. Pada

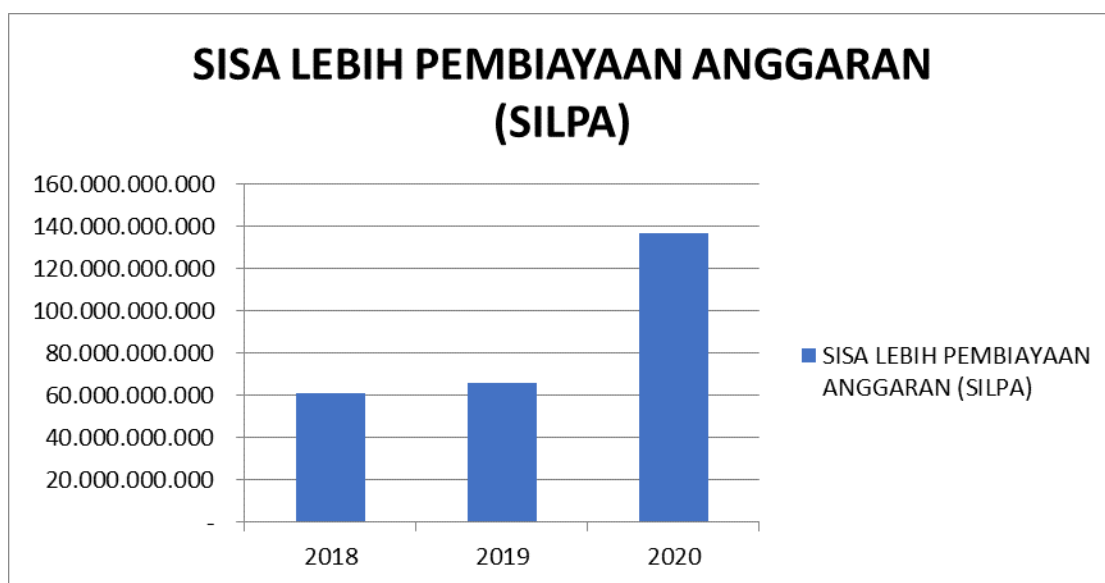
tahun 2018 tercatat SILPA sebesar 61.075.779.478 Rupiah dan meningkat pada 2019 menjadi sebesar 65.897.360.941 Rupiah serta pada 2020 meningkat menjadi sebesar 136.612.129.123 Rupiah. Rincian Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Minahasa 2018 -2020 dapat dilihat pada tabel 3.9.

**Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Minahasa 2018 - 2020**

URAIAN	2018		2019		2020	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
		Dari Silpa		dari silpa		Dari Silpa
JUMLAH SILPA	61.075.779.478		65.897.360.941		136.612.129.123	
PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD	0,00				0,00	
PELAMPAUAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN	0,00		0,00		0,00	
PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00		0,00		0,00	
SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA						
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BELUM TERSELESAIKAN	0,00		0,00		0,00	
KEGIATAN LANJUTAN	0,00		0,00		0,00	

Sumber : BPKAD Kab. Minahasa, 2020

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Dalam realisasi APBD Kabupaten Minahasa terjadi adanya Silpa yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



Gambar 3.4. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Minahasa

Pada Gambar 3.4 diatas nampak bahwa Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2019 terus meningkat. Munculnya SILPA ini terjadi kemungkinan karena serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 44 adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber- sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Kerangka pendanaan dirancang agar efisien dan efektif mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum dalam lingkup efektifitasnya kinerja birokrasi (aparatur) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program priority*. Hal ini dilakukan

untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan lain sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

3.3.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada bagian ini akan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA), dan Proyeksi Belanja daerah.

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan RPJMD-nya. Penentuan proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif pendapatan daerah yang secara umum dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa, rencana penerimaan diperkirakan dengan mengacu pada realisasi tahun-tahun sebelumnya dan prediksi

perkembangan potensi penerimaan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Selanjutnya dalam merencanakan belanja, agar pendanaan benar-benar efisien dan efektif, maka rencana belanja diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan. Dalam penentuan prioritas pembangunan tersebut, harus diperhatikan sinergitas antara program pembangunan nasional dan daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selain itu terdapat beberapa prioritas lainnya yaitu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini tentu mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah untuk berbagai bidang. Adapun arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya

untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang nampak dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan serta pembangunan reformasi birokrasi.

3. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.

Arahan kebijakan alokasi belanja kedepan, memerlukan dukungan komitmen pemerintah kabupaten bersama pihak legislatif untuk dapat mengalokasikan dana lebih besar guna mendukung pemenuhan SPM dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Secara bersamaan dan bertahap diharapkan alokasi belanja untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang harus semakin mengecil, dan pengurangannya diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama beberapa tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi. Dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama beberapa tahun kedepan.

Kerangka pendanaan selanjutnya merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan yang

pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Sehubungan dengan hal tersebut perhitungan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Minahasa akan ditampilkan sebagaimana tabel 3.10 dan tabel 3.11

Tabel. 3.10
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023 Kabupaten Minahasa

No	URAIAN	2021	2022	Pert (%)	2023	Pert (%)
4	PENDAPATAN	1,252,153,173,000	1,321,276,585,417	5,5	1,338,151,228,986	1,3
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,663,281,000	101,301,347,417	0,6	105,831,671,986	4,5
411	Pendapatan Pajak Daerah	37,093,181,000	41,976,000,000		42,688,000,000	
412	Pendapatan Retribusi Daerah	4,525,861,000	3,402,000,000		3,537,000,000	
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,150,000,000	3,150,000,000		3,150,000,000	
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55,894,239,000	52,773,347,417		56,456,671,986	
42	PENDAPATAN TRANSFER	1,124,405,242,000	1,192,348,895,000	6	1,204,140,688,000	1,0
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,071,930,607,000	1,139,332,978,000		1,148,240,616,000	
420101	<i>Dana Perimbangan</i>	884,025,764,000	947,670,039,000		952,744,419,000	
42010101	DBH	24,582,540,000	25,074,190,000		25,575,673,000	
42010102	DAU	635,281,531,000	693,950,923,000		693,950,923,000	
42010103	DAK-Fisik	91,169,460,000	92,992,849,000		94,852,705,000	
42010104	DAK-Non Fisk	132,992,233,000	135,652,077,000		138,365,118,000	
420102	<i>Dana Intensif Daerah</i>	17,194,722,000	17,538,616,000		17,889,388,000	
420105	<i>Dana Desa</i>	170,710,121,000	174,124,323,000		177,606,809,000	
4202	Pendapatan Transfer antar Daerah	52,474,635,000	53,015,917,000	1	55,900,072,000	
43	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27,084,650,000	27,626,343,000	2	28,178,869,000	2,0
5	BELANJA	1,338,581,226,819	1,338,533,949,000	-	1,365,304,628,000	2,0
51	BELANJA OPERASI	918,223,588,692	917,758,812,000	0,05	931,835,705,000	1,5
511	Belanja Pegawai	560,884,440,774	564,493,285,000		566,158,217,000	
512	Belanja Barang	308,698,293,614	309,316,927,000		315,374,540,000	
513	Belanja Bunga	4,035,000,000	4,350,000,000		4,350,000,000	
515	Belanja Hibah	29,296,855,000	29,296,855,000		30,181,619,000	
516	Belanja Bantuan Sosial	15,308,999,304	10,301,745,000		15,771,329,000	

No	URAIAN	2021	2022	Pert (%)	2023	Pert (%)
52	BELANJA MODAL	166,192,935,533	166,610,434,406	0,25	179,304,220,406	8,0
522	Belanja Peralatan dan Mesin	46,631,013,419	39,550,135,406		40,985,507,000	
523	Belanja Bangunan dan Gedung	82,059,719,915	83,700,914,000		90,537,923,000	
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31,712,126,280	37,572,424,000		41,993,829,000	
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	5,786,961,220	5,786,961,000		5,786,961,000	
53	BELANJA TAK TERDUGA	5,002,742,594	5,002,742,594	-	5,002,742,000	-
54	BELANJA TRANSFER	249,161,960,000	249,161,960,000	-	249,161,960,000	-
5401	Belanja Bagi Hasil	4,208,043,000	4,208,043,000		4,208,043,000	
5402	Belanja Bantuan Keuangan	244,953,917,000	244,953,917,000	-	244,953,917,000	
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86,428,044,819	36,217,275,588		63,678,814,050	76
	SELISIH	-	18,862,712,005		36,416,215,036	93

Dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Tahun 2022 maka proyeksi yang digunakan adalah atas dasar APBD Tahun 2021. Penetapan proyeksi PAD Tahun 2022 dan 2023 didasarkan juga dengan diskusi bersama SKPD terkait untuk menjadi dasar besaran yang akan menjadi target Tahun 2022 dan 2023. Diskusi dengan SKPD terkait ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama besaran target PAD yang bersesuaian dengan SKPD. Berdasarkan hasil pembahasan pada realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dikaitkan dengan prediksi perekonomian makro Kabupaten Minahasa, maka dapatlah disusun prediksi pendapatan dan belanja sepanjang periode RPJMD Kabupaten Minahasa selang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Pada tahun 2022 diproyeksikan Pendapatan sebesar 1,321 Triliun dan kemudian ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 1,338 Triliun. Belanja daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 1.338 Triliun dan diakhir periode tahun 2023 sebesar 1.365 Triliun.

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun kedepan, dilakukan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa periode 2022-2023 terlihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa
Tahun 2022-2023
848.281.776.000 873.303.357.000

No	Uraian	Proyeksi	
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan	1,321,276,585,417	1,338,151,228,986
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	
	Total Penerimaan	1,321,276,585,417	1,338,151,228,986
	<i>Dikurangi :</i>		
4	Belanja Operasional	917.758.812.000	931.835.705.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	403.420.573.417	406.206.323.986

Sumber : Data BPKAD Minahasa diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas nampak menunjukkan bahwa adanya potensi atau adanya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah di Kabupaten Minahasa.

Peningkatan kapasitas riil ini dapat meningkat dengan beberapa cara antara lain: Intensifikasi PAD, melalui: Optimalisasi sistem pajak, penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya, Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah serta adanya perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.

Tabel 3.12.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Minahasa

Uraian	Proyeksi	
	Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)
Kapasitas Riil kemampuan keuangan	403.420.573.417	406.206.323.986
Prioritas I		
Pendidikan (20%)	80.684.114.683	81.241.264.797
Prioritas II		
Kesehatan (10%)	40.342.057.342	40.620.632.399

Sumber : Data BPKAD Minahasa diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.11 dan 3.12, kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal diluar belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas-prioritas utama termasuk belanja pendidikan dan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dengan pendanaan tersebut dapat dilaksanakan berbagai program dalam rangka mengatasi permasalahan dan untuk mencapai target indikator pembangunan Kabupaten Minahasa selama lima tahun kedepan guna pencapaian Visi Kabupaten. Disadari bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Minahasa masih sangat terbatas untuk menjawab berbagai permasalahan, untuk itu dibutuhkan dukungan sumber dana lainnya baik dari APBN, APBD Provinsi, CSR, lembaga donor maupun swadaya masyarakat.

Memperhatikan dinamika pembangunan selang Tahun 2018 – 2020 maka Kabupaten Minahasa Menetapkan Target Indikator Makro dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun sisa periode RPJMD Kab. Minahasa (Tabel 3.13).

Tabel 3.13 Target Indikator Makro Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Target		
			2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	3,0-4,0	4,0-5,0	6,0
2	PDRB (ADHK)	(Trilyun Rp)	12,15	12,76	13,52
3	PDRB (ADHB)	(Trilyun Rp)	18,39	19,58	21,05
4	Jumlah Penduduk	(ribu orang) (+1,2%/Tahun 2021-2023)	351,46	355,68	359,94
5	PDRB/kap	(Juta Rp)	52,32	55,05	58,48
6	Kemiskinan	(Jiwa)	24.450	23.850	23.150
		(%)	7,3-7,0	7,0-6,7	6,7-5,9
7	Pengangguran	(Jiwa)	10.521	10.171	9.671 (-600)
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	6,21	6,00	5,71
9	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(%)	92.7-93	93-93.3	93.3-94.1
10	IPM	Point	75-76	76-77	77-78
11	Angka rata-rata lama sekolah		9,73	9,85	10,01
12	Angka usia harapan hidup		70,55	70,58	70,61
13	Pengeluaran per Kapita	Rp	12.720.000	12.395.000	12.450.000

14	Inflasi	(%)	2 (+/-0,75)	2 (+/-0,75)	2 (+/-0,75)
----	---------	-----	-------------	-------------	-------------

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Sebagaimana penjelasan dalam pedoman teknis penyusunan dokumen RPJMD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, lebih khusus berkaitan dengan permasalahan dan isu strategis daerah, maka permasalahan dan isu strategis daerah dimaksud merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu strategis dalam Bab ini meliputi dua aspek utama yaitu (1) permasalahan pembangunan daerah dan (2) isu strategis.

Permasalahan pembangunan yang disajikan dalam dokumen ini merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak disajikan atau tetap dalam perumusan saja. Perumusan permasalahan pembangunan dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.1. Permasalahan Pembangunan

RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaannya dokumen tersebut belum memiliki keterkaitan dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara karena pada saat proses penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa sampai dengan penetapan dengan Perda, belum disesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara. Akibat tidak mengacunya RPJPD Kabupaten Minahasa terhadap RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, banyak ditemui kelemahan dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Minahasa, seperti periodisasinya yang menggunakan kurun waktu

2008-2028, sedangkan periode RPJPN adalah Tahun 2005-2025. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke 2, maka pada RPJMD Ke 3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada semakin maju dan mandiri masyarakat Minahasa sehingga secara makro, keunggulan daerah Kabupaten Minahasa dapat bersaing tidak hanya dalam lingkup domestik namun juga dalam persaingan global dengan memanfaatkan secara bijaksana keunggulan komparative daerah dan telah mampu merubah menjadi keunggulan kompetitive sehingga keunikan daerah menjadi modal kompetensi inti dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Memasuki Tahun 2020 Pandemi Covid-19 melanda dunia, Indonesia dan Kabupaten Minahasa sehingga menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap hampir seluruh sektor dan tatanan kehidupan masyarakat sosial serta sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.1. Permasalahan berkaitan dengan Pembangunan Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kependudukan

Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Tren jumlah penduduk Kabupaten Minahasa lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015-

2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk, diketahui bahwa meskipun selalu mengalami pertumbuhan penduduk tetapi laju pertumbuhannya semakin melambat. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa hanya sebesar 0,82, menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,91.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 4.1

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011-2016 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2011	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	13.004	12.808	13237	14.620	15.527
2.	Jumlah lulusan S2	1.429	834	876	1.030	1.137
3.	Jumlah lulusan S3		109	114	120	134
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	14.433	13751	14227	15.770	16.798
5.	Jumlah penduduk	313.887	319.945	325,680	333.412	334.113
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5 x 10.000)	459	429	436	473	503

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Tahun 2017

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Minahasa tahun 2019 menurut data Badan Pusat Statistik sebesar 75, 47. Persoalan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan seperti yang duduk dalam lembaga legislatif yang sudah mencapai 31 %, duduk dalam lembaga eksekutif sebesar 50,04 % dari 1096 jumlah pejabat dari eselon IIa sampai IVb. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menciptakan Sumber daya Manusia yang berdaya saing yakni:

- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

- Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing sumberdaya manusia IPM, IPG, dan IDG,
- Meningkatkan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- Pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang konektivitas antara kecamatan dan desa di Kabupaten Minahasa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan produksi.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Minahasa pada tahun 2020 mencapai 17.427.127 jutiar rupiah, meningkat dari 17.119.638 juta rupiah pada tahun 2019. Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi dengan persentase sebesar 27,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Minahasa masih bercorak agraris.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa sebesar 5,82 persen, mengalami perlambatan apabila dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 6,12 persen, selanjutnya pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Minahasa tumbuh negatif yaitu pada angka - 1,03 % .

Terkait dengan inflasi Kabupaten Minahasa, kondisinya mengikuti inflasi kota Manado sebagaimana dipublikasikan oleh BPS Sulut yang mencatat pada bulan Desember 2020 mengalami Inflasi sebesar 0,47 persen, jika dilihat dari kelompok penyusunnya, pergerakan harga di Manado sebagian besar digerakkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kemudian kelompok transportasi, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, Indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,80 % dan memberikan kontribusi sebesar 0,23%. Kenaikan harga kelompok tersebut pada bulan Desember 2020 terutama didorong oleh kenaikan komoditas perikanan. Kenaikan harga sejumlah komoditas perikanan sejalan dengan penurunan stok di pasar yang dipengaruhi peningkatan anomali cuaca menjelang puncak musim hujan.

Tabel 4.2
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun Kota Manado,
Tahun 2016-2020

	Inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desember	-1,52	0,51	0,78	-1,88	0,47
2	Tahun kalender (Desember terhadap Desember tahun (n-1))	0,35	2,44	3,83	3,52	-0,18
3	Desember terhadap Desember (tahun (n) ke tahun (n-1))	0,35	2,44	3,83	3,52	-0,18

Dari perkembangan inflasi tahun kalender atau tahun ke tahun nampak bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir inflasi berada pada angka dibawah 4, yang berarti tidak terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi.

Permasalahan pembangunan daerah terkait kemandirian ekonomi mencakup beberapa sektor antara lain pertanian, perikanan, pariwisata dan sektor pendukung lainnya. Dalam pembentukan PDRB Kabupaten Minahasa sektor Pertanian dan Perikanan merupakan sektor yang mempunyai andil terbesar, meski persentasinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebagaimana hal tersebut maka dalam upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi, sektor pertanian dan perikanan menjadi hal utama untuk dijadikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2020 kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Minahasa adalah sebesar 27,11 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun Pertumbuhannya justru mengalami perlambatan dari tahun 2019 berkisar 4,99 persen menjadi 2,16 persen di tahun 2020. Hal ini berarti kontribusi sektor ini meningkat karena terjadinya penurunan kontribusi dari sektor-sektor lainnya.

Komoditas Pertanian utama yang dikembangkan di Kabupaten Minahasa terdiri dari Tanaman Pangan seperti Padi, Jagung, dan Kacang-kacangan, Tanaman Hortikultura seperti Cabe Rawit, Cabe Keriting, Bawang Merah, dan Tomat, Tanaman Perkebunan seperti Kelapa, Cengkih dan Kopi Arabika, kemudian ada pula komoditas ternak seperti Sapi, Babi dan Ayam. Luas Panen, Produktivitas dan produksi setiap jenis komoditi pertanian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Pertanian Kabupaten Minahasa Tahun 2016 - 2020

I	Tanaman Pangan	Capaian 2016			Capaian 2017			Capaian 2018			Capaian 2019			Capaian 2020		
		Luas Panen	Produktivitas	Produksi	Luas Panen	Produktivitas	Produksi	Luas Panen	Produktivitas	Produksi	Luas Panen	Produktivitas	Produksi	Luas Panen	Produktivitas	Produksi
		(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton/Ha)	Ton	(Ha)	(Ton/Ha)	Ton
1	Padi Sawah	13.797	5,87	80.988	16.490	5,56	91.813	8.000	4,00	32.000	10.598	4,50	47.691	10.172,06	5,25	53.403
2	Jagung	28.795	4,32	124.538	58.904	4,20	247.675	30.000	4,00	120.000	30.677	4,40	134.981	31.485	5,75	181.037
3	Kacang Tanah	700	1,40	996	590	1,40	841	292	1,43	419	300	1,44	431	384	2,00	768
1	Bawang Merah	290	9,12	2.645,00	295	9,12	2.690,00	210	6,58	1.380,80	82	6,33	518,90	224	6,97	1.560,80
2	Cabe Rawit	428	4,97	2.127,00	451	4,43	1.998,00	414	7,19	2.978,30	329	4,58	1.507,60	437	6,16	2.692,20
3	Cabe Keriting	-	-	-	-	-	-	123	116,07	14.277,00	129	127,21	16.410,00	212	12,86	2.726,00
4	Tomat	401	10,33	4.142,00	415	10,33	4.286,00	365	15,91	5.807,20	518	13,93	7.214,30	637	16,23	10.338,00
1	Kelapa	18.471	1,04	19.241	18.472	1,16	21.368	13.617	1,57	21.347,70	15.117	1,49	22.530	14.007,00	1,20	16.808,40
2	Cengkih	24.939	0,32	8.012	24.939	0,35	8.813	14.571	1,00	14.571	17.296	0,13	2.314	15.029,63	0,20	3.020,82
3	Kopi Arabika	256	0,45	116	256	0,45	116	194	0,68	132	232	0,15	36	33	1,39	45,89
IV	Peternakan	Capaian 2016			Capaian 2018			Capaian 2018			Capaian 2019			Capaian 2020		
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)		
1	Sapi	24.519	345.177		24.892	352.222		25.400	359.410		25.908	366.598		25.974	367.718	
2	Babi	118.635	6.643.553		123.578	6.920.368		127.400	7.134.400		128.500	7.196.000		129.948	7.277.060	
3	Ayam Daging	1.766.666	2.119.998		1.821.305	2.185.565		1.917.163	2.300.595		1.976.454	2.371.745		1.983.954	2.380.744	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa produksi total tiap jenis komoditas dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum terus meningkat, meski dengan produktivitas yang bervariasi. Hal utama yang perlu

dicermati adalah bagaimana cara untuk meningkatkan produksi pertanian ditengah semakin besarnya lahan pertanian yang dialihfungsikan, semakin rendahnya animo masyarakat untuk bertani serta terbatasnya sarana, prasarana/infrastruktur pendukung pertanian. Hal inilah yang mungkin menyebabkan sehingga kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sektor pertanian perlu dikembangkan sebagai potensi lokal, pada sisi konvensional adalah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif, terutama karena cadangan pangan masih belum mencapai target, konsumsi keberagaman pangan masih rendah dan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan masih kurang. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dan memenuhi kebutuhan gizi, disamping penyediaan cadangan pangan terutama untuk mensuplai kebutuhan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan. Hasil analisis daerah rawan pangan dalam sistim kewaspadaan pangan dan gizi di tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 9 desa dari 270 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa yang termasuk kartegori Rawan Pangan yaitu Desa Tumpaan Kecamatan Kakas, Makalelon Kecamatan Kakas, Ranotongkor Timur, Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur, Telap Kec. Eris, Parepey Kecamatan Remboken, Kayu Besi dan Ranowangko Dua Kecamatan Kombi.

Selain itu sektor pertanian juga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman permasalahan pengangguran dan kemiskinan karena berdasarkan data, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 30,67% penduduk yang bekerja pada tahun 2020 atau berjumlah 48.694 orang dari 158.771 orang yang bekerja (Minahasa Dalam Angka, 2021).

Sektor lainnya yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa adalah sektor Perikanan. Hal ini didukung dengan adanya wilayah pesisir di Pantai Barat dan Timur Minahasa serta adanya potensi Perairan Umum darat yang cukup besar seperti Danau Tondano, sungai-sungai, serta perairan lainnya. Produksi perikanan Budidaya pada tahun 2020 sebesar 63,824 ton, mengalami kenaikan sebesar 12,178 ton dibandingkan tahun 2019. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 50,449 ton, mengalami kenaikan sebesar 6.527 ton dibandingkan tahun 2019. Tantangan utama dalam pengembangan perikanan adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana

perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Hal-hal ini sangat mempengaruhi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Dari sisi daya saing ekonomi daerah, sektor pertanian dan perikanan perlu dikembangkan sebagai suatu industri, bukan lagi usaha subsistem, untuk mensuplai bahan-bahan (input) yang diperlukan oleh sektor lain, diantaranya sektor industri pengolahan makanan minuman dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena selama ini input dari industri pengolahan makanan minuman terutama kelompok industri mikro dan kecil serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih membutuhkan pasokan dari luar daerah. Apabila kebutuhan input sektor industri dan pariwisata dapat dipasok oleh petani lokal, ketahanan ekonomi daerah akan meningkat. Pengembangan sektor pertanian ini memerlukan strategi yang tepat. Sebagai suatu industri maka perlu dilakukan standarisasi kualitas dan kontinuitas produksi, hal ini tentu saja terkait dengan penyediaan input pertanian dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani. Melihat data statistik dimana trend jumlah pekerja sektor pertanian menurun yang disebabkan regenerasi pengelola pertanian tidak berlangsung dengan baik dan generasi muda tidak tertarik bekerja di sektor pertanian maka untuk pengembangan sektor pertanian diperlukan strategi yang dapat menarik minat masyarakat usia muda untuk menekuni dunia pertanian.

Berkaitan dengan sektor industri, di Kabupaten Minahasa industri yang ada didominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga. Perhatian pemerintah bagi pengembangan industri kecil akan membawa dua manfaat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Minahasa yakni 7 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir, didominasi oleh industri makanan dan minuman dan sebagian besar merupakan industri rumahan dan tergolong dalam Industri Kecil Menengah (IKM).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja untuk kesejahteraan masyarakat hal lainnya yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah serta Koperasi. Dari tahun ke tahun jumlah UKM di Kabupaten terus meningkat, dan pada tahun 2020, jumlah UKM menjadi 91.951. UKM ini bergerak dalam bidang, antara lain: perdagangan dan jasa; kuliner; pertanian/agrobisnis, ternak, kerajinan transportasi dan lain-lain. Sayangnya tidak semua UKM ini dapat berkembang dengan baik, terkendala dalam

permodalan, sarana usaha yang terbatas dan terutama sumberdaya manusianya yang relatif masih rendah. Kemitraan dengan lembaga keuangan akan sangat membantu perkembangan UKM yang ada. Kondisi Koperasi yang sering disebut sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia di Kabupaten Minahasa banyak yang tidak aktif. Hal ini mungkin disebabkan sumberdayanya yang terbatas. Pembinaan dan pendampingan bagi koperasi sangat dibutuhkan. Dari data yang ada hingga tahun 2020 terdapat 1.143 koperasi yang terdaftar, namun hanya 410 koperasi yang aktif (35,87%). Pengembangan perdagangan terutama dalam hal sarana dan prasarananya sangat mendukung pengembangan produk-produk pertanian, perikanan, pariwisata, industri, maupun produk UMKM, koperasi. Karena apalah artinya jika terdapat berbagai produk namun tidak dapat dipasarkan.

Kabupaten Minahasa memiliki potensi pariwisata yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi untuk dikembangkan agar mampu meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan baik mancanegara, maupun lokal. Kondisi yang memperlihatkan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan di Sulawesi Utara, membuka peluang bagi Kabupaten Minahasa untuk mengembangkan dan mengelola kawasan-kawasan wisata dan potensi destinasi wisata, sehingga dapat mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat menyumbang PDRB disektor pembangunan pariwisata.

Merujuk pada data pariwisata Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang ke Sulawesi Utara melalui pintu masuk bandara Sam Ratulangi tahun 2019 sebanyak **154,400** orang atau meningkat sebesar 0,55 persen tahun 2018 yang berjumlah **85,100** orang. Jika dilihat dari angka tersebut terjadi kenaikan sebesar 68,900 orang. Wisatawan yang datang di dominasi oleh wisatawan Tiongkok. Pada tahun 2020 terjadi Penurunan yang sangat drastis dimana tingkat kunjungan Wisatawan mancanegara hanya 0,006 % yaitu sebanyak 704 orang dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 154400 orang. Penyebab penurunan ini adalah karena Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tabel 4.4

Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Minahasa, Tahun 2013-2020

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah
1	2013	6.299	449.202	455.501
2	2014	7.461	475.781	483.242
3	2015	18.182	654.156	672.338
4	2016	32.125	808	840.125

5	2017	74.758	1.001.000	1.075.758
6	2018	85,100	1,151,150	1,236,250
7	2019	154,400	1,760,000	1,914,400
8	2020	704	12,100	12,804

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Memperhatikan gambaran pariwisata di Sulawesi Utara diatas menjadikan permasalahan bagi Kabupaten Minahasa untuk mengembangkan pembangunan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Aspek penting yakni ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata seperti Hotel dan Restoran yang memadai, destinasi wisata, sarana transportasi menuju daerah destinasi wisata, perbaikan infrastruktur jalan wisata, serta semua yang terkait dengan akomodasi. Area obyek wisata yang menjadi potensi destinasi wisata di Kabupaten Minahasa banyak yang kondisinya belum memenuhi standar kenyamanan, sehingga perlu terus dibenahi dan dikembangkan.

Dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa, Desa wisata menjadi salah satu alternatif yang perlu diperhatikan. Pengembangan desa wisata yang baik, dalam perspektif ekonomi daerah, dapat pemeratakan pendapatan secara lebih luas, mulai dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut, masyarakat sekitar desa sampai dengan pemerintah yang menaungi desa wisata tersebut, karena sekitar 40% pengeluaran wisatawan digunakan untuk belanja, baik kuliner, produk pertanian maupun produk kerajinan. Untuk itu perlu diperhatikan agar setiap desa wisata dapat menghasilkan produk khasnya yang benar-benar menaik bagi wisatawan. Kerjasama antara pengelola desa wisata dengan para produsen hasil pertanian, kuliner dan produk kerajinan perlu diupayakan karena masih dijumpai desa-desa wisata belum mempunyai dan belum bisa menyajikan cinderamata dan oleh-oleh yang menarik bagi wisatawan. Pengembangan Desa Wisata ini dapat juga berupa pengembangan Agrowisata dilihat dari potensi sumber daya alam di Kabupaten Minahasa yang sangat mendukung hal tersebut.

Tantangan yang lain adalah pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu adanya KEK Pariwisata Likupang. Kabupaten Minahasa perlu lebih bersemangat menata wilayahnya sebagai daerah pendukung kawasan agar bisa mendapat manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat., terutama kawasan potensial seperti Danau Tondano.

Peningkatan ekonomi juga ditandai dengan pertumbuhan penanaman modal. Di Kabupaten Minahasa Nilai Investasi yang diperoleh menunjukkan

tren yang meningkat dari tahun ke tahun dikecualikan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang lebih disebabkan oleh adanya pandemi Virus Corona. Nilai Investasi pada tahun 2019 sebesar 1.710.545.982.000 rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 862.100.000.000 rupiah. Dengan adanya Investasi ini akan bisa menghasilkan produk barang dan jasa, lapangan kerja, serta nilai tambah ekonomi bagi daerah. Selain itu juga bisa meningkatkan income perkapita masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah penyediaan kebijakan yang mendukung kemudahan investasi disamping ketersediaan data potensi dan peluang investasi di Kabupaten Minahasa. Kemudahan proses perizinan dan waktu penyelesaian proses perizinan saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan masih perlu dilakukan agar ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa semakin meningkat.

Dengan adanya sentuhan pada berbagai sektor yang membentuk perekonomian disamping akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan lainnya di sektor tenaga kerja adalah ketersediaan tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Dengan memperhatikan uraian permasalahan diatas maka dalam rangka kemandirian ekonomi masyarakat sangatlah perlu dilakukan akselerasi semua sektor ekonomi yang ada, sehingga pengembangan sektor yang satu akan mendukung pengembangan sektor lainnya. Secara garis besar yang menjadi permasalahan utama yang dapat dikembangkan di Minahasa sebagai berikut :

Tabel 4.5 Permasalahan Untuk Kemandirian Ekonomi

Permasalahan	
Pertanian dan Peternakan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan maupun produksi ternak.. Sangat dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur penunjang yang memadai serta sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai aturan mempengaruhi produktivitas pertanian.
Pangan	Ketahanan pangan masyarakat yang tercermin dalam pola pangan harapan yang sesuai standard, aman dan terjangkau. Masih adanya desa-desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.
Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan. Perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana perikanan yang

	memadai baik untuk perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan yang disertai dengan peningkatan kapasitas SDM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya terutama di sentra produksi perikanan.
Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pariwisata dengan memperhatikan kondisi sumber daya lokal baik cultural maupun potensi wilayah yang ada.
Perdagangan dan Industri	Penyediaan Sarana distribusi perdagangan dan pengendalian inflasi. Pengembangan industri terutama IKM melalui peningkatan kapasitas SDM., penyediaan sarana pengembangan IKM
Koperasi dan UMKM	Masih lemahnya kemampuan UMKM dan koperasi
Penanaman Modal	Peningkatan investasi melalui penyediaan kebijakan, informasi penanaman modal serta peningkatan pelayanan.
Tenaga Kerja	Kualitas SDM yang masih rendah dan keterbatasan lapangan kerja

Dampak Pandemi Virus Corona terhadap Ekonomi Kabupaten Minahasa

Corona virus 19 (Covid-19) telah Dinyatakan sebagai 575v Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial dan sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut disebutkan dalam analisis BPS bahwa kondisi turunnya kinerja ekonomi ini terjadi juga di Kabupaten Minahasa. Perekonomian Minahasa Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -1,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada dua tahun terakhir tumbuh positif meski mengalami perlambatan di tahun 2019, pada tahun 2018 sebesar 6,1%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,77%. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan berangsur naik seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas masyarakat terutama dengan adanya vaksinasi covid-19.

Gambaran dampak pandemi terhadap masyarakat sangat nampak pada :

- Pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa
- Pekerja yang bergerak di bidang pertanian dengan skala usaha kecil dan mikro
- Pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil

- Pekerja yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro dan kecil
- Pekerja yang bergerak di bidang pariwisata terutama penyediaan makan minum dan akomodasi

Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha terutama yang berskala mikro dan kecil serta ketenagakerjaan. Banyak pelaku usaha mikro/kecil yang tutup pada saat terjadinya pandemi dan banyak pula karyawan yang dirumahkan hal ini berakibat pada meningkatnya penduduk yang tidak bekerja yang tentunya berpengaruh pada daya beli masyarakat. Sektor Pariwisata pun sangat terdampak. Pada masa pandemi banyak obyek wisata yang ditutup sementara yang tergambar dari sangat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020. Data BPS Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Minahasa sebesar 7,3% meningkat dari tahun 2019 sebesar 7,18% demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang kembali meningkat menjadi 6,3% pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 5,58%.

Dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap hampir seluruh sektor dan tatanan kehidupan masyarakat ini harus menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Minahasa saat ini maupun perencanaan pada periode kedepan.

4.1.3. Permasalahan berkaitan dengan aspek Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 sebanyak 342,11 ribu jiwa yang terdiri atas 174,93 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 167,18 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Minahasa mengalami pertumbuhan sebesar 1,51 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,63. Rasio jenis kelamin per kecamatan cukup beragam dengan rasio jenis kelamin tertinggi pada Kecamatan Langowan Selatan sebesar 108,87 dan terendah pada Kecamatan Langowan Timur sebesar 100,38.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa tahun 2019 mencapai 300 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Langowan Timur dengan kepadatan sebesar 1.870 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kombi sebesar 96 jiwa/Km²

Tabel 4.6 Presentasi Penduduk dan Kepadatan Kabupaten Minahasa Tahun 2019

Kecamatan Subdistrict sq,km	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km² Population Density per sq,km
Langowan Timur	3,96	1870
Langowan Barat	4,94	396
Langowan Selatan	2,42	119
Langowan Utara	2,57	1063
Tompaso	2,20	434
Tompaso Barat	2,65	621
Kawangkoan	3,06	291
Kawangkoan Barat	2,60	462
Kawangkoan Utara	2,61	683
Sonder	5,79	377
Tombariri	5,37	325
Tombariri Timur	3,07	103
Pineleng	8,13	564
Tombulu	5,19	242
Mandolang	6,05	440
Tondano Barat	6,09	920
Tondano Selatan	5,07	684
Remboken	3,68	523
Kakas	3,69	142
Kakas Barat	3,19	241
Lembean Timur	2,49	111
Eris	3,50	360
Kombi	3,36	96
Tondano Timur	4,56	463
Tondano Utara	3,76	203
Minahasa	100,00	300
Hasil Registrasi/Registration	100,00	300
Result	100,00	297
Hasil Proyeksi I/Projection Result		

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2020

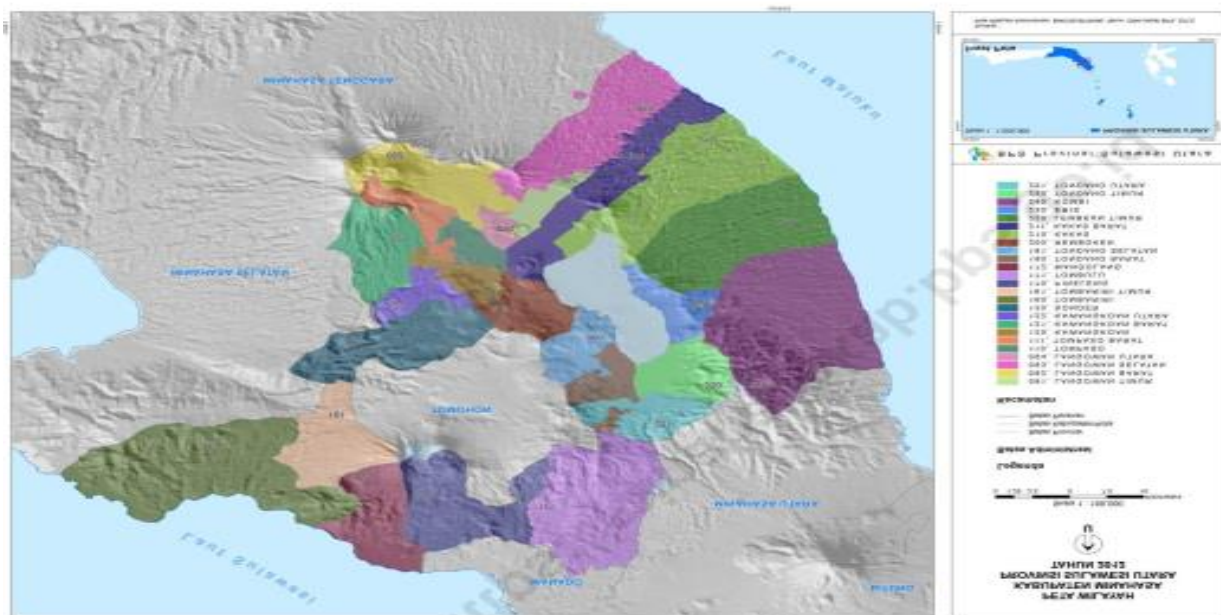
Untuk wilayah administratif pemerintahan di Kabupaten Minahasa terdiri dari 25 Kecamatan dan 270 Desa/Kelurahan. Gambaran wilayah administratif seperti ini:

Tabel 4.7 Wilayah Administratif Kabupaten Minahasa berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Langowan Timur	8	-	8
2	Langowan Barat	16	-	16
3	Langowan Selatan	10	-	10
4	Langowan Utara	8	-	8
5	Tompaso	10	-	10
6	Tompaso Barat	10	-	10

7	Kawangkoan	4	6	10
8	Kawangkoan Barat	10	-	10
9	Kawangkoan Utara	6	4	10
10	Sonder	19	-	19
11	Tombariri	10	-	10
12	Tombariri Timur	10	-	10
13	Pineleng	14	-	14
14	Tombulu	11	-	11
15	Mandolang	12	-	12
16	Tondano Barat	-	9	9
17	Tondano Selatan	-	8	8
18	Remboken	11	-	11
19	Kakas	13	-	13
20	Kakas Barat	10	-	10
21	Lembean Timur	11	-	11
22	Eris	8	-	8
23	Kombi	13	-	13
24	Tondano Timur	-	11	11
25	Tondano Utara	3	5	8
	TOTAL	270	43	270

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Minahasa



Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, terletak diujung utara Pulau Sulawesi. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Minahasa terletak pada 1o22'44"LU/124o 33' 52"BT - 1o 01' 11"LU /124o 54' 45"BT ke 125o 04' 21"BT/1o 20' 25" LU.

Luas Kabupaten Minahasa adalah 1141,64km² yang terdiri dari luas daratan adalah 1.094,88km² dan luas perairan danau 46,54 km² serta laut

sebesar 599,85 km². Kabupaten Minahasa terdiri atas 25 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Kombi (119,74km²).

Terkait dengan penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa berada pada luasan luas wilayah sebesar 121.043,31 ha, sebagian besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun penggunaan lahan berdasarkan analisis yang ada terdiri dari:

Tabel 4. 8 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa Tahun 2016

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Bakau	178,37	0,15
2	Danau	4.446,90	3,67
3	Hutan	13.065,20	9,19
4	Hutan belukar	1.750,80	1,45
5	Kebun Campuran	27.888,80	23,04
6	Perkebunan /kebun	32.994,66	27,26
7	Permukiman	5.567,00	4,60
8	Rawa	102,50	0,08
9	Rumput	6.083,73	5,03
10	Sawah Irigasi	5.762,30	4,76
11	Sawah Tadah Hujan	1.227,20	1,01
12	Tanah kosong	9.224,40	7,62
13	Tegalan/Ladang	10.034,65	8,29
14	Lain-Lain	2.845,00	
Total		121.041,31	100,00

Sumber: Hasil Analisis, RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2033

Aspek-aspek penting yang menjadi fokus permasalahan dengan kewilayahan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yakni:

- Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan;
- Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan;
- Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumberdaya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungannya perluasannya;
- Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan pedesaan dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan.

- Mewujudkan daerah pesisir pantai dan kawasan laut di Pantai Timur Minahasa di empat kecamatan, yakni Kombi, Lembean Timur, Kakas, Langowan Selatan, serta wilayah Kecamatan Tombariri dan Mandolang menjadi daerah yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan daerah Kabupaten Minahasa dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah lauth dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

4.1.4. Permasalahan berkaitan dengan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat Minahasa, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Oleh karena itu kebijakan dan program yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah di kecamatan-kecamatan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Minahasa terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin; meningkatnya kompetensi siswa; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi:

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 mencapai 17.119,64 miliar rupiah, meningkat sebesar 1.346,72 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi dengan persentase sebesar 26,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Minahasa masih bercorak agraris.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa dapat dilihat dari laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.9.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2015-2019

Kategori	PDRB Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3365704	3713219	3967800	4.185.359	4.509.794
B. Pertambangan dan Penggalian	783209	878624	936161	1013792	1069192
C. Industri Pengolahan	900305	943769	1042919	1153618	1225505
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10879	12794	16072	17545	19262
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17588	19293	19553	19877	21203
F. Konstruksi	1531037	1664407	1839607	2058122	2273122
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1320071	1442644	1612765	1789378	1989378
H. Transportasi dan Pergudangan	742714	842274	911486	993559	1092359
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113946	128740	143212	161608	176608
J. Informasi dan Komunikasi	252263	287497	316507	350987	389987
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	271123	339229	367555	379496	387112
L. Real Estate	500478	549846	595344	643067	711067
M,N. Jasa Perusahaan	7668	8662	9673	11269	12809
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1181225	1329116	1446081	1579087	1632086
P. Jasa Pendidikan	385925	425442	457500	492361	546361
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	464448	517832	565859	620407	689407

R, S, T, U. Jasa lainnya	196721	223430	248418	303386	374386
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	1204530 3	1332681 9	14496513	15772916	17.119.64 0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS	12.045.3 03	13.326.8 19	14.496.51 3	15.772.91 6	17.085.81 5

Sumber: BPS kabupaten Minahasa, Tahun 2020

Pada Tabel 4.9 nampak bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan yakni pada Tahun 2015 sebesar Rp 12,045 triliun menjadi Rp 17,085 Triliun. PDRB Kabupaten Minahasa ini juga menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas sama dengan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku non migas.

Tabel 4.10

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), Tahun 2015-2019

Kategori	PDRB Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2503476	2580084	2664774	2751742	2892441
B. Pertambangan dan Penggalan	619919	663476	702093	746435	799735
C. Industri Pengolahan	770012	779776	836128	902290	918948
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11298	13530	14882	15857	17303
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14420	14751	14851	14967	15300
F. Konstruksi	1367801	1483558	1611858	1744175	1869275
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1067288	1138085	1224206	1316273	1428273
H. Transportasi dan Pergudangan	504077	545230	571271	601868	643768
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91600	97991	105113	116242	123832
J. Informasi dan Komunikasi	198316	218624	231934	247628	269628
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	215501	261447	278728	273133	274561
L. Real Estate	430770	459757	491955	527277	561277
M,N. Jasa Perusahaan	5838	6302	6813	7373	8008
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	780807	828738	883803	942841	942341
P. Jasa Pendidikan	258930	274993	290051	307598	333597

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	358236	387556	415583	447500	482500
R, S, T, U. Jasa lainnya	151183	162011	173399	197866	229366
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	9349470	9915909	10517441	11161063	11810152
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS	9349470	9915909	10517441	11161063	11785874

Sumber; BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa sebesar 5,82 persen, mengalami perlambatan apabila dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 6,12 persen.

Kemiskinan

Berdasarkan perhitungan BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 adalah 7,18, artinya terdapat 7-8 orang dari 100 penduduk Kabupaten Minahasa yang masih miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa mengalami penurunan selama empat tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 8,80 kemudian menurun menjadi 8,36 di tahun 2016 lalu menurun lagi menjadi 7,90 di tahun 2017 lalu pada tahun 2018 menjadi 7,30 dan pada tahun 2019 merupakan yang paling rendah yaitu sebesar 7,18. Meskipun persentase penduduk miskin di Minahasa sudah menurun, upaya pengentasan kemiskinan harus tetap dilakukan.

Ketenagakerjaan

Pada tahun 2019, persentase penduduk Minahasa usaha 15 tahun ke atas yang bekerja didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 31,71 persen disusul penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 17,51 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015, maka diketahui bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami kenaikan dari 23,07 persen menjadi 31,71 persen pada tahun 2019 (Minahasa Dalam Angka 2020).

Kenaikan yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa banyak penduduk Minahasa yang pada tahun 2018 bekerja di sektor selain pertanian memilih untuk bekerja kembali di sektor pertanian pada tahun 2019

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Perempuan dan anak masih banyak mengalami berbagai kekerasan dan diskriminasi, dilain pihak lembaga menyediakan layanan berbasis masyarakat dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan TPPO kurang. Tenaga kerja

perempuan yang berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan bahasa. Sementara mafia perdagangan orang beroperasi sampai ke desa-desa dan menjebak anak-anak lewat ketidaktahuan orang tua, keluarga, aparat desa dan adanya praktek pemalsuan identitas terjadi di berbagai tingkatan.

Dalam hal perencanaan pembangunan, masih rendah pengintegrasian gender dalam program/kegiatan pada perangkat daerah disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran, implementasi dan monitoring, evaluasi. Selain itu, masih sangat diperlukan untuk membangun kesepahaman aparatur sipil negara di semua tingkatan tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

4.1.5. Permasalahan berkaitan dengan Manajemen Birokrasi yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi,

bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal krusial terkait pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih, kewenangan dan

mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari pemanfaatan kelembagaan yang *right-sizing* adalah respon terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Review analisis jabatan diperlukan agar pola perekrutan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif. Review analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat optimal. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. SOP-Aparatur Pemerintahan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal.

Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan manajemen pelayanannya dan perlu berorientasi pada penerapan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang merupakan dukungan terhadap *e-government*. Sehingga terselenggara manajemen pemerintahan yang

transparan, akuntabel dan proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi terstandarisasi.

Dengan demikian, kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas birokrasi pemerintahan, pemerintah Kabupaten Minahasa terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan pola pikir dan kultur budaya birokrasi. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Serta Penataan produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dimaksudkan agar tidak ada lagi tumpang tindih antara regulasi yang memiliki tujuan yang sama. Berdasarkan kondisi yang ada maka permasalahan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi yaitu:

- 1) Birokrasi yang belum efisien, efektif, disiplin dan budaya organisasi yang lemah;
- 2) Lemahnya monitoring progress kerja dan rutinitas yang sangat tinggi;
- 3) Resisten terhadap perubahan walaupun perubahan itu lebih baik dan masih rendahnya integritas dan praktek tidak sehat yang berhubungan dengan belum optimalnya pemanfaatan waktu kerja dan peningkatan kualitas kerja”
- 4) Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 5) Birokrasi pemerintahan belum optimal, efisien dan budaya pelayanan masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya.
- 6) Prinsip dasar *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan publik. Masalah ini diperburuk oleh belum terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan

prinsip meritokrasi. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap memang sudah ditingkatkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian harus diakui bahwa pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset barang milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Perlu ditindaklanjuti upaya optimalisasi peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis teknologi informasi; dan peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

- 7) Pentingnya untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang masih rendah terkait dengan signifikansi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian indikator hasil (outcome); lemahnya akuntabilitas kinerja instansi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Terkait dengan Politik Pemerintahan; Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam program pemerintah sesuai dengan janji kampanye, akan melanjutkan upaya Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Baru, yakni Pembentukan Kota Langowan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Barat.

Memperhatikan penjelasan permasalahan diatas, maka permasalahan pembangunan di Kabupaten Minahasa yang mempedomani pembangunan lima tahun ke depan dapat di lihat di bawah ini:

Tabel 4.11 Permasalahan Pembangunan

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ekonomi	Masih belum optimalnya pengembangan ekonomi di dalam masyarakat, khususnya untuk sektor ekonomi pertanian, perikanan dan pariwisata	Optimalnya pengembangan ekonomi pertanian, perikanan dan pariwisata di Minahasa	Terjadinya peningkatan produksi pertanian, perikanan serta peningkatan sarana, prasarana, dan

				pengelolaan pariwisata, sehingga meningkatkan pendapatan dan nilai tukar petani serta peningkatan kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata.
2	Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Perlunya mengembangkan potensi lahan yang ada di Minahasa sesuai dengan peruntukan: Bakau 178,37 ha; Danau 4.446,90 ha; Hutan 13.065,20 ha; Hutan belukar 1.750,80 ha; Kebun Campuran 27.888,80 ha; Perkebunan /kebun 32.994,66 ha; Permukiman 5.567,00 ha; Rawa 102,50 ha; Rumput 6.083,73 ha; Sawah Irigasi 5.762,30 ha; Sawah Tadah Hujan 1.227,20 ha; Tanah kosong 9.224,40 ha; Tegalan/Ladang 10.034,65 ha; Lain-Lain 2.845,000 ha; Total 121.041,31 ha	Pemanfaatan lahan dan pengembangan kewilayahan berbasis pembangunan berkelanjutan	Perlunya pengembangan pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3	Pembangunan SDM yang berbudaya dan berdaya saing	Perlunya SDM yang mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. SDM yang mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif.	Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya dan berdaya saing	Perlunya upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM melalui intensitas pendidikan dan latihan penguatan SDM yang berbudaya dan berdaya saing.
4	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	Pengembangan kapasitas keberagaman masyarakat Minahasa dengan memperhatikan latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang masyarakat.	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat Minahasa yang berkeadilan.	Perlunya optimalisasi upaya-upaya pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan,

		<p>Kebijakan dan program yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.</p> <p>Pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah di kecamatan-kecamatan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Minahasa terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.</p> <p>Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin; meningkatnya kompetensi siswa; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.</p>		<p>budaya serta berkeadilan dan kesetaraan gender serta memberantas kemiskinan.</p>
5	<p>Manajemen Birokrasi yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Birokrasi yang belum efisien, efektif, disiplin dan budaya organisasi yang lemah;</p> <p>Lemahnya monitoring progress kerja dan rutinitas yang sangat tinggi;</p> <p>Resisten terhadap perubahan walaupun perubahan itu lebih baik dan masih rendahnya integritas dan praktek tidak sehat yang berhubungan</p>	<p>Peningkatkan penguatan manajemen birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional</p>	<p>Perlunya melakukan penguatan kapasitas manajemen birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam rangka membangun birokrasi yang handal dan</p>

	<p>dengan belum optimalnya pemanfaatan waktu kerja dan peningkatan kualitas kerja”</p> <p>Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Birokrasi pemerintahan belum optimal, efisien dan budaya pelayanan masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya.</p> <p>Prinsip dasar <i>good governance</i> seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan publik.</p> <p>Masalah ini diperburuk oleh belum terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan prinsip meritokrasi.</p> <p>Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap memang sudah ditingkatkan.</p>		<p>profesional yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih baik.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.6. Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan

serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintahan Kabupaten Minahasa yang berhubungan dengan urusan wajib pemerintahan, yakni:

1. Urusan Pendidikan

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas: a. pendidikan menengah; dan b. pendidikan khusus. Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus; c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Kesehatan

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan

adalah satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; yaitu: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5) Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial.

Seperti kita ketahui, kondisi kemampuan sumber daya Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusannya diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal; 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus; 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Prinsip Dasar SPM Bidang Kesehatan: 1) Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah; 4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya; serta 5) berlaku secara nasional.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; c. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil; d. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin; e. bayi baru lahir

untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; f. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita; g. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; h. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif; i. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; j. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; k. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; m. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

3. Pekerjaan Umum

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu setiap Warga Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

4. Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas: a. penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; c. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan d. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

6. Sosial

SPM sosial mencakup SPM sosial Daerah Provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas: a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di

luar panti; c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti; b. anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar panti; c. lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti; d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti; e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan f. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Permasalahan Kabupaten Minahasa untuk implementasi SPM tidak lepas dari komitmen dan peran serta semua stakeholders guna saling melengkapi dalam mencapai pemenuhan kebutuhan dasar yang dilayani dan difasilitasi pemerintah daerah. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, Stunting : hasil pengukuran dari 5.691 balita terdapat 177 balita Stunting atau 3,1 %, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 adalah 7,18, artinya terdapat 7-8 orang dari 100 penduduk Kabupaten Minahasa yang masih miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa mengalami penurunan selama empat tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016-2019. Pada

tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 8,80 kemudian menurun menjadi 8,36 di tahun 2016 lalu menurun lagi menjadi 7,90 di tahun 2017 lalu pada tahun 2018 menjadi 7,30 dan pada tahun 2019 merupakan yang paling rendah yaitu sebesar 7,18. Meskipun persentase penduduk miskin di Minahasa sudah menurun, upaya pengentasan kemiskinan harus tetap dilakukan. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan.

Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar, penjangkauan oleh masyarakat miskin serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik yang terus diupayakan dipenuhi agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

4.1.7. Permasalahan Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Pembangunan dalam perspektif gender telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan responsif gender merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun lambat, namun PUG telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional, terutama setelah menjadi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan yaitu: (1). Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, (2). Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan (3). Pengarusutamaan Gender (PUG).

Ketiga prinsip pengarusutamaan tersebut diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada setiap kebijakan pembangunan dan menjadi jiwa serta semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Selain peraturan presiden, amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

mengamanatkan: (1). Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD, (2). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan: (1). Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain, (2). Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD, dan (3). Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: (1). Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan (2). Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD. Memperhatikan beberapa pasal penting dalam permendagri tersebut berarti setiap daerah harus mempersiapkan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender dalam seluruh urusan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mewujudkan pembangunan responsif gender dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan responsif gender dalam RPJMD tahun 2018-2023. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini termuat semangat mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan. Sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 merupakan aspek penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan.

Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;

Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu Global:

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah daerah, akan tetapi dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah yakni: **Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030**. Tujuan Pembangunan ini dalam implementasinya akan melibatkan berbagai urusan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa. Kondisi ini diperkuat dengan perlunya mengintegrasikan TPB/SDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Daerah. Dalam implementasi TPB/SDGs dalam penyelenggaraan pembangunan daerah merujuk pada empat pilar pembangunan yang tertuang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan itu sendiri, yakni Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Keempat pilar tersebut memiliki indikator-indikator masing-masing sebagaimana tergambar dibawah ini:

Gambar 4.2. Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Pada kurun waktu yang bersamaan dengan perumusan RPJMN 2015-2019, pada tingkat global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (Means of Implementation).

Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and

Transform Economies through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, High Level Panel mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

1. *Leave No One Behind* - **Tidak meninggalkan siapapun di belakang.** Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2. *Put Sustainable Development at the Core* - **Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti.** Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
3. *Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth* - **Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif.** Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
4. *Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All* - **Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua.** Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian

dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra

5. *Forge a New Global Partnership* - **Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015.** Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

TPB/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.12 Tujuan SDGS

TUJUAN SDGS	
1)	Tanpa Kemiskinan
2)	Tanpa Kelaparan
3)	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4)	Pendidikan Berkualitas
5)	Kesetaraan Gender
6)	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7)	Energi Bersih dan Terjangkau
8)	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9)	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10)	Berkurangnya Kesenjangan
11)	Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13)	Penanganan Perubahan Iklim
14)	Ekosistem Lautan
15)	Ekosistem Daratan
16)	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17)	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Serangkaian tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Minahasa harus dijawab dengan kebijakan dan strategi yang tepat. Pada sisi yang lain, optimalisasi akses ke pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan (di antaranya anak, penyandang disabilitas, dan Lansia), perlu terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pembangunan di Kabupaten Minahasa sebaiknya selaras dengan seluruh upaya pembangunan manusia. Salah satu aspek yang perlu menjadi fokus di antaranya perubahan perilaku masyarakat (behavioral change)- menciptakan manusia yang lebih berdaya dan optimal dalam memfungsikan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Keterlibatan dari akademisi dan praktisi perilaku (behavioural scientist and practitioner) dalam perencanaan dan implementasi pembangunan menjadi penting untuk mendukung internalisasi fokus tersebut dalam program dan kegiatan. Kunjungan-kunjungan kerja yang relevan dengan outcome yang terukur ke Pemerintah Kabupaten lain, sebaiknya dilakukan. Tujuannya tentu saja belajar praktik baik dari Kabupaten lain, sekaligus mencari mekanisme dan strategi implementasi yang lebih baik dan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Minahasa. Melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan akses dalam perizinan diharapkan mampu menarik minat lebih banyak investor ke Kabupaten Minahasa. Peningkatan investasi tersebut pada akhirnya juga akan berefek domino terhadap penciptaan lapangan kerja baru sehingga akan menambah jumlah pekerja formal. Selain itu, potensi investasi juga dapat diarahkan untuk masuk ke sektor pariwisata sehingga dapat membantu peningkatan kualitas dan kuantitas wisatawan mancanegara maupun domestik. Pada kegiatan nonpemerintah, hendaknya akademisi dan pakar lebih banyak dilibatkan lagi, baik dalam hal penelitian bersama, publikasi ilmiah ataupun ikut serta dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan Media; serta Filantropi dan bisnis juga diharapkan dapat berperan aktif dalam sinergi pembangunan bersama. Perlu dibuat pertemuan rutin forum lintas sektor per tujuan untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Minahasa. Kolaborasi ini perlu dilakukan untuk memastikan setiap tujuan mendapatkan perhatian dan pada akhirnya akan dapat ditentukan bentuk intervensi kegiatan atau kebijakan apa yang tepat untuk Tujuan TPB/SDGs terkait.

Isu Perubahan Iklim dan Bencana Alam:

Adanya paradigma yang menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup

temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanyabersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan ndonesia. Di Indonesia bahkan sampai didaerah pun masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan-kawasan yang menjadi kawasan penyangga sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam RTRW secara efisien dan berwawasan lingkungan, serta mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal. Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan membangun berlandaskan pembangunan yang berkelanjutan.

Isu Danau Prioritas

Danau Tondano adalah danau air tawar vulkanik, secara geografis terletak diantara 1o06'06" – 01o20'25" LU (Lintang Utara) dan antara 124o45'04" – 124o58'20" BT (Bujur Timur) memanjang dari Selatan ke Utara, berada pada ketinggian 680 m di atas permukaan laut. Sesuai data pada tahun 2015 luas permukaan Danau Tondano sekitar 3.925,7 ha, kedalaman maksimum 35,3 m dan kedalaman rata-rata 14 m. Inlet danau terdiri dari 35 sungai (termasuk sungai intermiten yang kadang berair kadang tidak) dan hanya memiliki satu outlet yaitu Sungai Tondano yang bermuara di Teluk Manado.

Kebijakan di tingkat Nasional dalam penanganan ekosistem danau, Danau Tondano termasuk satu dari 15 (lima belas) danau prioritas yang disepakati pada Kesepakatan Bali Agustus Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan. Kesepakatan ini telah melahirkan komitmen bersama 9 (sembilan) Kementerian untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan). Selain itu Daerah Aliran Sungai Danau Tondano juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Konservasi dan Wisata DAS Tondano. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 juga disebutkan bahwa Danau Tondano merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Danau Tondano berperan penting dalam menunjang kehidupan penduduk sekitarnya. Danau tondano tergolong danau multi fungsi (*multy purposes*), nilai jasa lingkungan sumberdaya air ekosistem Danau dan DAS Tondano diantaranya yaitu sebagai (1) sumber energi listrik di Sulawesi Utara (PLTA Tonsea Lama, Tanggari I, Tanggari Ii *Dan Rencana PLTA Sawangan*); (2) sumber air (diolah oleh perusahaan air minum) bagi Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan ke depan direncanakan untuk mensuplai air minum ke Kota Bitung; (3) retensi banjir kota manado; (4) lokasi budidaya perikanan keramba jaring apung/kja (*floating net cages*) dan keramba tancap (*pen culture*); (5) sumber mata pencaharian bagi nelayan tangkap yang ada di sekitar danau (*ikan, udang, kerang, dll*) (6) irigasi sawah dengan luas sekitar 3800 ha di Kabupaten Minahasa dan (7) fasilitas wisata alam.

Danau Tondano juga memiliki nilai konservasi yang tinggi, antara lain dengan hidupnya jenis-jenis ikan khas di dalamnya seperti ikan payangka dan nike yang merupakan anakan dari ikan payangka, yang tidak ditemukan di luar Sulawesi. Jika dilakukan penelitian mendalam, kemungkinan besar masih banyak lagi potensi-potensi keanekaragaman hayati penting lainnya yang dapat ditemukan. Jenis-jenis fauna dan flora lainnya yang ditemukan saat ini antara lain adalah beberapa jenis ikan invasif, seperti nila, mujair, betutu, lobster air tawar, berbagai jenis kerang, eceng gondok dan lain-lain.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Danau Tondano memiliki nilai dan manfaat yang luas bagi masyarakat, namun disisi lain dengan adanya manfaat yang begitu besar menyebabkan eksploitasi secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab dengan adanya berbagai kegiatan yang berlangsung di

daerah tangkapan air, sempadan dan di dalam Danau Tondano itu sendiri. Akibatnya kondisi danau cenderung mengalami penurunan fungsi ekologi, lingkungan dan keberlanjutannya dari waktu ke waktu. Dampak lanjutan yang ditimbulkan pada akhirnya mengurangi nilai dan daya guna perairan danau tondano untuk berbagai kepentingan masyarakat di sekitarnya. Hal demikian telah terlihat dari: (1) semakin berkurangnya pasokan daya listrik untuk operasional tiga buah plta yang merupakan system interkoneksi jaringan listrik di sulawesi utara dan akhirnya mengharuskan diadakannya pemadaman listrik secara bergiliran; (2) terjadinya banjir pada musim hujan (terutama) di daerah outlet danau (dan menggenangi lahan pertanian dan pemukiman), dan (3) mengurangi pasokan air baku untuk diolah oleh perusahaan air minum.

Beberapa isue utama yang mengancam keberadaan eksositem Danau Tondano:

- Adanya aktivitas masyarakat di daerah tangkapan air seperti penebangan pohon, galian pasir menimbulkan erosi tepi sungai dan lahan di sekitarnya dan akhirnya menyebabkan meningkatnya kekeruhan air akibat padatan tersuspensi dan akhirnya mengendap di sungai yang bersangkutan dan juga di dalam danau yang berakibat terjadinya **pendangkalan**. Selanjutnya dengan semakin merebaknya penjarahan (*encroachment*) lahan di sempadan danau untuk kegiatan pertanian dan pemukiman mengakibatkan semakin **berkurangnya luasan permukaan dan volume air danau**. Ledakan pertumbuhan eceng gondok dan gulma air lainnya terutama di daerah tepi (littoral) danau hingga menutupi badan perairan seluas 553 ha dan tertimbunnya tanaman eceng gondok yang mati di dasar danau semakin mempercepat proses pendangkalan dan berkurangnya luas permukaan serta volume air danau. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 1939 luas Danau Tondano sekitar 5.600 Ha dengan kedalaman maksimal 43 m sedangkan data terakhir Tahun 2015 luasnya tinggal 3.925,74 Ha (70.10% dari luas awal) dengan kedalaman rata-rata ± 14 m.
- **Penurunan kualitas air danau** akibat masuknya bahan pencemar dari luar danau (seperti dari kegiatan pertanian, pemukiman, peternakan, galian pasir dan sampah) dan dari dalam danau itu sendiri (seperti sisa—sisa pakan dari kegiatan KJA, restoran, eceng gondok yang mati). semakin merebaknya pertumbuhan karamba jaring apung dan karamba tancap serta aktivitas pertanian di hulu dan sekitar danau berakibat penurunan kualitas air dan peningkatan proses eutrofikasi di Danau yang mengancam ekosistem danau itu sendiri Dampak lanjutan dari semakin buruknya kualitas air danau

menyebabkan terjadinya kematian ikan baik yang dibudidaya di dalam KJA maupun dalam karamba tancap serta ikan-ikan alami yang berada bebas di perairan danau. Sampai dengan tahun 2020 status mutu kualitas air Danau Tondano adalah cemar berat sedangkan pada tahun 2016 status mutu kualitas air Danau Tondano adalah Cemar Ringan.

- Terjadinya kerusakan sempadan danau akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan kurang tertatanya sempadan danau. Disamping itu kurang tertatanya irigasi dan drainase di sekitar danau juga memiliki andil terhadap terjadinya banjir di daerah-daerah tertentu sekitar Danau.

Adanya multi fungsi Danau Tondano tidak disertai dengan kebijakan pengelolaan yang baik dan masih tumpang tindih pengelolaannya, baik antar pihak, antar jenjang pemerintahan, maupun antar sektor. Permasalahan yang terkait upaya pengelolaan Danau Tondano yang dilakukan selama ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Manajemen yang tidak terpadu dan tidak kontinue (*one river, one management plan* belum terpenuhi), (2) Prinsip keadilan antara penduduk hilir sebagai pengguna jasa ekosistem dan masyarakat hulu sebagai pelindung ekosistem belum dijabarkan secara konkrit, (3) Kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya fungsi hutan tanah dan air masih tergolong rendah, (4) *Sense of crisis* bagi instansi pengelola yang terkait dengan ekosistem Danau Tondano belum terbangun dengan baik, (5) Peran serta instansi pemerintah baik di tingkat provinsi hingga tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat pemilik lahan di danau belum maksimal dan hanya bersifat insidental, (6) Implementasi kegiatan rehabilitasi danau yang dilakukan dengan pendekatan proyek telah berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang berprinsip bahwa tanggung jawab rehabilitasi semata-mata berada pada pemerintah. Sedangkan masyarakat pemilik lahan tidak diberdayakan dengan baik untuk menghasilkan kemandirian dalam memanfaatkan lahan secara benar sesuai prinsip konservasi tanah dan air, dan pelaksanaannya secara partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional maka sudah terdapat acuan untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka percepatan Penyelamatan Danau Tondano. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan berupa:

- a. mencegah dan menanggulangi kerusakan Ekosistem Danau Prioritas Nasional;

- b. memulihkan fungsi dan memelihara Ekosistem Danau Prioritas Nasional;
- c. memanfaatkan Danau Prioritas Nasional dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan

Menyadari kompleksitas permasalahan serta urgensinya penyelamatan Danau Tondano, maka diperlukan rencana pengelolaan terpadu untuk menjadi acuan Koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antar pihak disertai peran masyarakat yang terencana secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan adanya rencana terpadu ini diharapkan efektifitas, efisiensi kegiatan penyelamatan danau Tondano dapat dicapai. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan danau tondano, kedepan diharapkan akan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terjaga kelestarian dan keberlanjutannya dengan tetap mempertahankan fungsi dan manfaat serta keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya.

Isu Terorisme

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnegara dalam memerangi terorisme internasional. Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebutmelalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Dalam

masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.

Keterkaitannya dengan Kabupaten Minahasa terhadap isu Terorisme, dapat dijelaskan bahwa Minahasa sebagai bagian dari Propinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari daerah yang berada di wilayah-wilayah perbatasan antar negara, yakni Philipina dan Malaysia, serta daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu tetap mewaspai dan memiliki agenda-agenda pencegahan dan mitigasi terhadap kemungkinan atas terorisme yang menglobal. Posisi ini salah satunya menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang memiliki tupoksi untuk melakukan pemantauan atas organisasi-organisasi masyarakat serta memfasilitasi program-program dan kegiatan lintas kemasyarakatan atau multi-stakeholder. Membangun dialog antar kelompok masyarakat serta memperkuat pemahaman idelogis yang demokratis dan berwawasan Pancasila, dan NKRI.

Selain itu pula, isu ini sangat erat dengan NAWACITA R3D Pemerintahan Kabupaten Minahasa, yakni Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara; Membentuk karakter masyarakat Minahasa dengan memperkuat semangat Mapalus dan Si tou Timou Tu Mou Tou, serta Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi seosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga.

Trafficking dan Kejahatan Trans-Nasional

Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam human trafficking. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan

nilai keuntungan terbesar ke-3 setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.

Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana dua komponen yang saling memperkuat yakni antara kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat perlu memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan trafficking ini, karena Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar terhadap praktek-praktek perdagangan orang. Sulawesi Utara saat ini bukan lagi sebagai daerah tujuan atas praktek penjualan atau perdagangan orang, tetapi juga telah menjadi daerah asal atas praktek-praktek perdagangan orang yang dikirim ke daerah lain dan luar negeri.

Isu Infrastruktur

Beberapa penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang belum terpenuhi di Kabupaten Minahasa yaitu : sarana prasarana dan infrastruktur pariwisata, infrastruktur penunjang konektivitas antara kecamatan dan desa di Kabupaten Minahasa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan produksi serta sarana prasarana/infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan produksi pertanian ditengah semakin besarnya lahan pertanian yang dialihfungsikan dan semakin rendahnya animo masyarakat untuk bertani. Hal inilah salah satu penyebab sehingga kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Secara khusus, isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Minahasa untuk periode pemerintahan 2018-2023 yang disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING**
 - Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

- Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Minahasa, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, agar mampu memberikan daya saing yang tinggi. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia dimaksud ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), menurunkan Prevalensi Stunting yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Masalah Stunting di Kabupaten Minahasa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa, dimana menjadi fokus untuk menurunkan angka jumlah kasus. Di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2016 Prevalensi Stunting sebesar 24 %, tahun 2017 naik sebesar 37,6 % dan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan masing-masing sebesar 20,12% dan 15,8 %. Untuk tahun 2020 dari jumlah sasaran 23.875 balita yang dilakukan pengukuran hanya 5.691 balita atau 23 %. Hasil pengukuran dari 5.691 balita terdapat 177 balita Stunting atau 3,1 %.
- Selain itu juga, dalam rangka pengembangan SDM yang mampu berdaya saing diperlukan membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal.
- Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara kecamatan dan desa di Kabupaten Minahasa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan produksi. Dengan demikian diperlukan mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal di wilayah Kecamatan dan Desa dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran. Promosi terhadap daerah tertinggal yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan perlu dilakukan lebih intensif;

2. KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA

Isu strategis berkaitan dengan mewujudkan kemandirian ekonomi berorientasi pada sektor pembangunan:

1) Pertanian

- Memperluas ekonomi pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, maupun budidaya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di daerah. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi pedesaan.
- Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, tataguna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan, dan belum berkembangnya tanaman organik.
- Perlu meningkatkan jumlah Desa Mandiri Pangan dalam rangka menjaga keamanan pangan.
- Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan biaya produksi tidak mendukung dengan nilai jual, belum optimalnya manajemen agribisnis dan akses permodalan yang belum merata.
- Perlu mengembangkan komoditi unggulan pertanian/perkebunan dan kawasan khusus pertanian/perkebunan.

2) Perikanan

- Minahasa memiliki daerah laut dan pantai yang berpotensi untuk menjadi area tangkapan ikan dan sentra produksi perikanan yang tersebar di wilayah Pantai Timur Minahasa di empat kecamatan, yakni Kombi, Lembean Timur, Kakas, Langowan Selatan, serta wilayah Kecamatan Tombariri dan Mandolang.
- Perlunya memberdayakan masyarakat pesisir pantai di wilayah dimaksud untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi bidang perikanan, yang diikuti dengan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- Sumberdaya ikan cenderung mengalami penurunan di kawasan pantai yang disebabkan karena menurunnya kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan seperti penggunaan alat tangkap yang direkomendasikan, metode penangkapan yang merusak lingkungan.
- Fasilitas pendukung berupa prasarana pelabuhan Ikan yang masih terbatas dan belum memadai, sehingga perlu investasi baik Pemerintah maupun swasta untuk melengkapinya.
- Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi. Dengan demikian, diperlukan reboisasi hutan mangrove (bakau) dalam rangka meningkatkan siklus ekosistem pantai dan sarana pengembangbiakan ikan yang berdampak pada peningkatan produksi ikan laut wilayah pesisir pantai, serta mencegah terjadinya abrasi dan pendangkalan pantai.
- Dalam pengembangan budidaya perikanan, masih dihadapkan pada implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir, kesiapan dalam menanggulangi penyakit ikan., bahan baku pakan serta tingginya harga pakan.
- Rendahnya produktivitas perikanan hasil budidaya yang disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya masih beada pada skala kecil dan bersifat tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar, serangan hama dan penyakit ikan serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
- Kesejahteraan pelaku usaha perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui sinergitas lintas sektor, dan perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk perikanan.
- Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim. Oleh karena itu sangat diperlukan penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim.

3) Pariwisata

- Pariwisata dan industri Pariwisata. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata daerah. Sedangkan industri pariwisata diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul berkaitan dengan kepariwisataan.
- Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (a) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; (b) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; serta (c) pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta (d) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional dengan strategi: (a) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (b) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan; (c) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata; (d) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; serta (e) mengelola dan mengendalikan manajemen perubahan. gembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata.
- Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk bandara Internasional Sam Ratulangi yang menuju kawasan wisata di Minahasa.
- Belum diselesaikannya Rencana Induk Pariwisata daerah sebagai roadmap pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
- Belum optimalnya partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing pariwisata dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.
- Belum terbangunnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing melalui terutama : (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan

religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan.

- Perlunya mengoptimalkan manajemen pariwisata agar lebih profesional sehingga, sumbangan sektor pariwisata (hotel, restoran dan perdagangan) agar mampu meningkatkan pendapatan daerah.
 - Belum terdapatnya investasi pengembangan objek wisata yang berkelanjutan, sebagian besar potensi pariwisata masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal.
 - Minimnya fasilitas pelayanan publik yang menunjang kepariwisataan.
 - Rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya.
 - Menurunnya nilai-nilai budaya lokal
 - Melemahnya ketahanan moral dan etika
 - Pengembangan kawasan Tondano menjadi kawasan pariwisata strategis (Kawasan Strategis Nasional) KSN Pariwisata Tomohon-Tondano, membuka peluang pengembangan Desa Wisata.
 - Perlunya pengembangan minat khusus kepariwisataan yang terdiri dari wisata Meeting Incentive Conference and Exhibition (MICE) & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu; (2) meningkatkan citra kepariwisataan
 - dan pergerakan wisatawan nusantara; (3) Tata Kelola Destinasi; serta (4) Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.
3. PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan;
 - Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan;
 - Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya;

- Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan pedesaan dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan.
- Mewujudkan daerah pesisir pantai dan kawasan laut di Pantai Timur Minahasa di empat kecamatan, yakni Kombi, Lembean Timur, Kakas, Langowan Selatan, serta wilayah Kecamatan Tombariri dan Mandolang menjadi daerah yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan daerah Kabupaten Minahasa dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

4. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan. Keterpaduan berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai;
- Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat

kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (supply side), penjang-kauan oleh masyarakat miskin (demand side), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik; Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;

- Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian serta pendamping desa;
- Mendukung pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya pengurangan kesenjangan sekaligus menjadikan pusat pertumbuhan baru yang dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- Pengembangan desa/kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal dengan: (a) Mengembangkan perekonomian melalui pencitraan desa/kota (city branding) yang mendukung pencitraan bangsa (nation branding); (b) Menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (c) Membangun modal sosial dan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.

5. MANAJEMEN BIROKRASI YANG PROFESIONAL MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi;

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur dalam membangun kemitraan antara masyarakat melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik.

6. Pandemi Covid-19

Penyebaran Coronavirus Disease-19 (COVID-19) menjangkau pada Tahun 2020 tidak hanya melanda Indonesia tapi terhadap seluruh dunia. Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) termasuk di Kabupaten Minahasa telah ditemukan korban corona virus ini. Pandemi C-19 ini selain menjadi masalah kesehatan tapi juga pada masalah ekonomi. Masalah ekonomi akibat dari C-19 perekonomian dunia termasuk di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara mengalami kontraksi. Tidak hanya sampai pada masalah pertumbuhan perekonomian tapi pikiran, tenaga dan anggaran pemerintah habis terkuras akibat C-19 ini. Secara ekonomi bentuk pelarangan usaha ataupun namanya Pembatasan kegiatan masyarakat adalah bentuk dari tidak bekerjanya perekonomian masyarakat secara baik pasti akan merugikan perekonomian yang berarti mengurangi pendapatan masyarakat.

Tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terjadi akibat dari aktivitas operasional perekonomian yakni usaha-usaha mulai dibuka secara normal walaupun tetap pada penerapan new normal. Hampir semua sector usaha mulai dibuka secara normal dengan penerapan proses era new normal. Pemulihan perekonomian yang terdampak Covid-19 harus dengan kerja keras yang tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan stimulusnya dan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar menekan penyebaran Covid-19 makin menurun sampai hilang. Pemulihan yang mulai terlihat di beberapa sektor usaha dan industry diharapkan bisa terus berlanjut meski masih masih pada tahapan awal sehingga ekonomi Indonesia termasuk Sulawesi Utara yang sudah berada di jurang resesi ini karena berkontraksi selama tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 akan mulai bangkit dan diharapkan terjadi pertumbuhan riil positif.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan menarik investasi. Hal ini dilakukan agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga menjadi sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap produksi jasa dan industri yang diproduksi oleh masyarakat terutama UMKM. Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (road map) program pemulihan perekonomian

daerah dengan melibatkan semua pihak yang terlibat yakni masyarakat baik sebagai pengusaha dan masyarakat pekerja dalam upaya pemulihan ekonomi untuk makin giat bekerja dan meningkatkan produktivitas. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah harus mendorong dan memberikan fasilitas kepada pengusaha menengah dan besar sehingga secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah.

Namun harus diakui Pandemi COVID-19 ini belum berakhir karenanya perlu ditingkatkan kewaspadaan dan terus makin mewaspadaikan dan mempersiapkan pelayanan kesehatan optimal bagi pasien terkapar corona virus, keterbatasan kapasitas laboratorium kesehatan dan tenaga analis laboratorium, keterbatasan tenaga medis untuk menangani korban COVID-19 dibandingkan jumlah pasien yang terus meningkat, termasuk penyediaan kebutuhan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit. Persiapan dan kewaspadaan ini tentunya harus juga mempersiapkan dana untukantisipasi adanya gelombang baru covid-19.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai sumber daya beranekaragam termasuk budaya dan karakter masyarakat yang kuat. Hal ini merupakan modal berharga bagi pelaksana pembangunan untuk melaksanakan rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir.

Konsep perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perencanaan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan tersebut harus selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan provinsi dan pusat.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dijelaskan dalam bab ini.

5.1 Visi

Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Minahasa.

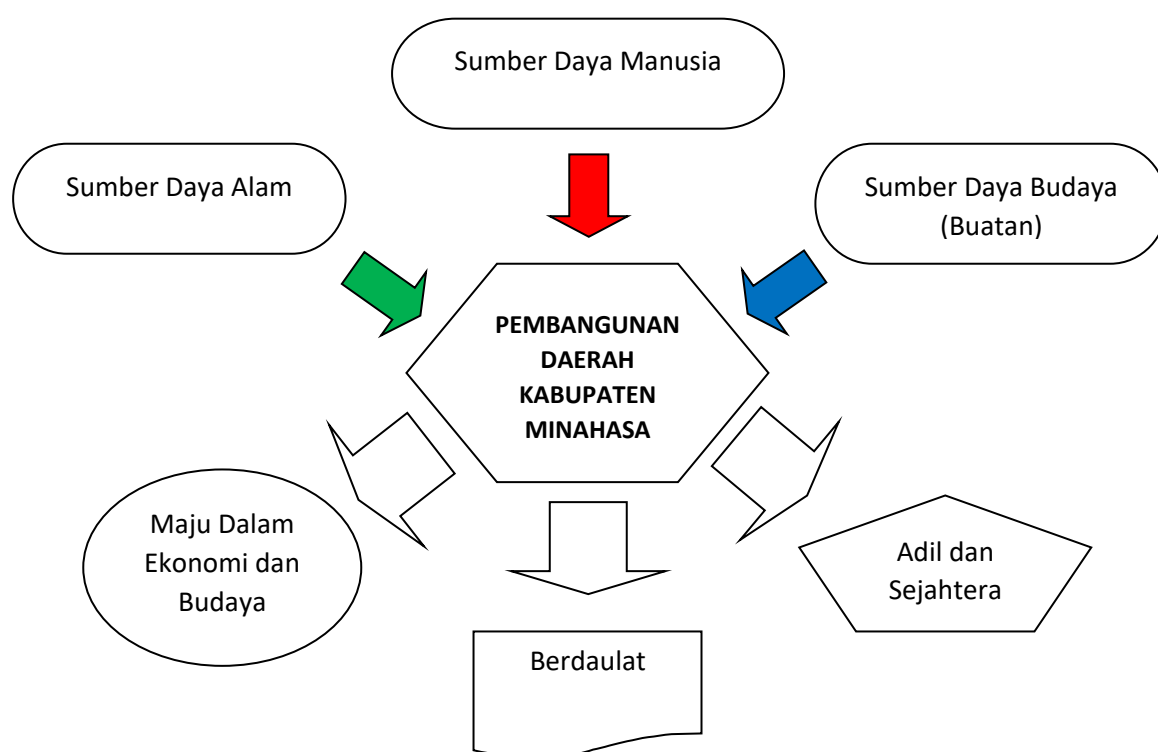
Selain itu juga visi dibangun sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2019-2023 sebagai berikut:

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung lima elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2019-2023 yakni ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Dari kelima elemen visi tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Minahasa menjadi lebih baik dengan melaksanakan pengelolaan sumber daya pembangunan yang ada, di mana hubungan antara sumberdaya dan visi pembangunan digambarkan sebagaimana pada gambar 5.1.



Gambar 5.1 Hubungan Antar Elemen Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Pengertian kelima elemen visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Maju dalam ekonomi
 - a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah.
 - b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif
 - c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah
 - d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita
 - e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing
 - f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum
2. Maju dalam budaya
 - a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing

- b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah
 - c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara
 - d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.
 - e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek mealui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan
 - f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan
 - g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup
3. Berdaulat
- a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah pancasila
 - b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa
 - c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas
 - d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat
 - e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama
4. Adil
- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum
 - b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk
 - c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
 - d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan
 - e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia
5. Sejahtera
- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
 - b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.
 - c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan
 - d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional
 - e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang

efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

Berdasarkan visi pembangunan serta identifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan renstra perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran RPJMD diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPd.

Pada dasarnya pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2019-2023 dijabarkan dalam sembilan cita-cita RRRD yang disebut **NAWACITA R3D** yaitu :

1. Menghadirkan pemerintah yang melindungi segenap masyarakat minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara
2. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya
3. Membangun minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan minahasa
4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kabupaten minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing
6. Meningkatkan produktifitas rakyat sehingga minahasa bisa maju dan sejahtera
7. Membentuk karakter masyarakat minahasa, dengan memperkuat semangat mapalus dan sitou timou tumou tou
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Nawacita merupakan sembilan agenda prioritas dalam visi dan misi yang telah dibuat oleh pemerintah. Sembilan agenda proritas ini untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa yang lebih baik. Poin pertama dalam Nawacita ini jelas bahwa pemerintah mengharapkan dapat memberikan rasa aman serta mementingkan kepentingan yang memberi hasil atau kepentingan setiap orang secara demokratis dan secara kebangsaan. Poin Kedua, Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya; Pemerintah yang disiplin bersih dan terpercaya merupakan harapan setiap pemerintahan daerah, dimana kedisiplinan dan kejujuran menjadi kunci keberhasilan setiap pemerintahan agar dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan pemerintahan sesuai visi yang ditetapkan. Ketiga, membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan Minahasa; daerah pinggiran dan perdesaan perlu mendapat perhatian dalam hal pembangunan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Keempat, Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata; kemandirian ekonomi atau ekonomi mandiri memiliki arti swasembada dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kabupaten Minahasa melalui sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang terus mengalami percepatan pembangunan. Kelima, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing. Keenam, Meningkatkan Produktifitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera; dalam poin ini jelas menekankan bahwa keberhasilan suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh pemerintahan namun juga oleh masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang produktif dapat memberikan sumbangsi besar dalam memajukan suatu daerah. Ketujuh,

membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat mapalus dan si tou timou tumou tou; Minahasa merupakan daerah yang sangat kental dengan budaya mapalus (kerja sama) dimana budaya ini secara fundamental merupakan suatu bentuk gotong royong yang harus terus diperkuat untuk terus dilaksanakan. Begitu juga semangat si tou timou tumou tou yang merupakan falsafah hidup bermasyarakat yang di kemukakan oleh Tokoh tanah Toar Lumimuut DR. Sam Ratulangi dengan arti “Manusia hidup harus dapat menghidupkan orang lain”. Falsafah ini mengandung banyak arti diantaranya; Interaksi sosial dalam hidup bermasyarakat harus menunjukkan sifat-sifat yang baik, toleransi dalam menghargai orang lain, kerjasama, serta aspek ekonomi dengan arti hidup jangan sampai merugikan orang lain. Kedelapan, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga; pemerintah mengantisipasi terjadinya perpecahan, serta mempermudah komunikasi antar masyarakat dan pemerintah dengan memperteguh kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga. Kesembilan, Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya

Selanjutnya dalam RPJMD untuk mencapai lima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa serta sembilan cita-cita R3D seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Adapun tujuan dan sasaran masing-masing misi adalah :

5.3.1. Dalam rangka pencapaian misi “**Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing**” maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya kesehatan masyarakat
 - 1.2. Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan
 - 1.3. Meningkatnya kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan

5.3.2. Dalam rangka pencapaian misi “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata**” maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor perikanan
 - 1.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata
 - 1.3. Meningkatkan Penguatan Investasi
 - 1.4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

5.3.3. Dalam rangka pencapaian misi **“Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis kabupaten
 - 1.2. Meningkatkan penyelenggaraan tata ruang
 - 1.3. Meningkatkan pengembangan konektivitas antar kawasan
 - 1.4. Meningkatkan kualitas pembangunan desa
 - 1.5. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

5.3.4. Dalam rangka pencapaian misi **“Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
 - 1.2. Menurunnya angka pengangguran
2. Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antar warga dan perlindungan lembaga adat serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial, dengan sasaran :
 - 2.1. Membangun budaya dan karakter bangsa

5.3.5. Dalam rangka pencapaian misi **“Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada
2. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang, dengan sasaran :
 - 2.1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
 - 2.2. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - 2.3. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keterkaitan Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran serta indikator keberhasilan jangka menengah Kabupaten Minahasa untuk tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1. Beberapa perubahan yang tertuang dalam tabel di bawah ini yaitu sasaran dan target kinerja pada Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang memuat realisasi, serta perubahan target kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 5.1.

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Minahasa

VISI: MINAHASA YANG MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL, DAN SEJAHTERA

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan pembangunan sumber daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,97	75,47	75,29	75-76	76-77	77-78	77-78
				Indeks Pembangunan Gender (IDG)	82,96	87,63	83,47	83,84	84,31	84,76	84,76
			1. Meningkatnya kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,67	70,98	71,08	71,18	71,39	71,69	71,69
			2. Meningkatnya Tingkat dan Mutu	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,56	9,58	9,59	9,73	9,85	10,01	10,01

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pendidikan	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,92	99,66	99,83	99,85	99,87	99,90	99,9
			3. Meningkatkan kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	96,48%	96,76%	95,76%	96,31%	96,34%	96,37%	96,37%
				Meningkatnya nilai cluster terhadap implementasi kabupaten layak anak	Belum KLA (476)	KLA Pratama (550 – 600)	-	KLA Pratama (550 – 600)	KLA Nindya (750 – 800)	KLA Madya (800 – 900)	KLA Madya (800 – 900)
2.	Mewujudkan Kemandirian	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	6,12	5,82	- 1,03	3,0-4,0	4,0-5,0	6,0	6,0
				PDRB per	46,62	50,04	50,18	52,32	55,05	58,48	58,48

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ekonomi dengan mendorong sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata			kapita							
			1. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (persen)	3,19	4,99	2,16	3,10	3,8	4,5	4,5
			2. Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	10,59	6,53	- 20,04	1	2	3	3
			3. Meningkatkan Penguatan Investasi	Nilai Investasi	150.000.000.000	1.710.545.982.000	862.100.000.000	750.000.000.000	900.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
		4. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio ketergantungan	46,17	46,33	46,53	46,51	46,49	46,47	46,47	
3.	Mewujudka	1. Pemerataan		Indeks	0,36-	0,36-0,39	0,36-0,39	0,345-	0,340-	0,335-	0,335-

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n pengembangan kewilayahannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	pembangunan antar wilayah		ketimpangan Regional Kabupaten	0,40			0,340	0,335	0,330	0,330
			1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	8.68%	75%	62,5%	68,8%	75%	81,3%	81,3%
			2. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	69%	71,05%	73%	74%	77%	80%	80%
			3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	85%	86%	87%	87%	88%	88%

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Meningkatkan kualitas pembangunan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0%	16,66%	45,34%	43,69%	49,58%	57,98%	57,98%
			5. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,76	55,29	72,82	60,11	60,21	60,29	60,29
				Indeks resiko bencana	85	143,85	205,50	200,50	195,50	190,50	190,50
4.	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		Indeks Gini	0,4	0,35	0,32	0,367	0,357	0,354	0,354
			1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,3	7,18	7,3	7,3-7,0	7,0-6,7	6,7-5,9	6,7-5,9
			2. Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	7.35	5,88	6.3	6,21	6	5,71	5,71

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n										
		2. Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial		Jumlah kasus SARA	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Demo	4	3	2	1	1	0	0
			1. Membangun budaya dan karakter bangsa	Persentase masyarakat mendapatkan pembinaan karakter, budaya, tumbuhnya jiwa patriotisme, prestasi, dan profesionalitas	90%	92%	94%	98%	98%	100%	100%

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	75%	80%	80%	85%	90%	100%	100%
5.	Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintah	1. Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif		Indeks Demokrasi	72	73	75	78	80	88	88
			1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada	Persentase Partisipasi Pemilih	81%	64%	76%	-	-	-	
		2. Meningkatkan	Indeks	64,51	65,10	66,32	67,49	68,89	70,14	70,14	

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Realisasi dan Target Capaian					Kondisi Akhir
						Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	han yang baik	n kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang		Reformasi Birokrasi							
			1. Meningkatkan Keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan Informasi Publik	< 80	-	-	86	86,5	87	87
			2. Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indeks Integritas	66,19	-	-	72,98	76,58	80,11	80,11
			3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas laporan keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	CC	B	BB	BB	BB	BB
				Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka menjawab Visi dan Misi dari Bupati Bapak Royke Octavian Roring dan Wakil Bupati Bapak Robby Dondokambey Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 terkait pembangunan lima tahun ke depan, dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 telah memuat tujuan dan sasaran serta sembilan cita-cita seperti yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Guna pencapaian hal-hal tersebut, diperlukan adanya Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Strategi pembangunan menjelaskan pernyataan-pernyataan tentang tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan menjelaskan rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selanjutnya, Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pandemi COVID 19 yang melanda dunia sampai ke tingkat daerah menyebabkan adanya penyesuaian berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah serta prioritas pembangunan yang menopang percepatan pemulihan ekonomi.

6.1. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah- langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan

- pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TABEL 6.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI		
VISI: MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL		
DAN SEJAHTERA		
MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Berdaya Saing		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kesehatan masyarakat	1.Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan; Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat; Sumber Daya Kesehatan; Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular. 2.Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas masyarakat.
	2. Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan	1.Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan; kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
		2.Mengoptimalkan lembaga- lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan; Meningkatkan budaya baca masyarakat. 3.Mengoptimalkan teknologi digital dalam bidang Pendidikan.

	3. Meningkatkan kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan	1. Mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan
		2. Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata		
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Pembangunan pertanian terpadu untuk meningkatkan komoditas andalan, guna menjamin Kedaulatan pangan dan keberlanjutan pangan Strategis
	2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
	3. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	1.Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus (edu-tourism dan eco-tourism) dengan tetap berpegang pada prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan 2.Mengoptimalkan sektor pariwisata pasca pandemi covid-19

	4. Meningkatkan Penguatan Investasi	Meningkatkan nilai tambah investasi sektor riil dan industrialisasi, iklim Investasi serta pemulihan investasi dampak pandemi covid-19
	5. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja serta dampak pandemi covid-19
Misi 3: MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
1. Meningkatkan Pemerataan pembangunan antar wilayah	1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Meningkatkan fungsi, kapasitas dan pengelolaan kawasan kawasan strategis
	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat. 2. Meningkatkan kualitas teknologi informasi menopang konektivitas antar Kawasan.
	4. Meningkatkan kualitas pembangunan Desa	1. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pemenuhan pelayanan

		<p>dasar.</p> <p>2.Peningkatan infrastruktur teknologi informasi menuju desa digital.</p>
	<p>5. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana</p>	<p>Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon.</p>
<p>Misi 4: MENINGKATKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN</p>		
<p>1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</p>	<p>1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap hak hak dasar.</p> <p>2.Pemberdayaan masyarakat rentan pasca pandemi covid-19</p> <p>3.Penguatan data terpadu kesejahteraan sosial.</p>
	<p>2. Menurunnya angka pengangguran</p>	<p>1.Meningkatkan lapangan pekerjaan layak dan produktivitas tenaga kerja.</p> <p>2.Meningkatkan jiwa kewirausahaan tenaga kerja.</p> <p>3.Membangun kreativitas dan inovatif tenaga kerja pasca pandemi covid-19</p>
<p>2. Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong,</p>	<p>1. Membangun budaya dan karakter bangsa</p>	<p>1.Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas di berbagai bidang pembangunan</p>

kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial		2. Penguatan Gerakan Masyarakat hidup Sehat, Pembinaan dan Peningkatan Infrastruktur olahraga
		3. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kerukunan umat beragama, harmoni sosial serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
Misi 5: Memantapkan Manajemen Birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik		
1. Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada	Meningkatkan Pendidikan politik secara konsisten dan sistematis
2. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	1. Meningkatkan Keterbukaan informasi publik	1. Mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif. 2. Mewujudkan e_government.
	2. Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mewujudkan sistem anti korupsi yang optimal

	<p>3. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah</p> <p>2. Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara</p> <p>3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>4. Mengoptimalkan transformasi digital dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Arah Kebijakan

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Minahasa, serta acuan bagi para stakeholder terkait dalam partisipasi aktif pembangunan.

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk Perangkat Daerah yang

terlibat di dalamnya.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 berdasarkan peta tematik pembangunan seperti pada tabel 6.3. Tahun pertama; Penyediaan Infrastruktur Sosial-Budaya, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Sumberdaya manusia Dan Kewilayahan. Pada Tahun kedua; Pemantapan Infrastruktur Sosial-Budaya, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Sumberdaya manusia Dan Kewilayahan. Tahun Ketiga; Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata Untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Ekonomi Masyarakat. Tahun keempat; Pemantapan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata Untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Ekonomi Masyarakat, dan Tahun kelima; Kemandirian Ekonomi Wilayah Untuk Mendukung Perwujudan Masyarakat Yang Berdaulat, Adil Dan Sejahtera.

Tabel 6.2
Tema Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023				
TAHUN PERTAMA (Tahun 2019)	TAHUN KEDUA (Tahun 2020)	TAHUN KETIGA (Tahun 2021)	TAHUN KEEMPAT (Tahun 2022)	TAHUN KELIMA (Tahun 2023)
<p>PENYEDIAAN</p> <p>INFRASTRUKTUR SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN KEWILAYAHAN</p>	<p>PEMANTAPAN</p> <p>INFRASTRUKTUR SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN KEWILAYAHAN</p>	<p>PENINGKATAN</p> <p>KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN EKONOMI MASYARAKAT</p>	<p>PEMANTAPAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH</p>	<p>KEMANDIRIA</p> <p>N EKONOMI WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA</p>

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun
2018-2023 Berbasis Tematik Pembangunan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TEMATIK PEMBANGUNAN
<p>Tahun PERTAMA : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN KEWILAYAHAN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan tingkat kemiskinan melalui Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Kualitas Infrastruktur Dasar dan Bantuan Sosial; • Menyediakan sarana prasarana Kesehatan dan Pendidikan serta konektivitas antar wilayah; • Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan pedesaan untuk mewujudkan kota/desa yang aman dan layak huni; • Penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi semua masyarakat; • Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat ; • Meningkatkan Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparat pemerintah daerah dan desa; • Meningkatkan dan mengembangkan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif; • Pengelolaan dan penambahan nilai sumberdaya alam dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian lahan kering dan perikanan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya alam, produksi pertanian, perikanan dan kelautan; • Mengembangkan ekonomi pertanian dan kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan; • Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan • Pengelolaan Bencana • Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang • Meningkatkan Jumlah Desa Berkembang dan Maju

**TAHUN KEDUA:
PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI DAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Mendukung Peningkatan Daya
Saing Sumber Daya Manusia dan Kewilayahan**

Aspek penting dalam pemantapan infrastruktur sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup untuk mendukung peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan kewilayahan yakni **MENINGKATKAN PENGUATAN KAPASITAS** terhadap pelaksanaan arah kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun pertama, kemudian disinergikan dengan arah kebijakan yang menunjang pembangunan di tahun pertama.

- Pengurangan tingkat kemiskinan melalui Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Kualitas Infrastruktur Dasar dan Bantuan Sosial;
- Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan dan layanan kesehatan serta peningkatan Produktifitas Masyarakat Minahasa;
- Peningkatan akses infrastruktur kawasan strategis agropolitan, minapolitan dan pariwisata;
- Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah;
- Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Berkelanjutan dan Kewilayahan di seluruh bidang pembangunan;
- Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya lokal masyarakat serta pembinaan mental spiritual keagamaan masyarakat;
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi Informasi.

**TAHUN KETIGA :
PENINGKATAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PARIWISATA UNTUK Mendukung Pemerataan Pembangunan
Wilayah dan Ekonomi Masyarakat**

Fokus dalam peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui ekonomi lokal, pemerataan pembangunan wilayah dan ekonomi masyarakat yakni perlunya pendampingan dan penguatan secara kelembagaan terkait dengan upaya menghasilkan kontribusi ekonomi dan mendorong kemandirian ekonomi petani dan sektor pariwisata.

- Mengintensifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui
Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Kualitas Infrastruktur Dasar dan Bantuan Sosial serta kepastian penerima bantuan tepat sasaran;

- Mengembangkan kawasan Strategis agropolitan dan minapolitan
- Peningkatan Ekonomi Berbasis Pertanian dan mengembangkan usaha ekonomi pedesaan, Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan akses pembangunan pariwisata Danau Tondano dan pengembangan peluang destinasi-destinasi wisata untuk pembangunan pariwisata terpadu dalam mewujudkan rantai nilai ekonomi kepariwisataan;
- Meningkatkan investasi untuk mendukung penyediaan 5A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan awareness) dengan dukungan peningkatan kapasitas serta profesionalitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata;
- Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pengembangan desa;
- Pengembangan potensi ekonomi wilayah;
- Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah;
- Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;
- Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- Meningkatkan Pembangunan Transportasi Perkotaan dan Perdesaan
- Meningkatkan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Meningkatkan Penguatan Investasi dan Inovasi
- Meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi

TAHUN KEEMPAT :

PEMANTAPAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA UNTUK Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah.

Aspek penting dalam pemantapan peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan ekonomi masyarakat yaitu penguatan kapasitas dan kelembagaan serta sinergitas terhadap pelaksanaan arah kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun ketiga serta penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan dampak sosial dan budaya :

- Pengurangan tingkat kemiskinan melalui Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Kualitas Infrastruktur Dasar dan Bantuan Sosial serta pemberdayaan bagi yang terdampak pandemi covid-19;

- Penanganan stunting di tingkatan desa/kelurahan sampai kabupaten
- Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
- Menjalankan inovasi desa dan daerah melalui produk unggulan dan potensi lainnya serta pengoptimalan dimasa atau pemulihan pasca pandemi;
- Pengembangan destinasi-destinasi wisata baru dengan dukungan peningkatan kapasitas serta profesionalitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata;

- Meningkatkan pembangunan pariwisata terpadu, akses pembangunan dan peluang pariwisata serta pengoptimalan sektor pariwisata dimasa/pasca pandemi covid-19;
- Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan Pengembangan desa menjadi Maju dan Mandiri;
- Pengembangan potensi ekonomi wilayah;
- Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;
- Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi melalui penerapan protokol kesehatan dalam berbagai aktifitas masyarakat.

TAHUN KELIMA :

KEMANDIRIAN EKONOMI WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA

Tematik pembangunan terakhir dengan mempercepat agenda pembangunan yang mempunyai daya ungkit perekonomian untuk mendukung perwujudan masyarakat berdaulat, adil dan sejahtera serta sinergitas terhadap pelaksanaan arah kebijakan yang telah dilaksanakan pada empat tahun sebelumnya serta penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan dampak sosial dan budaya :

- Mengintensifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Kualitas Infrastruktur Dasar dan Bantuan Sosial serta kepastian penerima bantuan tepat sasaran;
- Penanganan stunting di tingkatan desa/kelurahan sampai kabupaten

- Meningkatkan sistem inovasi daerah untuk produk unggulan hingga wilayah pedesaan;
- Penguatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan dan pariwisata;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif;
- Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kedisiplinan aparat pemerintah daerah;
- Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
- Pembinaan dan pengawasan aparat pemerintah daerah;
- Memenuhi sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta Penataan Sistem pengelolaan keuangan, layanan informasi pembangunan dan elektronik Pemerintahan;
- Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan Pengembangan desa menjadi Maju dan Mandiri;
- Meningkatkan perwujudan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar;
- Terbentuknya Kawasan Strategis Kabupaten;
- Aksesibilitas konektivitas Kota-Desa;
- Kepatutan atas Penyelenggaraan Tata Ruang;
- Pembangunan kota hijau yang tahan terhadap iklim dan bencana.

6.3. Program Pembangunan

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan

daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Adapun prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang menjadi Program Unggulan pemerintah dapat dilihat pada tabel 6.3 di bawah ini :

Tabel 6.4. Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Minahasa

1	MAPALUS (MASYARAKAT PEDULI DAN TULUS UNTUK SESAMA)
2	RR-RD (RAKYAT RAMAH, RUKUN DAN DAMAI)
3	RR-RD TONDANO (REHABILITASI, REVITALISASI DAN REKREASI DANAU TONDANO)
4	SUMIKOLAH
5	KESEHATAN/LANSIA SEHAT
6	RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI
7	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
8	PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA
9	LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN
10	BIROKRASI HANDAL DAN PROFESIONAL

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat Kabupaten serta dilakukan harmonisasi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa yang sinergis dengan pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas tersebut dilakukan mulai dari pemahaman Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nasional yang kemudian menjadi acuan pendekatan pembangunan daerah. Adapun program prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah : Mapalus (Masyarakat Peduli Dan Tulus Untuk Sesama), program prioritas Mapalus ini untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa dengan masyarakat yang bermoral dan berkepribadian dalam rasa kepedulian dan tulus terhadap sesama. Kedua,

RR-RD (Rakyat Ramah, Rukun Dan Damai) tak jauh dari poin pertama program prioritas ini juga dalam rangka mewujudkan suatu daerah yang rukun serta damai dengan masyarakat yang damai untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat namun juga para wisatawan yang datang berkunjung di Kabupaten Minahasa. Ketiga, RR-RD Tondano (Rehabilitasi, Revitalisasi Dan Rekreasi Danau Tondano), dimana objek wisata Danau Tondano sangat berpotensi untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa dengan meningkatkan perhatian terhadap kebersihan danau, rehabilitasi, revitalisasi yaitu keduanya adalah proses untuk memunculkan nuansa keindahan danau Tondano sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan lokasi rekreasi di seputaran danau Tondano. Keempat, Sumikolah; ajakan untuk bersekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah agar masyarakat sesuai dengan penjabaran visi dan misi pemerintah menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya saing baik secara nasional maupun secara internasional. Kelima, Kesehatan/Lansia Sehat; Umur panjang merupakan indikator utama dari Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH menjadi indikator juga dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga sangat penting untuk tetap memastikan setiap lansia di Kabupaten Minahasa dalam keadaan sehat. Keenam, Rumah Tinggal Layak Huni; setiap orang membutuhkan tempat tinggal yang layak, dan masih ada masyarakat di Kabupaten Minahasa yang belum memilikinya. Sehingga Rumah Tinggal Layk Huni bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu program prioritas untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat di Kabupaten Minahasa. Ketujuh, Pembangunan Infrastruktur; dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berwujud pembangunan dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sistem pengairan, sistem kelistrikan dan lainnya maka akan banyak manfaat dan kenyamanan yang bisa dirasakan masyarakat.

Kedelapan, Pertanian, perikanan dan Pariwisata; Ketiga hal ini merupakan faktor penting terjadinya kemandirian ekonomi suatu daerah, yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kesembilan, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Kesepuluh, Birokrasi Handal dan Profesional; Birokrat yang handal dan profesional akan menjadikan pemerintahan Kabupaten Minahasa menjadi lebih baik.

Dalam alokasi dan kebijakan penganggaran, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Pada tataran implementasi dilakukan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Urusan Pilihan yang dipilih dalam RPJMD dikaitkan dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pada bagian ini disajikan program pembangunan daerah disertai pagu indikatif.

TABEL 6.5
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Minahasa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 1: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING																
	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.97	75.47		75.29		76		77		78		78		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82.96	87.63		83.47		83.84		84.31		84.76		84.76		
	Sasaran 1: Meningkatkan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.67	70.98		71.08		71.18		71.39		71.69		71.69		
	Program :															
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	6,5	6,45	101.920	6,69	68.970	6,87	112.953	69,1	101.233	7,0	127.084	7,0	523.892	Dinas Kesehatan
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,001	0,001		0,001		0,001		0,001		0,001		0,001		Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,19%	108,22%		98,28%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,79%	97,06%		92,89%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,02%	104,3%		91,34%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	70,55%	96,73%		21,4%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,04%	94,79%		44,91%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	100,35%		40,89%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	95,77%		58,96%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32,33%	105,17%		118,58 %		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	103,94%		96,61%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/a	111,26%		47,89%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	43%	131,86%		40,35%				100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	N/a	7,8%		15,30%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5.35/1.000 KH	6.97/1.000 KH		1.5/1.000 KH		4.5/1.000 KH		4.3/1.000 KH		3.7/1.000 KH		3.7/1.000 KH		Dinas Kesehatan
		Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	61.7/100.000KH	102.56/100.000 KH		150.15/100.000 KH		107/100.000 KH		100/100.000 KH		96/100.000 KH		96/100.000 KH		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	0,68%	1,63%		3,11%		13,5%		13%		12,5%		12,5%		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87%	90%		92%		94%		96%		98%		98%		Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	92%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		Dinas Kesehatan
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	≥2		<2		≥2		≥2		≥2		≥2		Dinas Kesehatan
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	49,77	110,8		103		141		140		139		139		Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Penderita diare yang ditangani	91,08%	92%		93%		94%		95%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Angka kejadian Malaria	<1‰	<1‰		<1‰		<1‰		<1‰		<1‰		<1‰		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tingkat kematian akibat Malaria	0	0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	83%	85%		88%		90%		98%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas	100%	100%		73%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Nilai IKM Dinas Kesehatan	B	B		B		B		B		B		B		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,1%	96,6%		86,36%		93%		94%		95%		95%		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	46,30%	50%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	8	8		0		6 akre 4 re-akre		1 akre 4 re-akre		8 re-akre		6 re-akre		Dinas Kesehatan
		Persentase Tenaga Kesehatan Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A		114,93 %		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
		Persentase Petugas Pelayanan Publik Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A		73,7%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
		Persentase Masyarakat Umum Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A		30,64%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
		Persentase Lansia Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A		26,13%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
		Persentase Anak 12-17 Tahun Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A		31%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Puskesmas dan jaringannya yang memiliki sumberdaya kesehatan yang berkompeten sesuai standard	100%	100%	30	100%		100%	-	100%	-	100%	200	100%	430	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat esensial dan obat kebutuhan lainnya	90%	91%		91%	210	92%	-	92%	-	93%	200	93%	460	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	60%	76%	50	84%		89%	-	92%	521	94%	200	94%	450	Dinas Kesehatan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	100%	13.696	100%	18.109	100%	78.360	100%	102.791	100%	113.071	100%	78.360	RSUD Sam Ratulangi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia	100%	100%	-	100%	-	100%	4.906	100%	5.503	100%	6.053	100%	4.906	RSUD Sam Ratulangi
	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,06	2,06	-	2,08	-	20,8	65	209 TFR	50	2,1	51	2,1	751	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,54%	79,94%	-	80,34%	-	80,74%	5.128	81,14%	6.188	81,54%	6.374	81,54%	17.691	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	200 Org	400 Org		600 Org	0	800 Org	0	1000 Org	0	1080 Org	90	1080 Org	-	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Median Usia kawin pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	20	-	0	-	0	21	19	21	50	21	51	21	120	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sasaran 2: Meningkatkan Tingkat dan Mutu Pendidikan		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9.56	9.58		9.59		10.3		10.35		10.4		10.4		
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.92	99.66		99.83		99.85		99.87		99.90		99.9		
Program :																
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		100%	46.328	100%	-	4	321,894	4	369.961	4	414.357	4	414.357	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60,16%	66,10%		66,20%		85,5%		86,06%		86,7%		86,7%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,50%	80,99%		92,18%		93,10%			95%		97%		97%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	56,12%	56,54%		57,20%		60%			62%		65%		65%		
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		-	0	-	0	100%	46,328	100%	-	100%	51,887	100%	51,887		Dinas Pendidikan
		Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan satuan pendidikan dasar															
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang baik		100%	0	100%	6.496	-	0	75%	781		875		875		Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,81%	84,1%		85,6%		86%		86,55%		87,45%		87,45%			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Guru bersertifikasi pendidik	84,54%	86,24%		86,24%		88%		90%		95%		95%		
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan				22	100%	6.629	100%	14.585	100%	16.336	100%	16.336	Dinas Pendidikan	
		Persentase Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memiliki ijin														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	536	4	507	4	168	4	2.430	4	593	4	593	Dinas Perpustakaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1%	2%	30	3%	41	3%	91	4%	70	5%	2,325	5%	4,291	Dinas Perpustakaan
		Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,98%	3,44%		3,72%		N/A		N/A		N/A		N/A		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2.50%	3.20%		3.38%		4.12%		4.15%		4.72%		4.72%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno Yang diakuisisi dialihmediakan	0	0		0		0		0	0	0		0		Dinas Perpustakaan
	Program pengolahan kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	0.21%	0.21%		0.21%		0.50%	30	0.90%	40	1%	225	1%	404	Dinas Perpustakaan
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	0	0		0		0		0.21%		0.50%		0.50%		Dinas Perpustakaan
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan		Indeks Pembayaran Gender (IPG)	96.48%	96.76%		95.76%		96.31%		96.34%		96.37%		96.37%		
	Meningkatnya nilai cluster terhadap implementasi kabupaten layak anak		Belum KLA (476)	KLA Pratama (550-600)		-		KLA Pratama (550-600)		KLA Nindya (750-800)		KLA Madya (800-900)		KLA Madya (800-900)		
Program :																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender) pada belanja langsung APBD	-	25 Kec	850	25 Kec	1.025	25 Kec	1,120	25 Kec	1,225	25 Kec	1,330	25 Kec	4,350	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per seratus ribu penduduk perempuan)	0.03	0.03	0	0.04	0	0.03%	0	0.04%	0	0.013%	0	0.013%	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan	2	2	47	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengelolaan sistim data gender dan anak	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat kabupaten kota	-	6	825	6	950	11	1.040	30	30	34	1.260	34	5.225	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	3	0	3	0	3	0	5	30	10	60	10	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	-	0	100%	975	100%	1,105	100%	1,205	100%	1,300	100%	1,390	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA																
	Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	6.12	5,82		- 1,03		3,0-4,0		4,0 – 5,0		6,0		6,0		

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PDRB per kapita	46,62	50,18		50,67		52,32		55,05		58.48		58.48		
	Sasaran 1: Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Perikanan, Kehutanan (Persen)	3,19	4,99		2,16		3,10		3,8		4,5		4,5		
	Program :															
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan	25%	-	-	-	-	30%	4	30.50%	23	-	-	40%	27	Dinas Pangan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase pencapaian pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi	60%	65%	807	-	-	75%	202	80%	199	80%	199	80%	1.407	Dinas Pangan
	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan mutu pangan segar	-	25%	-	-	-	35%	3	40%	24	45%	24	45%	51	Dinas Pangan
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	1%	2%	1.899	2%	1.530	2%	608	2%	1.569	3%	1.715	3%	7.321	Dinas Pertanian
		Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	2%	2%		2%		2%		4%		4%		4%		
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	8%	10%		10%		13%		19%		21%		21%		
		Persentase Peningkatan Populasi Peternakan	1%	2%		2%		3%		5%		6%		6%		
	Program penyediaan dan pengembangan	Persentase Prasarana yang digunakan	100%	100%	4.384	100%	1.651	100%	4.370	100%	2.055	100%	2.340	100%	14.800	Dinas Pertanian

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Prasarana pertanian															
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase fasilitasi penanggulangan kasus penyakit hewan menular	70,87%	72,23%	431	72,70%	271	73,46%	100	74,50%	308	77,47%	384	77,47%	4.957	Dinas Pertanian
	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan teknologi yang diterapkan oleh petani	60%	65%	381	70%	145	75%	708	80%	1.257	85%	757	85%	3.248	Dinas Pertanian
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	52.284	50.000	850	24.922	1.258	25.000	1.596	26.000	996	26.000	1.062	151.922	5.763	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	55.701	55.000	830	26.538	1.810	27.500	1.262	30.000	1.236	30.000	1.119	169.038	6.257	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	102	75%	102	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan dan pemasaran (ton)	296	400	-	286	-	290	90	300	90	300	-	1.576	180	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Sasaran 2: Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	10,59	6,53		-20,04		1		2		3		3		
	Program :															
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian warisan budaya	41,86 %	76,14%	45	83,10%	73	84,14%	157.	83,89%	152	83,55 %	89	83,55 %	516	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan	Persentase karya budaya dan kesenian	55,56 %	66,67%	542	66,67 %	562	66,67%	2	70%	2	70%	89	70%	1.197	Dinas Kebudayaan

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kesenian Tradisional	tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi														n dan Pariwisata
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	35,29 %	77,22%	45	84,21 %	73	82,35%	157	83,45 %	152	84,51%	89	84,51%	516	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	n.a	n.a	-	n.a	-	n.a	-	n.a	-	100 %	20	100 %	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten	7.558 Miliar	10.989 M	2.357	5.905 M	3.778	8.020 M	74	8.181 M	151	8.344 M	1.218	8.344 M	7.578	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		6,53%		-20,04%		8,23%		8,56%		8,81%		8,81%		
	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	13,83 %	80,96%	611	-97,41%	1.224	4,98%	780	5,01%	469	6,00%	969	6,00%	4.053	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	14,99 %	52,89%		-86,49%		10,00%		15,00%		36,60%		36,60%		
		Tingkat Hunian Akomodasi	61,96%	65,39%		65,39%		54,88%		63,19%		68,27%		68,27%		
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	N.A	N.A	-	0 %	-	0 %	-	50 %	200	50 %	200	14,29%	400	Kebudayaan dan Pariwisata
	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkatkan kualitasnya melalui	N.A	32 %	738	30 %	753	0 %	0	10 %	0	28 %	530	100 %	2.021	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembekalan sektor kepariwisataan														
	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	N.A	32 %	738	30 %	753	0 %	0	10 %	0	28 %	530	100 %	2.021	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Sasaran 3: Meningkatkan Penguatan Investasi	Nilai Investasi (Rp.)	150.000.000.000	1.710.545.982.000	862.100.000.000	750.000.000.000	900.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000							
	Program :															
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25%	25%	128	-	-	-	-	-	-	25%	175	25%	303	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pameran Investasi	20%	20%	85	-	-	20%	150	17%	150	10%	120	84%	505	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	23%	23%	3	18%	10	27%	323	17%	323	10%	23	95%	682	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM terhadap layanan publik	203,30	203,39	30	203,39	12	203,42	90	203,45	90	203,50	140	203,50	362	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem	Persentase peningkatan	25%	25%	61	25%	16	25%	90	25%	16	25%	100	25%	283	Dinas Penanaman Modal

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Informasi Penanaman Modal	pengelolaan data dan sistem informasi Secara Elektronik														Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan energi baru terbarukan	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dalam Kabupaten yang dikelola	-	100%	123	100%	179	100%	60	100%	40	100%	41	100%	443	Dinas Perdagangan
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP Toko swalayan	15%	15%	-	15%	-	15%	-	15%	-	20%	20	20%	20	Dinas Perdagangan
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten	100%	100%	5.554	-	-	100%	1.671	100%	1.616	100%	1.648	100%	10.489	Dinas Perdagangan
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat Inflasi	3,52%	3.52%	70	-	-	2.72%	216	2.73%	225	2.73%	330	2.73%	841	Dinas Perdagangan
	Program pengembangan ekspor	Jumlah produk berkualitas ekspor yang dihasilkan		-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	150	5 Kegiatan	150	Dinas Perdagangan
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-	3.20%	939	3.20%	38	3.20%	6	5%	16	5%	16	5%	1.015	Dinas Perdagangan
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Terciptanya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	50	20%	50	Dinas Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemasaran Produk Dalam Negeri														
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	0.9%	0.9%	215	-	-	2.50%	1.920	3%	700	4%	714	-	3.549	Dinas Perdagangan
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin perluasan industri (IPI) kecil dan industri menengah, jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya dikeluarkan instansi terkait di daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	70	100%	70	Dinas Perdagangan
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		-	-	-	-	-	-	-	-	40%	20	40%	20	Dinas Perdagangan
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan izin	10 Koperasi	10 Koperasi	-	10 Koperasi	-	10 Koperasi	-	10 Koperasi	2	10 Koperasi	3	50 Koperasi	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Meningkatnya Koperasi Terawasi dalam hal kepatuhan dan pelaporan	25 Koperasi	25 Koperasi	119	25 Koperasi	-	25 Koperasi	-	25 Koperasi	6	25 Koperasi	6	125 Koperasi	131	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Jumlah KSP/USP yang sehat dan mandiri	25 Koperasi	25 Koperasi	-	25 Koperasi	41	25 Koperasi	-	25 Koperasi	16	25 Koperasi	18	125 Koperasi	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program pendidikan dan latihan	Prosentase Koperasi binaan Kabupaten yang mengikuti diklat	1,70%	-	-	-	-	1,70%	27	1,70%	30	1,70%	33	85%	90	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	25 Koperasi	25 Koperasi	-	25 Koperasi	-	25 Koperasi	-	25 Koperasi	-	25 Koperasi	53	125 Koperasi	53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	0,254%	0,254%	145	-	-	0,313%	32	0,336%	39	0,376%	154	0,376%	370	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program pengembangan umkm	Prosentase jumlah UMKM yang terfasilitasi	0,063%	0,063%	104	0,076%	592	-	-	0,006%	83	0,114%	95	0,114%	874	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Sasaran 4 : Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja		Rasio Ketergantungan	46.17	46.33		46.53		46.51		46.49		46.47		46.47		
Program :																
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan latihan kerja	64 orang	88 orang	2.415	208 orang	2.512	344 orang	2.891	384 orang	3.333	424 orang	3.803	1448 orang	14.953	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21%	24%		29.10%		33.33%		42.80%		43.70%		34.50%		Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.60%	0.82%		-3.97 %		2%		3%		5%		1.37%		Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat pengangguran terbuka	7,35	5,88		6,3		6,21		6		5,71		5,71		Dinas Tenaga Kerja
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	68,6	72,6		71,4		74,2		81,00		81,5		81,5		Dinas Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pelatihan berbasis kompetensi														
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Tenaga Kerja
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Tenaga Kerja
		Keselamatan dan perlindungan	6%	7%		9.50%		20%		30%		40%		21.30%		Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	300 orang	426 orang	165	445 orang	186	449 orang	188	502 orang	189	505 orang	192	2327 Orang	920	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3						5 perusahaan	82	5 perusahaan	83	5 perusahaan	88	25 perusahaan	406	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	80%	100%		36.70%		100%		100%		100%		87,34 %		Dinas Tenaga Kerja
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	68,6	72,6		74,8		74,2		81		81,5		81.5		Dinas Tenaga Kerja
Misi 3: MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN																
	Tujuan 1: Pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks ketimpangan Regional Kabupaten	0,36-0,40	0,36-0,39		0,36-0,39		0,36-0,38		0,36-0,37		0,36-0,36		0,36-0,36		
		Pertumbuhan Ekonomi		6.15		6.2		6.3		6.4		6.5		6.5		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 1: Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	8.68%	75%		62.5%		68.8%		75%		81.3%		81,3%		
	Program :															
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	6,20%	6,20%	0	11,32%	36	15,10%	200	20,33%	250	25,95%	255	25,95%	705	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Ratio Kepatuhan IMB	0,85	0,858	0	0,866	0	0,873	225	0,881	75	0,889	77	0,889	376	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase luas bangunan dan lingkungan dikawasan strategis kabupaten yang tertangani	82,50%	87,2%	0	90,5%	1.049	93.8	40	96,75%	250	100%	255	100%	159	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Jasa Konstruksi	Ratio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%C	14	100%	0	100%	27	100%	25	100	26	100	775	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,2784	0,2784		0,2896		0,3189		0,3776		0,4657		0,4657		
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang sudah	N.A	91%	850	92%	350	93%	337	94%	358	95%	500	95%	2.395	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)															Permukiman
	Sasaran 2 Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	69%	71.05%		73%		74%		77%		80%		80%			
	Program :																
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N.A	N.A	479	N.A	720	100%	351	100%	1,297	100%	1.185	100%	4,184		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sasaran 3: Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	85%		86%		87%		87%		88%		88%			
	Program :																
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	61.35	65,16	43.144	69,42	42,592	70,10%	30,532	70,50%	31,611	72%	32,243	72%	180,022		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan LaluLintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks konektivitas angkutan jalan	85 %	85 %	364	85,7 %	439	90 %	222	92,5 %	22	95 %	26	95 %	1.073		Dinas Perhubungan
		Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota (VC Ratio Jalan Kabupaten)	0,70	0,7		0,74		0,78		0,83		0,85		0,85			
	Program pengelolaan pelayaran	Indeks konektivitas angkutan sungai, danau dan laut	25%	25 %	0	25 %	450	50 %	0	50 %	0	55 %	357	55 %	807		Dinas Perhubungan
	Sasaran 4: Meningkatkan kualitas pembangunan Desa	Presentase peningkatan status desa mandiri	0%	16.66%		45.34%		43.69%		49.58%		57.98%		57.98			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program :																
	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa		-	0	-	0	-	0	100%	0	100%	160	100%	160	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama		-	0	-	0	-	0	24,6%	25	25.5%	47	25.5%	72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase pegentasan desa tertinggal	33,48%	59,21%		100%			0	0		0		0		
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0	16.66%		45.34%			43,69%	49,58%		57,98%		57,98%		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	-	9.69%	0	9.69%	0	14.53%	2,712	19.38%	2.152	24.22%	3.404	24.22%	8.269	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	72,20%	72,20%		90,42%			90,42%		90,63%		90,85%		90,85%	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	0	100%	0	100%	1.499	100%	1,550	100%	1.970	100%	5.021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,29	0,29		0,29			0,29		0,29		0,29		0,29	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.08	1.08		1.08			1.08		1.08		1.08		1.08	
		Persentase LPM Berprestasi	-	1,48%		1,48%			1,48%		2,96%		4,4%		4,4%	
		Persentase PKK aktif														

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 5 : Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.76	55,29		72.82		60,11		60,21		60,29		60,29		
		Indeks risiko bencana	85	143.85		205.50		200.50		195.50		190.50		190.50		
	Program :															
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.0363	0,0394	3.493	0,0477	5.924	0,0525	3,203	0,0525	3,266	0,0525	3,331	0,0525	19,217	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	86,8%	88%		89%		91%		92%		94%		94%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Persentase Panjang Drainase Primer Dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	52,15%	52,15%	150	52,15%	643	53,25%	415	54,30%	422	55,45%	430	55,45%	2,060	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	Prosentase luas wilayah yang terlayani oleh sistim dan pengelolaan persampahan	7,43%	7,43%	0	10,57%	0	10,57%	0	20,34%	1,333	24,55 %	1,359	24,55 5	2,692	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase penyediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	2.203	100%	45	100%	225	100%	0	100%	0	100%	2,473	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,29	65,18	1.893	72,82	7.829	60,11	4,215	60,27	4.491	60,29	4,581	60,29	23.009	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	Presentase keanekaragaman hayati terpelihara.	n.a	n.a	0	n.a	0	n.a	0	n.a	0	50%	10	50%	10	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase pengendalian penerbitan ijin B3 dn LB3	n.a	n.a	0	51%	10	52%	10	53%	9	54%	11	54%	41	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Presentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/kota	65%	65%	0	66%	30	67%	40	68%	40	69%	41	69%	151	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengakuan keberadaan MHA, Kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase keberadaan MHA, Kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	n.a	n.a	0	n.a	0	n.a	0	n.a	0	50%	10	50%	10	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	n.a	n.a	-	n.a	-	45%	10	46%	10	47%	10	47%	30	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	n.a	n.a	0	n.a	0	1 penghargaan	50	1 penghargaan	50	1 penghargaan	51	3 penghargaan	151	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	-	100%	-	100%	-	56%	20	57%	20	58%	20	58%	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah di kab. (penanganan dan	73%	73%	6.907	80%	6.055	75%	6,600	74%	10.297	73%	10.503	73%	40.362	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pengurangan sampah)														
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	2.689	100%	8.806	100%	517	100%	902	100%	2.884	100%	13.448	Badan Penanggulangan Bencana
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	342,110 jiwa	342,110 jiwa		343,564 jiwa		343,565 jiwa		343,566 jiwa		343,567 jiwa		343,567 jiwa		Badan Penanggulangan Bencana
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	342,110 jiwa	50 jiwa		10.000 jiwa		343,565 jiwa		343,566 jiwa		343,567 jiwa		343,567 jiwa		Badan Penanggulangan Bencana
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	342,110 jiwa	4245 jiwa		4600 jiwa		343,565 jiwa		343,565 jiwa		343,565 jiwa		343,565 jiwa		Badan Penanggulangan Bencana
Misi 4: MENINGKATKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN																
Tujuan 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		Indeks Gini	0.4	0.35		0.320		0.39		0.38		0.38		0.38		
Sasaran 1: Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	7.3	7.18		7.3		7		6.7		6.4		6.4		
Program :																
	Program pengelolaan dan Pengembangan sistim penyediaan Air Minum	Persentase RT yang mendapatkan akses Terhadap air minum melalui SPAM jaringan	78.6 %	81,05%	10.407	82,48%	6.369	83,66%	6,709	84,83%	6,456	85,99%	6,585	85,99%	36,526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		perpipaan dan bukab jaringan perpipaan terlindungi terhadap RT diseluruh Kab.														
	Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistim air Limbah	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	'68.3%	69,1 %	5.938	69,78 %	4.932	70.07%	1,967	71,53%	3,000	72.99%	3,060	72,99%	18,897	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	N.A	N.A	0	N.A	0	N.A	11	93%	1,350	94%	1.500	94%	2,861	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	N.A	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	89%	90%	5.685	91%	7.250	92%	2.934	93%	2,348	94%	3.000	94%	21.217	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	30%	30%	0	27%	0	25%	0	23%	0	20%	500	20%	500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial yang diberdayakan	100%	100%	45	100%	45	4	2,419	4	2,419	4	2,419	4	7,312	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	22.28%	6.20%	694	10.83%	722	3.33%	45	7.66%	46	7.66%	47	57.96%	228	Dinas Sosial
		Persentase meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	7,9%	9,5%		11,1%		12,8%		14,4%		16,1%		16,1%		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) anak terlantar menerima jaminan sosial	100%	1224%	167	3469%	176	326%	50	0	200	0	204	12129%	1,870	Dinas Sosial
		Persentase terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial
		Presentase meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin	7,1%	10,7%		14,3%		18%		21,6%		25,3%		25,3%		Dinas Sosial
		Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11.76%	17.64%		41.17%		64.7%		88.23%		100%		100%		Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah l..	100%	100%	445	0	524	-	-	408%	50	408%	51	5509%	441	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam pahlawan yang dikelola	2	2	192	2	131	1	500	1	400	1	408	7	1,877	Dinas Sosial
	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota	10%	25%		8	25%	7	30%	36	35%	39	35%	90	Dinas Pangan	
Sasaran 2 : Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Kemiskinan	7.35	5.88		6.3		6.21		6		5.71		5.71		
Program :																
	Program hubungan industrial	Presentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial	-	-	0	-	0	15000 orang	3.024	15000 orang	3.033	15000 orang	3.083	15000 orang	3.083	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5.50%	7.50%		15%		33%		33%		53%		28.30%		Dinas Tenaga Kerja
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	45	43		40		37		33		30		30		Dinas Tenaga Kerja
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45	43		40		37		33		30		30		Dinas Tenaga Kerja
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	55 %	70 %		90.4 %		91 %		92 %		93 %		87.28 %		Dinas Tenaga Kerja
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS	0,66	0,89		0,90		0,91		0,91		0,92		0,92		Dinas Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	85%	88%		88%		94%		94%	1	100%	1	92.80%	1	Dinas Tenaga Kerja
	Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial	Jumlah Kasus SARA	0	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Demo	4	3		2		1		1		0		0		
	Sasaran 1 : Membangun budaya dan karakter bangsa	Persentase masyarakat mendapatkan pembinaan karakter, budaya, tumbuhnya jiwa patriotism, prestasi dan profesionalitas	90	92%		94%		98%		98%		100%		100%		
		Persentase fasilitas penyelenggaraaan dialog antar umat beragama dikalangan tokoh agama, pemuda, lembaga social keagamaan serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	75%	80%		80%		85%		90%		100%		100%		
	Program :															
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		10%	0	15%	321	20%	431	25%	750	25%	408	25%	416	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	42%	41%	6.237	43%	953	59%	1,578	65%	280	75%	5,057	75%	14.107	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemesyarakatan	10%	10%	0	20%	0	25%	0	30%	200	35%	0	35%	200	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	92%	0	94%	0	96%	0	98%	0	100%	0	100%	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 5: MEMANTAPKAN MANAJEMEN BIROKRASI YANG PROFESIONAL MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK																
Tujuan 1. Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif		Indeks Demokrasi	72	73		75		78		80		88		88		
Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada		Persentase Partisipasi Pemilih	81%	64%		76%		-		-		-				
Program :																
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Persentase Kegiatan/Sosialisasi mengenai peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		82%	119	64%	0	85%	0	76%	525	85%	525	90%	1.169	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemesyarakatan		75%	0	80%	0	85%	1.000	90%	1.000	90%	1.020	95%	3.020	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase Sosialisai /kegiatan Pembinaan dan		75%	1.669	80%	113	85%	25,396	90%	17.726	90%	18,079	90%	62.984	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya														
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kegiatan /Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		100%	1.186	100%	295	100%	2.369	100%	1.509	100%	1.539	100%	6.899	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	Indeks Reromasi Birokrasi	64.51	65.10	66.32	67.49	68.89	70.14	70.14	70.14						
	Sasaran 1: Meningkatkan Keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<80	-	-	86	86.5	87	87							
	Program :															
	Program Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik yang di selenggarakan secara online dan integrasi	50%	60%	2.263	73%	1.581	80%	1.305	86%	1.800	91%	4.500	91%	7.119	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	5%	5%		30%		60%		75%		100%		100%		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	4%	8%		20%		63%		74%		100%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		daerah kabupaten/kota														
		Informasi Tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan														
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	13%	18%		25%		30%		60%		70%		70%		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	57%	63%	0	68%	0	74%	6,400	86%	0	92%	200	92%	256	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program penyelenggaraan statistic sektoral	Presentase penyelenggaraan statistik sektoral	-	-	0	-	0	-	0	-	8,000	-	0			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	Persentase pelaksanaan E-Government Pemerintah Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	357	-	0			Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran 2 : Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Indeks Integritas	66.19	-		-		72.98		76.58		80.11		80.11		
Program :																
	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	72	73	2.146	73	1.464	73%	1.141	82%	1.116	83%	1.340	84%	7.342.	Inspektora t Daerah
		Jumlah Temuan BPK	23	20		20		18		14		13		12		Inspektora t Daerah
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*	-	-		-		6		40		50		75		Inspektora t Daerah
		Persentase pelanggaran pegawai*	0	-		0		0		0		0		0		Inspektora t Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 1	Level 1	135	Level 2	159	Level 2	321	Level 2	175	Level 3	388	Level 3	1.357	Inspektora t Daerah
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 2		Level 2		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Inspektora t Daerah
		Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	-	-		-		-		2		4		8		Inspektora t Daerah
		Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	-	-		-		-		2		4		8		Inspektora t Daerah
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Opini BPK atas laporan keuangan Pemda	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Predikat system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	CC		B		BB		BB		A		A		
		Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang	Sangat Tinggi		-		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
Program :																
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	64%	64%		42%		76%	8.084	80%	7.279	90%	10.433	90%	6.346	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	33%	44%	1.004	60%	8.139	73%		86%	60	100%	303	100%	303	Dinas Pemadam Kebakaran

Ko de	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Waktu tanggap (respon time penanganan kebakaran)	9%	27%		45%		63%		81%		100%		100%		Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	96%	98%	2.718	98%	2.892	96%	3,181	97%	118	98%	3,840	98%	3,972	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	0%	4%		5%		5,77%		15%		25%		25%		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran														
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akte perkawinan, perceraian, kematian dan penyajian data kependudukan	75%	80%	537	85%	596	87%	685	90%	776	93%	838	93%	863	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Tersedianya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase PD, Kantor, Badan yang terkoneksi update dengan Database Kependudukan	100%	100%	2.875	100%	2.909	100%	2,825	100%	167	100%	1,722	100%	2,058	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	0%	0%		0%		25%		50%		75%		75%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		perjanjian kerjasama														
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD, Kantor, Badan yang terkoneksi update dengan Database Kependudukan	ada	-	500	ada	550	ada	650	ada	800	75%	850	75%	850	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah	100%	100%	3.003	100%	2.871	100%	1.040	100%	1,352	100%	1,487	100%	9.755	Sekretariat Daerah
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan perekonomian	100%	100%	1.353	100%	424	100%	563	100%	589	100%	647	100%	3.578	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	98%	98%	26.515	98%	29.078	99%	18.543	-	9.202	99%	42.596	99%	42.596	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		13 Dokumen		14 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		Sekretariat DPRD
		Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	4 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		Sekretariat DPRD
		Meningkatnya pelayanan kepada Anggota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DPRD dalam menjalankan fungsinya														
		Presentase fasilitas penyelenggaraan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya	90%	100%		100%		96%		98%		98%		98%		Sekretariat DPRD
		Jumlah Ranperda (Ranperda eksekutif dan Ranperda Inisiatif) yang difasilitasi	9 Ranperda	9 Ranperda		9 Ranperda		10 Ranperda		10 Ranperda		10 Ranperda		56 Ranperda		Sekretariat DPRD
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran setwan DPRD	4 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		Sekretariat DPRD
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	N/a	N/a		N/a		N/a		B		B		B		Sekretariat DPRD
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan perda, perkara dan atau keputusan kepala daerah			1139		394	100%	950	100%	465	100%	724	100%	724	Bappelitb angda
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Persentase Dokumen perencanaan Pembangunan			320		52	100%	775	100%	773	100%	810	100%	810	Bappelitb angda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pembangunan daerah	Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronkan														
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase dokumen litbang sebagai bahan rekomendasi pembangunan daerah		0	0	100%	100	100%	200	100%	200	100%	332	100%	332	Bappelitbangda
	Program pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	269.819	100%	259.870	100%	268.630	100%	796.997	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Laporan BMD Perangkat Daerah Sesuai aturan	100%	100%	-	100%	-	100%	701	100%	1.180	100%	1.335	100%	3.179	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah	100 %	100 %	4.123	100 %	2.979	100 %	2.041	100 %	2.072	100 %	2.274	100 %	13.619	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	12%	11%	-	2%	-	2.5%	-	3%	-	3.50%	-	22%	-	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	0	9,57%	9.675	9,65%	741	9,73%	771	9,81%	950	9,81%	950	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi 9%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	0	9.57%	1	9.65%	1.800	9.73%	1.581	9.81%	4.900	9.81%	10.500	BKPSDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Juta Rp	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)	4	4	12.095	4	4.752	4	58.422	4	60.597	4	62.258	4	95.625	Seluruh PD
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)	95%	4	15.007	4	28.592	4	55.247	4	45.859	4	51.932	4	93.083	Seluruh Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	98%	99%	280	100%	286	100%	274	100%	321	100%	348	98,8%	664	Seluruh Kecamatan
	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	95%	298	100%	321	100%	218	100%	314	100%	320	100%	594	Seluruh Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	-	100%	191	100%	199	100%	204	100%	285	100%	316	100%	482	Seluruh Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	8	100%	8	9,9%	8	Kecamatan Kombi

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan dan yang telah diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Minahasa yang berisi program jabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kinerja suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Program prioritas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan agar setiap urusan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu program pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih menjadi prioritas untuk dianggarkan, namun demikian tidak harus meninggalkan urusan pemerintahan daerah yang lain yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional dan regional.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang).

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-

program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas, diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional.

Kecenderungan peningkatan proporsi Belanja Langsung yang diskenariokan dalam RPJMD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Rincian kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 berdasarkan skenario kapasitas riil keuangan diuraikan sebagaimana tabel 7.1.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No.	URAIAN	2021	2022	Pert. (%)	2023	Pert. (%)
4	PENDAPATAN	1.252.153.182.000	1.321.179.385.417	5,5	1.338.042.028.986	1,3
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.663.281.000	101.204.147.417	0,5	105.722.471.986	4,5
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.093.181.000	41.878.800.000		42.578.800.000	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.525.861.000	3.402.000.000		3.537.000.000	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.150.000.000	3.150.000.000		3.150.000.000	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.894.239.000	52.773.347.417		56.456.671.986	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.124.405.251.000	1.192.348.895.000	6	1.204.140.688.000	1,0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.071.930.616.000	1.139.332.978.000		1.148.240.616.000	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	884.025.773.000	947.670.039.000		952.744.419.000	
4.2.01.01.01	DBH	24.582.540.000	25.074.190.000		25.575.673.000	
4.2.01.01.02	DAU	635.281.531.000	693.950.923.000		693.950.923.000	
4.2.01.01.03	DAK-Fisik	91.169.460.000	92.992.849.000		94.852.705.000	
4.2.01.01.04	DAK-Non Fisk	132.992.233.000	135.652.077.000		138.365.118.000	
4.2.01.02	Dana Intensif Daerah	17.194.722.000	17.538.616.000		17.889.388.000	
4.2.01.05	Dana Desa	170.710.121.000	174.124.323.000		177.606.809.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	52.474.635.000	53.015.917.000	1	55.900.072.000	
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.084.650.000	27.626.343.000	2	28.178.869.000	2,0
5	BELANJA	1.338.581.226.819	1.338.533.949.000	-	1.365.304.628.000	2,0
5.1	BELANJA OPERASI	918.223.588.692	917.758.812.000	0,05	931.835.705.000	1,5
5.1.1	Belanja Pegawai	560.884.440.774	564.493.285.000		566.158.217.000	
5.1.2	Belanja Barang	308.698.293.614	309.316.927.000		315.374.540.000	

No.	URAIAN	2021	2022	Pert. (%)	2023	Pert. (%)
5.1.3	Belanja Bunga	4.035.000.000	4.350.000.000		4.350.000.000	
5.1.5	Belanja Hibah	29.296.855.000	29.296.855.000		30.181.619.000	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.308.999.304	10.301.745.000		15.771.329.000	
5.2	BELANJA MODAL	166.192.935.533	166.610.434.406	0,25	179.304.220.406	8,0
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	46.631.013.419	39.550.135.406		40.985.507.000	
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	82.059.719.915	83.700.914.000		90.537.923.000	
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.712.126.280	37.572.424.000		41.993.829.000	
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.786.961.220	5.786.961.000		5.786.961.000	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.002.742.594	5.002.742.594	-	5.002.742.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	249.161.960.000	249.161.960.000	-	249.161.960.000	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.208.043.000	4.208.043.000		4.208.043.000	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.953.917.000	244.953.917.000	-	244.953.917.000	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.428.044.819	36.217.275.588		63.678.814.050	93
	SELISIH	-	18.862.712.005		36.416.215.036	75

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah seperti yang diuraikan dalam tabel 7.1 diatas maka dirumuskan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Indikasi program-program ini disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya untuk melaksanakan program-program tersebut maka perlu pendanaan yang nampak dalam Pagu Indikatif tahunan.

Salah Satu yang harus dibiayai untuk Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM), mengatur ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar, Yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum,

Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Dan dari ke 6 (Enam) Substansi Pelayanan Dasar pada urusan Pemerintahan tersebut sebagian di tetapkan sebagai Standart Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri atas SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Berikut Jenis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) per Urusan/Bidang di Kabupaten Minahasa:

Tabel 7.2 Standart Pelayanan Minimal (SPM)

BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (S/D AKHIR PERIODE)
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	36,524,546,442
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18,897,190,083
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	2,738,233,500
PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan	187,131,466,715
KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	454,922,523,057
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOL-PP	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	39,848,075,200
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana	15,799,789,584
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	15,773,995,557

	DINAS SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial	1,416,670,400
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	344,167,600

Selain untuk pelaksanaan SPM, pendanaan juga diarahkan untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan serta untuk melaksanakan fungsi penunjang, yang pada akhirnya ditujukan bagi pencapaian Visi Kabupaten Minahasa periode 2018- 2023 yaitu **Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera**.

Selain untuk pelaksanaan SPM, Pendanaan juga memperhatikan 10 Program Unggulan dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yaitu:

1. Mapalus (Masyarakat Peduli dan tulus untuk sesama);
2. RR-RD (Rakyat Ramah, Rukun dan Damai);
3. RR-RD Tondano (Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Rekreasi Danau Tondano);
4. Sumikolah;
5. Lansia Sehat;
6. Rumah Tinggal Layak Huni;
7. Pemngembangan Infrastruktur;
8. Pertanian, Perikanan dan Pariwisata;
9. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Energi Terbarukan;
10. Birokrasi Handal dan Profesional.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun penentuan target kinerja program di masing-masing urusan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain. Penentuan Indikasi program prioritas dilakukan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Minahasa seperti yang telah digambarkan dalam bab-bab sebelumnya.

Adapun rumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 sesuai urusan dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Minahasa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1	BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.324	4	612	4	322	4	370	4	414	4	414	Dinas Pendidikan
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar	70%	100%	3.078	100%	20.378	100%	46.328	100%	60.328	100%	51.887	100%	51.887	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60,16%	66,10%		66,20%		85,5%		86,06%		86,7%		86,7%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang baik		100%	0	100%	6.496	100%	6,630	100%	6,630	100%	16,336	100%	16,336	Dinas Pendidikan
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,81%	84,1%		85,6%		86%			86,55%		87,45%		87,45%	
				Persentase Guru bersertifikasi pendidik	84,54%	86,24%		86,24%		88%			90%		95%		95%	
		5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan				22.369	100%	20	100%	43	100%	49	100%	49		Dinas Pendidikan
				Persentase Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memiliki ijin														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		BIDANG KESEHATAN															
1	2	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4		4	55,460	4	56,793	4	63,892	4	269,720	Dinas Kesehatan		
		2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	6,5	6,45	#####	6,69	##### #	6,87	112,953	6,9	101,233	7	127,084	7	523,892	Dinas Kesehatan
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,001	0,001		0,001		0,001		0,001		0,001		0,001		
				Persentase Rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,19%	108,22%		98,28%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,79%	97,06%		92,89%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,02%	104,3%		91,34%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	70,55%	96,73%		21,4%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,04%	94,79%		44,91%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	100,35%		40,89%		100%		100%		100%		100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	95,77%		58,96%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32,33%	105,17 %		118,58 %		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	103,94 %		96,61%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/a	111,26 %		47,89%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	43%	131,86 %		40,35%					100%		100%		100%		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	N/a	7,8%		15,30%				100%		100%		100%		100%	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5.35/1.000 KH	6.97/1.000 KH		1.5/1.000 KH				4.5/1.000 KH		4.3/1.000 KH		3.7/1.000 KH		3.7/1.000 KH	
		Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	61.7/100.000KH	102.56/100.000 KH		150.15/100.000 KH				107/100.000 KH		100/100.000 KH		96/100.000 KH		96/100.000 KH	
		Prevalensi Stunting	0,68%	1,63%		3,11%				13,5%		13%		12,5%		12,5%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87%	90%	92%		94%		96%		98%		98%		
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	92%	93%	94%		95%		96%		97%		97%		
			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	≥2	<2		≥2		≥2		≥2		≥2		
			Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	49,77	110,8	103		141		140		139		139		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Penderita diare yang ditangani	91,08%	92%	93%		94%		95%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Angka kejadian Malaria	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	
		Tingkat kematian akibat Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	83%	85%	88%	90%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan nifas	100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Nilai IKM Dinas Kesehatan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,1%	96,6%			86,36%		93%			94%		95%		95%	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	46,30%	50%			100%		100%			100%		100%		100%	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	8	8			0		6 akre 4 re-akre			1 akre 4 re-akre		8 re-akre		6 re-akre	
			Persentase Tenaga Kesehatan Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A			114,93%		N/A			N/A		N/A		N/A	
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan															Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Masyarakat Umum Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A	30,64%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
			Persentase Lansia Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A	26,13%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Anak 12-17 Tahun Mendapatkan Vaksin Covid-19 Lengkap	-	N/A	31%		N/A		N/A		N/A		N/A		Dinas Kesehatan
1	2	BIDANG KESEHATAN														
1	2	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4			4	16,976	4	20,564	4	22,621	4	16,856	RSUD Sam Ratulangi
		2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	100%		100%	78,360	100%	102,791	100%	113,071	100%	78,360	RSUD Sam Ratulangi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia	100%		100%	-		100%	4,906	100%	5,503	100%	6,053	100%	4,906	RSUD Sam Ratulangi	
1	3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	3	1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1-4)	4	4	6.840	4	6.824	4	8,318,	4	8,484	4	8.654	4	39.121	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	Program pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.0363	0,0394	3.493	0,0477	5.924	0,0525	3,203	0,0525	3,266	0,0525	3,331	0,0525	19,217	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	86,8%	88%		89%		91%		92%		94%		94%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	3	3	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan Air Minum	Persentase RT yang mendapatkan akses Terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukab jaringan perpipaan terlindungi terhadap RT diseluruh Kab.	78.6 %	81,05%	10.407	82,48%	6.369	83,66%	6,709	84,83%	6,456	85,99%	6,585	85,99%	36,526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Prosentase luas wilayah yang terlayani oleh sistem dan pengelolaan persampahan	7,43%	7,43%	0	10,57%	0	10,57%	0	20,34%	1,333	24,55 %	1,359	24,55 5	2,692	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	Program Pengelolaan Dan penegembangan Sistem air Limbah	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68.3%	69,1 %	5.938	69,78 %	4.932	70,07%	1,967	71,53%	3,000	72,99%	3,060	72,99%	18,897	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Panjang Drainase Primer Dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	52,15%	52,15%	150	52,15%	643	53,25%	415	54,30%	422	55,45%	430	55,45%	2,060	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	54 %	54 %			54 %		60%			62%		64%		64%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7	Program pengembangan permukiman	6,20%	6,20%	0	11,32%	36	15,10%	200	20,33%	250	25,95%	255	25,95%	705	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	8	Program penataan bangunan gedung	0,85	0,858	0	0,866	0	0,873	225	0,881	75	0,889	77	0,889	376	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Bangunan Ber-IMB	4%	1,57%		2%		1,80%		1,90%		2%		13,27%			
1	3	9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	82,50%	87,2%	0	90,5%	1.049	93.8	40	96,75%	250	100%	255	100%	159	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	3	10	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	61.35	65,16	43.144	69,42	42,592	70,10%	30,532	70,50%	31,611	72%	32,243	72%	180,022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	Program pengembangan Jasa Konstruksi	Ratio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%C	14	100%	0	100%	27	100%	25	100	26	100	775	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,2784	0,2784		0,2896		0,3189		0,3776		0,4657		0,4657		
1	3	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Prosentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N.A	N.A	479	N.A	720	100%	351	100%	1,297	100%	1.185	100%	4,184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4		BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	4	1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1-4)	4	4	2.430	4	2.503	4	2.504	4	3.106	4	3.181	4	13.724	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	N.A	N.A	0	N.A	0	N.A	11	93%	1.350	94%	1.500	94%	2.861	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	N.A	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	89%	90%	5.685	91%	7.250	92%	2.934	93%	2.348	94%	3.000	94%	21.217	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	4	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	30%	30%	0	27%	0	25%	0	23%	0	20%	500	20%	500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	N.A	91%	850	92%	350	93%	337	94%	358	95%	500	95%	2.395	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan, barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik						100%	4.280	100%	2.970	100%	4.346	100%	19,242	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	64%	64%	42%			76%	8.084	80%	7.279	90%	10.433	90%	6.346	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangun an	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	5	BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM SERTA PERLINDUN GAN MASYARAK AT																
1	5	1	Program Penunjang Pemerintah an Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah					4	6,266	4	8,058	4	8,856	4	0	Dinas Pemadam Kebakaran	
1	5	4	Program pencegahan, penanggulan gan, penyelamata n kebakaran dan penyelamata n non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92%	1.004	95%	8.139	-		85%	60	100%	303			Dinas Pemadam Kebakaran	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	33%	44%	1.004	60%	8.139	73%		86%	60	100%	303	100%	303	
				Waktu tanggap (respon time penanganan kebakaran)	9%	27%		45%		63%		81%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	6		BIDANG SOSIAL															
1	6	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4					4	2,419	4	2,419	4	2,419	4	7,312	Dinas Sosial
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial yang diberdayakan	100%	100%	45	100%	45	4	2,419	4	2,419	4	2,419	4	7,312	Dinas Sosial
1	6	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	22.28%	6.20%	694	10.83%	722	3.33%	45	7.66%	46	7.66%	47	57.96%	228	Dinas Sosial
1	6	4		Persentase meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	7,9%	9,5%		11,1%		12,8%		14,4%		16,1%		16,1%		
1	6	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) anak terlantar menerima jaminan social	100%	1224%	167	3469%	176	326%	50	0	200	0	204	12129%	1,870	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Persentase terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial	100%	100%			100%		100%			100%		100%		
			Presentase meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin	7,1%	10,7%			14,3%		18%			21,6%		25,3%		25,3%
			Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11.76%	17.64%			41.17%		64.7%			88.23%		100%		100%
	5	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah .I.,.	100%	100%	445	0	524	-	-	408%	50	408%	51	5509%	441	Dinas Sosial
	6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam pahlawan yang dikelola	2	2	192	2	131	1	500	1	400	1	408	7	1,877	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	5	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
		1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	4,112	4	5,628	4	4,640	4	14,381	Badan Penanggulangan Bencana	
		2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	2.689	100%	8.806	100%	517	100%	902	100%	2.884	100%	13.448	Badan Penanggulangan Bencana
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	342,110 jiwa	342,110 jiwa		343,564 jiwa		343,565 jiwa		343,566 jiwa		343,567 jiwa		343,567 jiwa		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	342,110 jiwa	50 jiwa	10.000 jiwa		343,565 jiwa		343,566 jiwa		343,567 jiwa		343,567 jiwa			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	342,110 jiwa	4245 jiwa	4600 jiwa		343,565 jiwa		343,565 jiwa		343,565 jiwa		343,565 jiwa			
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
2	7		BIDANG TENAGA KERJA														
2	7	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	4				4	2,349	4	2,720	4	3,308	4	3,308		Dinas Tenaga Kerja
2	7	2	Program hubungan industrial		-	0	-	0	15000 orang	3.024	15000 orang	3.033	15000 orang	3.083	15000 orang	3.083	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5.50%	7.50%	15%			33%		33%		53%		28.30%			
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	45	43	40			37		33		30		30			
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45	43	40			37		33		30		30			
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	55 %	70 %	90.4 %			91 %		92 %		93 %		87.28 %			
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS	0,66	0,89	0,90			0,91		0,91		0,92		0,92			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp				
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5.50%	7.50%	15%		33%		33%		53%		28.30%				
2	7	3		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan latihan kerja	64 orang	88 orang	2.415	208 orang	2.512	344 orang	3	384 orang	3	424 orang	4	1448 orang	15	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21%	24%		29.10%			33.33%		42.80%		43.70%		34.50%		
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.60%	0.82%		-3.97 %			2%		3%		5%		1.37%		
				Tingkat pengangguran terbuka	7,35	5,88		6,3			6,21		6		5,71		5,71		
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	68,6	72,6		71,4			74,2		81,00		81,5		81,5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%			100%		100%			100%		100%			
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%			100%		100%			100%		100%			
			Keselamatan dan perlindungan	6%	7%			9.50%		20%			30%		40%		21.30%	
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	300 orang	426 orang	165	445 orang	186	449 orang	188	502 orang	189	505 orang	192	2327 Orang	920.000	Dinas Tenaga Kerja
		5		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	4 perusahaan					5 perusahaan	82	5 perusahaan	83	5 perusahaan	88	25 perusahaan	406	Dinas Tenaga Kerja
				Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	300 orang	426 orang	165	445 orang	186	449 orang	188	502 orang	189	505 orang	192	2327 Orang	920	
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3						5 perusahaan	82	5 perusahaan	83	5 perusahaan	88	25 perusahaan	406	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD													
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp												
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17											
				Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	80%	100%			36.70%			100%			100%			100%					87,34 %				
				Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	68,6	72,6			74,8			74,2			81			81,5						81.5			
		6	Program perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	85%	88%			88%			94%			94%	1		100%			1			92.80%		1	Dinas Tenaga Kerja
2	8		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
2	8	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4							4	600		4	650		4	700				4	700			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender) pada belanja langsung APBD	-	25 Kec	850	25 Kec	1.025	25 Kec	1,120	25 Kec	1,225	25 Kec	1,330	25 Kec	4,350	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per seratus ribu penduduk perempuan)	0.03	0.03	0	0.04	0	0.03%	0	0.04%	0	0.013%	0	0.013%	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		4	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan	2	2	47	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		5	Program pengelolaan sistim data gender dan anak	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat kabupaten kota	-	6	825	6	950	11	1.040	30	30	34	1.260	34	5.225	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	6	Program Pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	3	0	3	0	3	0	5	30	10	60	10	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	7	Program Perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	-	0	100%	975	100%	1,105	100%	1.205	100%	1.300	100%	1.390	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4				4	2.999	400%	3.003	4	3.003	4	9,005	Dinas Pangan	
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan	25%	-	-	-	-	30%	4	30.50%	23	-	-	40%	27	Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi	60%	65%	807	-	-	75%	202	80%	199	80%	199	80%	1.407	Dinas Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota	10%	25%	-	-	8	25%	7	30%	36	35%	39	35%	90	Dinas Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan mutu pangan segar	-	25%	-	-	-	35%	3	40%	24	45%	24	45%	51	Dinas Pangan
2	11		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1-4)	4	4	3.266	4	3.374	4	3.488	4	3.870	4	3.901	4	17.899	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase penyediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	2.203	100%	45	100%	225	100%	0	100%	0	100%	2,473	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,29	65,18	1.893	72,82	7.829	60,11	4,215	60,27	4.491	60,29	4,581	60,29	23.009	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	Presentase keanekaragaman hayati terpelihara.	n.a	n.a	0	n.a	0	n.a	0	n.a	0	50%	10	50%	10	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase pengendalian penerbitan ijin B3 dan LB3	n.a	n.a	0	51%	10	52%	10	53%	9	54%	11	54%	41	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Presentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/kota	65%	65%	0	66%	30	67%	40	68%	40	69%	41	69%	151	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11	07	Program pengakuan keberadaan MHA, Kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase keberadaan MHA, Kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	n.a	n.a	0	- n.a	0	n.a	0	n.a	0	50%	10	50%	10	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	n.a	n.a	-	n.a	-	45%	10	46%	10	47%	10	47%	30	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	n.a	n.a	0	n.a	0	1 penghargaan	50	1 penghargaan	50	1 penghargaan	51	3 penghargaan	151	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	-	100%	-	100%	-	56%	20	57%	20	58%	20	58%	60	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah di kab. (penanganan dan pengurangan sampah)	73%	73%	6.907	80%	6.055	75%	6,600	74%	10.297	73%	10.503	73%	40.362	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
2	12	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	7,062	4	8,271	4	8,732	4	8,685	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	96%	98%	2.718	98%	2.892	96%	3,181	97%	118	98%	3,840	98%	3,972	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	96%	98%	2.718	98%	2.892	96%	3,181	97%	118	98%	3,840	98%	3,972	
				Persentase anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akte perkawinan, perceraian, kematian dan penyajian data kependudukan	75%	80%	537	85%	596	87%	685	90%	776	93%	838	93S%	863	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Tersedianya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase PD, Kantor, Badan yang terkoneksi update dengan Database Kependudukan	100%	100%	2.875	100%	2.909	100%	2.825	100%	167	100%	1.722	100%	2.058	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	0%	0%		0%		25%		50%		75%		75%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD, Kantor, Badan yang terkoneksi update dengan Database Kependudukan	ada	-	500	ada	550	ada	650	ada	800	75%	850	75%	850	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
2	13	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	3,872	4	3,593	4	0	4	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa		-	0	-	0	-	0	100%	0	100%	160	100%	160	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		3	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama		-	0	-	0	-	0	24,6%	25	25,5%	47	25,5%	72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pegentasan desa tertinggal	33,48%	59,21%	100%		0	0		0	0		0			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp				
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Persentase peningkatan status desa mandiri	0	16.66%			45.34%			43,69%	49,58%		57,98%		57,98%		
2	13	4		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	-	9.69%	0	9.69%	0	14.53%	2,712	19.38%	2.152	24.22%	3.404	24.22%	8.269	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	72,20%	72,20%			90,42%			90,42%	90,63%		90,85%		90,85%		
		5		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	0	100%	0	100%	1.499	100%	1.550	100%	1.970	100%	5.021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.08	1.08			1.08			1.08	1.08		1.08		1.08		
				Persentase LPM Berprestasi	-	1,48%			1,48%			1,48%	2,96%		4,4%		4,4%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase PKK aktif														
2	14			BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2	14	1		Program Penunjang Pemerintahan Daerah					4	6,244,	4	3,694	4	3,805	4	11,125	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2	14	2		Program Pengendalian Penduduk	2,06	2,06	-	2,08	-	20.8	65	209 TFR	50	2,1	51	2,1	751	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	3		Program Pembinaan Keluarga Berencana	79,54%	79,94%	-	80,34%	-	80,74%	5.128	81,14%	6,188	81,54%	6.374	81,54%	17.691	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	200 Org	400 Org		600 Org	0	800 Org		1000 Org		1080 Org	90	1080 Org	-	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Median Usia kawin pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	20	-	0	-	0	21	19	21	50	21	51	21	120	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2	9	BIDANG PERHUBUNGAN																
2	9	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (score 1 - 4)	4	4	6.444	4	6.769	4	6.196	4	6.356	4	6.122	4	31.887	Dinas Perhubungan
2	9	2	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks konektivitas angkutan jalan	85 %	85 %	364	85,7 %	439	90 %	222	92,5 %	22	95 %	26	95 %	1.073	Dinas Perhubungan
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota (VC Ratio Jalan Kabupaten)	0,70	0,7		0,74		0,78		0,83		0,85		0,85		
			Program pengelolaan pelayaran	Indeks konektivitas angkutan sungai, danau dan laut	25%	25 %	0	25 %	450	50 %	0	50 %	0	55 %	357	55 %	807	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	16																	
2	16	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4					4	3,598	4	3,534	4	5,000	4	12,941	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	Program Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik yang di selenggarakan secara online dan integrasi	50%	60%	2.263	73%	1.581	80%	1,305	86%	1,800	91%	4,500	91%	7,119	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	5%	5%		30%		60%		75%		100%		100%		
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	4%	8%		20%		63%		74%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					13%	18%		25%		30%		60%		70%		70%		
2	16	3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	57%	63%	0	68%	0	74%	6,400	86%	0	92%	200	92%	256	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program penyelenggaraan statistic sektoral	Presentase penyelenggaraan statistik sektoral	-	-	0	-	0	-	0	-	8,000	-	0			
			Program Aplikasi Informatika	Persentase pelaksanaan E-Government Pemerintah Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	357,	-	0			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	-	-	-	4	2.759	4	2.792	4	3.041	4	8.592	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan izin	10 Koperasi	10 Koperasi	-	10 Koperasi	-	10 Koperasi	2	10 Koperasi	3	50 Koperasi	5	Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi Terawasi dalam hal kepatuhan dan pelaporan	25 Koperasi	25 Koperasi	119	25 Koperasi	-	25 Koperasi	6	25 Koperasi	6	125 Koperasi	131	Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang sehat dan mandiri	25 Koperasi	25 Koperasi	-	25 Koperasi	41	25 Koperasi	-	25 Koperasi	16	25 Koperasi	18	125 Koperasi	75	Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Prosentase Koperasi binaan Kabupaten yang mengikuti diklat	1.70%	-	-	-	-	1.70%	27	1.70%	30	1.70%	33	85%	90	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Kopersai Yang Berkualitas	25 Koperasi	25 Koperasi	-	25 Koperasi	-	25 Koperasi	-	-	25 Koperasi	52	125 Kop	52	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	0.254%	0.254%	145	-	-	0.313%	32	0.336%	39	0.376%	154	0.406%	370	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase jumlah UMKM yang terfasilitasi	0.063%	0.063%	104	0,076%	592	-	-	0.006%	83	0.114%	95	0.114%	874	Dinas Koperasi dan UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	-	-	-	-	-	4	3.136	4	3.135	4	2.873	4	9.144	PTSP
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25%	25%	128	-	-	-	-	-	-	25%	175	25%	303	PTSP
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pameran Investasi	20%	20%	85	-	-	20%	150	17%	150	10%	120	84%	505	PTSP
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM terhadap layanan publik	203.3	203,36	30	203,39	12	203.42	90	203.45	90	203.50	140	203.50	362	PTSP
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	23%	23%	3	18%	10	27%	323	17%	323	10%	23	95%	682	PTSP
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi Secara Elektronik	25%	25%	61	25%	16	25%	90	25%	16	25%	100	25%	283	PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	19																	
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4					4	-	4	2,625	4	2,739	4	5.364	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		10%	0	15%	321	20%	431	25%	750	25%	408	25%	416	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		3	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	42%	41%	6.237	43%	953	59%	1,578	65%	280	75%	5,057	75%	14.107	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemesyarakatan	10%	10%	0	20%	0	25%	0	30%	200	35%	0	35%	200	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	22		BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score1-4)	4	4	3.174	4	2.904	4	3,213	4	3,230	4	3,294,	4	15,815,	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian warisan budaya	41,86 %	76,14%	45	83,10%	73	84,14%	157.	83,89%	152	83,55 %	89	83,55 %	516	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	3	Program Pengembangan kesenian Tradisional	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	55,56 %	66,67 %	542	66,67 %	562	66,67%	2	70%	2	70%	89	70%	1.197	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	5	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	35,29 %	77,22%	45	84,21 %	73	82,35%	157	83,45 %	152	84,51%	89	84,51%	516	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	6	Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	n.a	n.a	-	n.a	-	n.a	-	n.a	-	100 %	20	100 %	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	23		BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	536	4	507	4	168	4	2,430	4	593	4	593	Dinas Perpustakaan
		2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1%	2%	30	3%	41	3%	91	4%	70	5%	2,325	5%	4,291	Dinas Perpustakaan
				Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,98%	3,44%		3,72%		N/A		N/A		N/A		N/A		
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2.50%	3.20%		3.38%		4.12%		4.15%		4.72%		4.72%		
			Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno Yang diakuisisi dialihmediakan	0	0		0		0		0	0	0		0		Dinas Perpustakaan
		3		Tingkat	0.21%					0.50%	30	0.90%	40	1%	225	1%	404	Dinas Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Program pengolahan kearsipan	ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban		0.21%		0.21%										
		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat							0.21%	0	0.50%		0.50%			Dinas Perpustakaan
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4					4	3.389	4	3.111	4	3.228	4	9.728	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	52.284	50.000	850	24.922	1.258	25.000	1.596	26.000	996	26.000	1.062	151.922	5.763	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	55.701	55.000	830	26.538	1.810	27.000	1.262	30.000	1.236	30.000	1.119	169.038	6.257	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	102	75%	102	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN (TON)	296	400	-	286	-	290	90	300	90	300	-	1.576	180	Dinas Kelautan dan Perikanan
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
			Program Peningkatan daya Tarik	Kontribusi Sektor Pariwisata	7.558 Miliar	10.989 M	2.357	5.905 M	3.778	8.020 M	74	8.181 M	151	8.344 M	1.218	8.344 M	7.578	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Destinasi Pariwisata	Terhadap PAD Kabupaten															
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,98%	6,53%		-20,04%		1 %		2 %		3 %		3 %			
	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	13,83 %	80,96%	611	-97,41%	1.224	4,98%	780	5,01%	469	6,00%	969	6,00%	4.053		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	14,99 %	52,89%		-86,49%		10,00%		15,00%		36,60%		36,60%			
		Tingkat Hunian Akomodasi	61,96%	65,39%		65,39%		54,88%		63,19%		68,27%		68,27%			
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaannya intelektualnya	N.A	N.A	-	0 %	-	0 %	-	50 %	200	50 %	200	14,29%	400		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	N.A	32 %	738	30 %	753	0 %	0	10 %	0	28 %	530	100 %	2.021		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan stake holder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	4				4	16.770	4	17.217	4	17.659	4	51.646	Dinas Pertanian	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	1%	2%	1.899	2%	1.530	2%	608	2%	1.569	3%	1.715	3%	7.321	Dinas Pertanian
				Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	2%	2%		2%		2%		4%		4%		4%		
				Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	8%	10%		10%		13%		19%		21%		21%		
				Persentase Peningkatan Populasi Peternakan	1%	2%		2%		3%		5%		6%		6%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana yang digunakan	100%	100%	4.384	100%	1.651	100%	4.370	100%	2.055	100%	2.340	100%	14.800	Dinas Pertanian
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase fasilitasi penanggulangan kasus penyakit hewan menular	70.87%	72,23%	431	72,70%	271	73.46%	100	74.50%	308	77.47%	384	77.47%	4.957	Dinas Pertanian
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan teknologi yang diterapkan oleh petani	60%	65%	381	70%	145	75%	708	80%	1.257	85%	757	85%	3.248	Dinas Pertanian
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
3	29		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dalam Kabupaten yang dikelola	-	100%	123	100%	179	100%	60	100%	40	100%	41	100%	443	Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kepuasan stake holder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	4	-	-	-	-	4	4.030	4	4.030	4	4.289	4	12.349	Dinas Perdagangan
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP Toko swalayan	15%	15%	-	15%	-	15%	-	15%	-	20%	20	20%	20	Dinas Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten	100%	100%	5.554	-	-	100%	1.671	100%	1.616	100%	1.648	100%	10.489	Dinas Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi	3.52%	3.52%	70	-	-	2.72%	216	2.73%	225	2.73%	330	2.73%	841	Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2		3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk berkualitas ekspor yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	150	5 Kegiatan	150	Dinas Perdagangan	
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	-	3.20%	939	3.20%	38	3.20%	6	5%	16	5%	16	5%	1.015	Dinas Perdagangan
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Terciptanya Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	50	20%	50	Dinas Perdagangan	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	0.9%	0.9%	215	-	-	2.50%	1.920	3%	700	4%	714	-	3.549	Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (UI) kecil dan industri menengah, jumlah izin perluasan industri (IPU) kecil dan industri menengah, jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya dikeluarkan instansi terkait di daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	70	100%	70	Dinas Perdagangan
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	20	40%	20	Dinas Perdagangan
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	1		UNSUR SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	15,493	4	50,601	4	61,351	4	117,125	Sekretariat Daerah	
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah	100%	100%	3.003	100%	2.871	100%	1.040	100%	1,352	100%	1,487	100%	9.755	Sekretariat Daerah
4	1		Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan perekonomian	100%	100%	1.353	100%	424	100%	563	100%	589	100%	647	100%	3.578	Sekretariat Daerah
1			UNSUR SEKRETARIAT DPRD															
1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	10,830	4	27,297	4	14,731	4	14,731	Sekretariat DPRD	
2	3		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	98%	98%	26.515	98%	29.078	99%	18.543	-	9.202	99%	42.596	99%	42.596	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen			13 Dokumen			14 Dokumen			15 Dokumen		
		Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	4 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen			5 Dokumen			5 Dokumen			6 Dokumen		
		Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD dalam menjalankan Pkan fungsinya	100%	100%			100%			100%			100%			100%		
		Presentase fasilitas penyelenggaraan pelayanan kepada anggota DPRD	90%	100%			100%			96%			98%			98%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			dalam menjalankan fungsinya														
			Jumlah Ranperda (Ranperda eksekutif dan Ranperda Inisiatif) yang difasilitasi	9 Ranperda	9 Ranperda	9 Ranperda	9 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	56 Ranperda			
			Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran setwan DPRD	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			
			Nilai IKM Sekretariat DPRD	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	B	B			
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
			UNSUR PERENCANAAN														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	5.115	4	4.245	4	5,282	4	5,167	4	5,447	4	5,447	Bappelitbangda
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan perda, perkara dan atau keputusan kepala daerah			1139		394	100%	950	100%	465	100%	724	100%	724	Bappelitbangda
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronkan			320		52	100%	775	100%	773	100%	810	100%	810	Bappelitbangda
5	05	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN															
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	Persentase dokumen litbang sebagai bahan rekomendasi pembangunan daerah		0	0	100%	100	100%	200	100%	200	100%	332	100%	332	Bappelitbangda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	2		UNSUR KEUANGAN															
5	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	4	-	-	-	4	31.424	4	33.145	4	37.330	4	106.245	BPKAD	
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	269.819	100%	259.870	100%	268.630	100%	796.997	BPKAD
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan BMD Perangkat Daerah Sesuai aturan	100%	100%	-	100%	-	100%	701	100%	1.180	100%	1.335	100%	3,179	BPKAD
5	2		UNSUR KEUANGAN															
			BPP-RETDA															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	4				4	14.928	4	14.984	4	15.123	4	45.035	BPP-RETDA	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah	100%	100%	4.123	100%	2.979	100%	2.041	100%	2.072	100%	2.274	100%	13.619	BPP-RETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	12%	11%	-	2%	-	2.50%		3%		3.50%		22%		BPP-RETDA	
3	UNSUR KEPEGAWAIAN																
3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	-	4	3,960	4	0	4	0	BKPSDM	
	2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		-	0	9,57%	9.675	9,65%	741	9,73%	771	9,81%	950	9,81%	950	BKPSDM
		UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi 9%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		-	0	9,57%	1.400	9,65%	1.800	9,73%	1.581	9,81%	4.900	9,81%	BKPSDM	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		UNSUR PENGAWASAN															
1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4				4	9,655	4	9,823	4	10,397	4	44,698		Inspektorat Daerah
1	2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	72%	73	2.146	73	1.464	73%	1.141	82%	1.116	83%	1.340	84%	7.342	Inspektorat Daerah
			Jumlah Temuan BPK	23	20		20		18		14		13		12		Inspektorat Daerah
			Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*	0	-		-		6		40		50		75		Inspektorat Daerah
			Persentase pelanggaran pegawai*	0	-		0		0		0		0		0		Inspektorat Daerah
1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 1	Level 1	135	Level 2	159	Level 2	321	Level 2	175	Level 3	388	Level 3	1.357	Inspektorat Daerah
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 2		Level 2		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	-	-	-	-	-	-	-	2		4		8		Inspektorat Daerah		
		Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	-	-	-	-	-	-	-	2		4		8		Inspektorat Daerah		
		UNSUR KEWILAYAHAN																
Kecamatan Tondano Barat																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	4.729	4	4.729	4	5,505	4	5,550	4	5,661	4	5,661	Kec. Tondano Barat
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	90%	15	90%	15	0	0	100%	15	100%	16	100%	16	Kec. Tondano Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	0	0	0	0	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	Kec. Tondano Barat
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	95%	15	95%	15	0	0	100%	15	100%	16	100%	16	Kec. Tondano Barat
Tondano Timur																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.176	4	1.177	4	5,533	4	5,580	4	5,720	4	29,749	Tondano Timur
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	8	100%	8	100%	11	100%	15	100%	15	100%	74	Tondano Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	18	100%	18	100%	0	100%	11	100%	13	100%	23	Tondano Timur
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	37	100%	37	100%	11	100%	13	100%	13	100%	69	Tondano Timur
Tondano Utara																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	728	4	779	4	4,174	4	4,239	4	4,324	4	4,324	Tondano Utara
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	21		22	100%	11	100%	15	100%	15	100%	15	Tondano Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	116	100%	132	100%	11	100%	15	1000%	15	100%	15	Tondano Utara
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	29	100%	31	100%	0	100%	15	100%	15	100%	15	Tondano Utara
Tondano Selatan																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	5.235	4	4.289	4	3.589	4	3.589	4	3.678	4	3.678	Tondano Selatan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	20	100%	14	100%	10	100%	13	100%	15	100%	15	Tondano Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	20	100%	14	100%	0	100%	0	100%	7	100%	7	Tondano Selatan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	20	100%	14	100%	10	100%	13	100%	15	100%	15	Tondano Selatan
Kecamatan ERIS																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.073	4	1.765	4	1.640	4	1.694	4	1.736	4	1.736	ERIS
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	14	100%	16	100%	11	100%	11	100%	11	100%	11	ERIS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	19	100%	8	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	ERIS
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	19	100%	1	100%	7	100%	7	100%	8	100%	8	ERIS
Kecamatan Remboken																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.644	4	2.235	4	2.284	4	2.318	4	2.375	4	2.375	Remboken
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	18	100%	18	100%	5	100%	10	100%	11	100%	11	Remboken

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	16	100%	12	100%	5	100%	10	100%	11	100%	11	Remboken
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	25	100%	15	100%	5	100%	10	100%	11	100%	11	Remboken
Kecamatan Kombi																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	254	4	204	4	2,142	4	2,114	4	2,167	4	2,167	Kab.Minahasa, Kec.Kombi
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	99%	0	0	0	0	100%	7	100%	8	100%	21	100%	21	Kec.Kombi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	0	0	0	0	100%	0	100%	25	100%	21	100%	21	Kec.Kombi
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	25	100%	10	100%	9	100%	15	100%	16	100%	16	Kec.Kombi
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	0	0	0	0	0	0	0	8	1100%	8	100%1	8	Kec.Kombi
Lembean Timur																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	113	4	124	4	2,138	4	2,185	4	2,241	4	2,241	Lembean Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	13	100%	14	100%	20	100%	15	100%	18	100%	18	Lembean Timur
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	5	100%	6	100%	5	100%	12	100%	13	100%	13	Lembean Timur
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	7	100%	8	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	Lembean Timur
Kecamatan Kakas																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.099	4	2.114	4	2.187	4	2.240	4	2.277	4	2.277	Kec.Kakas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	20	100%	13	100%	7	100%	10	100%	10	100%	10	Kec.Kakas
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	17	100%	11	100%	0	0	6	100%	5	100%	5	Kec.Kakas
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	19	100%	15	100%	8	100%	7	100%	6	100%	6	Kec.Kakas
Kecamatan Kakas Barat																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.023	4	1.108	4	2,284	4	2,318	4	2,375	4	2,375	Kakas Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	0	0	90%	10	100%	5	100%	10	100%	11	100%	11	Kakas Barat
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	0.63%	14	0.64%	16	100%	5	100%	10	100%	11	100%	11	Kakas Barat
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	80%	24	82%	26	100%	5	100%	10	100%	11	100%	11	Kakas Barat
Kecamatan Pineleng																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.033	4	2.062	4	1,678	4	1,711	4	1,745	4	1,745	Pineleng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	19	100%	14	100%	14	100%	15	100%	15	Pineleng
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	15	100%	14	100%	29	100%	29	100%	29	Pineleng
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	24	100%	20	100%	16	100%	16	100%	16	100%	16	Pineleng
Kecamatan Mandolang																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.545	4	1.547	4	1.550	4	1.598	4	1.638	4	7,513	Mandolang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	24	100%	10	100%	10	100%	15	100%	69	Mandolang
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	15	100%	9	100%	10	100%	15	100%	59	Mandolang
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	80%	24	82%	26	100%	10	100%	10	100%	15	100%	74	Mandolang
Kecamatan Tombulu																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.751	4	1.787	4	1.761	4	1.785	4	1.829	4	1.829	Tombulu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	19	100%	19	100%	20	100%	16	100%	16	100%	16	Tombulu
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%	14	Tombulu
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	0	19	100%	19	100%	0	100%	16	100%	16	100%	16	Tombulu
Tombariri																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.591	4	1.624	4	1.454	4	1.454	4	1.454	4	1.621	Tombariri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	16	100%	18	Tombariri
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	11	100%	11	100%	11	100%	11	100%	12	100%	15	Tombariri
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	13	100%	13	100%	13	100%	13	100%	14	100%	18	Tombariri
Kecamatan Tombariri Timur																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.618	4	1.546	4	1.258	4	1.380	4	1.408	4	7.136	Kecamatan Tombariri Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	19	100%	20	100%	8	100%	8	100%	72	Kecamatan Tombariri Timur
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	14	100%	8	100%	8	100%	8	100%	50	Kecamatan Tombariri Timur
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	24	100%	19	100%	7	100%	7	100%	7	100%	58	Kecamatan Tombariri Timur
Kecamatan Sonder																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.900	4	2.950	4	1.767	4	2.074	4	2.116	4	2.116	Sonder

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	19	100%	24	100%	10	100%	15	100%	15	100%	82	Sonder
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	62%	14	63%	15	100%	28	100%	5	100%	10	100%	40	Sonder
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	0	0	0	0	100%	21	100%	15	100%	15	100%	69	Sonder
Kecamatan Kawangkoan																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	736	4	943	4	3,069	4	4,011	4	4,092	4	4,092	Kecamatan Kawangkoan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	0	0	100%	10	100%	7	100%	15	100%	15	100%	15	Kecamatan Kawangkoan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	20	100%	21	100%	16	100%	15	100%	15	100%	15	Kecamatan Kawangkoan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	20	100%	21	100%	7	100%	15	100%	15	100%	15	Kecamatan Kawangkoan
Kawangkoan Utara																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.900	4	2.950	4	2,996	4	3,022	4	3,422	4	3,022	Kawangkoan Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	18	100%	18	Kawangkoan Utara
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	10	100%	10	100%	9	100%	10	100%	15	100%	15	Kawangkoan Utara
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	18	100%	10	Kawangkoan Utara
Kawangkoan Barat																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.211	4	1.222	4	1.451	4	1.593	4	1.632	4	1.632	Kawangkoan Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	0	0	98%	10	100%	14	100%	15	100%	15	100%	15	Kawangkoan Barat
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	12	100%	13	100%	14	100%	10	100%	11	100%	11	Kawangkoan Barat
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	98%	18	98%	18	100%	9	100%	15	100%	16	100%	16	Kawangkoan Barat
Kec.Tompaso																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	95%	1.516	95%	1.543	95%	1,489	95%	1,538	95%	1,570	95%	1,570	Kec.Tompaso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	15	100%	15	100%	16	100%	16	100%	16	Kec.Tompaso
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	10	100%	10	100%	11	100%	11	100%	11	Kec.Tompaso
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	24	100%	15	100%	15	100%	16	100%	16	100%	16	Kec.Tompaso
Kecamatan Tompaso Barat																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.269	4	1.270	4	1,376	4	1,376	4	1,410	4	1,410	Tompaso Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	26	100%	17	100%	18	100%	18	100%	18	Tompaso Barat
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	80%	16	80%	16	100%	13	100%	15	100%	15	100%	15	Tompaso Barat
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	80%	24	82%	26	100%	18	100%	18	100%	18	100%	18	Tompaso Barat
Langowan Timur																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	2.001	4	1.952	4	1,756	4	1,794	4	1,841	4	1,873	Langowan Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	20	100%	18	100%	11	100%	11	100%	11	100%	14	Langowan Timur
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	13	100%	13	100%	11	100%	11	100%	11	100%	12	Langowan Timur
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	24	100%	15	100%	11	100%	11	100%	11	100%	15	Langowan Timur
Kecamatan Langowan Barat																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.700	4	1.800	4	1,999	4	2,029	4	2,065	4	2.065	Kecamatan Langowan Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	90%	15	90%	15	100%	10	100%	15	100%	15	100%	82	Kecamatan Langowan Barat
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	90%	18	90%	18	100%	0	100%	5	100%	10	100%	40	Kecamatan Langowan Barat
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	90%	11	90%	11	100%	0	100%	15	100%	15	100%	69	Kecamatan Langowan Barat
Langowan Selatan																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.945	4	1.716	4	1.792	4	1.809	4	1.856	4	1.856	Langowan Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	19	100%	9	100%	16	100%	12	100%	12	Langowan Selatan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	16	0	0	100%	21	100%	14	100%	14	Langowan Selatan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	24	100%	15	100%	6	100%	8	100%	8	100%	8	Langowan Selatan
Kecamatan Langowan Utara																		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	1.858	4	1.732	4	1.563	4	1.608	4	1.640	4	1.640	Kecamatan Langowan Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	24	100%	18	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Langowan Utara	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	14	100%	10	0	0	0	100%	9	100%	15	Kecamatan Langowan Utara	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	24	100%	15	100%	11	100%	15	0	0	0	Kecamatan Langowan Utara	
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
			Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4					4	3,626	4	3432	4	3,524	4	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	92%	0	94%	0	94%	0	96%	0	98%	0	100%	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Kegiatan/Sosialisasi mengenai peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		0,82	119	0,64	0	82%	119	64%	0	85%	0	76%	525	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		75%	0	80%	0	75%	0	80%	0	85%	1.000	90%	1.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Sosialisai /kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0,75	1669	0,8	113	75%	1.669	80%	113	85%	25	90%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kegiatan /Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		100%	1.186	100%	295	100%	1.186	100%	295	100%	2,369	100%	1,509	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diukur melalui indikator kinerja daerah sesuai sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja daerah inilah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Daerah dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Bupati dan Wakil Bupati karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2018-2023.

Penetapan Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis pembangunan jangka menengah sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati disajikan sebagaimana Tabel 8.1.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Capaian Tahun		Target Capaian		
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Harapan Hidup	70,98	71,08	71,18	71,39	71,69
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,58	9,59	9,73	9,85	10,01
3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,66	99,83	99,85	99,87	99,90
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	96,76%	95,76%	96,31%	96,34%	96,37%
5	Meningkatnya nilai cluster terhadap implementasi kabupaten layak anak	KLA Pratama (550 – 600)	-	KLA Pratama (550 – 600)	KLA Nindya (750 – 800)	KLA Madya (800 – 900)
6	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan	4,99	2,16	3,10	3,8	4,5

NO	Indikator	Capaian Tahun		Target Capaian		
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kehutanan					
7	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,53	-20,04	1	2	3
8	Nilai Investasi	1.710.545.982.000	862.100.000.000	750.000.000.000	900.000.000.000	1.000.000.000.000
9	Rasio ketergantungan	46,33	46,53	46,51	46,49	46,47
10	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	75%	62,5%	68,8%	75%	81,3%
11	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	71,05%	73%	74%	77%	80%
12	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	85%	86%	87%	87%	88%
13	Persentase peningkatan status desa mandiri	16.66%	45.34%	43,69%	49,58%	57,98%
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,29	72,82	60,11	60,21	60,29
15	Indeks risiko bencana	143,85	205,50	200,50	195,50	190,50
16	Tingkat Kemiskinan	7,18	7,3	7,3-7,0	7,0-6,7	6,7-5,9
17	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,88	6,3	6,21	6	5,71
18	Persentase masyarakat mendapatkan pembinaan karakter, budaya, tumbuhnya jiwa patriotisme, prestasi, dan profesionalitas	92%	94%	98%	98%	100%
19	Persentase fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	80%	80%	85%	90%	100%
20	Persentase Partisipasi Pemilih	64%	76%	-	-	-
21	Indeks keterbukaan Informasi Publik	-	-	86	86,5	87
22	Indeks Integritas	-	-	72,98	76,58	80,11
23	Opini BPK atas laporan keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Tingkat sistem akuntabilitas	CC	B	BB	BB	BB

NO	Indikator	Capaian Tahun		Target Capaian		
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kinerja instansi pemerintah					
25	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

8.2. Penetapan Indikator kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Minahasa, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan PDRB	6.15	5.77	-1.03	3,0-4,0	4,0-5,0	6,0	6,0		
2	Laju Inflasi	3.83	3.52	-0.18	2 (+/- 0,75)	2 (+/- 0,75)	2 (+/- 0,75)	2 (+/- 0,75)		
3	PDRB per kapita	46.62	50.04	50.18	52,32	55,05	58,48	58,48		
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92.7	92,82	92.7	92.7-93	93-93.3	93.3-94.1	93.3-94.1		
5	Jumlah Penduduk Miskin	24.490	24320	24950	24765	24173	23571	23571		
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.97	75.47	75.29	75-76	76-77	77-78	77-78		
7	Angka melek huruf	99,69	99,65	99.75	99,89	99,99	99.99	99.99		
8	Angka rata-rata lama sekolah	9,56	9,58	9,59	9,73	9,85	10,01	10,01	IKU Dinas Pendidikan	
9	Angka usia harapan hidup	70.67	70.98	71.08	71,18	71,39	71,69	71,69	IKU Dinas Kesehatan	
10	Persentase balita gizi buruk	0.004	0.013	0	0	0	0	0		
11	Prevalensi balita gizi kurang	17.5	1.84%	0.74%	16	15.8	15.5	15.5		
12	Cakupan desa siaga aktif	71.11 %	66.94 %	66.94%	85 %	90 %	95 %	95 %		
13	Angka partisipasi angkatan kerja	60.83	174.024	168.854	62.14	62.52	62.97	62.97		
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60.83	66,11 %	63,37 %	62.14	62.52	62.97	62.97		
15	Tingkat Pengangguran terbuka	7.35	5.88	6.3	6.21	6	5.71	5.71		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
16	Rasio penduduk yang bekerja	93.09	161.225	158.917	95.17	95.26	95.34	95.30		
17	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	5.57	5,98	6,38	6.82	7.32	7.90	7.90		
18	Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	60.83	60,52	60,40	60.47	60.72	60.72	61.15		
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	70.10	77,51	78,66	79.53	80.15	80.50	80.50		
20	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	0.62	N/a	N/a	1.630	1.630	1.630	21.655		
21	Persentase PAD terhadap pendapatan	8%	7,65%	9,48%	9%	9%	10%	10%		
22	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,3	92.7	92.3	92,9	93,2	93,4	93,4		
24	Penguatan Cadangan Pangan	0		0	5Ton	5 Ton	5Ton	20 Ton		
25	Penanganan daerah rawan pangan	120 Desa	15 Desa	7 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	100 Desa		
26	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan									
	1. Padi Sawah (ton)	32.000	47.691	53.403	55.616	58.388	60.683	60.683		
	2. Jagung (ton)	120.000	134.981	181.037	187.294	193.631	203.440	203.440		
	3. Kacang	419	431	768	780	800	820	820		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Tanah (ton)									
27	Hortikultura									
	1. Bawang Merah (ton)	1.381	519	1.561	1.680	1.813	1.907	1.907		
	2. Cabe Rawit (ton)	2.978	1.508	2.692	2.799	2.930	3.076	3.076		
	3. Cabe Keriting (ton)	1.428	1.641	2.726	2.917	3.125	3.371	3.371		
	4. Tomat (ton)	5.807	7.214	10.338	10.641	11.020	11.484	11.484		
28	Produksi sektor perkebunan									
	1. Kelapa (Ton)	21.348	22.530	16.808	17.901	19.743	22.302	22.302		
	2. Cengkih (Ton)	14.571	2.314	3.021	3.759	5.296	7.658	7.658		
	3. Kopi (Ton)	132	36	46	51	57	65	65		
29	Produksi Sektor Peternakan									
	Sapi (kg)	359.410	366.598	367.718	375.072	382.573	390.224	390.224		
	Babi (kg)	7.134.400	7.196.000	7.277.060	7.495.376	7.870.184	8.421.056	8.421.056		
	Ayam Pedaging (kg)	2.300.595	2.371.745	2.380.744	2.499.782	2.674.766	2.942.244	2.942.244		
29	Kontribusi sektor pertumbuhan terhadap PDRB (Juta)	746.435	799.734,6	785.634,6	785.634,7	785.634,8	785.635,2	785.635,2		
30	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Pariwisata	7.558M	10.989M	5.905M	8.020M	8.181M	8.344M	41.439M		
31	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7,57 %	13.24 %	6.31%	6.32%	6.35%	6.39%	6.39%		
32	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta)	1.612.765	1.428.273	1.413.272,7	1.427.405,43	1.441.679,48	1.456.096,27	1.456.096,27		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
33	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	45,21 %	7.16%	7.18%	7.18%	7.19%	7.2%	7.2%		
34	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	60%	N/a	N/a	40%	43%	45%	45%		
35	Pertumbuhan Industri	7.83%	7%	-	5%	6%	7%	7%		
36	PDRB (ADHK)	11,16	11,80	11,68	12,15	12,76	13,52	13,52		
37	PDRB (ADHB)	15,77	17,12	17,43	18,39	19,58	21,05	21,05		
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	12.319.000	12.720.000	12.395.000	12.720.000	12.395.000	12.450.000	12.450.000		
2	Nilai tukar petani	95.38	94.33	98.79	94.33	98.79	98.85	98.85		
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	N/a	49.33	48.64	49.33	48.64	48,97	48,97		
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	11,85%	1,1%	0,37	14,1%	14,8%	15.6%	15,6%		
ASPEK PELAYANAN UMUM										
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR										
1. PENDIDIKAN										
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60,16%	66,10 %	66,20%	85,5%	86,06%	86,7%	86,7%		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12	79,50%	80,99 %	92,18%	93,10%	95%	97%	97%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	56,12%	56,54%	57,20%	60%	62%	65%	65%		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	78,50%	79,9%	80,18%	89,10%	90%	92,7%	92,7%		
	Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan satuan pendidikan dasar	0	0	0	0	0	0	0		
	Angka rata-rata lama Sekolah (RLS)	9,56	9,58	9,59	9,73	9,85	10,01	10,01	IKU Dinas Pendidikan	
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,96	13,97	13,98	14,15	14,32	14,49	14,66		
	Angka Partisipasi Kasar	60,16%	66,1%	66,2%	85,5%	86,06%	86,7%	86,7%		
	Angka pendidikan	87%	91,35%	91,45%	92%	93,18%	94,14%	94,14%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	yang ditamatkan									
	Angka Partisipasi Murni									
	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	89,50%	78,99%	92,18%	93%	95%	97%	97%		
	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	66,12%	56,54%	54,20%	60%	62%	65%	65%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103,10%	92,20%	92,25%	95%	97%	100%	100%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	108%	97,54%	90,47%	93%	95%	100%	100%		
	Angka partisipasi sekolah									
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	98,92%	78,98%	92,20%	93%	95%	97%	97%		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	66,12%	56,54%	54,20%	60%	62%	65%	65%		
	Angka Putus Sekolah									
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12%	0,10%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04%	0,15%	0,07%	0,06%	0,05%	0,04%	0,04%		
	Angka Kelulusan:									
	Angka Kelulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	(AL) SD/MI									
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Angka Melanjutkan (AM):									
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		
	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C	60%	70%	61%	76%	77%	78%	78%		
	Fasilitas Pendidikan:									
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:25	1:27	1:31	1:32	1:34	1:35	1:35		
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:10	1:12	1:13	1:12	1:10	1:8	1:8		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:16	1:16	1:18	1:20	1:21	1:22	1:22		
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:16	1:16	1:18	1:20	1:21	1:22	1:22		
	Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	140,43	143,24	147,45	147,54	150,4	151,96	151,96		
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	98,75	98,95	99,02	99,25	99,45	99,65	99,65		
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,45	99,66	99,83	99,85	99,87	99,9	99,9	IKU Dinas Pendidikan	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,81%	84,1%	85,6%	86%	86,55%	87,45%	87,45%		
	Prosentase Guru bersertifikasi pendidik	84,54%	86,24%	86,24%	88%	90%	95%	95%		
	Nilai IKM Dinas Pendidikan					B	B	B		
2.	KESEHATAN									
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	43%	131,86%	40,35%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase ibu hamil mendapatkan	98,19%	108,22%	98,28%	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	pelayanan kesehatan ibu hamil									
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,79%	97,06 %	92,89%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,02%	104,3 %	91,34%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	70,55%	96,73 %	21,4%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,04%	94,79 %	44,91%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	100,35 %	40,89%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/a	95,77 %	58,96%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	32,33%	105,17 %	118,58 %	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	pelayanan kesehatan sesuai standar									
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/a	103,94 %	96,61%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	N/a	111,26 %	47,89%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	N/a	7,8%	15,30%	100%	100%	100%	100%		
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	N/a	N/A	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	N/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5.35/1.000 KH	6.97/1.000 KH	1.5/1.000 KH	4.5/1.000 KH	4.3/1.000 KH	3.7/1.000 KH	3.7/1.000 KH	IKU Dinas Kesehatan	
	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	61.7/100.000 KH	102.56/100.000 KH	150.15/100.000 KH	107/100.000 KH	100/100.000 KH	96/100.000 KH	96/100.000 KH	IKU Dinas Kesehatan	
	Prevalensi	0,68%	1,63%	3,11%	13,5%	13%	12,5%	12,5%	IKU Dinas Kesehatan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Stunting									
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,1%	96,6%	86,36%	93%	94%	95%	95%	IKU Dinas Kesehatan	
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	46,30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Dinas Kesehatan	
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	8	8	0	6 akre 4 re-akre	1 akre 4 re-akre	8 re-akre	6 re-akre	IKU Dinas Kesehatan	
	Cakupan Uiversal Health Coverage	100%	81%	73%	100%	100%	100%	100%	IKU Dinas Kesehatan	
	Rasio posyandu per satuan balita	1,22	1,29	1,41	1,46	1,52	1,56	1,56		
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	21,57	20,81	20,93	27,11	33,20	39,39	39,39		
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87%	90%	92%	94%	96%	98%	98%		
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%		
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	≥2	<2	≥2	≥2	≥2	≥2		
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	49,77	110,8	103	141	140	139	139		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penderita diare yang ditangani	91,08%	92%	93%	94%	95%	100%	100%		
	Angka kejadian Malaria	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰	<1‰		
	Tingkat kematian akibat Malaria	0	0	0	0	0	0	0		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan pelayanan nifas	83%	85%	88%	90%	98%	100%	100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam									
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1.18	1.17	1.45	1.86	1.92	2.11	2.11		
	Nilai IKM Dinas Kesehatan					B	B	B		
	Nilai IKM RSUD Tondano					B	B	B		
	Cakupan Puskesmas dan jaringannya yang memiliki sumberdaya kesehatan yang berkompeten sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase ketersediaan obat esensial dan obat kebutuhan lainnya	90%	91%	91%	92%	92%	93%	93%		
	Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	60%	76%	84%	89%	92%	94%	94%		
3.	PEKERJAAN UMUM									
1	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,8%	75%	62,5%	68,8%	75%	81,3%	81,3%	IKU Dinas PUPR	
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	6,20%	6,20%	11,32%	15,10%	20,33%	25,95%	25,95%	IKU Dinas PUPR	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Kabupaten yang mendapatkan penanganan									
3	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	82.5%	87,2%	90,5%	93,8%	96,75%	100%	100%	IKU Dinas PUPR	
4	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	0,85	0,858	0866	0,873	0,881	0,889	0,889	IKU Dinas PUPR	
5	Persentase Bangunan Ber-IMB	4 %	1.57 %	2 %	1.80 %	1.90 %	2 %	13.27 %	IKU Dinas PUPR	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Dinas PUPR	
6	Rasio operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,2784	0,2784	0,2896	0,3189	0,3776	0,4657	0,4657	IKU Dinas PUPR	
	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	69%	71,05%	73%	74%	77%	80%	80%	IKU Dinas PUPR	
7	Prosentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%	100%	IKU Dinas PUPR	
8	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi darat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Dinas PUPR	
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	61,35%	65,16%	69,42%	70,1%	70,5%	72%	72%	IKU Dinas PUPR	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
10	Persentase layanan Pengelolaan Dumber daya air (Irigasi), drainase dan persampahan	49,41%	50,14%	51,86%	53,86%	58,11%	60,85%	60,85%	IKU Dinas PUPR	
11	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0363	0,0394	0,0477	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525	IKU Dinas PUPR	
12	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	86,6%	88%	89%	91%	92%	94%	94%	IKU Dinas PUPR	
13	Prosentase Panjang Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi baik	52,15%	52,15%	52,15%	53,25	54,30	55,45	55,45	IKU Dinas PUPR	
14	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	7,43%	7,43%	10,57%	11%	20,34%	24,55%	24,55%	IKU Dinas PUPR	
15	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	61,47%	62,19%	62,80%	63,06%	64,38%	65,69%	65,69%	IKU Dinas PUPR	
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	78,6%	81,05%	82,48%	83,66%	84,83%	85,99%	85,99%	IKU Dinas PUPR	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten									
17	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,3%	69,1%	69,78%	70,07%	71,53%	72,99%	72,99%	IKU Dinas PUPR	
	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	CC	B	BB	BB	A	A		
	Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum	B	B	B	A	A	A	A		
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,8%	75%	62,5%	68,8%	75%	81,3%	81,3%	IKU Dinas PERKIM	
	Tingkat Kemiskinan	7.3	7,18	7,3	7,3-7,0	7,0-6,7	6,7-5,9	6,7-5,9	IKU Dinas PERKIM	
	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	C	CC	B	BB	BB	A	CC	IKU Dinas PERKIM	
	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	N.A	N.A	N.A	N.A	93%	94%	94%	IKU Dinas PERKIM	
	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	IKU Dinas PERKIM	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	89%	90%	91%	92%	93%	94%	94%	IKU Dinas PERKIM	
	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	30%	30%	27%	25%	23%	20%	20%	IKU Dinas PERKIM	
	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	N.A	91%	92%	93%	94%	95%	95%	IKU Dinas PERKIM	
	Nilai IKM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N.A	N.A	N.A	N.A	B	B	B	IKU Dinas PERKIM	
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	64%	64%	42%	76%	80%	90%	90%		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	342,110 jiwa	342,110 jiwa	343,564 jiwa	343,565 jiwa	343,566 jiwa	343,567 jiwa	343,567 jiwa	IKU BPBD	
	Jumlah warga negara yang	342,110 jiwa	50 jiwa	10.000 jiwa	343,565 jiwa	343,566 jiwa	343,567 jiwa	343,567 jiwa	IKU BPBD	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana									
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	342,110 jiwa	4245 jiwa	4600 jiwa	343,565 jiwa	343,565 jiwa	343,565 jiwa	343,565 jiwa		
	Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	n/a	90,83	100	96	92,31	95,89	95,89	IKU Dinas Damkar	
	Ketersediaan sarana pemadam kebakaran	n/a	55	47,73	58,33	73,08	92,86	92,86	IKU Dinas Damkar	
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	33%	44%	60%	73%	86%	100%	100%		
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran)	9%	27%	45%	63%	81%	100%	100%		
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	99,92	92%	92%	100	100	100	100		
	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman,	70%	72%	74%	76%	80%	90%	90%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	keindahan)									
	Presentase kerjasama pemeliharaan KANTRAN TIPMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Presentase pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat/PATKO (Patroli Kota)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Satpol PP	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	33 %	44 %	60 %	73 %	86 %	100%	100%		
	Tingkat waktu tanggap (<i>respons time rate</i>) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	9%	27%	45 %	63%	81 %	100%	100%		
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	12,1%	12,1%	21,1%	26,3%	30%	32,6%	32,6%		
	Persentase Ketersediaan sarana pemadam kebakaran	45%	55%	70%	75%	75%	75%	75%		
	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih dan sigap dalam upaya mitigasi bencana	66 Orang	66Orang	75 Orang	90 Orang	100 Orang	120 Orang	120 Orang		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	kebakaran									
	Persentase Penegakan PERDA	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	<i>IKU Satpol PP</i>	
	Cakupan fasilitasi kegiatan FKD/FKDM	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%		
	Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
	Nilai IKM Dinas Pemadam Kebakaran	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
6.	SOSIAL									
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	22.28%	6.20%	10.83%	3.33%	7.66%	7.66%	57.96%		
	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/k	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	ota									
	Persentase terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Dinas Sosial	
	Persentase meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	7,9%	9,5%	11,1%	12,8%	14,4%	16,1%	16,1%		
	Persentase meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin	7,1%	10,7%	14,3%	18%	21,6%	25,3%	25,3%		
	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11.76%	17.64 %	41.17%	64.7%	88.23%	100%	100%		
	Keluarga pra sejahterah dan keluarga sejahtera	0.62%	1.629 %	1.629%	1.630%	1.630%	1.630%	21.655%		
	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	31%	44%	58%	79%	86%	100%	100%		
	Persentase PMKS yang tertangani	31%	44%	58%	79%	86%	100%	100%	IKU Dinas Sosial	
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk	69%	75%	80%	85%	90%	95%	95%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	pemenuhan kebutuhan dasar									
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%		
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase menurunnya resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	95%	85%	75%	65%	55%	50%	50%		
	Persentase meningkatnya kapasitas	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	penanggulangan bencana									
	Cakupan penanganan musibah/bencana akibat kondisi iklim ekstrim (KARHUTLA)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan masyarakat tangguh bencana	100 Masyarakat	200 Relawan	300 Relawan	400 Relawan	500 Relawan	600 Relawan	600 Relawan		
	Cakupan penanganan pemulihan daerah bencana	3 Paket	5 paket	11 paket	12 paket	14 paket	15 Paket	60 Paket		
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	19.8%	36.2%	52.6%	69%	85.4%	100%	100%		
	Nilai IKM Dinas Sosial	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Nilai IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
	Jumlah Taman makam pahlawan yang dikelola	1	2	2	1	1	1	7	IKU Dinas Sosial	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
1. TENAGA KERJA										
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	85%	88%	88%	94%	94%	100%	92.80%		
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21%	24%	29.10%	33.33%	42.80%	43.70%	34.50%		
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.60%	0.82%	-3.97 %	2%	3%	5%	1.37%		
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	N/a	70	71	72	73	74	74	IKU Disnaker	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5.50%	7.50%	15%	33%	33%	53%	28.30%		
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan	80%	100%	36.70%	100%	100%	100%	87,34 %		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota									
	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	0.12 %	0.13 %	0.047 %	0.13 %	0.14 %	0.15 %	0.15 %		
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	7,35	5,88	6,3	6,21	6	5,71	5,71		IKU Disnaker
	Jumlah pengangguran	12.799	9.937	10.671	10.521	10.171	9.671 (-600)	9.671 (-600)		
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	68,6	72,6	71,4	74,2	81,00	81,5	81,5		
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS	0,66	0,89	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92		
	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	4 perusahaan	5 perusahaan	6 perusahaan	7 perusahaan	9 perusahaan	11 perusahaan	11 Perusahaan		
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	45	43	40	37	33	30	30		
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45	43	40	37	33	30	30		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	68,6	72,6	74,8	74,2	81	81,5	81.5		
	Keselamatan dan perlindungan	6%	7%	9.50%	20%	30%	40%	21.30%		
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	55 %	70 %	90.4 %	91 %	92 %	93 %	87.28 %		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	-	-	-	100%	100%	40 %		
	Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
	Jumlah Pengangguran	12.799	9.937	10.671	10.550	10229	9774	9774		
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15.21%	45.29 %	35.15%	35.15%	40%	45%	45%	IKU DP3A	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0.03%	0.0059%	0.09%	0.05%	0.09%	0.02%	0.02%	IKU DP3A	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%	0.013%	0.013%	IKU DP3A	
	Persentase peran perempuan dalam pembangunan diberbagai bidang	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		
	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah kebijakan (Perda/Perbup) dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan yang diterbitkan	4 Kebijakan	4 Perbup	544,9 KLA	1 KLA	8 Kebijakan	9 Kebijakan	9 Kebijakan		
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69.50	69.60	69.70	69.75	69.80	69.82	69.82		
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	31	35	35	35	35	35	35		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	17.43	20.00	23.00	26.00	28.00	30.00	30.00		
	Rasio KDRT	0.028	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023		
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	4.45	4.35	3.25	2.35	2.00	1.80	1.80		
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	71.1	65	60	58	55	50	50		
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani insntansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
3.	PANGAN									
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung	0,75%	1,78%	1,27%	1,30%	1,35%	1,40%	1,40%	IKU Pangan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	sesuai kebutuhan)									
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92,3	92,5	92,7	92,9	93,2	93,4	93,4	IKU Pangan	
	Ketersediaan pangan utama	90%	90,25%	90,50%	90,75%	91,00%	91,25	91,25%	IKU Pangan	
	Ketersediaan energi perkapita	4.596,67	4.608,2	4.631,2	4.677,5	4.700,9	4.724,4	4.724,4	IKU Pangan	
	Ketersediaan protein perkapita	125,48	125,8	126,4	127,7	128,3	129,0	129,0	IKU Pangan	
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	IKU Pangan	
	Nilai IKM Dinas Pangan	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU Pangan	
4.	LINGKUNGAN HIDUP									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/kota	55,29	55,29	58,70	60,11	60,27	60,29	60,29	IKU DLH	
	Indeks kualitas air	45,88	45,88	55,58	60,16	60,73	61,01	61,01	IKU DLH	
	Indeks Kualitas Udara	90,20	90,20	90,08	89,97	89,88	89,66	89,66	IKU DLH	
	Indeks kualitas tutupan lahan	30,21	30,21	30,21	30,21	30,21	30,21	30,21	IKU DLH	
	Berkurangnya luasan Populasi eceng gondok di Danau Tondano	315 ha	75 ha	150 ha	90 ha	60 ha	40 ha	40 ha	IKU DLH	
	Meningkatnya Kualitas Air Danau Tondano	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	IKU DLH	
	Berkurangnya Laju Pendangkalan Danau Tondano	15 m	0,01 m	0,01 m	0,01 m	0,01 m	0,01 m	0,01 m	IKU DLH	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Presentase keanekaragaman hayati terpelihara	N.A	N.A	N.A	N.A	0	50%	50%	IKU DLH	
	Persentase pengendalian penerbitan ijin B3 dn LB3	N.A	N.A	51%	52%	53%	54%	54%	IKU DLH	
	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	65 %	65 %	66 %	67 %	68 %	69 %	69 %	IKU DLH	
	Persentase keberadaan MHA, Kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	50%	50%	IKU DLH	
	Persentase Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	N.A	N.A	N.A	45%	46%	47%	47%	IKU DLH	
	Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup	0	0	0	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	IKU DLH	
	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	N.A	100%	100%	56%	57%	58%	58%	IKU DLH	
	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten (Penanganan dan Pengurangan sampah)	73%	73%	80%	75%	74%	73%	73%	IKU DLH	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	<i>Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan</i>	C	CC	B	BB	BB	A	CC	IKU DLH	
	<i>Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	B	B	B	IKU DLH	
5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	Perekaman KTP-elektronik	96%	98%	98%	96%	97%	98%	98%		
	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0%	4%	5%	5,77%	15%	25%	25%		
	Kepemilikan Akta Kelahiran	88 %	90%	93,22%	95%	96%	97%	97%		
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0%	0%	0%	25%	50%	75%	75%		
	Persentase peningkatan disiplin aparatur	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pelatihan/diklat	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu melalui penyiapan sarana dan prasarana	0Apl	2Apl	4Apl	4Apl	4Apl	4Apl	4Apl	IKU Capil	
	Persentase Tersedianya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Capil	
	Persentase pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Capil	
	Persentase administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase pengembangan database kependudukan	1 Db	1 Db	1 Db	1 Db	1 Db	1 Db	1 Db	IKU Capil	
	Rasio penduduk ber-KTP	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Rasio bayi berakte kelahiran	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Rasio pasangan berakte nikah	0,93	0,95	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99		
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,1%	99,0%	99,5%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	Persentase pengentasan desa tertinggal	33,48%	59,21%	100%	0	0	0	0	IKU Pemdes	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	16,66%	45,34%	43,69%	49,58%	57,98%	57,98%	IKU Pemdes	
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	72,20%	72,20%	90,42%	90,42%	90,63%	90,85%	90,85%		
	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	0	9,69%	9,69%	14,53%	19,38%	24,22%	24,22%		
	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	pemberdayaan masyarakat (LPM)									
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08		
	Persentase LPM Berprestasi	-	1,48%	1,48%	1,48%	2,96%	4,4%	4,4%		
	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	0	0	0	0	100%	100%	100%		
	Persentase desa yang melakukan kerjasama	0	0	0	0	24,6%	25,5%	25,5%		
	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,06	2,06	2,08	2,08	2,09	2,1	2,1	IKU PP&KB	
	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,54%	80,34%	80%	80,74%	81,14%	81,54%	81,54%	IKU PP&KB	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,68	8,96	16,96	16	15,75	15	15	IKU PP&KB	
	Laju pertumbuhan	1,02	1,5	1,51	1,3	1,2	1	1	IKU PP&KB	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	penduduk (LPP)									
	Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	20	20	21	21	21	21	21	IKU PP&KB	
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	-	-	36,8%	50%	65%	65%		
	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	-	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
	Jumlah Stakeholder/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	-	-	6	6	6	6		
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	-	-	76,11%	77,61%	79,1%	79,1%		
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok	-	-	-	3	5	7	7		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	kerja KKBPk yang efektif									
	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	-	-	-	29,21%	29,49%	32,42%	32,42%		
	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	-	-	-	37,03%	34,62%	31,11%	31,11%		
	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	-	-	-	41,59%	41,68%	45,97%	45,97%		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19)	47	13	12	30	28	26	26		
	Persentase peserta KB Aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	24	33,72	30,5	31	31,5	32	32		
	Cakupan Kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	0	81%	84%	86%	88%	90%	90%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	10%	9%	20%	50%	80%	100%	100%		
	Nilai IKM Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
8.	PERHUBUNGAN									
	Rasio konektivitas Kabupaten	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	0,95	IKU Perhubungan	
	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota (VC Ratio Jalan Kabupaten)	0,70	0,70	0,74	0,78	0,83	0,85	0,85	IKU Perhubungan	
	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	85%	85%	85,7%	90%	92,5%	95%	95%	IKU Perhubungan	
	Indeks Konektivitas ASDP	25%	25%	25%	50%	50%	55%	55%	IKU Perhubungan	
	Nilai IKM Dinas Perhubungan	3.108	3.140	3.175	3.532	3.720	3.999	3.999	IKU Perhubungan	
9.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50%	60%	73%	80%	86%	91%	91%	IKU KOMINFO	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5%	5%	30%	60%	75%	100%	100%	IKU KOMINFO	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	4%	8%	20%	63%	74%	100%	100%		
	Jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik	4 layanan	7 layanan	10 layanan	13 layanan	16 layanan	16 layanan	16 layanan	IKU KOMINFO	
	Persentase sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	10%	30%	40%	50%	60%	70%	70%		
	Persentase perangkat daerah yang mengolah informasi public	5%	20%	30%	40%	50%	60%	60%		
	Persentase tata kelola persandian & statistik	5%	20%	30%	40%	50%	60%	60%		
	Jumlah sdm bidang komunikasi dan informasi yang memiliki kompetensi	1 orang	2 orang	2 orang	5 orang	6 orang	10 orang	10 orang		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	25%	20%	40%	60%	80%	100%	100%		
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	60 %	65%	70%	80%	85%	85%	85%		
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	60%	75%	80%	85%	90%	95%	95%		
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	18%	21%	50%	70%	80%	90%	90%		
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	9%	10%	20%	30%	50%	60%	60%		
	Nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
10	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK									
	Informasi Tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	15 %	23%	28%	30%	60%	75%	75%		
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	13%	18%	25%	30%	60%	70%	70%		
10.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25 Koperasi	25 Koperasi	35 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	IKU Koperasi	
	Meningkatnya koperasi yang Mendapatkan Izin	3 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	IKU Koperasi	
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0.10%	0.16%	0.17%	0.40%	0.50%	0.60%	0.60%	IKU Koperasi	
	Jumlah UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal	15	20	25	30	35	40	40	IKU Koperasi	
	Persentase koperasi aktif	70,33%	7,33%	72,33%	73,33%	74,33%	75,33%	75,33%	IKU Koperasi	
	Persentase LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Koperasi	
	Persentase BPR Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Koperasi	
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	75,82%	76,82%	77,82%	78,82%	79,82%	80,82%	80,82%	IKU Koperasi	
	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	0,254%	0,254%	-	0,313%	0,336%	0,376%	0,376%	IKU Koperasi	
	Nilai IKM Dinas Koperasi dan UMKM	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU Koperasi	
11.	PENANAMAN MODAL									
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	99,32	(55,57)	(49,60)	50	20	11,11	11,11	IKU PM & PTSP	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	19 Investor	10 Investor	12 Investor	15 Investor	18 Investor	20 Investor	20 Investor	IKU PM & PTSP	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	150 M	350 M	500 M	750 M	900 M	1 T	1 T	IKU PM & PTSP	
	Rasio daya serap tenaga kerja	60,83	61,28	61,72	62,14	62,56	62,97	62,97	IKU PM & PTSP	
	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	99,3 % (1.919 M)	133 % (200 M)	43 % (150 M)	50 % (250 M)	20% (150 M)	11 % (250 M)	250 M	IKU PM & PTSP	
	Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU PM & PTSP	
	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25%	25%	-	-	-	25%	25%	IKU PM & PTSP	
12.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		10%	15%	20%	25%	25%	25%	IKU PEMUDA & OLAH RAGA	
	Peningkatan prestasi olahraga	42%	41%	43%	59%	65%	75%	75%	IKU PEMUDA & OLAH RAGA	
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan	10%	10%	20%	25%	30%	35%	35%	IKU PEMUDA & OLAH RAGA	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	dan Sosial Kemesyarakatan									
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5%	5%	15%	5%	5%	5%	5%		
	persentase wirausaha muda	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
	cakupan pembinaan olahraga	0%	90%	75%	85%	95%	100%	100%		
	cakupan pelatih yang bersertifikasi	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
	cakupan pembinaan atlet muda	10%	5%	5%	10%	25%	50%	50%		
	jumlah atlet berprestasi	108 Atlet	118 Atlet	118 Atlet	125 Atlet	135Atlet	150 Atlet	150 Atlet		
	jumlah prestasi olahraga	15 Cabor	23 Cabor	10 Cabor	24 Cabor	25 Cabor	25 Cabor	25 Cabor		
	Presentase pemuda berprestasi	10%	15%	20%	25%	30%	35%	35%		
	Presentase prestasi olahraga diberbagai event/kompetisi	15 %	50 %	55 %	60 %	65 %	75 %	75 %		
	Presentase Sport Development Index	40%	42%	21%	46%	48%	50%	50%		
	Nilai IKM Dinas Kepemudaan dan Olahraga	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
13.	STATISTIK									
	Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	perencanaan pembangunan daerah									
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
	Buku "PDRB"	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
14.	PERSANDIAN									
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	5%	11%	25%	49%	68%	75%	75%		
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	3 SKPD	6 SKPD	9 SKPD	12 SKPD	15 SKPD	18 SKPD	18 SKPD		
15.	KEBUDAYAAN									
	persentase pelestarian warisan budaya	41,86%	76,14	83,10%	84,14%	83,89%	83,55%	83,55%	IKU Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang	53,56%	66,67%	66,67%	66,67%	70%	70%%	70%%	IKU Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	direvitalisasi dan diinventarisasi									
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	32,29%	77,22%	84,21	85,29%	84,89 %	84,51%	84,51 %		IKU Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	100%		IKU Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	C	CC	B	BB	BB	A	A		IKU Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Nilai IKM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	N.A	N.A	N.A	B	B	A	A		IKU Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
16. PERPUSTAKAAN										
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1%	2%	3%	3%	4%	5%	5%		IKU Dinas Perpustakaan
	Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,98%	3,44%	3,72%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2.50%	3.20%	3.38%	4.12%	4.15%	4.72%	4.72%		IKU Dinas Perpustakaan
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	720 orang	781 orang	798 orang	823 orang	833 orang	842 orang	842 orang		
	koleksi buku yang tersedia dipustakaan daerah	10.047 buku	11.047 buku	12.047 buku	13.047 buku	14.047 buku	15.047 buku	15.047 buku		
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,86	1,87	1,88	1,89	1,90	1,91	1,91		IKU Dinas Perpustakaan

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	60 Org	65 Org	67 Org	69 Org	70 Org	70 Org	70 Org		
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.605	2.605	3.605	4.605	5.605	6.605	6.605		
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	2	2	2	3	3		
	Nilai IKM Dinas Perpustakaan	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
17.	KEARSIPAN									
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0.21%	0.21%	0.21%	0.50%	0.90%	1%	1%	IKU Dinas Perpustakaan	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	0	0	0	0	0.21%	0.50%	0.50%	IKU Dinas Perpustakaan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat									
	Persentase perangkat daerah yang mengolah arsip secara baku	N/a	15%	20%	25	30	35	35		
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	N/a	15%	20%	45	50	55	55		
LAYANAN URUSAN PILIHAN										
1.	PARIWISATA									
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,98%	6,53%	-20,04%	1%	2%	3%	3%		IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,558 M	10.989 M	5.905 M	8.020 M	8.181 M	8.344 M	8.344 M		IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	13,83%	80,96%	-97,41%	4,98%	5,01%	6,00%	6,00%		IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	14,99%	52,89%	-86,49%	10,00%	15,00%	36,60%	36,60%		IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	kabupaten/kota									
	Tingkat Hunian Akomodasi	61,96%	65,39%	38,66%	54,88%	63,19%	68,27%	68,27%	IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	N.A	N.A	N.A	0%	50%	50%	100%	IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkatkan kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	0%	32,00%	30,00%	0,00	10,00%	20,00%	100%	IKU Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
2.	PERTANIAN									
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4.00	4.45	5.50	5.60	5.73	5.88	5.88	IKU Pertanian	
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9.21	8.96	7.58	7.34	1.11	1.03	1.03	IKU Pertanian	
	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	26.54	26.34	27.11	27.38	27.65	27.93	27.93	IKU Pertanian	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman	4%	4.45%	5.50	2%	2%	3%	3%	IKU Pertanian	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Pangan									
	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	1.32%	9.39%	10.55%	2%	4%	4%	4%	IKU Pertanian	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1.08%	0.59%	0.93%	13%	19%	21%	21%	IKU Pertanian	
	Persentase Peningkatan Populasi Peternakan	3%	2%	1%	3%	6%	6%	6%	IKU Pertanian	
	Persentase fasilitasi penanggulangan kasus penyakit hewan menular	70,87%	72,23 %	72,70%	73,46%	74,50%	77,47%	77,47%	IKU Pertanian	
	Persentase Peningkatan teknologi yang diterapkan oleh petani	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	IKU Pertanian	
	Jumlah kenaikan kelas kelompok tani	2	2	1	3	4	4	14	IKU Pertanian	
	Cakupan bina kelompok petani	1.53	25.35	21.67	5.00	5.30	5.14	12.49	IKU Pertanian	
	Nilai IKM Dinas Pertanian	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU Pertanian	
3.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dalam Kabupaten yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Perdagangan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha pertambahan yang dibangun	500	n/a	n/a	500	800	1000	1000	IKU Perdagangan	
	Persentase perolehan Bonus Produksi Panas Bumi	95%	n/a	n/a	95%	95%	95%	95%	IKU Perdagangan	
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	94,25%	n/a	n/a	1,15%	1,16%	1,17%	99,98%	IKU Perdagangan	
4.	PERDAGANGAN									
	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0	35%	32%	40%	40%	40%	IKU Perdagangan	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUST/SIUP, Tokoh Swalayan)	15%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	IKU Perdagangan	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	3.2%	3.2%	3.2%	5%	5%	5%	5%	IKU Perdagangan	
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang di tata	90,00%	n/a	n/a	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	IKU Perdagangan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Jumlah pasar yang dibangun dan direhabilitasi	6	5	0	2	2	2	23	IKU Perdagangan	
	Jumlah Temuan peredaran barang kadaluarsa dan Bahan pangan yang mengandung zat berbahaya serta UTTP	6	10	0	8	6	4	4	IKU Perdagangan	
	Pengawasan Barang Beredar	12 Keg	10	2	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	IKU Perdagangan	
	Rekonsiliasi Bonus Panas Bumi	49,89% (3.221.035.486)	60.14%	56.74%	63,89% (3.686.250)	65,89% (3.760.007.487)	67,89% (3.835.207.636)	67,89% (3.835.207.636)	IKU Perdagangan	
	Nilai IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU Perdagangan	
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Perdagangan	
	Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Terciptanya Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	20%	20%	IKU Perdagangan	
5.	PERINDUSTRIAN									
	Pertambahan jumlah industri kecil dan	1.2%	0.9%	2.4%	2.5%	3%	4%	4%	IKU Perdagangan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	menengah di provinsi									
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	0	0	0	0	0	0	IKU Perdagangan	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya dikeluarkan instansi terkait di daerah kabupaten/kota	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Perdagangan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	0	0	0	0	0	40%	40%	IKU Perdagangan	
	Persentase penanganan IKM	5%	4	2	4,7%	4,6%	4,5%	28,7%	IKU Perdagangan	
	Persentase industri kecil dan menengah yang bertambah	12%	8	0	18,9%	21,9%	24,8%	24,8%	IKU Perdagangan	
	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,0051	0	0	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	IKU Perdagangan	
6. KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	N/a	18.2%	-4.89%	10%	10%	10%	10%	IKU Kelautan	
	Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data:one data KKP)	108.201	95.991	107.405	112.400	115.950	119.500	659.447	IKU Kelautan	
	Produksi perikanan budidaya (ton)	55.701	55.000	26.538	27.500	30.000	30.000	30.000	IKU Kelautan	
	Produksi perikanan tangkap (ton)	52.284	50.000	24.922	25.000	26.000	26.000	26.000	IKU Kelautan	
	Produksi pengolahan dan pemasaran (ton)	296	423	98	400	450	500	500	IKU Kelautan	
	Rata-rata pendapatan/tahun (Rp)	62.276.624	86.203.650	93.499.449	95.000.000	97.000.000	99.000.000	99.000.000	IKU Kelautan	
	Produksi perikanan	79,37	106.56%	63.33%	83,35	87,14	97,87	97,87	IKU Kelautan	
	konsumsi ikan	93,75	101.50%	106.54%	94,42	96,67	97,92	97,92	IKU Kelautan	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	cakupan bina kelompok nelayan	16%	17%	17,29%	20,32%	20,32%	20,32%	20,32%	IKU Kelautan	
	produksi perikanan kelompok nelayan	34,71	81,34 %	48,23 %	39,85	41,14	42,4	42,4	IKU Kelautan	
	proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	25,00	25,00	25,00	20,25	20,26	21	21	IKU Kelautan	
	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	IKU Kelautan	
	Nilai tukar nelayan	105	105	105	105	107	107	107	IKU Kelautan	
	Nilai IKM Dinas Kelautan dan Perikanan	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU Kelautan	
	Persentase pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	75%	60%	60%	75%	75%	75%	75%	IKU Kelautan	
PENUNJANG URUSAN										
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
	Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahannya yang telah ditetapkan dengan	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	3	2	2	13 Dokumen		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	PERDA dan PERBUP									
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, dan Program RKPD ke dalam APBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)		Ranking 3	-	Ranking 2	Ranking 1	Ranking 1	Ranking 1		
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	2 Dokumen		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen		
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	PERDA									
	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam APBD	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	80%	98%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Nilai IKM Bappelitbangda	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
2.	KEUANGAN									
	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	62.26 %	61.71 %	61.33%	61.42%	61.63%	61.63%	62.26 %	IKU BPKAD	
	Rasio PAD	8.03 %	8.27 %	8.02 %	8.05 %	8.07 %	8.07 %	8.03 %		
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU Inspektoral	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 1	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU Inspektoral	
	Rasio belanja urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer Expenditures	82.17%	81.86 %	81.70%	81.55%	81.37%	81.37%	82.17%	IKU BPKAD	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
)									
	Penyusunan APBD Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	IKU BPKAD	
	Prosentase penyerapan belanja	94 %	90,34 %	84.93%	94,86 %	94,88 %	94,88 %	94,88 %	IKU BPKAD	
	Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	IKU BPKAD	
	Prosentase data aset yang akurat	94 %	95%	96%	97 %	98 %	99 %	99 %	IKU BPKAD	
	Persentase SILPA	5,2	4.73%	4.86%	1,9	1,81	1,77	1,77	IKU BPKAD	
	Persentase SILPA terhadap APBD	5,2	4.73%	4.86%	1,9	1,81	1,77	1,77	IKU BPKAD	
	Prosentase penyerapan belanja	94 %	91.20 %	84.93%	94,86 %	94,88 %	94,88 %	94,88 %	IKU BPKAD	
	Persentase belanja pendidikan	25,08	26.03 %	23.73%	26,43	26,43	26,43	26,43	IKU BPKAD	
	Persentase belanja kesehatan	15,74	48.56 %	55.94%	15,74	15,74	15,74	15,74	IKU BPKAD	
	Capaian Penerimaan Pajak Daerah	104%	102%	96%	100%	100%	100%	100%	IKU BAPENDA	
	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	12%	11.96 %	0%	2%	2%	2%	2%	IKU BAPENDA	
	Perbandingan antara belanja langsung / belanja tidak langsung	37,92 / 65,09	42,89 / 66,76	44,07 / 73,67	37,92 / 62,08	37,92 / 62,08	37,92 / 62,08	37,92 / 62,08	IKU BPKAD	
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,52 %	10%	11%	0,56 %	0,57 %	0,56 %	0,56 %	IKU BPKAD	
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKU	
	Nilai IKM BPKAD	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU BPKAD	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Nilai IKM Badan Pendapatan Daerah	N/a	N/a	N/a	N/a		B	B	B	IKU BPKAD
	Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU BPKAD
3. Manajemen Keuangan										
	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-8.80%	-7.72%	-6.68%	-5.54%	-5.25%	-5.25%	-8.80%		IKU Keuangan
	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-7.50%	-6.87%	-5,70%	-4.83%	-4,40%	-4,40%	-7.50%		IKU Keuangan
	Management Aset	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		IKU Keuangan
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	5.11%	3.38%	2.11%	1.77%	1.23%	1.23%	5.11%		IKU Keuangan
4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	n/a	51,99%	52.35	52.71	53.07	53.07		
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan	n/a	n/a	9,57%	9.65	9.73	9.81	9.81		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	tenaga kesehatan)									
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	n/a	9,57%	9.65	9.73	9.81	9.81		
	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	48,65	31,77	48,75	50,25	50,75	50,75	IKU BKPSDA	
	Rata Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	96,75 hari	96 hari	-	96 hari	96 hari	96 hari	96 hari		
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100	100%	100%	100	100	100	100		
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	23,28	19.75 %	16.10%	41,25	48,01	54,77%	54,77%		
	Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	39	39	39	39	39	39	39		
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	212	212	212	212	212	212	212		
	Jumlah pemangku jabatan	3,107	3.091	3.075	3.050	3.050	3.050	3.050		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	fungsional tertentu pada instansi pemerintah									
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase perangkat daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	94.54%	96.36%	100%	98,18%	98,18%	100%	100%		
	Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN Minahasa	n/a	83.33%	83.33%	86%	88%	90%	90%		
	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaian nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU BKPSDA	
	Persentase pegawai yang datanya akurat	95%	95.50%	95.50%	100%	100%	100%	100%	IKU BKPSDA	
	Persentase pegawai Minahasa yang Memiliki sertifikat diklat Peningkatan kompetensi (Diklat PIM II, III dan IV)	23,28%	19.75%	16.10%	42,25%	48,01%	54,77%	54,77%		
	Persentase pegawai Minahasa yang Memiliki sertifikat	50%	60%	60%	63%	66%	69%	69%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	diklat Peningkatan kompetensi (Tugas Teknis dan Fungsional)									
	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi (diklat dasar)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	n/a	10 PNS	17 PNS	30 PNS	30 PNS	40 PNS	134 PNS		
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	n/a	82.80 %	88.30%	90%	95%	100%	100%		
	Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	n/a	n/a	n/a	n/a	B	B	B		
	4. Pengadaan									
	Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	12.34%	0	0	0	25%	50%	75%		
	Persentase Jumlah Pengadaan	97.73%	98.97 %	99.30%	99.33%	99.35%	99.40%	99.45%		

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	yang dilakukan dengan metode kompetitif									
	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	2.53%	2.52%	3.17%	3%	10%	25%	50%		
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	Persentase rekomendasi kebijakan Hasil Litbang yang diterapkan di daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%		
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%		
	Penerapan SIDA :									
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0	2,86%	5,71%	5,71%	8,57%	8,57%	8,57%		
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	UNSUR PENGAWASAN									
	PENGAWASAN									
	Persentase pelanggaran pegawai	0,12	0.09	0.24	0,09	0,08	0,07	0,07	IKU INSPEKTOR AT	
	Jumlah temuan BPK	23	24	13	17	16	15	15	IKU INSPEKTOR	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									AT	
	Kematangan implementasi SPIP	Level 2 +	Level 2	Level 2	Level 3 +	Level 3 +	Level 3 ++	Level 3 ++	IKU INSPEKTOR AT	
	Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	IKU INSPEKTOR AT	
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU INSPEKTOR AT	
	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	72,28	73.33	73.93	82,73	83,74	84,73	84,73	IKU INSPEKTOR AT	
	Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	0	0	0	5	7	9	9	IKU INSPEKTOR AT	
	Nilai IKM Inspektorat	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B	IKU INSPEKTOR AT	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
7. SEKRETARIAT DAERAH										
	Presentase kebijakan strategis bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
8. SEKRETARIAT DEWAN										

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	IKU SETWAN	
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	IKU SETWAN	
	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Presentase fasilitas penyelenggaraan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya	90%	100%	100%	96%	98%	98%	98%		
	Jumlah Ranperda (Ranperda eksekutif dan Ranperda Inisiatif) yang	9 Ranperda	9 Ranperda	9 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	56 Ranperda	IKU SETWAN	

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	difasilitasi									
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran setwan DPRD	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		
	Nilai IKM Sekretariat DPRD	N/a	N/a	N/a	N/a	B	B	B		
URUSAN PELAYANAN UMUM										
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				85%	90%	90%	95%		

BAB IX PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan yang melatarbelakangi Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa yaitu terbitnya beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah serta Pandemi Covid 19. Dampak dari hal-hal tersebut yaitu perlu dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan.

Dokumen perubahan RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan pedoman dalam penyusunan Renja perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Minahasa. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD, maka diperlukan pedoman yang akan dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa 2008-2028, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabuapten Minahasa Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Minahasa akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan kabupaten, dan lain-lain.

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat serta memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat Kabupaten Minahasa.

4. Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tondano,

2021

BUPATI MINAHASA

Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING. M,Si

Lampiran Form pemantauan TPB/SDGs

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET TPB/SDGs	INDIKATOR TPB/SDGs		TARGET KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	STATUS	OPD
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	7%	7.3			
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	93.79	93.7			
	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	3.33%	100%			
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.					
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	33%	15%			
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru,	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	70%	50%			
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.					

dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.					
	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.					
	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>					
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana					
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber,	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.					

termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	100%				
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor- sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.					

Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
--------	-----------	-------------	--------------	--------	-----

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).					
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.					
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.	13.50%	3.11%			
	2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.					
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	92.9	92.7			
	2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.					
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	57000	56.85			

makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan					
	2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.					
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif	2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.					
	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.					

memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.					
	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.					
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.					

<p>kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.</p>	<p>2.a.2*</p>	<p>Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.</p>					
<p>2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i>.</p>	<p>2.b.1*</p>	<p>Subsidi ekspor pertanian.</p>					

2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.					
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET		INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATU S		OPD
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	107/100.000 KH	150.15/100.000 KH			Dinas Kesehatan
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.					
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	4.5/1.000 KH	1.5/1.000 KH			Dinas Kesehatan

seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.					
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	100%	15.30%			Dinas Kesehatan
	3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	141	103			Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	<1‰	<1‰			Dinas Kesehatan
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0			Dinas Kesehatan
	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.					
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.					
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.					

	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.					
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.					
	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.					
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.					
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.					
	3.4.2	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.					
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.					
	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.					
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.					

	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.					
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.					
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.					
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.					
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>	2.08	2.06			Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.					
	3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	8.06	8.57			Dinas Kesehatan
	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.					

terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.					
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	63.06%	62.80%			Dinas Kesehatan
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.					
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.					
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.					
	3.b.2*	Total <i>Official Development Assistant (ODA)</i> untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.					

<p>terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p>	<p>3.b.3*</p>	<p>Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.</p>					
<p>3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara</p>	<p>3.c.1*</p>	<p>Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.</p>					

kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan di 088ni, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.				
	3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.				

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	80%	78%	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	82%	77%	Dinas Pendidikan

	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	100%	99.60%			Dinas Pendidikan
	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.					
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.					
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.					
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.					
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	66.20%	85.50%			Dinas Pendidikan

4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	10%	20%			Dinas Pendidikan
	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).					
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	92.18%	93%			Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki	4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/ mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.					

kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99.25	98.95			Dinas Pendidikan
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.					

4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					
	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.					
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.					

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Tujuan 5. Kesenjangan gender

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.				
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				

dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.					
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.					
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.					
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.					

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.					
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.					
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.					
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.					

<p>5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.</p>	<p>5.a.1*</p>	<p>(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.</p>					
<p>5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</p>	<p>5.b.1*</p>	<p>Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.</p>					
<p>5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</p>	<p>5.c.1*</p>	<p>Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p>					

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET	INDIKATOR		TARGET 2021	CAPAIAN 2021		STATUS	OPD
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.					
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.					
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman.					
	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.					

dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.					
	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.					
	6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku.					
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.					
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya.					
	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.					
	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.					
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).					

<p>semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.</p>	<p>6.5.2*</p>	<p>Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.</p>					
<p>6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</p>	<p>6.6.1*</p>	<p>Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.</p>					
<p>6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.</p>	<p>6.a.1.</p>	<p>Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.</p>					

6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.			
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.			
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.			
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.			
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.			
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global	7.3.1*	Intensitas energi primer.			

sebanyak dua kali lipat.							
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.					
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).					
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi							

TARGET	INDIKATOR		TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3,0-4,0	-1.03		
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	52.32	50.67		
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.				
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin				
	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan				

usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.					
	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.					
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).					
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.					
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.					

yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.					
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).					
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).					
	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur					

8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.					
	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.					
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.					
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	8.23	20.04			Dinas Pariwisata
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	4.191	3.992			Dinas Pariwisata
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	261.498	237.726			Dinas Pariwisata
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.					
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.					
	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.					

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.					
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.					

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas,	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.				
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.				
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.				

untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.					
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan modal transportasi.					
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.					
	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.					
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.					
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.					
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.					
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.					
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.					
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.					

mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.					
	9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industry					
	9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri					
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.					
	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk					
	9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)					

pembelanaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.					
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.					
	9.b.1.(a)	Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi					

9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara- negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR		TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Rasio Gini.				
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
	10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	0	0	sudah tidak ada desa tertinggal	PMD
	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	63 Desa	31 Desa	IDM	PMD
	10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.				

	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.					
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.					
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.					
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.					
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.					
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).					

	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.					
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.					
	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.					
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.					
	10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.					
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>					
	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.					

10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.					
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.					
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.					
	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.					
	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.					

	10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.					
	10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.					
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.					
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).					

program nasional mereka.							
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.					

Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.			
	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.			
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.			

berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.					
	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.					
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.					
	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.					
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.					
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan <i>Purchase Power Parity</i> , PPP).					

	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).					
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.					
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.					
	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.					
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.					
	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.					
	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola.					

	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).					
	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10.					
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.					
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.					
	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.					
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).					
	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.					

11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.					
	11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.					
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i> .					
	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.					

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	-					
	11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.					

Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
12.1 Melaksanakan <i>the 10- Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan	12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan			

pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).					
	12.2.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).					
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>).					
	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.					
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah	12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.					

yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.					
	12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i> .					
	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.					
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.					
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.					
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.					
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.					

siklus pelaporan mereka.							
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1*	Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi.					
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.					
	12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa.					
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.					
	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.					

	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.					
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita).					
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Mengimplementasikan perangkat akuntansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan.					
	12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i> .					

<p>12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak</p>	<p>12.c.1*</p>	<p>(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.</p>					
<p>Tujuan 13. Perubahan iklim</p>							

TARGET	INDIKATOR		TARGET 2021	CAPAIAN 2021			STATUS	OPD
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.						
	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .						
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.						
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i> .						
	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.						
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).						

	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).					
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.					
	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.					
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam	13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD hingga tahun 2025.					
	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim.					

pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.							
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam <i>adaptation communications</i> dan <i>national communications</i> .					

Tujuan 14. Ekosistem lautan

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk	14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung.			
	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.			

sampah laut dan polusi nutrisi							
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.					
	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.					
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.					
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.					

rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya							
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.					
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan	14.6.1.	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (<i>IUU fishing</i>).					

<p>penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)</p>	<p>14.6.1.(a)</p>	<p>Persentase kepatuhan pelaku usaha.</p>					
<p>14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan</p>	<p>14.7.1</p>	<p>Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).</p>					

<p>14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara</p>	<p>14.a.1</p>	<p>Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.</p>					
<p>14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</p>	<p>14.b.1*</p>	<p>Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelemagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil</p>					

	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.					
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.					
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> "	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).					

Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	STATUS	OPD
15.1 Pada tahun 2020, menjamin	15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.				

pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya.					
	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).					
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari.					
	15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju.					
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir,	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.					

dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi							
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.					
	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.					
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (<i>Red-list index</i>).					

15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.					
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal	15.7.1	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal.					
	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.					
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah- langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI).					

15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi.					
	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.					
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.					
	15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.					
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan					

yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi		dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.					
	15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.					
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.					
	15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.					

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021		STATUS	OPD
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.				

terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.					
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.					
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.					
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.					
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.					
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.					
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir					
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh					

		dalam setahun terakhir.					
	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.					
	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.					
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.					
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.					
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.					

sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.					
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi					
	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.					
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.					
	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.					
	16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.					
	16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)					

16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).					
	16.4.2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.					
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.					
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).					
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.					

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.					
	16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.					
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B					
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B					
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.					
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.					

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.					
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).					
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.					
	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi					
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan					

	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan					
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.					
	16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.					
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.					
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.					
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun					

16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.					
	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.					
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).					
	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.					
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.					

	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif					
	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.					
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .					
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN 2021		STATUS	OPD
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.				
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.				
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.				
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.				
	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB				

<p>negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</p>							
<p>17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</p>	<p>17.3.1</p>	<p>Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/</i>FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.</p>					
	<p>17.3.2</p>	<p>Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.</p>					
	<p>17.3.2.(a)</p>	<p>Proporsi volume remitansi TKI (dalam US <i>dollars</i>) terhadap PDB.</p>					

<p>17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</p>	<p>17.4.1*</p>	<p>Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.</p>					
<p>17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.</p>	<p>17.5.1</p>	<p>Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara- negara kurang berkembang.</p>					
<p>17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular</p>	<p>17.6.1</p>	<p>Langganan <i>broadband</i> internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya</p>					

secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga					
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)					
	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara- negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.					

<p>17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p>	17.8.1*	Persentase pengguna internet					
<p>17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</p>	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.					
	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST					
	17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular					

17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).					
	17.10.1(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati					
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.					
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas					
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk	17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.					

dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.							
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makro ekonomi.					
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.					
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.					

<p>17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.</p>	<p>17.16.1</p>	<p>Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>					
<p>17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan</p>	<p>17.17.1</p>	<p>Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).</p>					
	<p>17.17.1.(a)</p>	<p>Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.</p>					

bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					
	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.					
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs					
	17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.					
	17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.					
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.					

geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.					
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.					
	17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.					
	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.					
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.					
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.					

	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).					
--	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH LINGKUP KABUPATEN MINAHASA**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Penelaahan RTRW kabupaten/kota	√			
4	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota	√			
5	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan	√			
6	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota	√			
7	Penelaahan RPJMN	√			
8	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota	√			
9	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota	√			
10	Perumusan penjelasan visi dan misi	√			
11	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.	√			
12	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.	√			
13	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .	√			
14	Perumusan tujuan dan sasaran				

15	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.	√			
16	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.	√			
17	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional	√			
18	Perumusan strategi dan arah kebijakan	√			
19	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah	√			
21	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :	√			
21a	Pencapaian indikator IPM	√			
21.b	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM	√			
21.c	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund	√			
21.d	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	√			
21.e	Penurunan tingkat pengangguran	√			
21.f	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah	√			
21.g	Peningkatan umur harapan hidup	√			
21.h	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana	√			

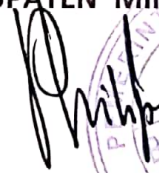
21.i	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi	√			
21.j	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.	√			
21.k	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha	√			
21.l	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.	√			
21.m	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.	√			
21.n	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi	√			
22	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:	√			
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:	√			
	a. Kawasan Lindung:	√			
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:	√			
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				

22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :	√			
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;	√			
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;	√			
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;	√			
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;	√			
	e. sistem jaringan sumber daya air;	√			
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	√			
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik	√			
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan	√			
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	√			
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	√			
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.	√			
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.	√			
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.	√			
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.	√			
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir	√			
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	√			

32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.	√			
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	√			
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.	√			
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disahkan				

Tondano, November 2021

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA,**



PHILIP F.S. H. SIWI, SE
NIP. 19640606 199003 1 009

